



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI UTARA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2014 -2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2018**



**BUPATI TAPANULI UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
UTARA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 10);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
dan  
BUPATI TAPANULI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2014 - 2019.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
10. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan dan penyusunan terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019.
11. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 05 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) RPJMD disusun memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah periode tahun 2014-2019, berpedoman kepada RPJPD dan RTRW;
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan;
- (3) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka  
Pendanaan

BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX : Penutup

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 05-06-2018

**Plt. BUPATI TAPANULI UTARA,**

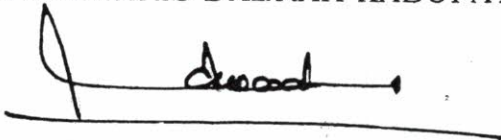
**DTO,-**

**MAULIATE SIMORANGKIR**

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 05-06-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018  
NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/54/2018)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR                   TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2014-2019**

1. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 09 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019.

Terjadinya beberapa perubahan normatif/regulasi antara lain : dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 20109 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 0090/4936/SJ, Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sedangkan secara eksternal, terdapat perubahan asumsi makro yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Nasional maupun regional sehingga berpengaruh terhadap capaian target indikator kinerja utama dan target kinerja pembangunan daerah. Perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja juga berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain : Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memakai tahun dasar 2010; perubahan indikator perhitungan IPM dimana angka melek huruf diganti menjadi angka harapan sekolah, serta berdasarkan hasil evaluasi RPJMD (Evaluasi Mid Term RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019), maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019. Perubahan tersebut difokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun periode akhir RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019.

## 2. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI UTARA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2014-2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2018**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan yang substansinya saling berkaitan satu sama lain. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial didalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi pembangunan daerah yaitu "Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Berbasis Pertanian dan Agroindustri yang didukung oleh Sektor Pariwisata, Pertambangan dan Energi", yang terdiri dari delapan misi yang memuat indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui, pada setiap tahap lima tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu tahap I (2005-2009), tahap II (2010-2014), tahap III (2015-2019) dan tahap IV (2020-2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati **Drs. Nikson Nababan** dan Wakil Bupati Tapanuli Utara **Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si** masa bakti 2014-2019 pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-1561 Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.12-1562 Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, maka melekatlah kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun.

4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 melalui berbagai tahap analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan secara rinci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPJMD ini memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Merupakan pedoman pembangunan selama lima tahun.
3. Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi dan Nasional.
4. Merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama lima tahun.
6. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 dalam pelaksanaannya telah memasuki tahun ketiga. Dalam periode tersebut tentunya akan terlihat tingkat capaian target kinerja selama periode berjalan, baik yang sudah tercapai, akan tercapai ataupun yang belum tercapai. Atas dasar pertimbangan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan evaluasi midterm RPJMD. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disampaikan bahwa evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275 - 277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi :

1. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 299 dinyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD Pemerintah Kabupaten dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Seiring perkembangan sejak dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ditetapkan, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial yang berdampak terhadap perekonomian di tingkat regional serta adanya perubahan kebijakan nasional, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Adapun secara detil beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (*System National Account*) 2008, maka cakupan sektor/ kategori semakin luas, dari semula 9 sektor terbagi menjadi 17 sektor lapangan usaha. Dampak dari perubahan ini adalah capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Selanjutnya perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi dan digantikan dengan angka harapan

1. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota agar memberi dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019;
2. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019 selain didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan nasional juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial, dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan;
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilakukan dengan prinsip money follow program, yang mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; serta penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah;
5. Bagi daerah yang melakukan Pemilukada Serentak Tahun 2017 dan daerah yang melakukan perubahan RPJMD agar melakukan penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 mengikuti petunjuk Surat Edaran Bersama ini.

Berdasarkan lima hal tersebut maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 dinyatakan bahwa :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
    - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
    - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
    - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
    - d. Merugikan kepentingan nasional.
  - (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional
  - (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- Pasal 283 yang menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara serta berpedoman pada RPJM Nasional, perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD kabupaten tetangga. Agar perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, perlu dilakukan kajian terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu kajian juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Sebagai suatu subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
3. Sasaran dan target pencapaian Sustainable Development Goals.
4. Sasaran dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).
5. Sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).
6. Sasaran dan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
7. Sasaran dan target pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG).
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1. Maksud**

Penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk :

1. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 mengakibatkan cakupan sektor/kategori semakin luas, dari semula 9 sektor menjadi 17 sektor lapangan usaha.
2. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan perubahan dan pengkajian kembali terhadap muatan dan substansi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 agar dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya.
3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

#### BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Tapanuli Utara.

#### BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 – 2019 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

#### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya yang mendukung pada pencapaian visi dan misi.

#### BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD beserta kebutuhan pendanaannya. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

#### BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

#### BAB IX PENUTUP

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya yang besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis yang cukup strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Dari beberapa aspek dapat diraih secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk.

### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

### **2.1.1.1. Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara berada pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

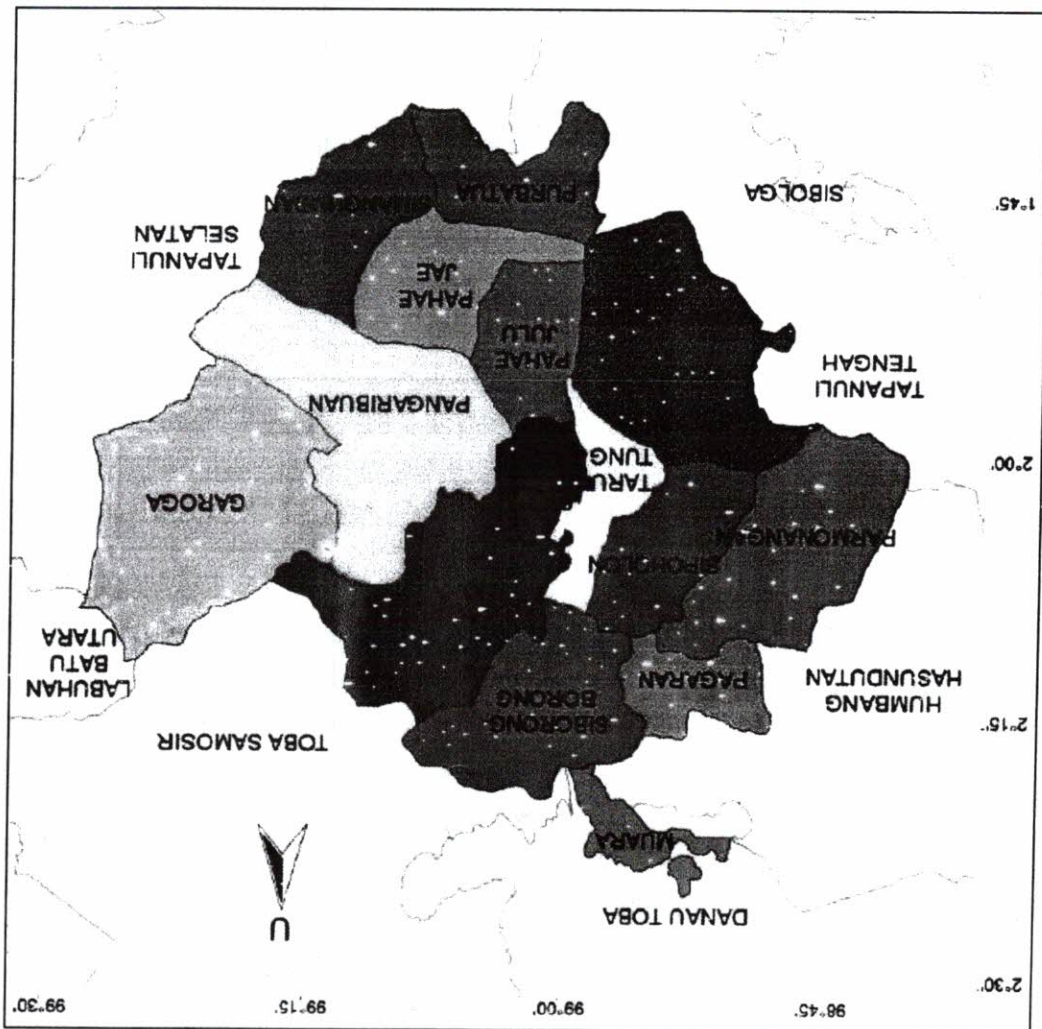
Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1° 20' - 2° 41' Lintang Utara dan 98° 05' - 99° 16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km<sup>2</sup> dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km<sup>2</sup>. Perhitungan luas ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan politik di Indonesia. Sampai akhir tahun 2013, secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa sebagaimana diraih pada Tabel 2.1.

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi yang berbukit dan berhembah dengan suhu antara 12°C - 28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150 - 1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen, daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

**2.1.1.2. Topografi**

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara**



Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

No.	Jenis Guna Lahan	Luas (Km2)	%
1.	Hutan Lindung (HL)	1.236,7	32,6
2.	Hutan Produksi (HP)	0,4660	12,3
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	0,4909	12,9
4.	Hutan Suaka Alam (HSA)	0,0182	0,48
5.	Hutan Rakyat	0,2475	6,5
6.	Kawasan Sempadan Danau	0,0017	0,05
7.	Kawasan Sempadan Mata Air	0,0009	0,02
8.	Kawasan Sempadan Sungai Besar	0,0154	0,4
9.	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	0,0934	2,5
10.	Kawasan Tambang	0,0079	0,21
11.	Holtikultura	0,1761	12,3
12.	Perkebunan	0,1616	4,3
13.	Permukiman	0,0641	1,7
14.	Pertanian Lahan Basah	0,3684	9,7
15.	Pertanian Lahan Kering	0,4450	11,7
<b>Jumlah.....</b>		<b>3.793,71</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara**

Dari total wilayah daratan seluas 3.793,71 km<sup>2</sup>, luas hutan lindung mencapai 32,6 persen, hutan produksi terbatas 12,9 persen dan hutan produksi seluas 12,3 persen. Sedangkan untuk permukiman adalah 1,7 persen dari seluruh luas daratan. Penggunaan lahan untuk pertanian (holtikultura, perkebunan, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering) adalah sebesar 38 persen. Penggolongan lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada Tabel 2.3.

#### 2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200 mm/tahun. Hanya sebagian kecil yang memiliki curah hujan dengan rentang antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29° C, minimum 17° C serta kelembapan udara rata-rata 85,04 %

Uraian tentang klimatologi ini bermanfaat untuk mengenal tingkat pengaruh iklim terhadap fungsi ruang tingkat kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah diantaranya adalah besaran curah hujan (mm/tahun), kondisi atau tingkat suhu udara rata-rata (°C), tingkat kelembaban udara dan intensitas penyinaran matahari.

#### 2.1.1.5. Klimatologi

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
<b>II. KAWASAN BUDAYA</b>		
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan yang berfungsi sebagai hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksikan hasil hutan. Kawasan ini mencakup hutan produksi dan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara seluas 95.690 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 36.839,193Ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.500,010 Ha, kawasan tanaman tahunan/perkebunan seluas 16.159,001 Ha, kawasan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Purbata, Pahae Jae, Siborongborong, Purbata dan Muara seluas + 4.570 Ha dan kawasan pengembangan peternakan ternak kecil di Kecamatan Siborongborong, Muara, Parnonangan, Pagaran, Sipoholon, Garoga, Pangaribuan, Sipahutar dan Tarutung.
3.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan A, B, dan C. Kawasan ini meliputi : (1) Kecamatan Parnonangan dan Pahae Julu berupa kaolin. (2) Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa Feldspar. (3) Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit. (4) Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, Tarutung, Adiankoting berupa Batu Gamping. (5) Kecamatan Pahae Jae dan Parnonangan berupa Batu Apung. (6) Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang. (7) Kecamatan Siborongborong berupa gambut. (8) Kecamatan Pangaribuan berupa mika. (9) Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan berupa tras. (10) Kecamatan Adiankoting berupa granit. (11) Kecamatan Pahae Julu berupa batu setengah mulia dan sabak. (12) Kecamatan Parnonangan dan Pangaribuan berupa silika. (13) Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa lempung. (14) Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, Sipahutar, Siatas Barta, Siborongborong, Pagaran, Purbata, Adiankoting berupa pertambangan panas bumi. (15) Kecamatan Tarutung, Siatas Barta, Pahae Julu, Adiankoting, Pahae Jae, Simangumban, Purbata, Siborongborong, Sipahutar, Sipoholon, Pangaribuan, Parnonangan dan Garoga berupa bahan tambang mineral logam.
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang meliputi industri kecil menengah yang dirahkan di 15 kecamatan serta industri besar yang dirahkan ke Kecamatan Siborongborong dan Tarutung.
5.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan yang berfungsi untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepariwisataan. Kawasan ini terdiri dari: (1) Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi yang meliputi Panaroma Alam Hutaginjang dan Pantai Muara di Kecamatan Muara, Air Soda di Parubu, Air Panas Hutabarat, Ugan dan Salnihuta serta Gua Natumandi di Kecamatan Tarutung, Air Panas Sipoholon di Kecamatan Sipoholon dan Pacuan Kuda di Kecamatan Siborongborong; (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya/sejarah yang meliputi Sopo Partungkon dan Pohon Durian di Kecamatan Tarutung serta Situs Hindu Hopong di Kecamatan Simangumban; (3) Kawasan peruntukan wisata rohani meliputi Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barta; Makam Musnson & Lyman - Lobu Pining di Kecamatan Adiankoting; Kantor Pusat HKBP Pea Raja, Tugu

bertemuinya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tartung dan terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba. Daerah-daerah tersebut sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tartung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan yang aktif, serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal.

#### 2.1.4. Demografi

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebanyak 295.613 jiwa.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

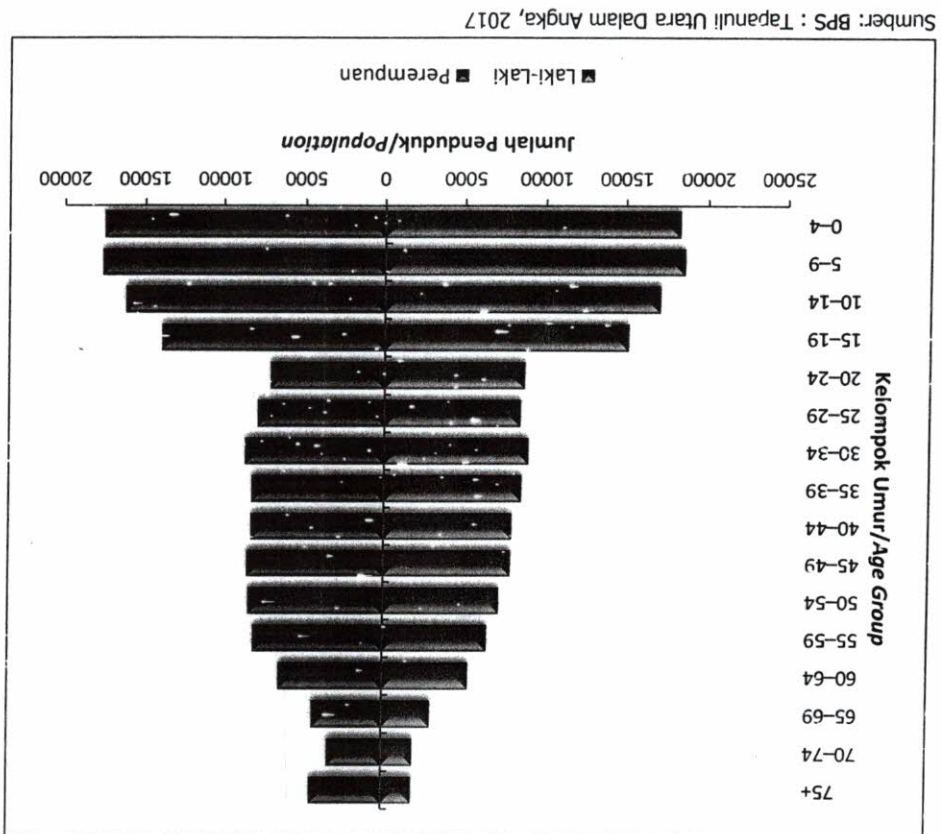
No.	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
		Jumlah Penduduk (Jiwa)/Tahun				
1	Parmonangan	13.291	13.389	13.563	13.680	13.788
2	Adiankoting	14.166	14.271	14.455	14.582	14.692
3	Sipoholon	22.729	22.898	23.191	23.393	23.569
4	Tartung	40.322	40.620	41.143	41.503	41.815
5	Statas Barita	13.333	13.434	13.608	13.726	13.831
6	Pahae Julu	11.987	12.078	12.236	12.343	12.436
7	Pahae Jae	10.792	10.869	11.009	11.105	11.189
8	Purbatua	7.333	7.366	7.462	7.525	7.583
9	Simangumban	7.453	7.507	7.604	7.671	7.727
10	Pangarbuan	27.299	27.496	27.847	28.087	28.300
11	Garoga	15.906	16.022	16.228	16.370	16.494
12	Sipahutar	24.047	25.232	25.558	25.785	25.976
13	Siborongborong	45.088	45.420	46.002	46.402	46.751
14	Pagaran	16.885	17.011	17.231	17.380	17.511
15	Muara	13.459	13.553	13.727	13.847	13.951
<b>Kabupaten Tapanuli Utara</b>		<b>285.070</b>	<b>287.166</b>	<b>290.864</b>	<b>293.399</b>	<b>295.613</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

2.7. Komposisi penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD mengalami penurunan dari 22,24 persen di tahun 2012 menjadi 20,21 persen di tahun 2016. Komposisi penduduk seperti ini berlaku juga untuk pendidikan yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Hal ini mengambarkan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat mengalami kemajuan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan kesadaran (*awareness*) akan arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan. Tingkat perkembangan persentase penduduk umur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel

Jumlah penduduk tengah tahun Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2016 pada Gambar 2.2 merupakan angka proyeksi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010. Hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebesar 295.613 jiwa yang terdiri dari 146.104 jiwa laki-laki dan 149.509 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 97,72 ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Tapanuli Utara lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk relatif rendah, yaitu 78 jiwa per kilometer persegi.

**Gambar 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016**



Utara rata-rata berkisar 5,4 milyar rupiah per tahun. Angka ini masih kasar dan belum dapat digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi karena di dalamnya mengandung pengaruh perubahan/kenaikan harga (inflasi). Artinya bisa saja pertambahan tersebut mayoritas justru disumbang oleh perubahan harga, bukan kuantitas. Perkembangan ekonomi secara riil bisa dilihat dari perubahan PDRB ADHK yang kemudian lazim disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2016, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara mencapai Rp. 2.597.786.510.000, meskipun sepanjang tahun 2012-2016 peran sektor ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Perkembangan nilai dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara ADHK 2010 ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Dari Tabel 2.8 diperoleh gambaran, bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB ADHK 2010 didominasi oleh Sektor Pertanian disusul oleh Sektor Jasa dan berturut-turut oleh Sektor-sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Bangunan serta Pengangkutan dan Komunikasi. Demikian juga halnya, jika dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada periode waktu yang sama berdasarkan nilai dan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Beraku (ADHB) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Sektor	TAHUN															
		2012		2013		2014		2015		2016*							
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%						
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.296.300,33	49,85	2.527.779,21	49,71	2.618.153,38	48,22	2.774.297,46	47,38	2.936.774,98	46,61						
2	Pertambangan dan Penggalian	3.010,03	0,07	3.553,30	0,07	3.675,49	0,07	4.051,46	0,07	4.365,43	0,07						
3	Industri Pengolahan	78.084,99	1,70	88.917,62	1,75	102.191,34	1,88	114.232,22	1,95	126.751,47	2,01						
4	Pengadaan Listrik, dan Gas	4.362,21	0,09	4.580,99	0,09	4.461,92	0,08	4.549,86	0,08	4.401,56	0,07						
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.100,27	0,11	5.434,31	0,11	5.876,27	0,11	6.282,27	0,11	6.858,63	0,11						
6	Konstruksi	520.088,00	11,29	586.403,76	11,53	661.417,91	12,18	718.611,09	12,27	855.147,20	13,57						
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	562.082,77	12,20	623.588,80	12,26	678.848,78	12,50	767.177,59	13,10	807.214,29	12,81						
8	Transportasi dan Pergudangan	206.282,94	4,48	232.612,66	4,57	253.457,76	4,67	280.720,19	4,79	309.798,14	4,92						
9	Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	103.596,13	2,25	121.078,13	2,38	132.403,44	2,44	148.739,36	2,54	161.730,12	2,57						
10	Informasi dan Komunikasi	46.106,00	1,00	48.139,84	0,95	46.952,00	0,46	47.425,00	0,81	47.456,83	0,75						
11	Jasa keuangan dan Asuransi	71.460,35	1,55	81.851,54	1,61	87.483,14	1,61	98.695,14	1,69	107.132,65	1,70						
12	Real Estate	100.736,28	2,19	112.351,85	2,21	127.748,28	2,35	143.920,28	2,46	156.053,49	2,48						
13	Jasa Perusahaan	13.454,89	0,29	14.681,28	0,29	15.443,85	0,28	16.774,39	0,29	18.259,40	0,29						
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	457.859,60	9,94	491.497,02	9,67	542.595,60	9,99	576.469,14	9,84	600.926,20	9,54						
15	Jasa Pendidikan	95.132,90	2,07	97.414,80	1,92	98.626,80	1,82	100.963,23	1,72	102.645,98	1,63						
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.106,43	0,81	38.748,80	0,76	43.294,32	0,80	45.260,69	0,77	46.455,64	0,74						
17	Jasa Lainnya	5.546,31	0,12	6.203,75	0,12	6.697,55	0,12	7.460,08	0,13	831,87	0,13						
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>4.606.310,43</b>	<b>100,00</b>	<b>5.084.837,66</b>	<b>100,00</b>	<b>5.429.327,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5.855.644,46</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.290,07</b>	<b>100,00</b>						

Sumber : BPS : PDRB Kab. Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, Tahun 2017

pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dari sektor pertanian ke sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Lapangan usaha konstruksi merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,93 persen. Adapun pertumbuhan lapangan usaha lainnya berturut-turut, adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan mencatat sebesar 6,29 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,28 persen; dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,56 persen. Sementara, lapangan usaha lainnya tercatat pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan dibawah 5 (lima) persen. Lapangan usaha yang nilai pertumbuhannya terkecil di tahun 2016 adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan yaitu hanya 0,07 persen dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 0,47 persen.

### 2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 yaitu 4,12 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 4,89 persen. Hal ini disebabkan mayoritas lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di setiap lapangan usaha masih positif.

**Tabel 2.11**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Dibanding**  
**Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)					Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%)
		2012	2013	2014	2015*	2016**	
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4,90	5,27	5,11	4,81	4,12	4,84
2.	Provinsi Sumatera Utara	6,22	6,01	5,23	5,10	5,18	5,55
3.	Nasional	6,23	5,78	5,02	4,79	5,02	5,37

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara dan BPS Prov. Sumatera Utara, Tahun 2017 (Data Diolah)

### 2.2.1.3. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB per kapita dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB perkapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, World Bank menetapkan garis kemiskinan internasional agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Garis kemiskinan tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur

Definisi kemiskinan lainnya juga dapat didasari pada jenis kemiskinan secara konseptual yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, maka penduduk dikatakan miskin secara absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan

pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Pada tahun 1990 World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterampilan dan kebebasan.

## 2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Indeks ketimpangan berdasarkan Gini Coefficient berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Angka 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang merata sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Selanjutnya angka 0,50 - 0,70 berarti ketimpangan lebar. Indeks 0,31 - 0,40 ketimpangan sedang, sementara 0,20 - 0,30 berarti kesenjangan yang rendah. Dari tabel dapat dicermati bahwa Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Gini Ratio tercatat paling rendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,30%.

Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, pemeriksaan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penerima PKH Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2016**

No	Kecamatan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Tarutung	218	219	409
2	Adiankoting	260	260	511
3	Sipahutar	468	466	579
4	Pangaribuan	439	439	563
5	Garoga	312	312	521
6	Muara	296	296	352
7	Parmonangan	304	300	446
8	Sipoholon	264	264	447
9	Pahae Julu	196	197	308
10	Siborongborong	782	774	898
11	Pagaran	369	369	445
12	Siatas Barta	-	252	416
13	Pahae Jae	-	218	287
14	Purbatua	-	181	253
15	Simangumban	-	255	255
<b>Kab. Tapanuli Utara</b>		<b>3.908</b>	<b>4.802</b>	<b>6.690</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Bertambahnya jumlah PKH menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini agar tetap meningkatkan kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2.1.6. Agama

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan terhadap kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan. Kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Tapanuli Utara terpelihara dengan baik dan saling membantu. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten

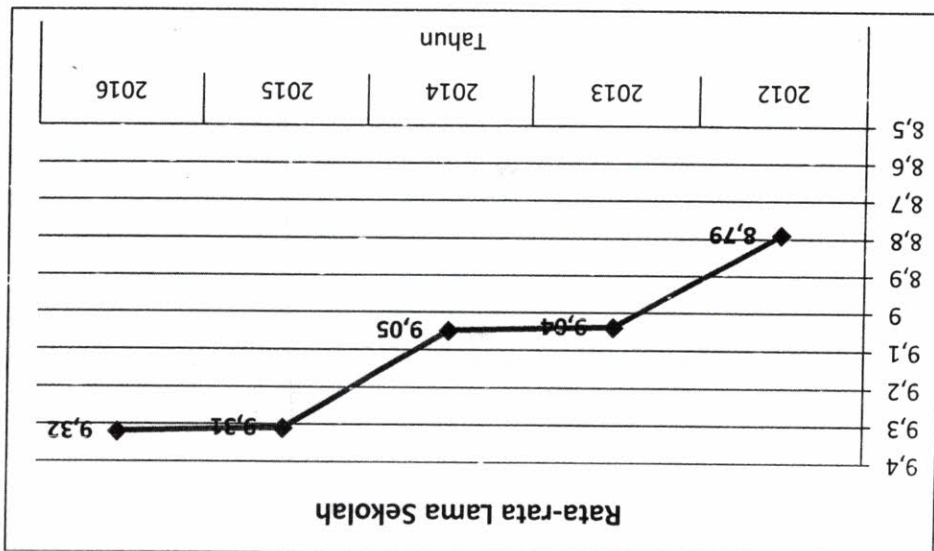
Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, kanji) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

**2.2.2.1.2. Angka Melek Huruf**

Dari Gambar 2.4 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari 8,79 tahun pada tahun 2012 menjadi 9,32 tahun pada tahun 2016. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Apabila dihitung nilai rata-rata lama sekolah untuk 5 tahun maka nilai rata-rata berkisar pada 9,10 yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Tapanuli Utara bersekolah sampai 9 tahun 1 bulan atau sudah menamatkan jenjang pendidikan SMP.

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013-2016



Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan penduduk yang semakin membaik. Secara umum persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Nilai APK di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan untuk semua jenjang tingkat pendidikan, dimana peningkatan APK yang paling tinggi didapat pada jenjang pendidikan SD/MI dengan APK rata-rata selama tahun 2012-2016 sebesar 107,6 persen dengan laju pertumbuhan 1,35. Pada periode waktu yang sama rata-rata APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 97,23 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 3,5 persen per tahun dan pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA rata-rata APK sebesar 85,48 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/MI	%	112,41	108,98	104,41	105,85	106,35
b. SMP/MTs	%	88,04	105,97	95,68	97,50	98,95
c. SMA/SMK/MA	%	79,67	75,71	89,13	91,41	91,46

**Tabel 2.17**  
**Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar**

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan kesnambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesnambungan antar upaya program dan sektor serta kesnambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

### 2.2.2. Kesehatan

Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah aspek pendidikan penduduk. Oleh karena itu, sebaiknya permasalahan pendidikan dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya.

Dari Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan yang berfluktuatif untuk semua jenjang pendidikan, dimana peningkatan APM yang paling tinggi didapat pada jenjang pendidikan SD/MI dengan APM rata-rata selama tahun 2012-2016 sebesar 97,27 persen dan laju pertumbuhannya sebesar 0,12 persen per tahun, sedangkan pada periode waktu yang sama rata-rata APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 90,99 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 7,72 persen per tahun dan pada tingkat jenjang pendidikan SMA/SMK/MA rata-rata APM sebesar 70,66 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38 persen.

APM mengambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Tapanuli Utara di masa depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat inteletualitas angkatan kerja pada beberapa tahun mendatang setelah para pelajar meninggalkan bangku sekolah. Dari data pada tabel 2.19 bahwa angka partisipasi murni semakin rendah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar anak usia diatas 15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka panjang, intervensi pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan *knowledge, skill* dan *attitude* yang mendukung pembangunan.

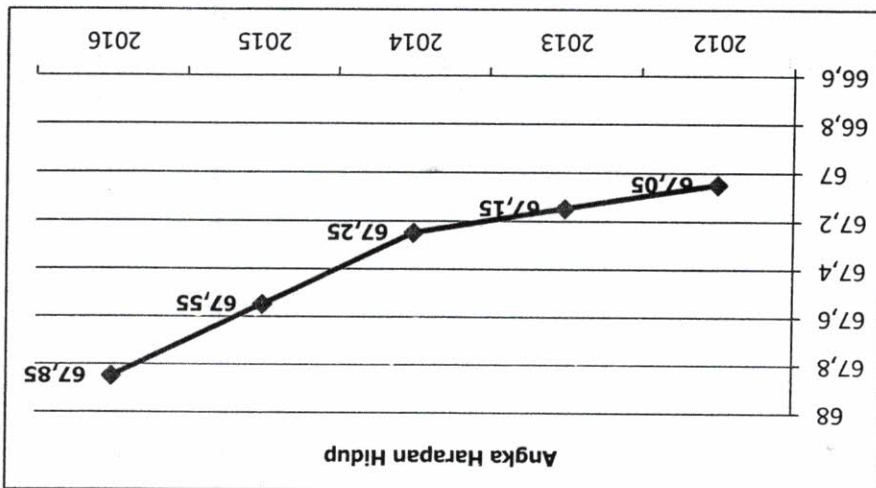
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/MI	%	97,47	95,15	97,35	98,51	97,89
b. SMP/MTs	%	74,14	88,68	95,68	97,50	98,95
c. SMA/SMK/MA	%	64,13	64,61	73,36	75,45	75,73

Tabel 2.19  
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016

**Gambar 2.6**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016



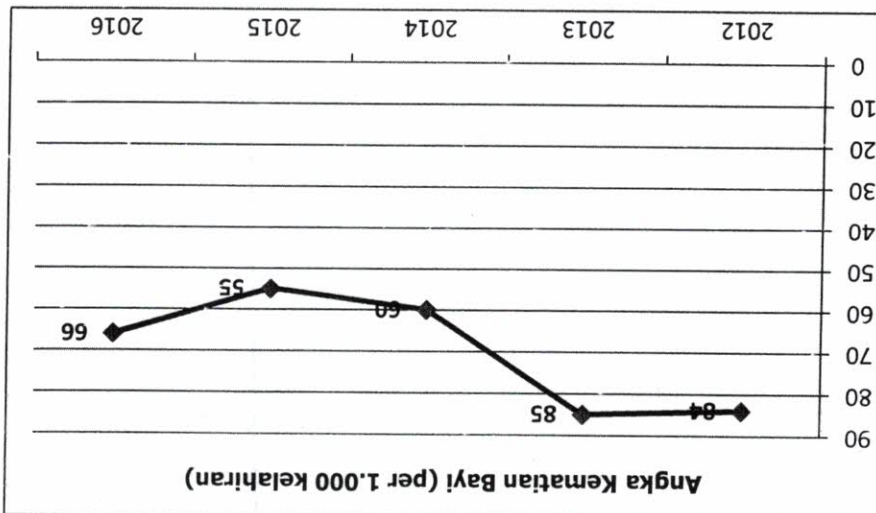
Angka harapan hidup rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

**2.2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup**

Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara masih tergolong tinggi dan jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Faktor penyebab kematian bayi secara umum adalah lahir mati, BBLR, premature, kelainan jantung, asfiksia, aspirasi dan gizi buruk.

**Gambar 2.5**  
**Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016



ensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut pada ayat (2) disampaikan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang dampak negatinya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam Lampiran undang-undang tersebut pada huruf j mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada sembilan sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas: (1) izin lokasi, (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (3) sengketa tanah garapan, (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (5) subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absente, (6) tanah ulayat, (7) tanah kosong, (8) izin membuka tanah, dan (9) penggunaan tanah.

Dari kesembilan sub urusan tersebut terdapat tiga sub urusan yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat, yaitu urusan tanah ulayat, tanah kosong dan izin membuka tanah. Kewenangan pemerintah izin membuka tanah hanya ada pada pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya ada pada pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Berdasarkan aturan dalam UU 23/2014 terdapat penyebutan secara lebih konkrit mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu (1) penyelesaian sengketa tanah garapan, (2) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, dan (3) penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua level pemerintahan, sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya ada pada level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan bidang pertanahan pada umumnya dan bidang sengketa tanah pada khususnya masih memerlukan aturan yang lebih konkrit, karena itu peraturan pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamatkan pasal 21 UU 23/2014 perlu segera direalisasikan.

#### 2.2.4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

**2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**  
 Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.  
 Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.  
 Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti terdiri dari layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

**2.3. Aspek Pelayanan Umum**  
 Pemberian pelayanan umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah didalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat tersebut

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

No	Uraian	2015	2016
		Tahun	Tahun
1	Jumlah cabang organisasi olah raga tingkat Kabupaten	21	21
2	Jumlah lapangan olah raga	4	4
3	Jumlah gedung olah raga	0	0

**Tabel 2.21**  
**Potensi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 - 2016**

Utara telah tersedia berbagai fasilitas pendukung.  
 Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, dimana untuk mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tapanuli

naftinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif.  
 Melalui olahraga pemuda dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Olahraga

**2.1.3.2. Olahraga**

Dari tabel menunjukkan bahwa secara umum nilai APS menurut tingkatan usia, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah sudah bagus walaupun belum mencapai 100,00 persen. Kemudian nilai APS menjadi turun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (akademik, perguruan tinggi). Salah satu penyebabnya adalah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat juga oleh tersedianya fasilitas yang mendukung.

### 2.31.1.2 Rasio Guru dan Siswa

Beberapa kinerja guru salah satunya dapat diukur dengan indikator rasio murid-guru, yaitu perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disampaikan bahwa Guru Tetap Pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, untuk masing-masing jenjang/tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK, RA, atau yang sederajat 15 : 1;
- b. SD atau yang sederajat 20 : 1;
- c. MI atau yang sederajat 15 : 1;
- d. SMP atau yang sederajat 20 : 1;
- e. MTs atau yang sederajat 15 : 1;
- f. SMA atau yang sederajat 20 : 1;
- g. MA atau yang sederajat 15 : 1;
- h. SMK atau yang sederajat 15 : 1; dan
- i. MA atau yang sederajat 12 : 1.

**Tabel 2.23 Rata-rata Rasio Siswa dan Guru Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	SD/MI	1 : 11	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13
2	SMP/MTs	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15	1 : 15
3	SMA/MA	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 15	1 : 15
4	SMK	1 : 8	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa secara rata-rata untuk Kabupaten Tapanuli Utara, rasio jumlah siswa dengan ketersediaan guru yang ada untuk semua jenjang pendidikan telah tercukupi, walaupun untuk beberapa kecamatan terdapat angka yang sedikit berbeda (penyebaran guru belum merata).

### 2.3.1.1.3 Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara telah memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilihat dari banyak faktor, diantaranya angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah. Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus pada tingkat pendidikan per jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tahun sebelumnya, sedangkan angka melanjutkan

Indikator kesehatan lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan banyaknya fasilitas kesehatan termasuk (sarana kesehatan dan tenaga medis) Kabupaten di Tapanuli Utara.

**2.3.1.2.1 Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis**

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap wilayah. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan.

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

**2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan**

Tabel 2.26 menunjukkan bahwa jumlah kelompok PAUD mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara peduli terhadap masalah pendidikan anak usia dini sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk kedepannya.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Kelompok Bermain	8	10	10	10	10
2	Tempat Penitipan Anak	5	5	5	5	5
3	Kelompok PAUD sejenis	95	110	105	105	179

**Tabel 2.25 Jumlah Lembaga PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

**Tabel 2.27**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013-2016**

No	Tenaga Kesehatan	Puskemas						RSU						Klinik Dinkes						Dinkes					
		Tahun						Tahun						Tahun						Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016				
1	Dokter Spesialis	1	-	-	-	4	14	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Dokter Umum	19	22	37	35	15	19	18	17	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2					
3	Dokter Gigi	11	14	13	12	4	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
4	Bidan	381	482	488	485	48	127	53	61	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-					
5	Perawat	28	87	106	104	141	163	158	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Perawat Gigi	1	8	7	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	Tenaga teknis kefarmasian	-	6	7	9	13	16	16	16	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5					
8	Apoteker	-	1	1	-	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
9	Kesehatan Masyarakat	8	7	6	27	3	4	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
10	Nutrisi	5	16	14	13	6	6	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	Dietisien	2	-	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	Fisioterapis	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	Radiografer	5	8	6	5	6	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	Teknisi elektronmedis	-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	Analisis kesehatan	2	5	4	4	7	7	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	Kesehatan lingkungan	-	-	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	Rekam medis dan infokes	1	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	Pengetia p program kes	23	25	25	32	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	37	56	49	56					
19	Tenaga kes lainnya	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-					
	<b>Total</b>	<b>694</b>	<b>682</b>	<b>722</b>	<b>739</b>	<b>267</b>	<b>382</b>	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>64</b>					

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 - 2016

**Tabel 2.29**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	Parmonangan	14	4	8	6	11
2	Adiankoting	16	8	10	13	14
3	Sipohon	14	12	10	12	12
4	Tarutung	31	9	26	29	13
5	Sitas Barta	12	8	10	10	9
6	Pahae Julu	19	3	14	11	16
7	Pahae Jae	13	11	9	10	11
8	Purbata	11	-	7	4	8
9	Simangumban	8	5	5	5	6
10	Pangaribuan	26	14	19	22	23
11	Garoga	13	-	9	6	5
12	Sipahutar	25	-	17	18	20
13	Siborongborong	21	17	17	21	21
14	Pagaran	14	12	12	10	11
15	Muara	15	9	10	12	12
<b>Kabupaten</b>		<b>252</b>	<b>112</b>	<b>183</b>	<b>189</b>	<b>192</b>

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi dimana 80% dari jumlah bayi telah mendapatkan imunisasi secara lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis campak yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sesuai data pada tabel, tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI sudah mencapai 89 persen, sehingga sesuai target nasional pada tahun 2019 diharapkan cakupan UCI akan mencapai 91 persen.

### 2.3.1.2.4 Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan.

**Tabel 2.30**  
**Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan)**  
**di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Jumlah Bayi	5.668	5.862	3.040	2.611	2.888
2	Jumlah bayi yang diberi asi eksklusif (usia 0-6 bulan)	1.969	1.177	1.585	820	780

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 lebih kurang 1.679,36 Km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 149,84 Km, jalan provinsi sepanjang 169,50 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.222,01 Km. Perkembangan panjang jalan dan

2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten serta kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat serta orang/penumpang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun

**2.3.1.3.1. Kondisi Jalan**

Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pembangunan jalan lingkar, jalan poros/penghubung dan jalan utama serta pembangunan jalan ke sentra-sentra produksi perkotaan dan perdesaan diharapkan menjadi faktor yang dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat.

**2.3.1.2. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Jaminan Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
1	Jaminan Kesehatan Nasional	37.042	107.036	147.738	155.855	179.134
	b. Persema Bantuan Iuran (PBI) APBN	26.371	27.407	107.021	106.411	113.398
	c. PBI APBD Provinsi		5.667	5.209	5.677	4.588
	d. Pekerja Persema Upah (PPU)		1.035	22.010	25.862	31.864
	e. Pekerja Bukan Persema Upah/Mandiri		1.047	4.285	6.764	17.909
	f. Bukan Pekerja		1.636	9.213	11.141	11.375
2	Jamkesda	8.539	17.857	5.000	25.000	14.999
	<b>Jumlah</b>	<b>71.952</b>	<b>161.685</b>	<b>152.738</b>	<b>180.855</b>	<b>194.133</b>
	<b>Cakupan persentase</b>	<b>25,24</b>	<b>56,51</b>	<b>52,51</b>	<b>61,64</b>	<b>65,67</b>

**Tabel 2.31 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Tabel 2.33 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan prasarana jaringan irigasi selama periode tahun 2012-2016. Demikian juga halnya, bahwa luas lahan budidaya yang dilirir sarana irigasi juga mengalami peningkatan dari 12.970 Ha pada tahun 2012 menjadi 15.905 Ha pada tahun 2016.

### 2.3.1.3.3. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu : (1) adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang : manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat serta pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut; (2) proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu dan berdayaguna serta serasi.

Dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan wilayah Kabupaten Tapau Utara diwaktu mendatang, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapau Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapau Utara Tahun 2017-2037, wilayah Kabupaten Tapau Utara terdiri atas kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Prioritas. Implementasi pengembangan budidaya dan kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tapau Utara Tahun 2017-2037 memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal. Hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana.

Kondisi pola ruang yang dilihat dari pencapaian kebijakan kawasan lindung, dimana kawasan ini ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2013 di daerah ini terdapat kawasan hutan (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan hutan konservasi cagar) seluas 311.125,40 Ha atau 82,01 persen dari luas daratan Kabupaten Tapau Utara. Penyimpangan pemanfaatan ruang (kawasan lindung) diperhatikan oleh adanya alih fungsi lahan kawasan hutan (hutan primer maupun hutan sekunder) yang disebabkan pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan jumlah penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi pada umumnya menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) mengakibatkan berkurangnya kawasan resapan air pada kawasan hulu sungai.

Di sisi lain, alih fungsi pada umumnya mengakibatkan rencana tata ruang seperti yang terjadi pada alih fungsi lahan kawasan budidaya pertanian produktif (sawah) menjadi kawasan permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan yang menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan di daerah ini. Perubahan alih fungsi lahan tersebut merupakan indikasi rentannya kondisi lahan yang menjadi penyebab degradasi lingkungan. Penyimpangan alih fungsi lahan disebabkan karena belum efektif berfungsinya aspek pengendalian dalam pelaksanaan penataan ruang serta terkait dengan kewenangan perijinan

terdapat peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni dari sebesar 56.973 unit pada tahun 2012 menjadi sebesar 70.440 unit pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,56 persen per tahun.

Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, diantaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan).

Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Taparuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat. Jumlah rumah tangga yang telah dapat mengakses air bersih meningkat dari 75,60 persen pada tahun 2012 menjadi 79,95 persen pada tahun 2016 yaitu dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,42 persen per tahun. Demikian juga halnya dalam pemenuhan penerangan, rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan meningkat dari 96,76 persen pada tahun 2012 menjadi 98,09 persen pada tahun 2016 yaitu dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun. Berdasarkan persentase ini, hanya sekitar 3,11 persen rumah tangga yang belum menikmati pelayanan listrik dari PLN maupun non PLN.

### **2.3.1.5. Bidang Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Rakyat**

Salah satu upaya untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang lebih baik adalah melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan. Pada tahun 2013 organisasi yang terdapat di Taparuli Utara adalah 58 buah, terdiri dari 41 buah organisasi LSM, 13 buah organisasi pemuda dan 4 buah organisasi warga.

Selain itu, manajemen pemerintahan yang efektif dilakukan dengan melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan keterlibatan masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Penyelenggaraan pembangunan bidang keterlibatan umum dan ketertarikan masyarakat selama tahun 2012-2016 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan keterlibatan umum dan ketertarikan masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disisipkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.35.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMSKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

No	Uraian	Data PMKS					Data PMKS Yang Ditangani				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban bencana alam	118	113	127	769	1.397	118	113	127	769	1.397
22	Korban bencana sosial	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	1.260	1.260	633	1.260	1.260	10	10	10	10	10
24	Fakir Miskin	-	-	4.981	17.686	15.733	-	-	-	17.686	15.733
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	9	16	16	10	249	9	16	16	10	18
26	Komunitas Adat Terpencil	3	3	3	3	3	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

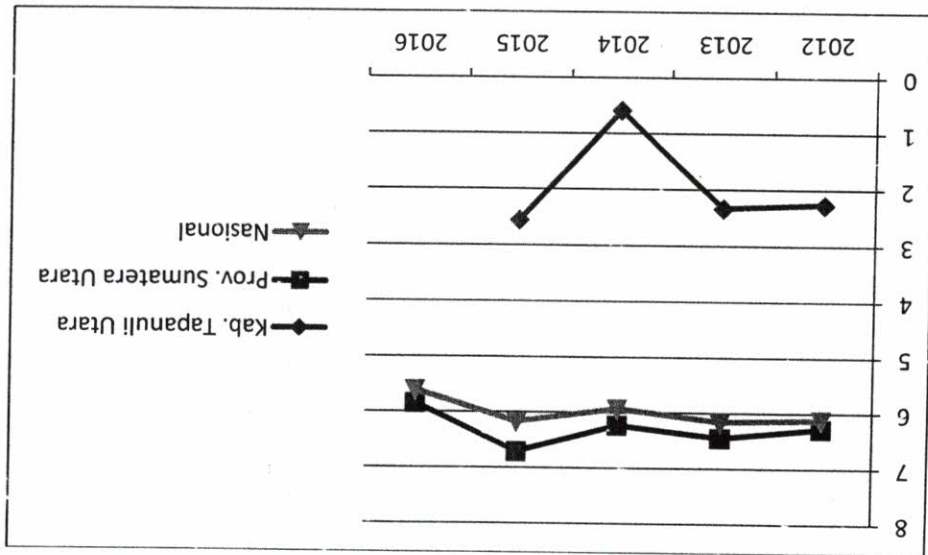
Pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya kesetaraan gender. Upaya perbaikan pemberdayaan perempuan dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), yaitu upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan ini dapat dilakukan dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi.

**2.3.2.2. Bidang Urusan Fembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional, maka angka TPT Kabupaten Tapanuli Utara jauh di bawah. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara masih mampu bekerja mandiri walaupun tidak menutup kemungkinan untuk masuknya investor guna pembukaan lapangan kerja baru.

**Gambar 2.9**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2016**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017



Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapakan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan Tabel 2.37, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk yang masuk pasar kerja (*supply*) selama tahun 2012-2015 mengalami *trend* meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu yang sama mengalami penurunan.

### 2.3.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah terhadap perempuan dalam pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya pembangunan perempuan agar posisi perempuan diperlakukan setara dengan laki-laki sehingga peran perempuan dalam masyarakat akan semakin nyata.

Meibangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidakkepatan interpretasi ajaran agama dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

Penghitungan IPG ini memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasi dan tidak dapat dibandingkan dengan angka yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain :

sendiri".  
publik. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi "membuka aib keluarga berarti membuka aib karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial.

**2.3.2.4. Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Tabel 2.39 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 capaian partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 5.846 orang pada tahun 2012 menjadi 71.373 orang pada tahun 2016.

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah pekerja perempuan (orang)	60.156	61.219	63.188	63.250	75.090
2.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	56.288	57.411	59.454	63.188	71.373
3.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)	3.868	3.808	3.734	9.957	3.717

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2012-2016**

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta, menunjukkan persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bermakna rendahnya partisipasi perempuan yang kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan di lapangan kerja swasta. Budaya patriarki masih menempatkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan dalam kategori marginal, seperti buruh perusahaan dan pelayan toko.

**2.3.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga-lembaga Swasta**

Tabel 2.38 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 capaian partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 3.868 orang pada tahun 2012 menjadi 71.373 orang pada tahun 2016, sedangkan capaian partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Tapanuli Utara) pada tahun 2012-2016 sebanyak tiga orang. Partisipasi perempuan pada bidang politik dan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

### 2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah bersama-sama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui suatu kebijakan yang mampu mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Pokok-pokok kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi, penganekeagaman konsumsi dan kewaspadaan/keamanan pangan dan gizi terhadap komoditas strategis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah ini, berbagai upaya telah ditempuh melalui berbagai kebijakan, diantaranya: 1) kebijakan peningkatan ketersediaan ketahanan pangan yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani, pemantapan penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan peningkatan mutu teknologi terapan; 2) kebijakan dalam kewaspadaan dan keamanan pangan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), peningkatan keberdayaan masyarakat pangan dan peningkatan keamanan mutu dan gizi pangan.

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah penduduk (orang)	285.070	287.166	290.864	293.399	295.613
2.	Pangan karbohidrat (padi)					
	a. Produksi padi gabah kering panen (ton)	149.729,05	151.937,67	125.755	135.726	172.889
	b. Ketersediaan beras (ton)	94.623,89	94.440,31	78.898,69	85.781,89	108.471,00
	c. Kebutuhan konsumsi beras per kapita (kg)	155,28	153,72	94,10	85,41	98,00
	d. Total kebutuhan beras konsumsi (ton)	44.265,67	44.272,28	27.370,30	27.993,85	28.917,00
	e. Swasembada beras (ton)	50.358,22	50.168,03	51.528,39	58.173,04	79.554,00
3.	Protein hewani					
	a. Daging					
	▪ Produksi daging (ton)	966,61	1.025,14	1.314,81	1.343,46	1.396,44
	▪ Kebutuhan konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	5,20	5,59	4,52	4,62	6,80
	▪ Total kebutuhan daging konsumsi (ton)	1.482,07	1.592,32	1.314,71	1.355,50	2.020,35
	b. Susu					
	▪ Produksi susu (liter)	233.724,08	231.269,42	231.344,00	236.007,00	238.367,23
	▪ Kebutuhan konsumsi susu per kapita (liter/kapita)	0,82	0,81	0,80	0,81	0,82
	▪ Total kebutuhan susu konsumsi (liter)	641.407,50	648.013,50	232.691,20	237.653,19	238.367,23

dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar. Namun demikian pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup tetap dilaksanakan oleh daerah mengingat indikator-indikator yang ada di dalamnya merupakan bagian kegiatan dari urusan bidang lingkungan hidup.

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Utara terus mendapat perhatian karena jumlah sampah terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di daerah ini. Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016 diraikan pada tabel 2.41 berikut.

**Tabel 2.41  
Perkembangan Pengelolaan Sampah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Pengelolaan sampah					
	a. Jumlah sampah (ton)	357,19	360,04	363,64	366,91	373,00
	b. Jumlah sampah yang ditangani (ton)	90,09	91,72	92,55	93,81	96,98
	c. Persentase (a/b) (%)	25,22	25,47	25,45	25,57	26,00
2.	Jumlah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah (unit)	3	3	3	3	3
3.	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah (unit)	265	293	353	407	407

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.41 menunjukkan bahwa produksi sampah di Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2012-2016 meningkat setiap tahunnya. Rata-rata volume sampah di daerah ini adalah 357,19 ton per tahun. Peningkatan jumlah sampah ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Rata-rata volume sampah yang ditangani adalah 90,75 ton atau 25,41% per tahun. Pengelolaan sampah dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dimana pada tahun 2013 terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di 3 lokasi serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang jumlahnya meningkat. Melihat pengelolaan sampah yang belum optimal, pengelolaan persampahan diselenggarakan melalui pembinaan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan.

### 2.3.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Beberapa perubahan mendasar terkait administrasi kependudukan pada undang-undang tersebut antara lain :

Tabel 2.42 tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahun dimana angka

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017 (data diolah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP (j:wa)	135.548	143.914	118.739	134.302	152.935
2.	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (j:wa)	221.186	214.382	224.628	222.172	224.549
3.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	61,28	67,13	52,86	60,44	68,10

Tabel 2.42  
Persentase Penduduk Memiliki KTP di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016

pada Tabel 2.42.

Rasio penduduk yang telah memiliki KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang telah memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Perimbangan rasio penduduk memiliki KTP di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016 ditunjukkan

### 2.3.2.5.1. Rasio Penduduk yang Memiliki KTP per Satuan Penduduk

Dalam bidang penyelenggaraan urusan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya dan berkomitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dimana hasil indikator hasil capaian yang dilakukan pemerintah daerah didalam urusan kependudukan pada tahun 2012-2016, diraikan sebagai berikut:

10. **Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN** Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.
11. **Penambahan Sanksi** Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
- Setiap pejabat dan petugas pada Desa/keurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
- Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

### 2.3.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warga masyarakat ikut berpartisipasi. Suatu usaha dinilai berhasil sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, dimana setiap pengelola kegiatan khususnya SKPD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat, sehingga dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Pemerintah pusat mendorong adanya otonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdamainya sebagian besar rakyat Indonesia. kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.

Dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pembangunan diharapkan dukungan dan peran berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Di dalam pemberdayaan masyarakat desa juga sangat dibutuhkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga

Tabel 2.46 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB tahun 2012-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian jumlah penduduk tetap dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program KB. Namun demikian, secara umum angka ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana) yang diharapkan mampu mengubah pandangan generasi tentang pentingnya Keluarga Berencana.

### 2.3.2.7.2. Cakupan Peserta KB Aktif

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Terkait dengan hal ini telah dibuat beberapa cara untuk mencegah atau munda kehamilan melalui alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.

**Tabel 2.47**  
**Perkembangan Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2013**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah pasangan usia subur (orang)	34.093	34.177	34.865	33.388	33.170
2.	Jumlah peserta KB aktif (orang)	21.440	22.935	21.643	22.075	22.985
3.	Persentase jumlah peserta KB aktif	62,89	67,11	62,08	66,12	69,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.47 tersebut menunjukkan bahwa persentase peserta KB aktif tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana jumlah peserta KB aktif pada tahun 2012 sebesar 62,89 persen dari jumlah PUS sebesar 34.093 orang meningkat menjadi sebesar 22,985 orang atau sebesar 69,29 persen dari jumlah PUS sebesar 33.170 orang pada tahun 2016. Semakin tingginya jumlah peserta KB berarti bahwa sosialisasi KB kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB telah berhasil dilakukan. Hal ini perlu terus ditingkatkan guna mensukseskan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

Transportasi udara di Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan keberadaan bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong. Bandara Silangit dibangun pada masa penjajahan Jepang dan pembangunan kembali bandara ini mulai dilakukan sejak tahun 1995 dengan menambah landas pacu sepanjang 900 meter sehingga menjadi 1.400 meter. Pada Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan langsung pengoperasian Bandara Silangit, sejak saat itu pembangunan Bandara pun mulai dilakukan dengan gencar. Pada tahun 2011, Bandara Silangit akhirnya memiliki landas pacu sepanjang 2.400 meter dan direncanakan pada tahun 2015 akan diperpanjang kembali menjadi 3.800 by 45 meter (12.467 x 148 ft), sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar secara reguler. Pada tanggal 18 Januari 2011, Bandara Silangit didatangi oleh Presiden RI beserta rombongan yang menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dengan kedatangan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa Bandara Silangit telah sanggup melayani pesawat sekelas A320, A320neo, A330, & B737 Next Generation, & MAX (https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar\_Udara\_Internasional\_Silangit). Pada tanggal 24 November 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional Silangit.

2.3.2.8.3. Jumlah Terminal Bus/Pelabuhan Danau/Lapangan Udara

Jumlah terminal bus, pelabuhan danau dan bandara tahun 2012-2016 tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah terminal adalah dua unit, pelabuhan danau satu unit dan bandara satu unit. Transportasi danau di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara yang terletak di Kawasan Danau Toba. Aksesibilitas transportasi danau tahun 2016 didukung sarana dermaga danau sebanyak satu unit dengan jumlah armada angkutan danau sebanyak satu unit ferry dan 35 unit kapal pengangkutan yang merupakan sarana transportasi masyarakat di Kawasan Danau Toba.

Tabel 2.49 menunjukkan bahwa jumlah jin trayek dan uji kir angkutan umum di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

No.	Uraian	Tahun (Unit)			
		2012	2013	2014	2015
I	Jumlah Izin Trayek Kendaraan Bermotor	330	345	350	340
	1. Perkotaan	200	210	210	215
	2. Perdesaan	130	135	140	125
II	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.222	1.245	1.245	1273
	1. Mobil penumpang umum	355	360	375	379
	2. Mobil bus	185	193	200	215
	3. Mobil barang	650	669	670	679
					476

Tabel 2.49 Perkembangan Jin Trayek dan Uji Kir Angkutan Umum Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012-2016

berasakan kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Keberadaan Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi (unit)	399	404	431	459	461
	a. Koperasi Unit Desa (KUD) (unit)	30	30	30	30	30
	b. Koperasi Non KUD (unit)	369	374	401	429	431
2.	Koperasi aktif (unit)	161	164	93	35	98
3.	Rasio koperasi aktif (%)	40,35	40,59	21,57	7,62	21,25
4.	Jumlah anggota koperasi (orang)	40.360	40.500	42.018	42.703	42.824

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.51 menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahun, dimana peningkatan ini terjadi pada koperasi non Koperasi Unit Desa (KUD). Peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting. Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi, dimana hal ini terlihat dari semakin meningkatnya rasio koperasi aktif.

### 2.3.2.11.2. Permodalan Koperasi

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Peran koperasi dalam memperkuat kehidupan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha koperasi dapat dilihat dari permodalan koperasi tersebut.

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Permodalan Koperasi Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun (Rp.000)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Modal Sendiri	48.327.783	56.002.216	62.007.246	62.087.286	62.308.401
2.	Modal Luar	49.851.813	49.901.009	50.001.009	50.001.009	50.678.372
3.	Volume Usaha	130.457.652	222.038.249	226.127.147	293.419.309	314.138.709
4.	Sisa Hasil Usaha (SHU)	949.828	1.973.217	1.003.189	1.006.009	1.214.396
5.	Asset	93.535.744	105.903.225	107.703.256	113.094.304	114.201.169

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**2.3.2.14. Bidang Urusan Persandian**

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan kriteria serta metode pelaksanaan pengumpulan data. kegiatan pendataan statistik. Keadaan ini muncul akibat dari belum optimalnya koordinasi Satuan Kerja Disamping itu, masih terdapat *overlapping* data capaian antar instansi yang berwenang melakukan disajikan oleh pemerintah masih mengalami keterlambatan sebanyak 2 tahun dari tahun perencanaan. secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu. Dalam pelaksanaannya, data statistik yang karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik harus senantiasa dipayakakan tersaji harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Oleh Statistika harus menganut asas kemutakhiran dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa data yang Penyusunan data statistik menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 tentang

Dokumen statistik menampilkan jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyusun data statistik yaitu profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8 jenis kelompok data, meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4) infrastruktur, 5) industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha dan investasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) politik, hukum dan keamanan, serta 8) insidensial.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Statistika dijelaskan bahwa statiska adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistika juga adalah sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Upaya penyediaan dan penyediaan data serta upaya pengembangan ilmu statistik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan dimana keterkaitan keputusan terhadap suatu kebijakan, program dan kegiatan sangat bergantung kepada ketersediaan data.

### 2.3.2.13. Bidang Urusan Statistik

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Pemuda dan Olahraga				
	2012	2013	2014	2015	2016
1.	-	-	-	22	22
2.	-	-	-	21	21
3.	-	-	-	4	6
4.	-	-	-	7	7
5.	-	-	-	5	5

**Tabel 2.53**  
**Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

Bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik serta perumpanan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, ketuhanan, ketersediaan, keadilan dan nir-sangkal. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan persandian dilihat dari jumlah informasi yang diamankan menurut peraturan perundang-undangan. Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian. Jumlah aset atau fasilitas yang diamankan. Jumlah, rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamanannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakekatnya Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat Tapanuli Utara.

### 2.3.2.15. Bidang Urusan Kebudayaan

Kabupaten Tapanuli Utara dalam proses pembangunan juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan modal dalam proses pembangunan. Keberagaman budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di daerah ini. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di daerah ini. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh Batak Toba.

Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat kabupaten serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan kearsipan melalui manajemen perpustakaan dan kearsipan.

Tabel 2.55 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan di daerah ini selama tahun 2012-2016 yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah buku yang terdapat di Kantor Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara, baik buku bacaan untuk pelajar pada tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Diploma/Sarjana maupun buku bacaan ilmu pengetahuan. Peningkatan jumlah buku tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat dalam mendukung peningkatan sumberdaya manusia. Selain itu, dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat telah dikembangkan perpustakaan umum di tingkat desa/keurahan yang pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 65 unit. Demikian juga halnya pengandaan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika, dimana pada tahun 2016 telah dilakukan untuk 100 dokumen arsip daerah.

### **2.3.2.17. Bidang Urusan Kearsipan**

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik aset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 'kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga unit kearsipan dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamatkan bahwa :1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

usahanya ada di kolam dan sawah sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, rawa dan danau. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengembangan perikanan, Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sistem Penulihan Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Air Payau dan Air Tawar dan Pengembangan Kawasan Budi Daya Danau, Air Payau dan Air Tawar.

Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang pengembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 10.290 Ha. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai luas dominan adalah Sipahutar, Siborongborong, dan Garoga. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, dilakukan berbagai upaya, di antaranya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Melalui berbagai program bidang peternakan dan bidang perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara telah didapat capaian hasil kegiatan pembangunan pada bidang peternakan dan bidang perikanan di daerah ini, sebagaimana dirangkai pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.56**  
**Perkembangan Produksi, Tingkat Konsumsi, Kebutuhan Konsumsi dan Swasembada**  
**Ikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
	Jumlah Penduduk (Orang)	285.070	287.166	290.864	293.399	295613
1	Produksi Ikan	1.747,70	1.795,60	1.684,30	1.399,10	1.402,40
2	Kebutuhan Konsumsi Ikan Per kapita (kg/kapita)	20,15	20,25	20,30	20,50	20,90
3	Total Kebutuhan Ikan Konsumsi (Ton)	5.744	5.832	5.904,50	6.014,68	6.124,50
4	Swasembada Ikan (Ton)	-3.996,46	-4.036,52	-4.220,20	-4.715,58	-4.722,10

Sumber : Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.56 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan dan hewan selama tahun 2012-2016 belum mencapai swasembada, dimana tingkat produksi ikan lokal di daerah belum dapat mencukupi kebutuhan protein yang berasal dari ikan dengan tingkat kekurangan kebutuhan konsumsi ikan rata-rata sebesar 5.596 ton per tahun. Kekurangan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan di daerah ini diatasi dengan melakukan introduksi ikan yang merupakan sumber protein hewani ikan dari luar daerah.

Peran Sub Sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah ini cukup penting, yang didasarkan pada kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara (ADHB maupun ADHK 2010) pada Tahun 2012-2016 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.12.

Guna mendukung ketersediaan akomodasi bagi wisatawan, saat ini terdapat 1 buah hotel bintang 3, 1 buah hotel bintang 2, 4 unit hotel bintang 1 dan 12 unit hotel non bintang dengan jumlah kamar sebanyak 355 buah dan tempat tidur sebanyak 693 buah.

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
	Jumlah wisatawan (orang)	98.826	96.841	93.147	109.742	128.110
1	Wisatawan mancanegara (orang)	732	480	1.500	1.665	1.705
2	Wisatawan domestik (orang)	98.094	96.361	91.647	108.177	108.743

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.57 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 rata-rata wisatawan (mancanegara dan domestik) yang berkunjung ke daerah ini adalah 96.397 orang per tahun dengan laju pertumbuhan 0,82 persen per tahun. Wisatawan yang paling banyak berkunjung ke daerah ini adalah wisatawan domestik dengan jumlah rata-rata 95.527 orang per tahun.

### 2.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Sektor Pertanian memegang peranan penting dan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor pertanian memberikan fasilitas dan dorongan yang lebih terarah bagi perkembangan pembangunan kerakyatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Potensi lahan yang cukup luas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok untuk pengembangan pertanian komoditi pangan dan palawija dan pengembangan komoditi perkebunan.

### 2.3.3.3.1. Tanaman Pangan

Pengembangan sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cukup potensial karena didukung oleh potensi lahan yang cukup luas, yang meliputi : potensi lahan sawah seluas 16.879 Ha dan lahan kering untuk tanaman pangan dan perkebunan seluas 126.095 Ha. Luas lahan sawah menurut pengalirannya terdiri dari : irigasi Pekerjaan Umum (PU) seluas 7.528 Ha dan irigasi non PU/irigasi desa seluas 9.351 Ha. Sementara itu luas lahan perkebunan rakyat mencapai 42.771 Ha dan lahan ladang 83.324 Ha.

Tanaman sayuran terbagi atas tanaman sayuran semusim dan tanaman sayuran tahunan. Data produksi yang ditampilkan pada tabel berikut adalah tanaman sayuran semusim berumur kurang dari satu tahun yang umum ditanam oleh petani Kabupaten Tapanuli Utara.

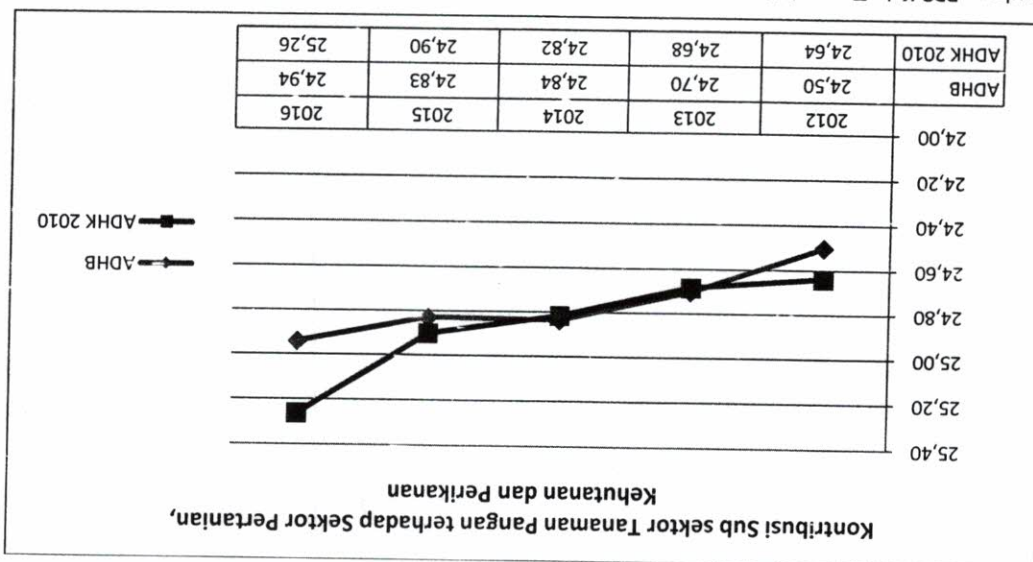
Sub sektor hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis karena punya nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain fungsi ekonomi tersebut tanaman hortikultura mempunyai nilai kalori cukup tinggi, merupakan sumber vitamin, mineral, serat alami dan anti oksidan, sehingga selalu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber pangan maupun nutrisi serta berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Melihat manfaat dan fungsinya dapat dikatakan hortikultura dapat diandalkan untuk memajukan perekonomian daerah. Komoditas hortikultura mencakup tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias (florikultura) dan tanaman bahan obat (biofarmaka). Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

**2.3.3.3.2. Tanaman Hortikultura**

Kontribusi sub sektor tanaman pangan perlu terus ditingkatkan, mengingat tanaman pangan merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu dijaga ketersediaannya sepanjang tahun.

**Gambar 2.13**  
**Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2012-2016**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017 (Data diolah)



Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang telah mampu berkontribusi bagi pembangunan. Komoditas ini juga sangat potensial dan prospektif untuk diusahakan karena metode pembudidayaan cenderung mudah dan sederhana. Kegiatan usaha tani buah-buahan juga berperan besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan komoditas tersebut memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lainnya.

**Tabel 2.60**  
**Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Alpukat	745,05	754,55	424,95	814,93
	Produksi (Ton)	816,15			
2	Mangga	62,88	62,88	64,10	74,08
	Produktivitas (Kw/Ha)	1.194,00			
3	Duku	72,64	72,64	73,43	76,47
	Produktivitas (Kw/Ha)	310,49			
3	Duku	417,03	417,29	239,75	310,17
	Produksi (Ton)	45,00			
4	Jeruk	43,06	43,06	44,40	44,95
	Produktivitas (Kw/Ha)	3.312,19			
4	Jeruk	4.982,23	5.010,24	4.874,21	3.132,07
	Produksi (Ton)	145,01			
5	Salak	142,83	142,83	145,50	144,86
	Produktivitas (Kw/Ha)	471,50			
5	Salak	140,27	140,39	277,54	471,03
	Produksi (Ton)	50,70			
6	Durian	40,63	40,63	41,14	50,65
	Produktivitas (Kw/Ha)	5.819,42			
6	Durian	6.118,68	6.123,78	5.813,92	5.819,42
	Produksi (Ton)	98,46			
7	Jambu Air	94,50	94,50	96,37	96,46
	Produktivitas (Kw/Ha)	226,92			
7	Jambu Air	110,82	110,94	140,45	226,68
	Produksi (Ton)	15,76			
8	Pepaya	11,30	11,30	15,46	15,74
	Produktivitas (Kw/Ha)	18,08			
8	Pepaya	43,01	43,27	7,24	18,07
	Produksi (Ton)	58,89			
9	Pisang	54,78	54,77	58,22	58,86
	Produktivitas (Kw/Ha)	2.087,75			
9	Pisang	2.902,71	2.904,24	3.050,23	2.085,67
	Produksi (Ton)	78,76			
10	Nenas	76,34	76,34	79,19	78,68
	Produktivitas (Kw/Ha)	34.857,16			
10	Nenas	32.757,41	32.794,96	33.852,60	34.477,57
	Produksi (Ton)	179,02			
	Produktivitas (Kw/Ha)				

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 2.62.

Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia petani dilakukan pemberdayaan petani melalui penyuluhan. Keberadaan Balai Penyuluhan dan tenaga penyuluh pertanian sangat memegang peranan penting didalam pemberdayaan dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian di daerah ini. Keberadaan kelembagaan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun

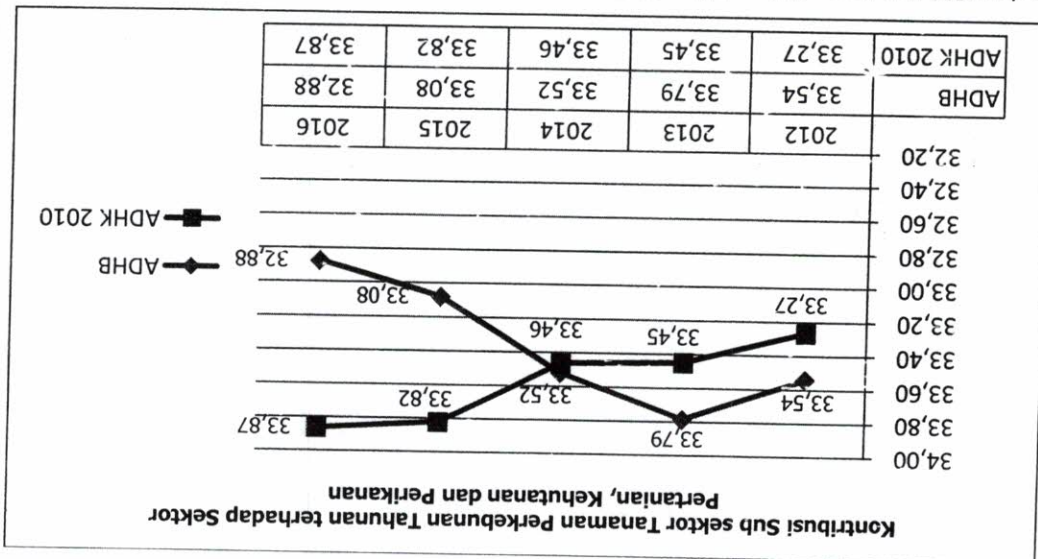
tani).

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpoli serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok

**2.3.3.3.4. Kelembagaan Pertanian**

**Gambar 2.14**  
**Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan Tahunan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2012-2016**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017 (Data diolah)



Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan kehutanan meliputi luas kawasan hutan yang terdapat di daerah ini, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan kerusakan kawasan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi sub sektor kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB tahun 2012-2016 ditunjukkan pada gambar berikut.

Hutan merupakan sumber daya alam terbahari yang dari aspek ekonomi menjadi harapan untuk menjawab kelangkaan pangan, air, pangan, pakan dan energi; peran *carbon sink/stock* dalam perubahan iklim global dan pendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dalam masa krisis keuangan global serta penanggulangan kemiskinan untuk mencapai Millennium Development Goals. Dari aspek sosial menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha berdasarkan kearifan lokal berupa *agro forestry* atau perhutanan sosial, sumber pangan, energi, air dan *biofarma* serta religi dan budaya. Sedangkan dari aspek lingkungan hidup, hutan adalah pendukung kehidupan flora dan fauna sebagai sumber keanekaragaman genetik asli, pengendalian tata air, keseimbangan hara mineral dan penyerap CO<sub>2</sub> di udara dan menyimpannya (*carbon stock*) dalam bentuk batang kayu, ranting dan daun (*biomassa*).

### 2.3.3.4. Bidang Urusan Kehutanan

Tabel 2.63 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB meningkat.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
B.	PDRB Atas Harga Konstan 2010 (ADHK 2000) (%)					
	7. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,88	0,93	0,95	0,96	0,96
	1. Tanaman Pangan	24,64	24,68	24,82	24,90	25,26
	2. Tanaman Hortikultura Semusim	1,06	1,08	1,10	1,01	1,02
	3. Perkebunan Semusim	2,39	2,54	2,58	2,71	2,74
	4. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	18,39	18,46	18,57	18,25	18,02
	5. Perkebunan Tahunan	33,27	33,45	33,46	33,82	33,87
	6. Peternakan	6,31	6,32	6,34	6,35	6,37
	7. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,86	0,86	0,87	0,89	0,89

magnesit 0,005 juta ton. Pada tahun 2013, PDRB sub sektor pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara (ADHK 2000) sebesar 0,08 persen.

Pemenuhan bahan bakar untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dilayani melalui 4 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan pelayanan energi listrik dilaksanakan oleh PT. PLN Distribusi Wilayah Sumatera Utara, pada tahun 2012 terdapat 30.419.679 KWh energi listrik yang terpakai untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan orang pelanggan, dimana terdapat pelanggan rumah tangga sebanyak 29.282 rumah tangga. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) adalah 83 persen pada tahun 2013. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus dipayakan pada tahun yang akan datang, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus dipayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN ataupun Non PLN.

### 2.3.3.6. Bidang Urusan Perdagangan

Pengembangan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur perekonomian antara sektor pertanian dan sektor industri, perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jenis usaha pada umumnya merupakan industri skala kecil/kerajinan menengah. Berdasarkan kelompok usaha industri, terdapat lima kelompok usaha industri yaitu pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum, serta logam.

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Industri Kecil Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2012-2016**

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pangan					
	1. Unit Usaha (Unit)	645	647	647	652	656
	2. Tenaga Kerja (Orang)	1.828	2.243	1.830	1.835	1.839
B.	Sandang dan Kulit					
	1. Unit Usaha (Unit)	2.243	2.243	2.245	2.248	2.251
	2. Tenaga Kerja (Orang)	4.226	4.226	4.228	4.231	4.234
C.	Kimia dan Bahan Bangunan					
	1. Unit Usaha (Unit)	167	167	169	169	169
	2. Tenaga Kerja (Orang)	569	569	571	571	571
D.	Kerajinan					
	1. Unit Usaha (Unit)	311	311	311	311	311
	2. Tenaga Kerja (Orang)	657	657	659	659	659
E.	Jumlah					
	1. Jumlah Unit Usaha (Unit)	3.366	3.368	3.618	3.626	3.633
	2. Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	7.280	7.695	7.691	7.697	7.704

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**2.3.4.2. Perencanaan**

Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2013, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2009-2013 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis perlu semakin ditingkatkan. Penyusunan RPJMD harus mengacu pada penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**Tabel 2.66 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Keterangan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Dokumen Renstra SKPD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Dokumen RKPDP yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Dokumen Perubahan RRPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Dokumen Renja SKPD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

Penyusunan dokumen perencanaan perlu memperhatikan pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu : (1) tata pemerintahan yang amanah (*good governance*); (2) peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi 15 urusan wajib yang targetnya harus disusun oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara; (3) perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* dan penganggaran responsif gender, serta (4) memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.







No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui	Belum Tercapai
					2012	2013	2014	2015	2016		
	Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai RTW Kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	2014	60	80	85	90	95	Belum tercapai	Belum tercapai
		Tertaksananya penjarangan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang	100	2014	85	87	89	92	95	Belum tercapai	Belum tercapai
		Tertaksananya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR W kb/kota beserta rencana rincinya	90	2014	70	80	85	90	95	tercapai	tercapai
		Tertaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penata ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100	2014	85	87	89	93	95	Belum tercapai	Belum tercapai
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.									
VIII	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan										
	Penanganan/pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	0	0	0	0	11	Belum tercapai	Belum tercapai
	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh sasaran program 100%	100%	2014	53	58	52	36	44	Belum tercapai	Belum tercapai
	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75%	2014	0	0	0	0	0	Belum tercapai	Belum tercapai
	kekerasan korban anak perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75%	2014	0	0	0	0	0	Belum tercapai	Belum tercapai

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui
					2012	2013	2014	2015	2016	
X	Perumahan Rakyat	atau trayek antar Kab/kota dalam Provinsi yang memiliki alur pelayanan.								
		Rumah layak huni dan terjangkau	100 %	70	75	80	85	90	Belum tercapai	
		Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100 %	2009 - 2025	75	80	85	90	95	Belum tercapai
		umum sarana dan utilitas dengan prasarana, yang di dukung								
XI	Permodalan	Pelayanan Modal Terselenggaranya pelayanan perzinan dan penanaman modal non perzinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP) di bidang penanaman modal	100%	2014	75	82	85	91	95	Belum tercapai
XII	Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	90	2015	80	82	84	86	90	Belum tercapai
		Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	50	52	54	56	58	Belum tercapai
		Distribusi dan Akses Pangan	90	2015	80	82	84	86	89	Belum tercapai
		Akses Pangan di Daerah Pasokan, Harga dan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	2015	82	84	86	88	90	Belum tercapai
		Pengeneragaman dan Keamanan Pangan	90	2015	81	86	92	94	95	Belum tercapai
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	70	72	74	76	78	Belum tercapai
		Keamanan Pangan Daerah	60	2015	62	64	66	68	70	Belum tercapai
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	70	72	74	76	78	Belum tercapai
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	70	72	74	76	78	Belum tercapai
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	70	72	74	76	78	Belum tercapai
XIV	Lingkungan Hidup	Jenis pelayanan mutu air	100	2013	80	85	86	89	92	Belum tercapai
		Persentase Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	80	85	86	89	92	Belum tercapai
		Pelayanan Tindakan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau persusutan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	82	85	88	93	96	Belum tercapai
		Persentase Jumlah Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau persusutan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	82	85	88	93	96	Belum tercapai
		Persentase Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	80	85	86	89	92	Belum tercapai
		Persentase Jumlah Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau persusutan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	82	85	88	93	96	Belum tercapai
		Persentase Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	80	85	86	89	92	Belum tercapai
		Persentase Jumlah Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau persusutan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	82	85	88	93	96	Belum tercapai
		Persentase Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	80	85	86	89	92	Belum tercapai
		Persentase Jumlah Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau persusutan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	82	85	88	93	96	Belum tercapai

**Tabel 2.70**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019**

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
1.1	PDRB ADHB	6.169.157,86	5.855.644,46	6.894.033,91	6.300.290,07	7.739.931,87	8.712.841,31	9.797.590,05			
1.2	PDRB ADHK	2.164.246,35	4.869.478,21	2.307.086,61	5.070.194,85	2.462.814,95	2.632.749,19	2.820.990,75			
1.3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	6,25	5,11	6,60	4,81	4,5 - 4,7	4,7 - 5,0	5,00			
1.4	PDRB ADHB per Kapita	21.154.017,77	19.957.843,95	23.429.944,11	21.312.628,59	26.136.247,86	29.231.1746	32.531.670,94			
1.5	Jumlah Penduduk	291.777	293.399	294.652	295.613	297.554	300.485	303.445			
1.6	Tingkat Kemiskinan	11,50	11,41	11,30	11,25	11,00	10,50	10,00			
1.7	Angka Pengangguran	1,53	0,25	1,51	1,51	1,49	1,47	1,45			
1.8	Indeks Pembangunan Manusia	71	71,32	71,50	99,22	71,80	72,00	72,30			
1.9	Angka Melek Huruf	99,65	98,23	99,66	99,22	99,67	99,68	99,69			
1.10	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,60	9,31	10,80	9,32	11,10	11,40	12,00			
1.11	Angka Harapan Hidup	70,57	67,50	70,98	70,98	69	69,5	70			
1.12	Persentase Balita Gizi Buruk	1,00	0,09	0,80	0,80	0,1	0,60	0,45			
1.13	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,50	7,41	7,80	7,91	9,00	12,00	15,00			
1.14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
1.15	Jumlah Penduduk dibawah Garis Kemiskinan										
1.16	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>											
<b>1. Pendidikan</b>											
<b>1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>											
1.1.1	Jumlah Sekolah PAUD	30	120	30	194	30	30	30			

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.3.5	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,65	86,31	99,75	93,22	99,85	99,95	100			
1.3.6	APK SMA/SMK/MA	88,18	91,41	89,06	91,46	89,98	90,86	90,86			
1.3.7	APM SMA/SMK/MA	70,99	75,45	71,70	71,70	75,73	73,14	73,14			
<b>1.4</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>										
1.4.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,20	0,02	0,18	0,02	0,01	0,01			
1.4.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,12	0,32	0,10	0,23	0,08	0,06	0,05			
1.4.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,56	0,32	0,44	0,26	0,20	0,16			
<b>1.5</b>	<b>Angka Kelulusan</b>										
1.5.1	Angka Kelulusan SD/MI	100	95,56	100	96,80	100	100	100			
1.5.2	Angka Kelulusan SMP/MTS	100	95,56	100	97,30	100	100	100			
1.5.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	93,56	100	96,44	100	100	100			
<b>1.6</b>	<b>Angka Melanjutkan</b>										
1.6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	100	99,94	100	99,96	100	100	100			
1.6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	99,60	98,95	100,09	99,70	100,59	101,10	101,00			
<b>1.7</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>										
1.7.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SD/MI	62,33	42,37	71,52	46,71	80,53	89,34	97,97			
1.7.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D Tingkat SMP/MTS	83,90	86,62	87,97	90,22	92,02	95,88	99,66			
1.7.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D Tingkat SMA/SMK/MA	93,07	93,49	93,35	95,40	93,63	93,91	94,18			

No.	Indikator	Target Tahun Ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
4.	<b>Perumahan</b>										
4.1	Rumah Layak Huni	43	88,10	45	88,75	90	90,50	91,00			
4.2	Rumah Tidak Layak Huni	3	11,90	2,5	11,25	10	9	9			
4.3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	68,00	78,41	75,00	81,00	90	95	100			
4.4	Jumlah Data Bidang tanah										
4.5	Jumlah Sengketa/Konflik Tanah yang dimediasi						13.522	20.000			
5	<b>Sosial</b>						24	48			
5.1	Jumlah Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	1	1	1	1	1	1	1			
5.2	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	78,02	0,68	81,02	12,8	88,02	89,75	90,25			
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>											
1	<b>Ketenagakerjaan</b>										
1.1	Angka Partisipasi Angkatan kerja	86,20		87,25		88,33	89,56	89,89			
1.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	86,20		87,25		88,33	89,56	89,89			
1.3	Rasio Penduduk Bekerja	86,20		87,25		88,33	89,56	89,89			
2	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	7,09	6,66	7,32	4,95	7,55	7,77	7,98			
2.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	10,91	93,74	11,80	95,05	12,73	13,73	14,79			
2.3	Rasio KDRT	0,03	0,019	0,03	0,006	0,02	0,02	0,02			
2.4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	0	0	0	0	0	0	0			
2.5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	17,67	74,51	17,68	87,54	17,69	17,69	17,69			

No.	Indikator	Target Tahun ke											
		2015		2016		2017		2018		2019			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	100		100		100		100		100	
<b>6. Perhubungan</b>													
6.1	Jumlah Arus Perumpong Angkutan Umum												
6.1.1	Jumlah penumpang bus dan minibus	2.675.000	2.691.750	2.750.000	2.721.000	2.775.000	2.850.000	2.870.000					
6.1.2	Jumlah Penumpang Kapal Danau	22.400	9.750	22.430	9.850	22.520	22.520	22.600					
6.1.3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	17.900	17.685	18.000	153.135	18.500	19.000	20.000					
6.2	Rasio Uji Trayek terhadap Jumlah Penduduk	0,00101	0,00098	0,00104	0,00098	0,00106	0,00110	0,00114					
6.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.255	1.205	1.274	1.076	1.295	1.316	1.331					
6.4	Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis												
6.4.1	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1	1	1					
6.4.2	Jumlah Pelabuhan Danau	1	1	1	2	2	2	3					
6.4.3	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	3					
6.5	Jumlah Angkutan Darat	1.434	1.415	1.459	1.437	1.524	1.559	1.600					
6.6	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	30	30	30	30	30	30	30					
<b>7. Kependudukan dan Catatan Sipil</b>													
7.1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk	45,5	50,90	50,5	55,59	65,3	80,5	100					
7.2	Rasio Pasangan Berakte Nikah	6,03	6,38	6,84	6,92	7,75	8,78	9,97					
7.3	Persentase Kepemilikan KTP	82,84	74,36	87,16	81,48	91,47	95,75	100,00					
7.4	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
7.5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah					

No.	Indikator	Target Tahun ke																			
		2015		2016		2017		2018		2019											
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi										
<b>10.</b>	<b>Perizinan dan Penanaman Modal</b>																				
<b>10.1</b>	<b>Perizinan</b>																				
	Jumlah Izin Yang diterbitkan :																				
	- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	180	237	185	327	191	198														207
	- Izin usaha industri (IUI)	2	0	5	0	7	10														15
	- Tanda daftar industri (TDI)	2	3	6	52	7	9														13
	- Izin mendirikan bangunan (IMB)	73	76	104	77	112	134														169
	- Izin gangguan (HO)	997	1.135	1.099	1.204	1.117	1.208														1.422
	- Waktu penerbitan surat izin:																				
	- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	5	4	4	4	3	3														2
	- Izin usaha industri (IUI)	7	5	6	5	5	5														4
	- Tanda daftar industri (TDI)	5	5	4	4	4	3														3
	- Izin mendirikan bangunan (IMB)	7	5	6	5	5	4														4
	- Izin gangguan (HO)	4	4	4	4	4	3														3
<b>10.2</b>	<b>Penanaman Modal</b>																				
	Jumlah Investasi (PMDN/PMDA)	3	8	3	15	26	30														40
	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMDA)	5,00	5,00	5,00	6,00	9,00	9,50														10,00
	Pertumbuhan Industri	3.624		3.629		3.634															3.644
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	37	15	41	24	49	56														60
<b>11.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																				
11.1	Jumlah Organisasi Pemuda	14	22	16	22	18	20														22
11.2	Jumlah Kegiatan Pemuda	5	4	6	6	7	8														9
11.3	Jumlah Organisasi Olah Raga	17	20	19	24	21	23														25

No.	Indikator	Target Tahun ke													
		2015		2016		2017		2018		2019					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
15.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>														
15.1	Jumlah Provider Telepon Seluler	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
15.2	Jumlah Menara Telekomunikasi	95	95	107	107	109	107	111	111	113	113	113	113	113	113
15.3	Rasio Warnet terhadap Penduduk	0,075	0,075	0,075	0,075	0,077	0,075	0,083	0,083	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
15.4	Jumlah Stasiun Penyiaran Radio	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15.5	Webseite Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>															
2.1	<b>Pertanian</b>														
2.1.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal														
2.1.1.1	Lainnya per Hektar														
	Padi Sawah	150,000	148,132	165,000	151,335	154,300	151,335	157,500	151,335	160,600	157,500	160,600	157,500	160,600	157,500
	Padi Ladang	58,00	58,54	58,00	58,70	58,75	58,75	59,00	59,00	59,25	59,00	59,25	59,00	59,25	59,25
	Jagung	8,600	12,446	8,800	19,577	9,100	19,577	9,500	9,500	10,000	9,500	10,000	9,500	10,000	9,500
	Jagung	25,75	34,62	25,85	45,21	25,95	45,21	26,10	26,10	26,50	26,10	26,50	26,10	26,50	26,50
	Jagung	21,950	14,866	22,450	37,246	23,150	37,246	24,150	24,150	25,150	24,150	25,150	24,150	25,150	25,150
	Kecacing tanah	48,55	34,52	48,60	52,95	48,75	52,95	49,00	49,00	49,50	49,00	49,50	49,00	49,50	49,50
	Kecacing tanah	3,750	2,600,99	4,150	2,654,82	2,700	2,654,82	2,750	2,654,82	2,800	2,654,82	2,800	2,654,82	2,800	2,800
	Ubi Kayu	17,9	18,35	18,00	19,75	19,90	19,90	20,00	20,00	20,10	20,00	20,10	20,00	20,10	20,10
	Ubi Kayu	41,000	32,123,11	41,800	23,659,38	24,000	23,659,38	24,500	24,500	25,000	24,500	25,000	24,500	25,000	25,000
	Ubi Kayu	177,25	179,61	177,35	186,44	188,50	186,44	191,00	191,00	19,50	191,00	19,50	191,00	19,50	19,50
	Ubi Jalar	11,480	11,829,56	11,750	14,198,29	12,050	14,198,29	12,400	12,400	12,900	12,400	12,900	12,400	12,900	12,900
	Ubi Jalar	105,96	105,94	106,10	161,34	106,32	161,34	106,61	106,61	107,00	106,61	107,00	106,61	107,00	107,00
2.1.2	Produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura														
	Cabai Merah	6,120	6,241,71	6,650	6,684,29	6,690	6,684,29	6,720	6,720	6,750	6,720	6,750	6,720	6,750	6,750
	Cabai Merah	54,51	54,51	55,60	55,57	55,65	55,57	55,65	55,65	55,70	55,65	55,70	55,65	55,70	55,70
	Bawang Merah	490	500,74	530	541,55	545	541,55	555	555	565	555	565	555	565	565
	Bawang Merah	71,53	71,53	74,18	74,18	74,50	74,18	74,60	74,60	74,70	74,60	74,70	74,60	74,70	74,70
	Jeruk	3,120	3,129,07	3,130	3,132,19	3,200	3,132,19	3,350	3,350	3,600	3,350	3,600	3,350	3,600	3,600
	Jeruk	144,86	144,86	145,01	145,01	145,10	145,01	145,15	145,15	145,20	145,15	145,20	145,15	145,20	145,20

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
2.1.6	Jumlah gabungan kelompok tani (gapoktan)	80	181	82	203	85	85	87	90		
2.1.7	Jumlah WKPP	184	132	185	127	168	168	168	200		
2.1.8	<b>Populasi Ternak</b>										
	Kerbau	9.342	9.339	9.346	9.527	9.550	9.575	9.600	9.600		
	Sapi	440	438	445	444	450	460	470	470		
	Kambing	1.880	1.877	1.915	1.919	1.925	1.930	1.975	1.975		
	Babi	60.200	60.311	61.650	61.679	61.879	62.050	62.350	62.350		
	Ayam	425.300	425.305	427.600	427.822	428.850	430.000	432.000	432.000		
	Itik	32.100	32.114	32.600	32.700	33.200	33.500	34.000	34.000		
2.1.9	<b>Kebutuhan Pupuk Bersubsidi</b>										
	Urea	4.340	4.340	4.290	4.290	4.160	4.380	4.680	4.680		
	Sp-36	2.110	2.110	1.907	1.907	1.730	1.892	1.964	1.964		
	ZA	1.427	1.427	1.239	1.239	1.223	1.236	1.240	1.240		
	NPK	4.504	4.504	5.416	5.416	4.890	4.984	5.130	5.130		
	Organic	792		1.605		1.130	1.120	1.128	1.128		
2.1.10	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>										
	Traktor Besar (Roda 4)	4	4	6	7	9	10	14	14		
	Traktor Mini	2	2	7	7	10	12	15	15		
	Combine Harvester	5	5	13	13	15	17	19	19		
	Hand Traktor	65	65	125	125	257	280	310	310		
	Hand Traktor	45	45	85	85	122	135	150	150		
	Mesin Pemipi Jagung (corn sheller)	20	20	28	28	36	50	75	75		

No.	Indikator	Target Tahun Ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
2.4.8	Konsumsi Susu perkapita	8,30	0,81	9,11	0,82	9,99		10,96		12,02	
2.4.9	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	2,10	2,98	2,00	3,01	1,89		1,78		1,67	
2.4.10	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,71	0,43	0,71	0,43	0,71		0,71		0,71	
<b>2.5</b>	<b>Parwisata</b>										
2.5.1	Jumlah Wisatawan	108.000	108.117	118.000	115.110	128.000		138.000		148.000	
<b>2.6</b>	<b>Perdagangan</b>										
2.6.1	<b>Perdagangan</b>										
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,98	13,10	16,15	12,61	15,33		16,50		16,68	
	Jumlah Lokasi Pasar Lelang	-	-	-	2	3		3		3	
	Jenis Komoditi Pasar Lelang	-	-	-	1	2		2		3	
<b>2.6.2</b>	<b>Perindustrian</b>										
2.6.2.1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	1,68	1,95	1,85	2,01	1,85		1,93		1,98	
2.6.2.2	Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,43	1,95	1,40	2,01	1,37		1,34		1,32	
2.6.2.3	Pertumbuhan Industri.	0,14		0,14		0,15		0,16		0,17	
	a. Industri pangan										
	1) Jumlah perusahaan	652	651	656	659	666		675		683	
	2) Jumlah tenaga kerja	1.835	1.834	1.839	1.843	1.849		1.858		1.866	
	b. Industri sandang & kulit										
	1) Jumlah perusahaan	2.248	2.246	2.251	2.256	2.255		2.264		2.270	
	2) Jumlah tenaga kerja	4.231	4.232	4.233	4.236	4.238		4.247		4.253	
	c. Industri kimia & bahan bangunan										
	1) Jumlah perusahaan	168	169	170	186	173		178		187	

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi semakin besarnya tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang terdiri atas pelayanan publik, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin besar, maka dibutuhkan anggaran yang lebih besar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan terutama untuk membiayai urusan yang menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan tersebut diikuti dengan desentralisasi fiskal dimana Pemerintah Pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan adanya regulasi tersebut, secara perlahan-lahan penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekalipun pada awalnya sempat mengalami penurunan akibat dipangkasnya beberapa jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggap kontra produktif dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Hasil pengelolaan pendapatan daerah yang terus membaik harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena itu, upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan tidak boleh menghambat arus lalu lintas barang/jasa/penduduk dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Aturan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan tersebut, ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara diuraikan sebagai berikut.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

##### **3.1.1.1 Pendapatan**

Secara garis besar pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Selama Tahun Anggaran 2012-2016, realisasi pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp. 680.478.960.176,85 pada Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp. 1.197.878.363.798,45 pada Tahun Anggaran 2016.

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
	2) Jumlah tenaga kerja	575	571	586	588	704		733	785		
	d. Industri kerajinan										
	1) Jumlah perusahaan	312	246	315	246	320		328	341		
	2) Jumlah tenaga kerja	662	406	677	406	701		746	827		
	e. Industri logam										
	1) Jumlah perusahaan	246	311	246	347	250		254	411		
	2) Jumlah tenaga kerja	403	659	403	700	407		259	416		
2.6.3	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,68	1,95	1,85	2,01	1,85		1,93	1,98		

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Mesin Kompos	8	8	16	16	27		40		55	
	Power Thresher	15	15	30	30	30		40		50	
	Mesin pengupas Kulit Kopi	-	-	-	-	41		50		60	
	Alat Panen Padi Sederhana	-	-	-	-	100		200		300	
	Cultivator	-	-	-	-	28		35		45	
	Alat Tanam Jagung	-	-	-	-	50		100		150	
	Power Sparayer	-	-	-	-	-		30		60	
<b>2.2</b>	<b>Kehutanan</b>										
2.2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,17		0,26		0,35		0,44		0,53	
2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	7,11		7,08		7,05		7,02		6,55	
2.2.3	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,45		0,41		0,37		0,34		0,30	
<b>2.3</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>										
2.3.1	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan terhadap PDRB	0,19		0,20		0,20		0,21		0,21	
<b>2.4</b>	<b>Perikanan dan Peternakan</b>										
2.4.1	Produksi Perikanan Budi daya	1.979,60	1.399,10	2.078,50	1.402,40	2.182,50		2.291,60		2.406,20	
2.4.2	Konsumsi Ikan perkapita	20,50	20,50	20,70	20,90	20,90		21,10		21,30	
2.4.3	Produksi Daging	1.104,06	1.343,46	1.146,11	1.396,44	1.190,09		1.235,87		1.283,65	
2.4.4	Konsumsi Daging perkapita	6,28	4,62	6,67	6,80	7,09		7,54		8,03	
2.4.5	Produksi Telur	96.608,39	122.960,47	96.833,05	1.542.576,00	97.559,30		98.290,09		99.028,17	
2.4.6	Konsumsi Telur perkapita	8,30	5,24	9,11	6,96	9,99		10,96		12,02	
2.4.7	Produksi Susu	235.917,93	236.007,00	238.277,11	238.367,23	240.659,88		243.066,48		245.497,14	

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
	Alpukat	812	814,93	816	816,15	817	821	819	821	821	
		74,08	74,08	72,87	72,87	74,00	74,50	74,20	74,20	74,50	
	Nenas	34.400	34.477,57	34.800	34.857,16	34.860	34.865	34.862	34.862	34.865	
		178,84	178,84	179,02	179,02	179,05	179,10	179,08	179,08	179,10	
	Durian	5.815	5.819,42	5.818	5.819,42	5.820	5.823	5.821	5.821	5.823	
		96,46	96,46	96,46	96,46	96,50	96,55	96,55	96,55	96,60	
	Mangga	1.190	1.192,92	1.193	1.194	1.195	1.197	1.197	1.197	1.199	
		76,47	76,47	76,54	76,54	76,55	76,55	76,56	76,56	76,57	
2.1.3	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar										
	Karet	5.000	5.437,10	5.100	5.437,65	5.300	5.600	5.600	5.600	6.050	
		597,45	668,40	597,55	667,13	597,67	597,85	597,85	597,85	598,25	
	Kemanyan	3.975	3.660,75	4.060	3.661,10	3.661,50	3.661,85	3.661,85	3.661,85	3.662,15	
		250,65	262,47	250,70	262,50	262,55	262,58	262,58	262,58	262,80	
	Kopi Arabika	21.950	10.891,13	22.450	10.932,06	23.150	11.000	11.000	11.000	11.500	
		1.072	1078,65	1.119	1079,02	1.131	1.079,05	1.081,10	1.081,10	1.081,10	
	Kopi Robusta	3.83	546,90	3.83	546,93	3.83	150,11	150,11	150,11	155,5	
		625,99	517,66	626,10	517,69	626,28	626,36	626,36	626,36	627,50	
	Kelapa	277	253,15	280	253,17	253,20	253,29	253,24	253,24	253,29	
		1.128	1.120,88	1.132	1.120,97	1.121,00	1.121,12	1.121,12	1.121,12	1.121,15	
	Kakao	1.100	1.404,05	1.160	1.404,20	1.240	1.250	1.250	1.250	1.350	
		576,06	718,18	576,17	718,26	576,43	576,59	576,59	576,59	577,00	
	Kulit Manis	1.365	1.126,05	1.390	1.126,15	1.126,27	1.126,39	1.126,39	1.126,39	1.126,54	
		5.832,16	5.710,19	5.847,43	5.710,70	5.710,95	5.711,38	5.711,38	5.711,38	5.712,00	
	Kemiri	225,23	216,55	232,91	216,55	216,65	217,00	217,00	217,00	217,25	
		783,21	782,48	786,11	782,48	783,12	783,32	783,32	783,32	787,65	
	Aren	175,15	174,20	181,20	174,28	174,35	144,75	144,75	144,75	145,50	
		640,55	643,40	643,14	643,69	643,91	644,20	644,20	644,20	644,50	
	Tembakau	160,15	428,87	165,32	433,13	176,67	195,44	195,44	195,44	215,65	
		1.136,21	1.170,00	1.200,08	1.125,00	1.253,42	1.345,32	1.345,32	1.345,32	1.555,21	
2.1.4	Jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL)	155	132	160	127	168	168	168	168	200	
2.1.5	Jumlah kelompok tani (poktan)	1.880	2.092	1.885	2.126	1.885	1.900	1.900	1.900	2.000	

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.4	Rasio Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) terhadap Jumlah Penduduk	0,01	0,06	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	
11.5	Rasio Lapangan Olah Raga	0,04	0,16	0,04	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
11.6	Jumlah Kegiatan Olah Raga	6	7	8	7	10	12	12	14	14	
11.7	Jumlah Grup Kesenian	1,03		1,02		1,24	1,33	1,48	1,48	1,48	
11.8	Jumlah Gedung Kesenian	0,14		0,24		0,34	0,43	0,53	0,53	0,53	
11.9	Jumlah Klub Olahraga	0,58	0,67	0,64	0,74	0,78	0,80	0,85	0,85	0,85	
11.10	Jumlah Gedung Olahraga	0,14	0	0,24	0	0	0,03	0,03	0,03	0,03	
<b>12.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>										
12.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
12.3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	3,08	0,04	3,39	0,04	4,37	5,66	6,59	6,59	6,59	
12.4	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	90	61	100	66	130	170	200	200	200	
<b>13.</b>	<b>Statistik</b>										
13.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
13.2	Buku PDRB Kabupaten	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>14.</b>	<b>Kearsipan</b>										
14.1	Pengelolaan Arsip secara Baku	100	0	100	0	0	20	40	40	40	
14.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	0	0	1	1	1	1	
14.3	Jumlah perpustakaan	56	56	61	61	66	71	76	76	76	
14.4	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	26.464	26.464	27.464	27.464	28.275	28.775	29.275	29.275	29.275	

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.6	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	57,22	80,43	60,21	76,54	75,33	85,11	85,11	100		
7.7	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran/satuan Penduduk	25,52	28,27	44,12	34,73	45,32	50,26	50,26	55,65		
7.8	Persentase kepemilikan Akte Kematian berdasarkan keluarga cerai mati	5,1	7,20	7,2	19,31	13,33	16,66	16,66	20,20		
7.9	Persentase kepemilikan Akte Perceraian berdasarkan keluarga cerai hidup	1,3	13,86	3,6	19,12	19,42	19,52	19,52	20,04		
<b>8. Keluarga Berencana</b>											
8.1	Jumlah Anak per Keluarga	4	4	4	4	4	4	4	4		
8.2	Rasio Akseptor KB	74,96	66,94	76,88	72,55	79,00	81,08	81,08	83,13		
	Jumlah Peserta KB Aktif					20.000	23.000	23.000	26.000		
8.3	Cakupan peserta KB aktif	74,96	66,12	76,88	69,29	79,00	81,08	81,08	83,13		
	Jumlah Peserta KB Baru					2.800	3.000	3.000	3.200		
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,08	10,98	4,10	10,8	4,13	4,16	4,16	4,19		
8.5	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) berKB	171	145	173	147	150	155	155	160		
8.6	Cakupan Peserta PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	451	150	456	125	135	135	135	140		
<b>9. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>											
9.1	Persentase Koperasi Aktif	43,06	22,22	45,50	21,26	22,62	23,54	23,54	24,10		
9.2	Jumlah koperasi aktif		102	98	7,06	188	195	195	205		
9.3	Pertumbuhan volume usaha koperasi		29,76		0,98	3,12	3,45	3,45	4,02		
9.4	Pertumbuhan aset koperasi		5,00		2,17	2,42	2,50	2,50	2,54		
9.5	Persentase Koperasi Wanita Aktif	2,48	2,18	2,50	2,17	2,51	2,54	2,54	2,55		
9.6	Pertumbuhan Jumlah UMKM	20,04	21,03	16,70	16,24	11,79	15,02	15,02	27,25		
9.7	Jumlah Produk Unggulan UMKM	3	5	5	6	6	6	6	7		

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
2.6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	2,51	38	2,51	35	3,00	3,41	4,00			
<b>3</b>	<b>Pangan</b>										
3.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.2	Ketersediaan Cadangan Pangan	10	58.618,33	20	63.325,71	64.000	64.500	64.800			
3.3	Konsumsi pangan	1859	1.718,10	1887	1.801,30	1916	1.944	1.972			
3.4	Konsumsi Ketersediaan Energi dan Protein										
	a. Energi	1.859	1.718,10	1.887	1.801,30	1.916	1.944	1.972			
	b. Pangan	55	52,20	55	52,70	56	56	57			
3.5	Ketersediaan Energi dan Protein										
	a. Energi	4.475	4.837	4.500	5.607	4.900	5000	5500			
	b. Pangan	200	161,98	200	170,96	220	220	250			
3.6	Konsumsi Beras	78	80,20	79,5	81	80,50	83,50	85			
3.7	Pemberdayaan desa rawan pangan	15	15	15	15	15	15	15			
3.8	Kelompok Lumbung Pangan	5	5	6	5	5	5	5			
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
4.1	Persentase penanganan sampah	25,45	25,45	25,45	28,42	30	33	37			
4.2	Luas Ruang Terbuka Hijau	621,32	610,70	632,45	625,70	610,42	610,42	610,42			
4.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	0,65	1,17	0,75	1,39	0,84	0,94	1,03			
<b>5.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>										
5.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	

No.	Indikator	Target Tahun ke																		
		2015		2016		2017		2018		2019										
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target											
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>																			
2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	1,18	11,94	1,07	12,53	13,43	13,83	14,03												
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,29	0,27	0,29	0,27	0,28	0,28	0,28												
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003												
2.4	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0,45	0,32	0,48	0,30	0,48	0,35	0,38												
2.5	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	7,54	2,79	49,05	2,79	2,88	3,00	3,08												
2.6	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	91	82	92	83	84	85	86												
2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	76,2	100	88,9	92,2	93,2	95,8												
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100												
2.9	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	977	903	977	977	934	977	977												
2.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100	47,08	100	46,72	30	30	30												
2.11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100												
2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	92	92	94	94	96	98	100												
2.13	Cakupan Puskesmas	126,67	126,67	126,67	133,33	133,33	133,33	133,33												
2.14	Cakupan Pembantu Puskesmas	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	24,21												
<b>3.</b>	<b>pekerjaan Umum</b>																			
3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	44	80,07	46	61,15	62	62,8	65												
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	9,12	10,27	10,92	72,30	72,24	72,25	72,30												
3.3	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,010	27,39	0,010	27,01	27,81	27,42	27,02												
3.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,65		0,75		0,84	0,94	1,03												

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1.1.2	Jumlah Siswa PAUD	3.825	3.950	4.425	3.265	5.025	5.625	6.225			
1.1.3	Jumlah Guru PAUD	30	500	30	520	520	530	540			
1.1.4	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak	31	31	31	31	31	31	31			
1.1.5	Jumlah Siswa Taman Kanak-kanak	1.326	2.872	1.392	2.872	1.462	1.535	1.612			
1.1.6	Jumlah Guru Taman Kanak-kanak	135	140	142	128	149	156	164			
<b>1.2</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>										
1.2.1a	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	97,32	99,05	98,29	99,13	99,27	100,27	101,27			
1.2.1b	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	95,37	97,07	96,33	97,15	97,29	98,26	98,26			
1.2.2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	74,40	118	73,67	118	72,94	72,22	71,50			
1.2.3	Rasio Guru Terhadap Murid	2.858	1.411	2.749	1.440	2.644	2.544	2.447			
1.2.4	Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata	630	628	627	626	624	618	618			
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)										
	a. APK SD/MI	104,33	105,38	105,38	105,38	105,38	106,43	107,49			
	b. APK SMP/MTs	98,78	97,50	99,77	98,95	100,76	101,76	101,77			
1.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM)										
	a. APM SD/MI	89,28	98,51	90,18	90,18	97,89	91,99	92,91			
	b. APM SMP/MTs	71,63	97,50	72,35	72,35	98,95	73,80	73,80			
<b>1.3</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>										
1.3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	72,31	82,55	73,75	82,62	75,23	76,73	78,27			
1.3.2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	23,40	28,00	23,17	29,00	22,94	22,71	22,49			
1.3.3	Rasio Guru Terhadap Murid	723,18	768,00	695,79	747,00	669,35	643,87	619,27			
1.3.4	Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata	4.729,93	4.730,00	4.725,43	4.729,00	4.728,18	4.723,80	4.726,51			

Selanjutnya dapat kita lihat gambaran umum kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2012-2016.

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui											
					2012	2013	2014	2015	2016												
XV	Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali per tahun	2014	10	11	12	13	14	sesuai										
						Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional	Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	2014	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	sesuai						
										Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya dan/atau media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, prosur, spanduk dan baliho	12 kali per tahun	2014	8	9	11	12	13	Belum tercapai			
													Pengenangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pemberdayaan Cakupan pengembangan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	45	50	55	60	65	melampaui

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui
					2012	2013	2014	2015	2016	
		perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu								
	Pengakuan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	64	86	77	77	91	melampaui
	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	0	0	0	0	0	Belum tercapai
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	0	0	0	0	0	Belum tercapai
<b>IX</b>	<b>Perhubungan</b>									
	Angkutan Jalan									
	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kab/kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilayani	75%	2014	60	65	70	75	75	Belum tercapai
	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kab/kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilayani	60%	2014	70	70	70	70	70	tercapai
	Keselamatan	Terpenuhnya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kab/kota dalam Provinsi	75%	2014	55	60	65	70	75	Belum tercapai
	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kab/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas	75%	2014	49	56	67	73	78	Belum tercapai

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target				Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui																																																																																											
					2012	2013	2014	2015		2016																																																																																										
VII	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya air baku utk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	70	2014	65	70	75	85	87	tercapai																																																																																										
											Jaringan Jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kab/Kota (aksesibilitas)	100	2014	100	100	100	100	100	tercapai																																																																																
																					Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	100	2014	72,92	79,17	80,69	80,07	62,69	Belum tercapai																																																																						
																															Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100	2014	50,06	67,79	73,03	81,23	97,71	Belum tercapai																																																												
																																									Air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90	2014	72	75	81	85	91	Belum tercapai																																																		
																																																			Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	90	2014	71	75	84	87	89	Belum tercapai																																								
																																																													Drainase	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	100	2014	72	75	82	89	95	Belum tercapai																														
																																																																							Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dalam setahun	85	2014	70	75	80	85	90	Belum tercapai																				
																																																																																	Penataan bangunan dan lingkungan	Tersedianya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab/Kota	65	2014	50	55	60	62	65	Belum tercapai										
																																																																																											Jasa Konstruksi	Penerbitan IJUK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyarikat lengkap	90	2014	90	90	90	90	90	tercapai

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui
					2012	2013	2014	2015	2016	
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	61,32	96,43	100	100	100	melampaui
III	Pemerintahan Dalam Negeri	Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk(KTP)	100%	2011	35,90	51,25	82,04	76,52	81,48	Belum tercapai
		Cakupan pemberian kelahiran	100%	2011	23,18	80,27	79,79	97,86	97,32	Belum tercapai
		Cakupan pemberian Kartu keluarga	100%	2011	43,06	46,94	49,95	71,54	76,71	Belum tercapai
	Pemeliharaan Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas (Linmas) di Kab/Kota	50%	2015	12,30	12,30	12,30	15,87	23,81	Belum tercapai
IV	Sosial									
	Pemberian bantuan sosial bagi (PMKS) Skala masalah kesra penyandang sosial bagi Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Pesentse PMKS Skala Kab/Kota yang menyediakan sarana sosial	80 %	2015	30	32	30	34	35	Belum tercapai
	Pelaksanaan kegiatan sosial bagi PMKS Skala Kab/Kota	Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80 %	2015	28	30	32	34	36	Belum tercapai
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana kesejahtereraan sosial	Persentase panti sosial Kab/Kota yang menyediakan sarana kesejahtereraan sosial	80 %	2015	30	31	32	34	35	Belum tercapai
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kab/Kota	Persentase sarana kesejahtereraan sosial menyediakan sarana kesejahtereraan sosial	80 %	2015	30	31	32	33	34	Belum tercapai
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota	Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	80 %	2015	25	20	24	28	30	Belum tercapai
	Evaluasi korban bencana skala Kab/Kota	Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang dievaluasi dengan tanggap darurat lengkap	80 %	2015	24	25	26	24	31	Belum tercapai
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab/Kota	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	2015	32	32	31	34	35	Belum tercapai

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target	Batas Waktu	Realisasi Pencapaian Target					Interpretasi Belum Tercapai, Sesuai, Melampaui
					2012	2013	2014	2015	2016	
		- Angka putus sekolah (APS)	< 1 %	2014	0,69	0,68	0,15	0,12	0,1	Belum Tercapai
		- Jumlah sekolah yang memiliki sarana standar teknis	90 %	2014	55	60	67	74	80	Belum Tercapai
		- Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %	2014	60	60	65	70	80	Belum Tercapai
		- Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %	2014	54,52	54,52	53,63	51,72	52,80	Belum Tercapai
		- Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi secara nasional	90 %	2014	85,77	85,77	92,34	94,59	80,71	Belum Tercapai
		- Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %	2014	61,40	61,40	52,92	49,71	58,17	Belum Tercapai
		- Jumlah siswa per kelas	30-40	2014	30	30	35	32	32	Sesuai
		- Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel standar nasional	90 %	2014	84,00	99,30	99,30	99,40	99,60	melampaui
		- Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70 %	2014	97,32	97,32	99,10	99,20	99,25	melampaui
	SMA/SMK/MA	- Partisipasi anak bersekolah	60 %	2014	75,93	68,56	82,48	82,55	82,62	melampaui
		- Angka putus sekolah (APS)	< 1 %	2014	1,35	1,35	0,5	0,4	0,32	Sesuai
		- Jumlah sekolah yang memiliki sarana standar teknis yang ditetapkan	90 %	2014	35	35	38	40	45	Belum Tercapai
		- Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %	2014	35	35	38	40	45	Belum Tercapai
		- Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %	2014	55,94	55,94	56,63	50,36	54,86	Belum Tercapai
		- Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi secara nasional	90 %	2014	83,46	84,06	88,50	90,01	106,39	melampaui
		- Jumlah siswa per kelas	30-40	2014	35	40	42	40	40	Sesuai
		- Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel standar nasional	90 %	2014	85	90	92	96	99	melampaui
	Pendidikan Non Formal	- Bisa membaca dan menulis	100 %	2014	97,37	97,50	98,64	98,66	98,68	Belum Tercapai

NO	KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.576	2.513	2.496	2.605	2.146
	1. Laki - Laki	3.868	3.808	3.734	3.957	3.435
	2. Perempuan					
2	ASN berdasarkan Jabatan :					
	<b>A. ESELON II</b>	3	3	3	3	3
	1. ASN yg telah mengikuti DIKLATPIM II	30	30	30	30	30
	2. ASN yg belum mengikuti DIKLATPIM II	30	30	30	30	30

**Tabel 2.68**  
**Rekapitulasi Daftar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

keahlian yang dibawanya seseorang yang berkinerja unggul (superior performer). menggambarakan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan

**2.3.4.4. Kepegawaian**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Indikator	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Nilai Opini BPK	WDP	WDP	WTP dengan Paragraf Penjelasan	WTP
	WTP	WTP	WTP	WTP
	2016			

**Tabel 2.67**  
**Nilai Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :  
 Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI pengelolaan pemerintahan. Kerja keas ini membuahakan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Kabupaten Tapanuli Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam

**2.3.4.3. Keuangan**

nasional dan provinsi, maka ke depan penyusunan dokumen perencanaan perlu diwujudkan. berbagai bidang. Untuk itu dalam menjaga sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di kualitas perencanaan pembangunan daerah, pada masa mendatang akan sangat banyak dokumen dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKP, Renja SKPD dan RTRW. Seiring dengan peningkatan tuntutan yang dilaksanakan dapat berjalan efisien, efektif dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah terdiri ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan

## 2.3.4. Urusan Pemerintah Umum Fungsi! Penujangan

### 2.3.4.1. Administrasi! Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan; Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui! Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKPA) dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Program penataan peraturan perundangan di daerah ini dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum telah diterbitkan Peraturan Bupati.

**Tabel 2.65**  
**Peraturan Perundangan yang Diterbitkan Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	3	3	11	10	10
2.	Peraturan Bupati Tapanuli Utara	31	32	44	54	71

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.65 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penataan peraturan perundangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini merupakan penerapan Perda dan Perbup yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah.

Pengaturan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah aparat penegak hukum dan perlindungan masyarakat di daerah ini relatif memadai. Jumlah satuan polisi pamong praja relatif masih kurang untuk melindungi seluruh penduduk dan wilayah kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka pelayanan melalui penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disisagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi tambang dan galian, diantaranya kaolin 5,28 juta ton, batu gamping 192,40 juta ton, batu apung 0,6 juta ton, belerang 1,35 juta ton, feldspar 14 juta ton, sirtu 3,12 juta ton, oker 4,5 juta ton, zeolit 1,82 juta ton, trass 1,80 juta ton, lempung 0,54 juta ton, batu setengah mulia 1.24 juta ton, slate/sabak 0,15 juta ton, mika 1,20 juta ton, silika 1,2 juta ton, serisit 0,416 juta ton, tanah diatomae 0,05 juta ton, granit 249,6 juta ton dan dolomit

Mulai tahun 2017 urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah panas bumi.

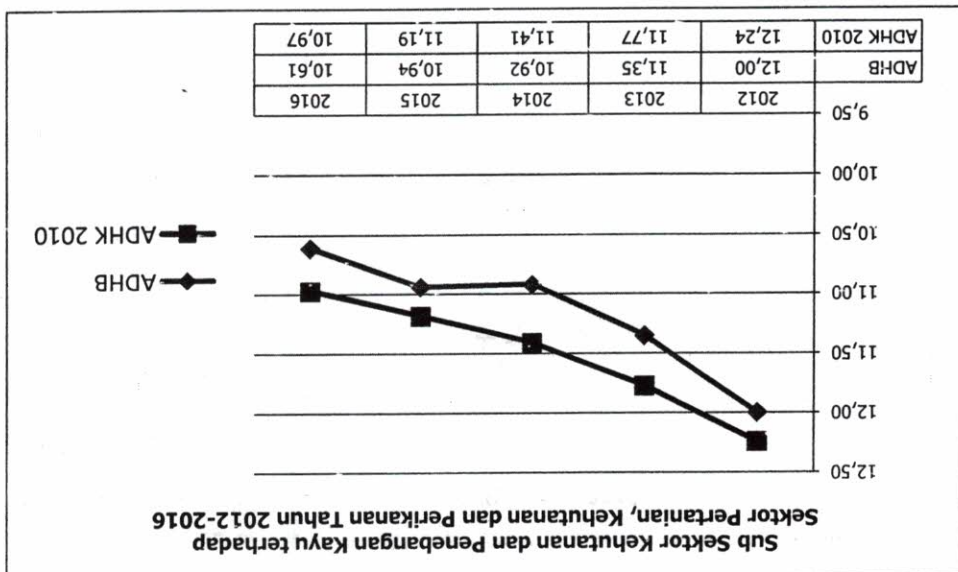
Sumber adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Daerah. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dari berbagai pemanfaatan langsung pada energi panas bumi selama ini belum dilakukan secara teknis oleh Pemerintah. pemanfaatan energi terbarukan, dalam hal ini bisa pada pemanfaatan langsung energi panas bumi. pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintah daerah terkait ESDM hanya pada Secara kewenangan, pertambangan sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun oleh

**2.3.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Selama tahun 2012-2016 kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB mengalami penurunan. Peluang pengembangan sub sektor kehutanan sangat besar dengan adanya daya dukung lahan dan tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan mutakhir. Melalui pengembangan bibit tanaman kehutanan bernilai ekonomi tinggi, kebutuhan kayu baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor akan dapat terpenuhi.

**Gambar 2.15**  
**Kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap**  
**Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2012-2016**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017



No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
A.	PDRB Atas Harga Bertaku (ADHB) (%)					
	1. Tanaman Pangan	24,50	24,70	24,84	24,83	24,94
	2. Tanaman Hortikultura Semusim	1,13	1,20	1,22	1,20	1,18
	3. Perkebunan Semusim	2,52	2,71	2,80	3,05	3,10
	4. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	18,56	18,45	18,62	18,73	18,94
	5. Perkebunan Tahunan	33,54	33,79	33,52	33,08	32,88
	6. Peternakan	6,05	6,02	6,24	6,29	6,46

**Tabel 2.63**  
**Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2012-2016**

Hal ini didasarkan pada kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap perekonomian daerah ini cukup penting. **2.3.3.3.5. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Upaya yang akan dilakukan saat ini adalah perекrutan tenaga PPL Non PNS yang dimulai tahun 2017-2019 dengan target tahun 2019 adalah 1 PPL per desa. Meskipun terjadi pengurangan PPL tetap dilakukan pemberdayaan PPL yang ada sehingga dampak terhadap peningkatan jumlah kelompok tani dan jumlah gabungan kelompok tani (keompok tani dan gapoktan) telah dapat mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian, khususnya didalam penyusunan program pertanian ditingkat kecamatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan penyuluhan dapat terintegrasi dan terfokus serta pemberdayaan kemampuan kelembagaan petani yakni dengan merevitalisasi kelompok tani dan Gabungan kelompok Tani (Gapoktan).

Berdasarkan data Tabel 2.62, selama tahun 2012-2016 terjadi penurunan jumlah tenaga penyuluh pertanian dari 147 orang pada tahun 2012 menjadi 127 orang pada tahun 2016. Pengurangan jumlah PPL ini disebabkan beberapa faktor, seperti pensiun, beralih ke jabatan struktural dan/atau pindah ke OPD lain serta daerah lain.

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (Orang)	147	153	153	132	127
2	Jumlah Kelompok Tani (Poktan) (Kelompok)	1.874	1.874	1.890	2.092	2.126
3	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Kel)	80	75	183	181	203
4	Jumlah WKPP (Unit)	183	183	153	132	127

**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Kelembagaan Pertanian Tahun 2012-2016**

### 2.3.3.3.3. Tanaman Perkebunan

Ditinjau dari segi iklim dan ketersediaan lahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan. Pada umumnya perkebunan di daerah ini merupakan usaha perkebunan rakyat dan belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Realisasi Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Produk (Ton)	4.713,55	4.752,18	5.461,47	5.437,1
	Produktivitas (kg/Ha)	596,33	597,44	674,03	668,40
2	Produk (Ton)	3.628,21	3.632,20	3.659,29	3.660,75
	Produktivitas (kg/Ha)	260,26	260,55	262,45	262,47
3	Produk (Ton)	10.272,47	10.573,34	10.692,64	10.891,13
	Produktivitas (kg/Ha)	1.064,00	1.064,52	1.076,59	1.078,65
4	Produk (Ton)	622,92	533,17	584,22	546,90
	Produktivitas (kg/Ha)	532,00	625,94	508,81	517,66
5	Produk (Ton)	270,20	270,23	266,92	253,15
	Produktivitas (kg/Ha)	1.126,53	1.126,66	1.119,87	1.120,88
6	Produk (Ton)	975,95	1.052,10	1.266,71	1.404,05
	Produktivitas (kg/Ha)	575,11	575,56	683,32	718,18
7	Produk (Ton)	1.232,93	1.309,03	1.234,46	1.126,05
	Produktivitas (kg/Ha)	5.819,83	5.832,16	5.787,44	5.710,19
8	Produk (Ton)	206,20	216,41	216,37	216,55
	Produktivitas (kg/Ha)	782,55	782,67	785,37	782,48
9	Produk (Ton)	160,25	169,26	169,63	174,2
	Produktivitas (kg/Ha)	639,10	639,32	639,51	643,40
10	Produk (Ton)	188,45	154,43	208,50	217,50
	Produktivitas (kg/Ha)	1.135,25	1.135,50	1.191,43	1.120,88
	Produk (Ton)				236,14
	Produktivitas (kg/Ha)				1.120,90

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Secara umum kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2012-2016 meningkat seperti gambar berikut.

**Tabel 2.59**  
**Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Cabe Merah	5.361,59	5.424,69	6.160,26	6.241,71	6.648,87
	Produktivitas (Kw/Ha)	49,64	49,68	54,52	54,51	55,61
2	Bawang Merah	576,40	449,57	491,34	500,74	541,55
	Produktivitas (Kw/Ha)	65,60	67,10	71,21	71,53	73,18
3	Bawang Daun	2.558,16	2.558,36	1.762,73	1.816,16	1.836,16
	Produktivitas (Kw/Ha)	56,72	56,73	59,15	59,16	59,23
4	Buncis	1.876,05	1.867,26	980,55	987,25	998,12
	Produktivitas (Kw/Ha)	66,44	66,45	67,16	67,16	67,44
5	Kentang	3.548,09	3.499,55	3.155,29	3.229,82	3.246,88
	Produktivitas (Kw/Ha)	120,68	120,67	123,25	123,28	123,20
6	Kubis	7.020,18	7.769,74	6.281,33	6.410,14	6.480,72
	Produktivitas (Kw/Ha)	214,03	214,04	214,38	214,39	214,59
7	Sawi	4.615,85	4.852,13	3.894,60	4.129,04	4.174,50
	Produktivitas (Kw/Ha)	117,45	117,48	117,66	117,64	117,57
8	Kacang Panjang	510,66	499,22	395,34	453,72	458,71
	Produktivitas (Kw/Ha)	20,03	20,80	21,60	21,61	21,64
9	Tomat	1.805,34	2.097,60	1.636,84	1.781,08	1.800,90
	Produktivitas (Kw/Ha)	67,21	67,66	68,77	69,03	69,00
10	Terung	1.372,77	1.254,48	975,72	1.028,21	1.039,53
	Produktivitas (Kw/Ha)	57,68	58,08	58,78	60,13	60,09
11	Bayam	280,54	331,26	263,41	303,49	306,84
	Produktivitas (Kw/Ha)	29,84	29,84	30,28	30,35	30,38

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Kontribusi sub sektor tanaman sayuran ini perlu terus ditingkatkan, mengingat tanaman sayuran merupakan tanaman sela diantara musim tanam padi berikut. Beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara bahkan menjadikan tanaman sayuran menjadi komoditi utama pertanian dari wilayah bersangkutan.

**Tabel 2.58**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Produksi (Ton)	149.729,05	151.937,67	150.502,71	160.581,27
	Produktivitas (Kw/Ha)	52,66	54,72	54,55	55,57
2	Produksi (Ton)				
	Produktivitas (Kw/Ha)	139.150,44	141.033,71	138.519,24	148.135,22
3	Produktivitas (Kw/Ha)	57,24	57,55	57,58	58,54
	Produksi (Ton)	10.578,61	10.903,96	11.983,47	12.446,05
4	Produktivitas (Kw/Ha)	25,67	33,43	33,90	34,62
	Produksi (Ton)	21.346,65	21.375,65	14.793,71	14.866,54
5	Produktivitas (Kw/Ha)	48,23	48,21	50,40	50,40
	Produksi (Ton)	3.589,72	3.595,59	2.459,9	2.600,99
6	Produktivitas (Kw/Ha)	17,85	17,80	17,8	18,24
	Produksi (Ton)	28.802,80	32.477,09	29.184,62	32.123,11
7	Produktivitas (Kw/Ha)	177,15	177,18	177,2	179,61
	Produksi (Ton)	11.406,96	11.009,62	11.576,56	11.829,56
		105,62	105,76	105,82	105,94
		161,34			

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Secara umum kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PD RB Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2012-2016 meningkat seperti gambar berikut.

Dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai program kepariwisataan untuk mendukung daya tarik wisata ke daerah ini, antara lain Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan dan Pengelolaan Keragaman Seni Budaya. Sebagai upaya pengembangan kepariwisataan tersebut telah memberikan kontribusi kepada perkembangan perekonomian daerah ini, yaitu kunjungan wisatawan dan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari kontribusi dari aktivitas perhotelan dan restoran yang terdapat di daerah ini.

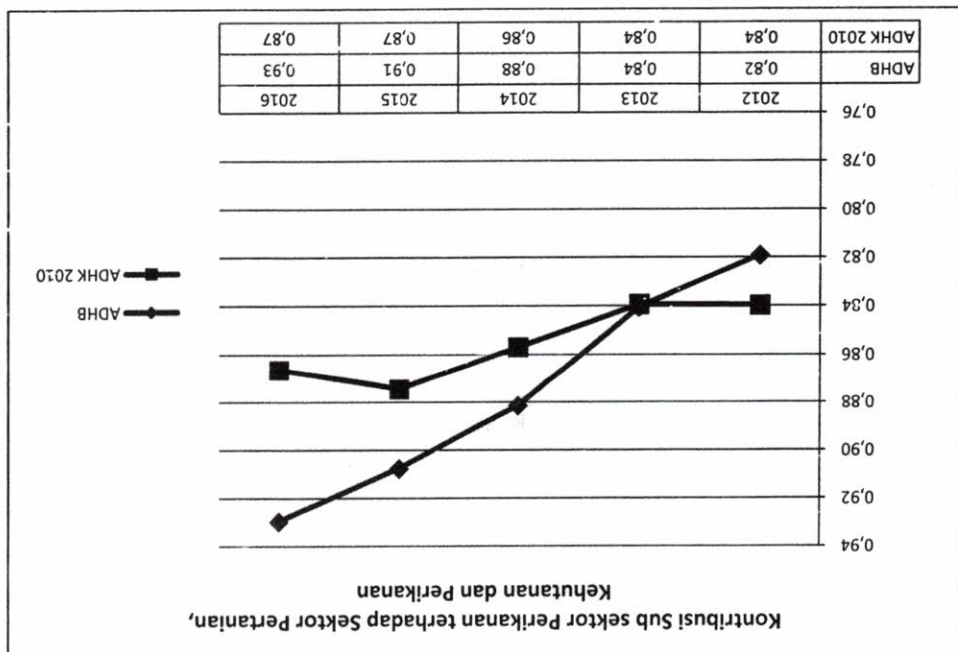
**2.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata**

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan daya tarik dan nilai objek wisata dan tersebar di beberapa kecamatan. Objek wisata tersebut terdiri dari objek wisata rohani atau agama, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya, obyek wisata hutan atau kebun. Potensi wisata di daerah ini terdiri dari wisata atau rekreasi sebanyak 25 buah, wisata sejarah atau budaya sebanyak 21 buah, wisata rohani atau agama sebanyak 8 buah dan wisata hutan atau kebun sebanyak 5 buah.

Gambar 2.12 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada PDRB Kab. Tapanuli Utara meningkat, dengan rata-rata kontribusi PDRB ADHB Sub Sektor Perikanan terhadap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 3,21 persen sedangkan ADHK 2010 sebesar 0,79 persen.

**Gambar 2.12. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017 (Data diolah)



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Adapun jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pengawasan kearsipan eksternal Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui LKD Provinsi terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh LKD Provinsi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi; LKD Kabupaten/Kota terhadap SKPD Kabupaten/Kota; Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya.

Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa. Saat ini Pengandaan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara jumlahnya mencapai 100 buah.

### 2.3.3. Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi beberapa bidang, yaitu :

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

### 2.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Sesuai kondisi alamnya, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang kaya sumber daya air dan sumber lahan, dimana selain memiliki Danau Toba juga terdapat kolam, rawa dan beberapa sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Usaha perikanan pada umumnya adalah usaha rumah tangga dalam skala kecil yang sifat usahanya ada yang sudah dikelola secara budidaya dan melalui penangkakan di perairan umum. Rumah tangga budidaya ikan lokasi

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah buku perpustakaan (exp):					
	a. TK	1.762	1.812	92	92	80
	b. SD/MI	1.936	2.036	38	38	130
	c. SMP/MTS	1.983	2.183	12	12	128
	d. SMA/SMK/MA	1.976	2.176	26	26	126
	e. Diploma/ Sarjana	2.103	2.353	36	36	60
2.	Jumlah buku perpustakaan, ilmu pengetahuan (exp)	13.368	13.904	936	936	756
3.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat kabupaten (unit)	1	1	1	1	1
4.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan (unit)	35	45	50	55	65

**Tabel 2.55**  
**Perkembangan Manajemen Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2012-2016**

Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian, sehingga peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi satu hal yang penting. Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan sangat penting dilakukan bagi pengelolaan arsip di SKPD setiap tahunnya.

yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif.

### 2.3.2.16. Bidang Urusan Perpustakaan

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kall)	15	18	18	18	18
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni & budaya (unit)	1	1	1	1	1
3	Jumlah group kesenian (kelompok)	71	75	75	75	75
4	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	7	7	7	7	7

**Tabel 2.54**  
**Perkembangan Seni Budaya Tahun 2012-2016**

dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi oleh informasi yang dikucualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikucualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya untuk menjaga stabilitas negara.

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Secara etimologis sandi diartikan sebagai kode rahasia atau perubahan fonologis yang terjadi pada sebuah kata karena pengaruh *fonem* yang didekatnya. Sandi atau persandian lebih luas dikenal sebagai kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Terdapat dua bagian kriptologi yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi merupakan cara untuk mengolah tulisan dalam berita sehingga menjadi tulisan yang berlainan dan *incoherent*. Kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem dan kuncinya.

Kegiatan persandian pada hakikatnya dimulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan. Informasi tersebut terkait dengan isu-isu strategis dan merupakan informasi yang dikucualikan. Pengamanan terhadap informasi yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan enkripsi. Kemudian distribusi informasi yang menggunakan sarana komunikasi digital diamankan dengan melakukan enkripsi jaringan dan keutuhan informasi dengan *hash function*. Sementara itu distribusi dalam bentuk *hardcopy* pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Persandian sangat membantu komunikasi intern organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melindungi informasi dari potensi ancaman. Terdapat empat macam ancaman terhadap informasi yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi dan fabrikasi. Interupsi adalah halangan penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Intersepsi adalah penyadapan terhadap pesan yang sedang disalurkan. Modifikasi adalah merubah pesan dari pengirim sehingga pesan yang diterima berbeda dengan aslinya. Fabrikasi adalah pembuatan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi. Ancaman tersebut merupakan dasar perlu dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persandian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup Sekretariat Daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumpanan urusan pemerintahan bidang persandian tergabung

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar pemuda dapat berfikir positif untuk berkreasi yang akan melahirkan karya-karya nyata yang monumental dan membawa pengaruh dan perubahan yang besar dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Disamping itu juga menguasai pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global. Kebudayaan akan pentingnya olah raga, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olah raga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. Pembinaan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional.

### 2.3.2.12. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Peningkatan dan kerjasama investasi, melalui koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi, koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; pengembangan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi, penyelenggaraan pameran investasi, pembuatan media promosi;
- 2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi;
- 3) Peningkatan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang meliputi kajian wisata kampung di daerah kawasan wisata dan kajian peluang investasi dibidang agribisnis.

Dalam mewujudkan pengembangan investasi di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat sistem pelayanan investasi, yaitu penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengacu kepada potensi daerah, melakukan penilaian daftar prioritas dan daftar investasi negatif secara berkala, penguatan kelembagaan daerah didalam Sistem Pelayanan Investasi yang efisien, meningkatkan promosi investasi, melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dan mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan akan memberikan banyak dampak penganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, diantaranya:

### 2.3.2.11. Bidang Urusan Penanaman Modal

**2.3.2.9. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-governmen*). Melalui pengembangan *e-governmen*, pemerintah berharap dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki *website* resmi dengan alamat [www.taputkb.go.id](http://www.taputkb.go.id) yang dapat diakses oleh siapa saja. Diharapkan ke depan *website* ini semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Tapanuli Utara.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah jaringan telepon genggam (unit)	35	36	36	36	37
2.	Jumlah jaringan telepon stasioner (unit)	1.130	1.188	1.188	1.188	1.188
3.	Jumlah warung internet (warne) (unit)	20	22	21	17	15
4.	Jumlah surat kabar nasional yang masuk ke daerah	2	2	3	4	5
5.	Jumlah surat kabar lokal yang ada di daerah	35	40	47	50	58
6.	Jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah	1	1	2	3	3
7.	Web Site milik Pemerintah Daerah (unit)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**2.3.2.10. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pembudayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dasar kehidupan perekonomian. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki prospek baik. Sektor koperasi dan UKM dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara apabila usaha berkembang dengan baik.

**2.3.2.11.1. Koperasi Aktif**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

dan uji kir kendaraan angkutan umum dan barang. Tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan umum dan barang dalam mendukung keselamatan transportasi darat telah meningkat. Ini ditunjukkan oleh peningkatan penguasaan izin trayek

### 2.3.2.8.2. Jumlah Ijin Trayek dan Uji Kir Angkutan Umum

Pada Tabel 2.48 dapat dilihat bahwa jumlah penumpang angkutan pada Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan per tahun sehingga pemerintah daerah harus tetap memperhatikan ketersediaan angkutan publik yang memadai.

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

No.	Penumpang	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun (Orang)				
1	Bus dan Mini Bus	2.496.000	2.575.000	2.776.250	2.691.750	2.721.000
2	Kapal Danau	52.000	52.450	52.320	53.125	54.265
3	Pesawat Udara	17.860	22.121	24.005	17.685	153.125

**Tabel 2.48**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Tahun 2012-2016**

Jumlah penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tentunya harus menjadi perhatian yang serius dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Perkembangan jumlah penumpang angkutan di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.48.

### 2.3.2.8.1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamatkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien terwujud dalam pelayanan transportasi antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkeseimbangan, tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan antar sarana dan fasilitas yang ada di perkotaan dan di pedesaan serta kesetaraan tingkat pelayanan sesuai dengan standar yang dibakukan. Jaringan transportasi di wilayah daerah ini terdiri dari transportasi darat, transportasi danau dan transportasi udara.

Salah satu faktor penting dalam memperancar aktivitas kehidupan masyarakat adalah operasional sistem transportasi. Pengembangan sistem transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pengembangan wilayah. Transportasi mempunyai fungsi penghubung fungsional dan spasial antar kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien diarahkan untuk penyediaan alternatif pilihan pelayanan sesuai kepentingan pengguna jasa transportasi dan akomodasi kepentingan penyedia jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

### 2.3.2.8. Bidang Urusan Perhubungan

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah pasangan usia subur (orang)	34.093	34.177	34.865	33.388	33.170
2.	Jumlah akseptor KB (orang)	6.511	7.321	7.495	7.044	6.627
3.	Rasio akseptor KB	0,19	0,21	0,21	0,21	0,20

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2012-2016 diuraikan pada tabel 2.46.

**2.3.2.7.1. Rasio Akseptor KB**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas sasaran dan arah pembangunan dalam rangka mewujudkan agenda penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal yang dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk serta mengupayakan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian tingkat kelahiran (*fertility*) penduduk yang dilakukan dengan Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Upaya pengendalian jumlah penduduk terlihat dari berkurangnya rata-rata jumlah jiwa per keluarga yang pada tahun 2012 berjumlah 6 orang menjadi 5 orang tahun 2016.

**2.3.2.7. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	241	241	241	241	241
2.	Jumlah LPM Berprestasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah kelompok binaan PKK	40	40	40	40	40
4.	PKK Aktif	252	252	252	252	252
5.	Posandu Aktif	380	377	373	373	377

**Tabel 2.45**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, sejahtera dan adil dalam hal gender serta sadar hukum dan lingkungan.

Tabel 2.44 menunjukkan bahwa rasio pasangan yang mempunyai akte nikah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memiliki administrasi akte nikah semakin meningkat.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017 (data diolah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah (RT)	1.771	3.677	3.382	4.834	4.916
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	74.085	71.078	73.430	75.786	78.789
3.	Persentase pasangan nikah ber-akte nikah	2,39	5,17	4,61	6,38	6,94

**Tabel 2.44**  
**Persentase Pasangan Mempunyai Akte Nikah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

### 2.3.2.5.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.43 tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai akte kelahiran per satuan penduduk mengalami peningkatan setiap tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memiliki administrasi akte kelahiran semakin meningkat.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017 (data diolah)

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	318.805	317.658	326.685	324.606	329.218
2.	Jumlah penduduk yang mempunyai akte lahir (jiwa)	38.320	41.391	51.644	70.696	93.274
3.	Persentase penduduk yang mempunyai akte lahir per satuan penduduk (%)	12,02	13,03	22,56	28,27	34,73

**Tabel 2.43**  
**Persentase Penduduk Mempunyai Akte Kelahiran Tahun 2012-2016**

Rasio penduduk yang memiliki akte kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran terhadap jumlah penduduk pada suatu daerah. Perkembangan penduduk yang mempunyai akte kelahiran di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.43.

### 2.3.2.5.2. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran

rasio ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memiliki KTP sudah semakin meningkat disamping adanya ketentuan *single identity* yang diterapkan pemerintah.

1. **Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)** yang semula lima tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).
2. **Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.** Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).
3. **Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun.** Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
4. **Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.** Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
5. **Pengakuan dan Pengesahan Anak,** dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).
6. **Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).** Larangan untuk tidak dipungut biaya semua hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).
7. **Pencatatan Kematian.** Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.
8. **Petugas Registrasi.** Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah ditamatkan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
9. **Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan.** Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013). Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan bidang Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan,

Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kehidupan manusia yang jika tidak diatasi pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya lingkungan, khususnya terkait dengan masalah persampahan dan kualitas air. Dalam mencapai tujuan meningkatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah lingkungan, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera memperoleh penanganan seperti masih terjadinya pencemaran air maupun tanah, belum optimalnya pengelolaan persampahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungannya, serta masih terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang berfungsi untuk interaksi sosial masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah serta meningkatnya penguasaan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menentu masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

**2.3.2.4. Bidang Urusan Lingkungan Hidup**

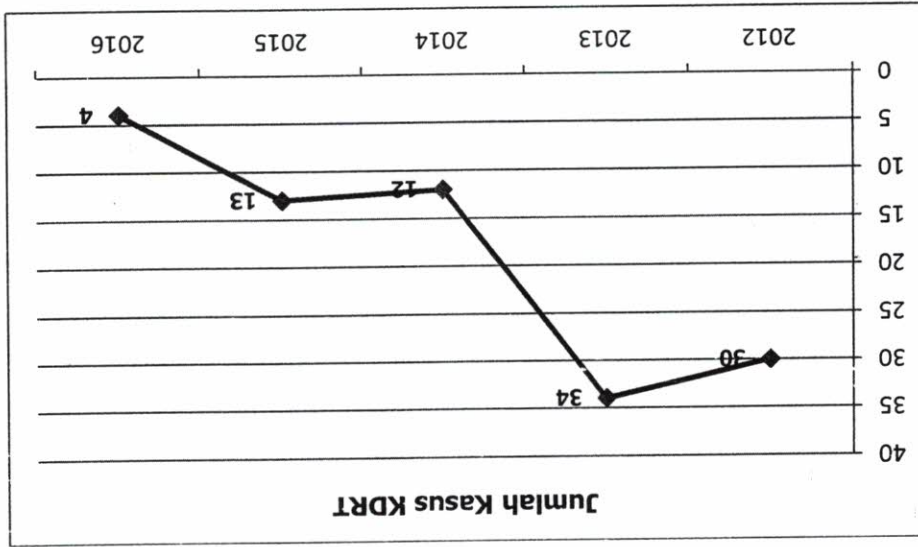
Guna mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikembangkan distribusi dan peningkatan akses pangan di masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan pembinaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Tabel 2.40 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2012-2016 telah mencapai swasembada. Pencapaian swasembada pangan beras di Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2012-2016 tidak diikuti dengan pencapaian swasembada pangan protein hewani yang berasal dari daging, susu dan telur.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
c. Telur	• Produk telur (kg)	472.185,00	92.649,94	94.768,76	122.960,47
	• Kebutuhan konsumsi telur per kapita (kg/kapita)	6,32	6,37	5,21	5,24
	• Total kebutuhan telur konsumsi (kg)	1.801.642,40	1.527.879,7	1.515.401,44	1.537.410,76
					2.063.378,74

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, bahwa laki-laki dianggap sebagai sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Adanya diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi berupa kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak, istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Gambar 2.11**  
**Jumlah Kasus KDRT Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Jumlah kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2012-2016 menunjukkan penurunan. Hal ini perlu terus didukung agar kedamaian dalam kehidupan keluarga dapat tercipta. Untuk mencegah, melindungi korban dan meniadak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun (Orang)				
1.	Jumlah pekerja perempuan	60.156	61.219	63.188	63.250	75.090
2.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah:					
	a. Eselon II	2	2	1	2	2
	b. Eselon III	19	14	22	31	30
	c. Eselon IV	149	153	185	232	237
	d. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.868	3.808	3.734	9.957	3.717
3.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga legislatif					

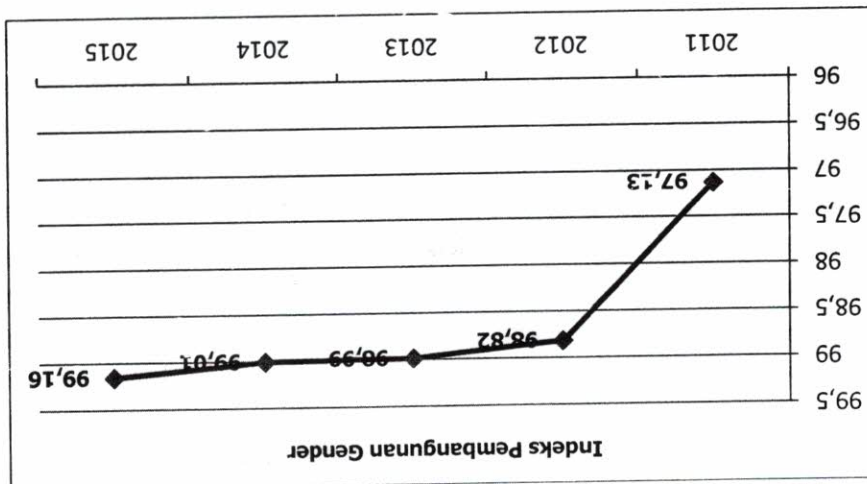
**Tabel 2.38**  
**Perkembangan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2010-2013**

ditunjukkan pada Tabel 2.38. perkembangan perempuan di Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016 perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV maupun di lembaga legislatif. Perkembangan jumlah perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Peran tertinggal dibandingkan laki-laki. Keteringgalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik, perempuan juga relatif pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga **Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Legislatif**

semakin setara). Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti tren naik. Nilai IPG berkisar pada tahun 2015 mencapai 99,16, artinya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah tercapai (semakin tinggi nilai IPG maka pembangunan antara laki-laki dan perempuan

**Gambar 2.10**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2011-2015**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017



Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan tersebut dilandasi berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional, diantaranya penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah ini.

Dokumen RPJMN 2015-2019 telah secara tegas menjelaskan arah kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses dan bidang pembangunan, Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi (1) peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk (1) menyempurnakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender; (3) peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan PUG; (4) penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat; (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpadu; (7) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun (%)				
1	Angkatan Kerja	85,98	87,57	83,98	83,57	-
2	Bukan Angkatan Kerja	14,02	12,43	16,02	16,43	-
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,80	87,57	83,98	83,57	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,27	2,34	0,59	2,56	-

**Tabel 2.37**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPak merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPak, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

**2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja**

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanian
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

**2.3.2. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar**

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Data PMKS					Data PMKS Yang Ditangani				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak balita terlantar	-	-	-	2	4	-	-	-	2	4
2	Anak terlantar	30	30	36	30	30	-	-	-	-	1
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	-	2	33	-	-	-	2	33
4	Anak jalanan	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	-	-	121	-	7	-	-	-	-	7
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau dipertukarkan salah	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	-	-	24	675	675	-	-	-	-	675
9	Penyandang disabilitas	504	504	1.185	504	504	-	-	10	15	64
10	Tuna Susila	25	25	8	38	45	25	25	8	38	45
11	Gelandangan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	10	8	8	8	5	10	8	8	8	5
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	18	15	32	4	3	18	15	11	4	3
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jenis PMKS yang sebelumnya 22 jenis PMKS menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitasasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Sebagaimana diamatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak.

**2.3.1.3. Bidang Urusan Sosial**

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa jumlah aparat polisi pamong praja telah meningkat dari 82 orang pada tahun 2012 menjadi 108 orang pada tahun 2016, dimana keberadaan aparat satuan polisi pamong praja telah melakukan peningkatan operasi dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah ini, diantaranya melalui peningkatan operasi kasih sayang kepada pelajar serta operasi penerbitan izin/peaturan daerah. Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menaati peraturan yang akan dapat menciptakan ketenteraman bagi mereka.

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Realisasi Tahun				
1	Jumlah personil Satpol PP (orang)	82	82	77	108	108
2	Jumlah demo dalam 1 tahun (kejadian)	4	4			
3	Jumlah operasi kasih sayang kepada pelajar (kali)	30	40	60	60	60
4	Jumlah operasi penerbitan izin/peaturan daerah (kali)	20	30	60	70	70
5	Jumlah operasi penyakit masyarakat (PEKAT) (kali)	16	16	16	16	16

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan Capaian Pelayanan Ketertiban Umum, Ketenraman dan Pengakan Perda di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

pemanfaatan ruang yang sepenuhnya masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya pemanfaatan kawasan lindung di daerah ini dilaksanakan penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

#### 2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan.

Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti: lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Capaian Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2012-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (%)	58,00	63,50	65,60	67,22	68,47
2	Jumlah rumah tinggal menggunakan listrik (%)	96,76	96,89	97,20	97,85	98,09
3	Jumlah rumah tinggal menggunakan air bersih (%)	75,60	78,78	79,10	79,14	79,95
4	Jumlah rumah tinggal menggunakan lantai (semen dan papan) (%)	96,45	98,73	98,80	98,86	98,81
5	Jumlah rumah tinggal (unit)	71.777	74.777	75.133	78.665	78.685
6	Jumlah rumah tinggal layak huni (unit)	56.973	59.822	60.254	68.556	70.440
7	Luas permukiman layak huni (Ha)	2.543	2.543	2.248	2.553	2.858
8	Luas wilayah permukiman (Km <sup>2</sup> )	2.543	2.543	2.605	2.635	2.675

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 2.34 tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selama tahun 2012-2016 terdapat peningkatan jumlah rumah tinggal hunian di Kabupaten Tapanuli Utara dari 71.777 unit pada tahun 2012 menjadi sebesar 78.685 unit pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,35 persen per tahun. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah tinggal di daerah ini, pada periode waktu sama juga

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	Panjang jaringan irigasi (m)	93.608	146.810	13.793,18	49.782,50	65.720,73
	a. Jaringan primer	4.680	7.341	7.341	8.420	11.082,23
	b. Jaringan sekunder	79.567	124.788	6.437,50	26.442,50	35.350,50
	c. Jaringan tersier	9.361	14.681	14.681,00	14.920,00	19.288,00
2	Luas lahan budidaya (Ha)	12.970,00	15.905,00	12.970,00	15.905,00	15.905,00
3	Rasio Jaringan Irigasi	7,22	9,23	1,06	3,13	4,13

**Tabel 2.33**  
**Perkembangan Jaringan Irigasi Tahun 2012-2016**

Seiring dengan wewenang urusan wajib pekerjaan umum, maka pembangunan di bidang pengairan sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan di daerah ini, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan areal pertanian.

**2.3.1.3.2. Irigasi**

Tabel 2.32 menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terus meningkat dan pada tahun 2016 sudah mencapai 42 persen. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pembangunan wilayah akan terhambat jika tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1.	Panjang Jalan (km)	1.541,34	1.541,34	1.679,36	1.679,36	1.679,36
	a. Jalan Negara	149,84	149,83	149,84	149,84	149,84
	b. Jalan Provinsi	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50
	c. Jalan Kabupaten	1.222,01	1.222,01	1.222,01	1.222,01	1.222,01
2.	Kondisi Jalan (km)					
	a. Kondisi Baik	38,51	43,13	482,29	490,69	515,77
	b. Kondisi Sedang Rusak	40,66	40,25	503,81	487,80	231,52
	c. Kondisi Rusak	13,69	13,20	166,05	162,31	414,22
	d. Kondisi Rusak Berat	7,13	3,41	69,86	81,21	60,50

**Tabel 2.32**  
**Perkembangan Panjang Jalan dan Tingkat Kematapan Jalan Tahun 2012-2016**

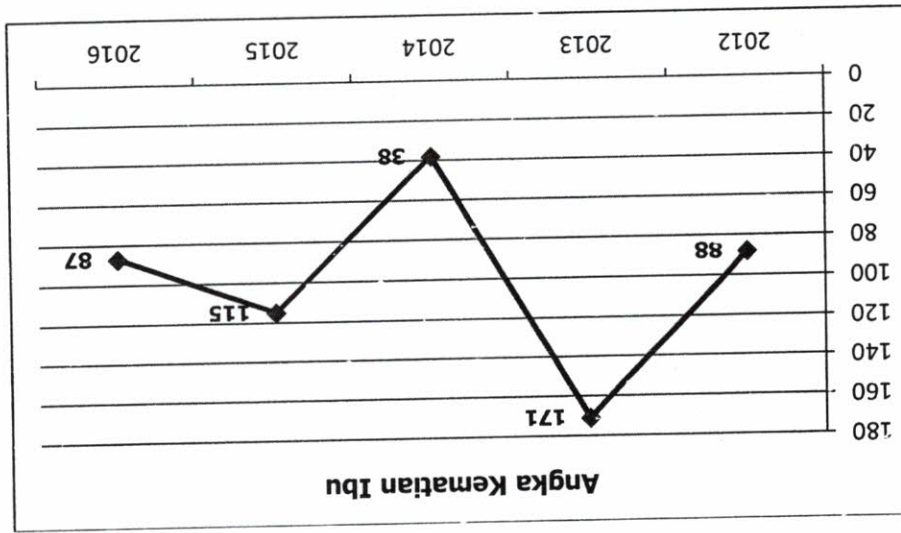
tingkat kematapan jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.32.

Jamian pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui jaminan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayannya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

**2.3.1.2.6 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

**Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016



Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama kematian maternal adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Disamping itu beberapa faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pengetahuan ibu yang kurang, jarak yang sulit dicapai dan masih adanya beberapa desa yang belum mempunyai tenaga kesehatan utamanya bidan desa.

**2.3.1.2.5 Angka Kematian Ibu**

**2.3.1.2.3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
 Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan.

Dari data pada tabel 2.29 cakupan persalinan ditolong oleh bidan semakin meningkat. Membaliknya kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang telah menempatkan bidan-bidan yang berstatus PNS maupun PTT di hampir seluruh desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian juga halnya kelahiran yang ditolong oleh dokter, persentasenya juga semakin meningkat.

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016

No	Penolong Anak Lahir Hidup	Tahun (%)			
		2012	2013	2014	2015
1	Dokter kandungan	12,39	9,7	12,71	18,35
2	Dokter umum	-	-	-	-
3	Bidan	77,76	84,18	76,9	76,4
4	Tenaga kesehatan lainnya/famili	0,64	1,58	2,94	1,92
5	Dukun beranak/paraji	9,22	4,54	7,45	3,34
					16

**Tabel 2.28**  
**Persentase Balita Menurut Penolong Anak Lahir Hidup Terakhir**  
**di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

**2.3.1.2.2 Penolong Kelahiran**  
 Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh dukun atau yang lainnya.

Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Sesuai data yang diperoleh dari buku Profil Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013-2016, upaya penambahan tenaga kesehatan terus dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah dan berupaya meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mencapai Kabupaten Sehat. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu tahun 2015 telah dilakukan pembangunan 1 unit puskesmas baru, yaitu Puskesmas Sipulatak di Kecamatan Pagaran.

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2013 - 2017

No	Sarana Kesehatan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1
2	Puskesmas				
	▪ Biasa	13	13	13	14
	▪ Rawat Inap	6	6	6	5
3	Pustu	60	60	60	60
4	Polindes	45	45	45	44
5	Posyandu	377	373	373	377

Tabel 2.26 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016

Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 4-6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Pentipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 0-2 tahun, 2-4 tahun, 4-6 tahun dan program pengasuhan untuk anak usia 0-6 tahun, kelompok bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2-4 tahun dan 4-6 tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.

**2.3.1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Tabel 2.25 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2012-2016 yang ditunjukkan oleh peningkatan angka persentase kelulusan murid pada semua jenjang pendidikan serta peningkatan jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan (sekolah) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melihat kondisi di atas, pelayanan bidang pendidikan di daerah ini perlu lebih ditingkatkan agar mutu lulusan mempunyai *life skill* dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017

No	Uraian	Tahun (%)			
		2012	2013	2014	2015
I.	Angka Kelulusan	100,00	100,00	63,30	95,56
	1. SD/MI	100,00	100,00	63,30	95,56
	2. SMP/MTs	99,84	100,00	93,88	95,58
II.	Angka Melanjut Sekolah	99,63	99,99	90,60	93,56
	3. SMA/SMK/MA	99,63	99,99	90,60	93,56
	1. SMP/MTs	98,86	99,80	99,80	99,94
2.	SMA/SMK/MA	97,32	98,50	98,90	98,95
	1. SMP/MTs	98,86	99,80	99,80	99,94
					99,70

**Tabel 2.24 Persentase Kelulusan dan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2012-2016**

sekolah menunjukkan persentase murid yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

No	Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun				
1	7 - 12 tahun	98,82	99,33	97,79	100	100
2	13 - 15 tahun	96,85	97,11	99,25	97,33	99,31
3	16 - 18 tahun	82,36	75,96	84,60	85,46	89,35
4	19 - 24 tahun	8,84	12,33	18,31	20,00	39,50
5	7 - 15 tahun	98,21	98,64	99,01	99,18	99,78
6	7 - 24 tahun	79,91	80,35	84,34	85,98	88,25

**Tabel 2.22**  
**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2012-2016**

**2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah**  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS juga dapat digunakan melihat tingkat kemampuan lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam menyerap warga belajar terutama anak usia sekolah.

**2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan**  
Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM antara lain sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Tapanuli Utara merupakan salah satu dari misi pembangunan yaitu dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan handal adalah dengan peningkatan pendidikan yang berkualitas. Beberapa kebijakan pembangunan pendidikan dimaksud adalah dengan menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan.

- Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, yaitu :
1. Urusan Pendidikan
  2. Urusan Kesehatan
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat
  6. Urusan Sosial

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Seni dan budaya daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, dimana Tarutung sebagai ibukota kabupaten selama ini telah dikenal sebagai Kota Wisata Rohani. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama pemangku kepentingan lainnya berusaha mengembangkan seni dan budaya di daerah ini dengan mengikuti berbagai event kebudayaan yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara, pemerintah provinsi/kabupaten lainnya maupun untuk tingkat nasional. Kegiatan kebudayaan juga ditampilkan dalam menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Tapanuli Utara.

**2.2.3.1. Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator berikut ini:

**2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

No	Lapangan Usaha	Tahun				Jumlah.....
		2012	2013	2014	2015	
1	Pertanian	76,53	74,41	77,36	84,74	84,74
2	Manufaktur	5,06	5,25	6,03	3,96	3,96
3	Jasa-jasa	18,41	20,34	16,61	11,30	11,30
		100	100	100	100	100

**Tabel 2.20**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan**  
**Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

Angkatan kerja merupakan penduduk di satu wilayah yang masuk dalam usia kerja (diatas 15 tahun sampai 64 tahun) baik yang bekerja maupun tidak bekerja (manggur) namun tidak termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Jadi angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja, hal ini karena penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja.

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan,” itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja.

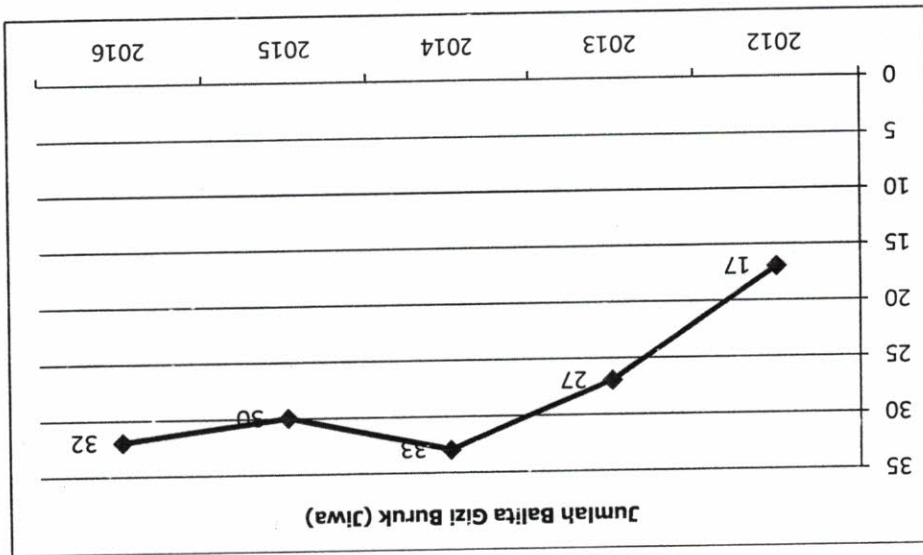
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan bahwa Urusan Pertanahan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan konkuren dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,

**2.2.2.3. Pertanahan**

Berdasarkan Gambar 2.7 jumlah balita gizi buruk pada tahun 2012 adalah 17 orang, meningkat menjadi 32 orang balita pada tahun 2016.

**Gambar 2.7**  
**Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017



Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan.

**2.2.2.3.3 Persentase Balita Gizi Buruk**

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

Angka kematian bayi di Indonesia saat ini dipergunakan dari hasil berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor HK.02.02/MENKES/S2/ 2015 tentang Renstra Kemkes RI 2015-2019 menargetkan penurunan AKB Tahun 2019 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

#### **2.2.2.1 Angka Kematian Bayi**

Untuk mendapatkan keadaan dimana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan diantaranya meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dengan demikian pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergis terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

masyarakat yang didukung dengan perlindungan ansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya.

2.19. jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah untuk SD/MI adalah umur 7-12 tahun, untuk SMP/MTS adalah umur 13-15 tahun dan untuk SMA/MA/SMK adalah umur 16-18 tahun. Perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.19.

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM berfungsi hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

**2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni**

Apabila diperhatikan secara rata-rata untuk seluruh jenjang pendidikan, maka secara umum terjadi peningkatan angka pendidikan yang ditamatkan. Kriteria penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD pada akhir tahun 2016 nilainya menurun, artinya keinginan untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat. Adanya program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pendidikan penduduk.

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2012-2016

No	Ijazah Tertinggi	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Tidak/belum pernah sekolah	0,94	1,29	1,04	0,96
2	Tidak/belum tamat SD	22,24	19,36	21,22	20,88
3	SD/MI/Sederajat	21,56	23,37	22,81	21,29
4	SMP/MTs/Sederajat	24,86	24,41	23,14	24,41
5	SMA/MA/Sederajat	18,04	20,00	17,31	-
6	SMK	7,84	7,46	8,23	-
7	SMA/MA/SMK Sederajat	-	-	-	25,45
8	Diploma I/II	0,36	0,50	0,01	0,92
9	Diploma III	0,96	1,05	0,07	0,98
10	Diploma IV/S-1	3,21	2,55	6,16	5,10
	Jumlah.....	100	100	100	100

**Tabel 2.18**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012 - 2016**

**Tabel 2.16**  
**Angka Buta Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Kemampuan Baca Tulis	Tahun																													
	2012						2013						2014						2015						2016					
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr									
Huruf Latin	93,92	92,21	93,05	95,46	91,86	93,61	98,59	98,23	98,41	99,54	98,04	98,78	99,70	98,57	99,12															
Huruf Latin dan Arab	1,20	2,05	1,63	1,39	2,07	1,74	1,64	1,18	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Huruf Latin dan Lainnya	3,76	3,24	3,49	2,50	3,88	3,21	5,59	4,54	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Huruf Arab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04	1,98	2,01	1,12	1,60	1,37															
Huruf Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72	2,94	3,32	1,92	1,66	1,79															
Melek Huruf	98,88	97,5	98,17	99,35	97,81	98,56	99,76	98,27	99,00	100,00	98,59	99,28	99,70	98,75	99,22															
Buta Huruf	1,12	2,50	1,83	0,65	2,19	1,44	0,24	1,73	1,00	0,00	1,41	0,72	0,30	1,25	0,78															
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 - 2016

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindikasikan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

**2.2.2.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Pendidikan merupakan unsur penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu komponen dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia selain kesehatan dan pengeluaran per kapita. Pendidikan akan memperluas peluang seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

**2.2.2.1. Pendidikan**

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai aspek pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

**2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat**

Jumlah sarana ibadah yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Hal ini sejalan juga dengan pertambahan jumlah dan penyebaran penduduk. Apabila dihitung rasio rumah ibadah secara keseluruhan tanpa melihat jenis rumah ibadah maka rasio rumah ibadah per 1.000 penduduk adalah 0,37. Artinya untuk 1.000 penduduk tersedia 4 rumah ibadah.

Sumber : BPS : Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
I	Jumlah Sarana Ibadah (Unit)	1.087	1.099	1.102	1.098
	a. Gereja Protestan	924	923	923	917
	b. Gereja Katolik	74	75	76	77
	c. Mesjid	67	67	68	67
	d. Langgar/Surau	22	34	35	37
II	Jumlah Penduduk	258.070	287.166	290.864	293.399
					295.613

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Tapanuli Utara dapat dilihat dari rasio tempat ibadah per satuan penduduk di daerah ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.15.

penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US \$ 1 atau \$ 2 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*).

Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2008). Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2006 BPS memperkirakan sekitar 55.721 jiwa atau 21,73 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara masuk dalam kategori miskin. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005. Jumlah ini berkurang pada tahun 2007 menjadi sebesar 52.400 jiwa penduduk atau 20,06 persen.

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Tahun				
Jumlah Penduduk (Jiwa)	258.070	287.166	290.864	293.399	295.613
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	32.600	33.800	32.230	33.370	33.200
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,55	11,68	11,06	11,41	11,25
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,42	1,44	1,33	1,61	
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,29	0,39	0,27	0,35	

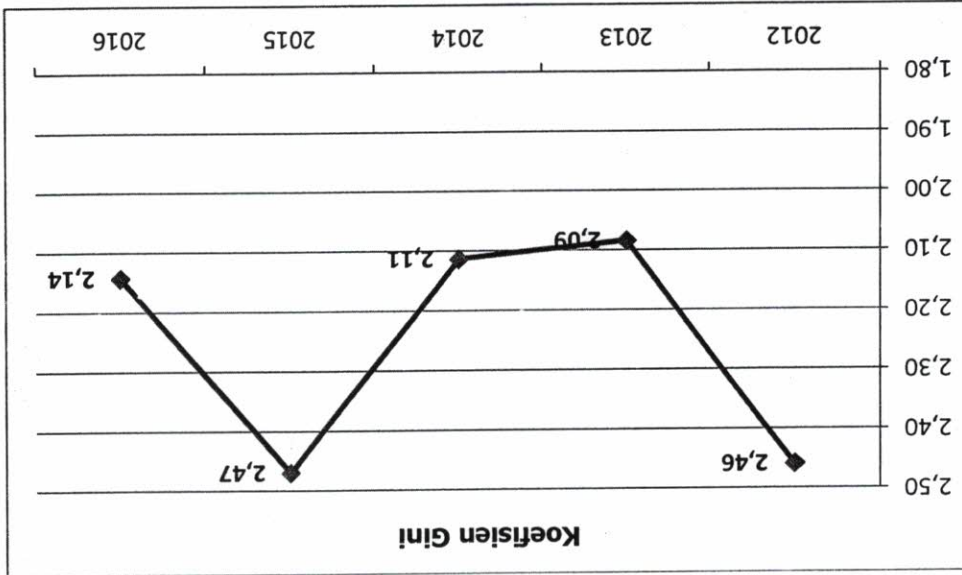
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara 2016, Tahun 2017

Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 32.600 orang (11,55 persen), naik menjadi 33.800 jiwa (11,68 persen) pada tahun 2013. Pada tahun 2014, penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan 32.230 jiwa (11,06 persen). Namun pada tahun 2015 kembali mengalami pertambahan hingga mencapai 33.370 jiwa penduduk miskin se-kabupaten Tapanuli Utara sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 33.200 jiwa (11,25 persen).

Secara nasional upaya penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rume;

**Gambar 2.3**  
**Gini Coefficient Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2017



Ketimpangan merupakan sebuah tantangan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan merata. Perekonomian yang sehat tidak hanya ditinjau dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi, namun juga dari rendahnya angka ketimpangan. Sejatinya, ketimpangan (*inequality*) adalah suatu hal yang umum terjadi pada negara berkembang. Secara teori, suatu negara akan mencapai tahap ketimpangan ekonomi, sebelum akhirnya mencapai fase *catch up* dimana ketimpangan berada pada angka yang rendah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah indeks Gini.

**2.2.1.4. Disparitas Pendapatan Masyarakat**

PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 16,12 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 21,31 juta rupiah di tahun 2016. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2012-2016 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2016, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai 17,15 juta rupiah.

Sumber : PDRB Kab. Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, Tahun 2017

No.	Uraian	Tahun (Rp)				Rata-rata (%)
		2012	2013	2014	2015	
1.	PDRB ADHB	16.115.964,89	17.279.972,58	18.666.207,66	19.957.843,95	7,24
2.	PDRB ADHK '2010	14.689.627,65	15.323.719,27	15.960.468,78	16.596.778,49	3,95

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2012-2016**

Dari perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat bahwa pertumbuhan kontribusi sektor dominan (pertanian) selama tahun 2012 - 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mempunyai kecenderungan tumbuh negatif, yang berarti bahwa telah terjadi

Sumber : BPS : PDRB Kab. Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, Tahun 2017

No	Sektor	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	49,85	49,59	48,71	47,61	46,61
2	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3	Industri Pengolahan	1,70	1,79	1,90	2,06	2,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	11,29	11,43	11,79	12,33	13,57
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,20	12,15	12,57	13,00	12,81
8	Transportasi dan Pergudangan	4,48	4,58	4,67	4,75	4,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,37	2,46	2,55	2,57
10	Informasi dan Komunikasi	1,00	0,93	0,87	0,81	0,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,55	1,59	1,64	1,69	1,7
12	Real Estat	2,19	2,27	2,37	2,47	2,48
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,94	9,84	9,71	9,55	9,54
15	Jasa Pendidikan	2,07	1,94	1,83	1,73	1,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,84	0,80	0,78	0,74
17	Jasa lainnya	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13
		Tahun (%)				

Tabel 2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (HK) dan Harga Berlaku (HB) Tahun 2012-2016

Berdasarkan Tabel 2.9 tersebut, secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Tapanuli Utara masih didominasi oleh Sektor Pertanian disusul Sektor Konstruksi dan Jasa serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana ketiga sektor ini diharapkan menjadi sektor unggulan di daerah ini. Perkembangan distribusi PDRB Lapangan Usaha ADHB Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Sektor	TAHUN																	
		2012		2013		2014		2015		2016*									
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.101.622,49	50,05	2.191.091,87	49,57	2.271.325,77	48,89	2.351.115,87	48,28	2.431.668,98	47,96								
2	Pertambangan dan Penggalian	2.684,99	0,06	2.946,54	0,07	3.216,66	0,07	3.540,36	0,07	3.762,95	0,07								
3	Industri Pengolahan	69.096,65	1,65	77.557,62	1,75	87.843,23	1,89	95.716,68	1,97	101.724,74	2,01								
4	Pengadaan Listrik, Gas	4.477,46	0,11	4.774,71	0,11	4.995,72	0,11	5.435,34	0,11	5.583,12	0,11								
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.669,56	0,11	4.857,52	0,11	5.052,42	0,11	5.269,98	0,11	5.364,68	0,11								
6	Konstruksi	457.804,37	10,90	489.231,70	11,07	531.675,08	11,45	578.504,95	11,88	635.966,05	12,54								
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	516.062,44	12,29	544.971,92	12,33	573.635,73	12,35	605.911,13	12,44	624.827,69	12,32								
8	Transportasi dan Pergudangan	182.611,62	4,35	196.759,87	4,45	210.027,65	4,52	224.708,90	4,61	237.197,57	4,68								
9	Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	87.797,62	2,09	95.484,60	2,16	101.305,15	2,18	107.773,05	2,21	112.940,47	2,23								
10	Informasi dan Komunikasi	44.981,69	1,07	45.959,98	1,04	46.415,22	1,00	46.853,29	0,96	47.653,29	0,94								
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61.826,05	1,47	67.041,16	1,52	71.273,36	1,53	76.443,56	1,57	79.909,16	1,58								
12	Real Estate	87.369,18	2,08	92.799,84	2,10	98.525,04	2,12	105.686,76	2,17	109.492,78	2,16								
13	Jasa Perusahaan	12.508,43	0,3	12.976,33	0,29	13.396,74	0,29	13.868,44	0,28	14.254,06	0,28								
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	434.971,08	10,36	461.009,58	10,43	488.682,72	10,52	511.498,30	10,5	522.284,68	10,3								
15	Jasa Pendidikan	88.973,47	2,12	89.988,26	2,04	90.370,22	1,95	90.874,16	1,87	90.934,77	1,79								
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	35.856,04	0,85	36.750,40	0,83	39.354,40	0,85	39.734,10	0,82	39.919,53	0,79								
17	Jasa Lainnya	5.420,91	0,13	5.949,68	0,13	6.230,68	0,13	6.543,34	0,13	6.707,34	0,13								
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.198.734,05</b>	<b>100,0</b>	<b>4.420.151,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4.643.325,79</b>	<b>100,0</b>	<b>4.869.478,21</b>	<b>100,0</b>	<b>5.070.194,85</b>	<b>100,00</b>								

Sumber : PDRB Kab. Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, Tahun 2017

Selama periode tahun 2012-2016, nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami peningkatan, baik ADHB maupun ADHK. Dalam rentang waktu tersebut, pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli faktor produksi yang tersedia.

PDRB yang dihasilkan Kabupaten Tapanuli Utara sangat tergantung pada kondisi sumber daya alam dan mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu, besaran ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan Kabupaten Tapanuli Utara dalam PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

(inflasi), sedangkan PDRB ADHK memperhatikan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dihitung dalam dua bentuk yaitu perhitungan Atas Dasar Harga Berlak

**2.2.1.1. Nilai PDRB**

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. ini akan diraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap

**2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Aspek ini menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan seni budaya dan olahraga.

**2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
		Tahun (%)				
1.	Tidak/belum pernah sekolah & belum Tamat SD	22,24	19,36	21,22	20,78	20,21
2.	Tamat SD/MI/Sederajat	24,56	23,37	22,81	22,02	21,20
3.	Tamat SMP/MTs/ Sederajat	24,86	24,41	23,14	23,17	22,61
4.	Tamat SMU/MA/Sederajat	18,04	20,00	17,31	17,25	16,90
5.	Tamat SMK	7,84	7,46	8,23	8,48	8,68
6.	Tamat dengan Ijazah Diploma I/II	0,36	0,50	0,50	0,45	0,48
7.	Tamat dengan Ijazah Diploma III/Sarjana Muda	0,96	1,05	0,07	0,05	0,05
8.	Tamat dengan Ijazah Diploma IV/S1/S2	3,21	2,55	6,16	7,32	8,51

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Tahun 2012-2016)**

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 sebesar 0,80 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama yang berada pada angka 1,10 persen. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 terdapat di Kecamatan Siborongborong yaitu sebanyak 46.751 jiwa (15,81 persen) dan terendah terdapat di Kecamatan Purbatua yaitu 7.583 jiwa atau 2,49 persen.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara**  
**menurut Kecamatan Tahun 2016**

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk pertengahan tahun		Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
			Laki-laki	Perempuan	
1	Parmonangan	3.309	6.844	6.944	54
2	Adiankoting	3.444	7.431	7.261	29
3	Sipohon	5.652	11.586	11.983	125
4	Tarutung	9.637	20.385	21.430	388
5	Siatas Barita	3.120	6.670	7.161	149
6	Pahae Julu	3.028	6.083	6.353	75
7	Pahae Jae	2.733	5.411	5.778	55
8	Purbatua	1.810	3.676	3.907	40
9	Simangumban	1.787	3.772	3.955	52
10	Pangaribuan	6.461	13.975	14.325	62
11	Garoga	3.796	8.284	8.210	29
12	Sipahutar	5.881	13.011	12.965	64
13	Siborongborong	10.400	23.507	23.244	167
14	Pagaran	3.974	8.671	8.840	127
15	Muara	3.284	6.798	7.153	175
		<b>68.316</b>	<b>146.104</b>	<b>149.509</b>	<b>78</b>

Sumber : BPS : Tapanuli Utara Dalam Angka, 2017

Tingkat kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2016 ada di Kecamatan Tarutung yaitu 388 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terkecil adalah di Kecamatan Purbatua yaitu 40 jiwa/Km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kelompok umur adalah kelompok umur 0-14 tahun sebesar 35,67 persen, kelompok umur 15-59 tahun (usia produktif) sebesar 53,80 persen dan kelompok umur 60 tahun keatas sebesar 10,53 persen.

Berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterania yaitu bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari gunung api-gunung api aktif. Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan. Selain adanya sirkum Mediterania daerah ini juga merupakan tempat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

**2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan yang berfungsi untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan ini terdiri dari : (1) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon dan Sipahutar; (2) Kawasan permukiman berkepadatan sedang di Kecamatan Pagaran, Garoga, Adiankoting, Muara dan Parmonangan; (3) Kawasan permukiman berkepadatan rendah di Kecamatan Siatas Barta, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Pangaribuan.
<b>III. KAWASAN STRATEGIS</b>		
1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kawasan Minapolitan dan Kawasan Bandara Siliangit.
2.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi kawasan Suka Margasatwa Dolok Saut, Kawasan Alam Sibaba Huta Gintang dan Kawasan Hutun Lindung Batang Toru.
3.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang mencakup Kawasan Wisata Rohani dengan penekanan sosial budaya.
4.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yang mencakup Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambahan dengan penekanan sumberdaya alam Sebaran Potensi Bahan Tambahan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan dan Kawasan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan sumberdaya alam.

## 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekat dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan diseluruh daerah ini dan untuk menelaah pembangunan sebagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara secara kewilayahan diarahkan menjadi empat pusat pelayanan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan Tarutung.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PK), mencakup kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, Muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barta, Adiankoting dan Parmonangan.
- e. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara**

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini mencakup kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan yang berfungsi untuk menjaga fungsi utama sungai, waduk dan mata air. Kawasan ini mencakup daerah di sekitar Danau Toba, Kecamatan Muara.
3.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan yang berfungsi menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tipe ekosistemnya masih kondisi alami (belum diganggu manusia). Kawasan ini mencakup Kawasan Suaka Alam Dolok Saut, Kecamatan Pangaribuan, dan Sijaba Huta Ginjaung, Kecamatan Muara serta Kawasan Konservasi Simangumban.
4.	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan yang memiliki gejala geologi, yang meliputi kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan Lindung Geologi tersebar di Kecamatan Sipahutar, Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barta, Adiankoting, Pahae
<b>KAWASAN LINDUNG</b>		

### 2.1.1.3. Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan sedimen aluvium muda dan aluvium tua. Berdasarkan hasil analisis atas Peta Geologi yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir dan konglomerat breksi.

Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi Kabupaten Tapanuli Utara adalah peralihan antara masa tertier dan masa kuartier yakni pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh *liparische effusifa* yang menghasilkan tanah dengan jenis *podsolik* yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumberdaya mineral.

Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat struktur sesar/patahan yang merupakan proses dislokasi pada batuan yang diikuti oleh pergeseran batuan. Indikasi adanya proses ini umumnya dapat terlihat dari gejala-gejala morfologi pada peta topografi seperti adanya pembelokan sungai, pergeseran bukit dan bentuk-bentuk khas lain yang menunjukkan gejala adanya sesar/patahan. Sesar/patahan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah bagian dari Sesar Semangko yang diinterpretasikan sebagai suatu sesar mendatar yang umumnya berarah relatif barat laut tenggara yang masih aktif.

### 2.1.1.4. Hidrologi

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara melalui irigasi didukung oleh keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di wilayah ini.

**Tabel 2.2**  
**Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara**

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Sipoholon	Batang Toru, Kolang	18.920
2.	Pangarbuan	Bilah, Batang Toru	45.925
3.	Adiankotng	Batang Toru, Kolang	50.290
4.	Sipahutar	DTA Danau Toba, Batang Toru	40.822
5.	Garoga	Bilah	56.758
6.	Tarutung	Batang Toru	10.768
7.	Simangumban	Batang Toru	15.000
8.	Purbatua	Batang Toru	19.180
9.	Pahae Jae	Batang Toru	20.320
10.	Pahae Julu	Batang Toru	16.590
11.	Siborongborong	DTA. Danau Toba, Batang Toru	27.991
12.	Siatas Barita	Batang Toru	9.292
13.	Parmonangan	Batang Toru, Sibundong, Kolang	25.735
14.	Pagaran	Batang Toru, Sibundong	13.805
15.	Muara	DTA. Danau Toba	7.975

Sumber : Buku Puth Sanitasi Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2014

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dari 15 kecamatan yang ada, yang paling luas di Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kecamatan Garoga sekitar 567,58 Km<sup>2</sup> atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Muara sekitar 79,75 km<sup>2</sup> atau 2,10 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
			Desa	Kelurahan	
1	Parmonangan		14	-	257,35
2	Adiankotng		16	-	502,90
3	Sipoholon		13	1	189,20
4	Tarutung		24	7	107,68
5	Siatas Barita		12	0	92,92
6	Pahae Julu		18	1	165,90
7	Pahae Jae		12	1	203,20
8	Purbata	Parsoran Janji Angkola	11	-	191,80
9	Simangumban	Simangumban	8	-	150,00
10	Pangarbuan	Pangarbuan	26	-	459,25
11	Garoga	Garoga	13	-	567,58
12	Sipahutar	Sipahutar	25	-	408,22
13	Siborongborong	Siborongborong	20	1	279,91
14	Pagaran	Sipitak	14	-	138,05
15	Muara	Muara	15	-	79,75
			<b>241</b>	<b>11</b>	<b>3,793,71</b>

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

4. Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 yang menyatakan "Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah", yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019.

#### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah
2. Melakukan penyesuaian terhadap target dan indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi midterm pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Menjadi acuan penyusunan RKPD selama periode tahun 2018-2019.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

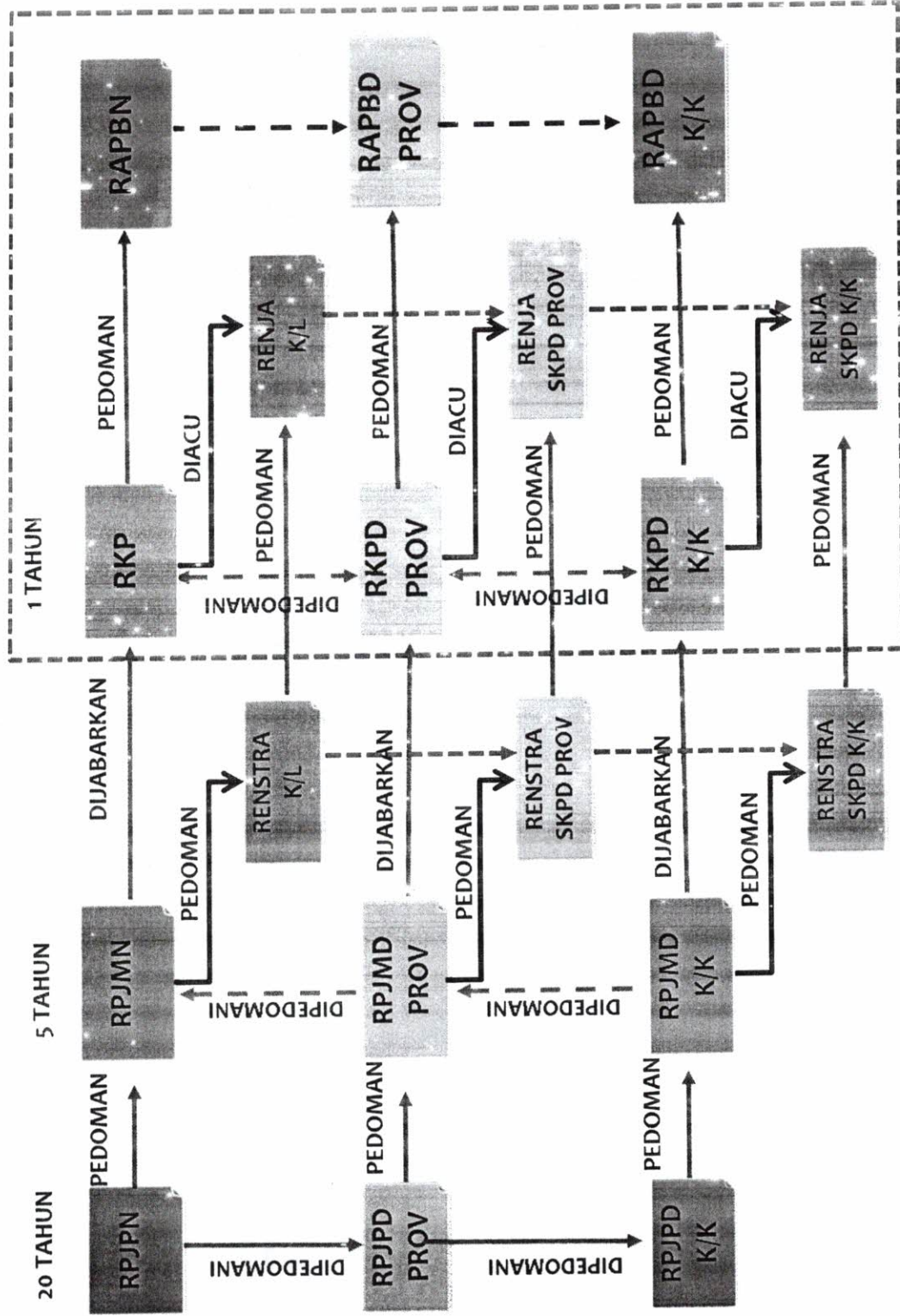
Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini berisi menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti



Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Dalam rangka memenuhi amanat Permendagri tersebut maka perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;

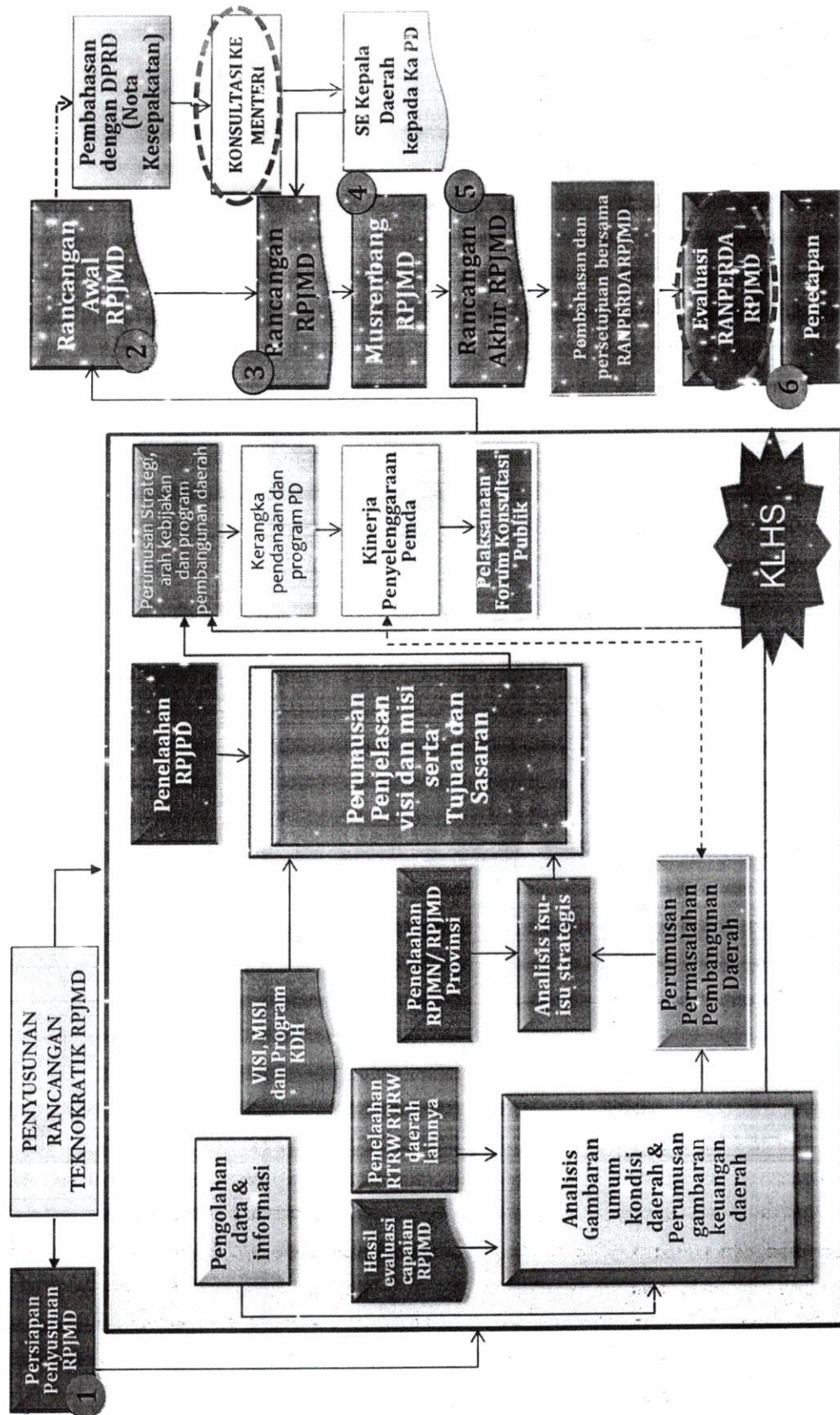
sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak dari perubahan penghitungan ini menyebabkan nilai IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama.

Kedua, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan perubahan dari pengkajian kembali terhadap muatan dan substansi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 agar dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya. Perubahan ini dilakukan melalui harmonisasi/penyelarasan terhadap Program Pembangunan Nasional dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan Jangka Menengah Nasional. Penyelarasan juga dilakukan terhadap perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya penyelarasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Ketiga, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Regulasi tersebut akan membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang semula terbagi atas urusan wajib dan pilihan menjadi terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Perubahan ini akan berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada.

Keempat, dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 yang menyatakan "Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah", yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Kelima, dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa :



Gambar 1.1  
 Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025. Mengingat bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan, maka RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, Rencana Strategik (Renstra) SKPD Tahun 2014-2019 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan dinamika perkembangan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, RPJPN 2005-2025 serta RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan RTRW kabupaten tetangga, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, serta disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Politis

Bahwa didalam penyusunan RPJMD ini pemilihan Kepala Daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Pendekatan Teknokratis

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah. Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati.

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan pada tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD yang bergerak dalam bidang *public service* dan *profit motive*.

Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Beberapa Perusahaan Daerah yang dibentuk di Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara
2. Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
3. Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara

Selama tahun 2015 sampai tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11.500.000.000,- untuk perusahaan daerah dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2015-2016**

No	Uraian	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
		2015	2016	2015	2016
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muat Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2	Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
3	Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara	5.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	5.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah, disusun dengan pendekatan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integrasi perencanaan terhadap penganggaran daerah serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui program dan kegiatan sesuai agenda strategis yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019. Struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

### **3.1.1.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutupi defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan terbatasnya pendapatan. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penerimaan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 46,34 persen selama Tahun Anggaran 2012 - 2016, yang sebagian besar diperoleh melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang rata-ratanya sebesar 95,42 persen per tahun.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 – 2016 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 menunjukkan gambaran asset daerah yang memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang. Asset terdiri dari (1) asset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) asset tetap, (4) dana cadangan dan (5) asset lainnya. Selama tahun anggaran 2012 - 2016, asset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.340.614.235.215,92 pada tahun anggaran 2012 dan menjadi Rp. 2.011.429.165.963,04 pada tahun anggaran 2016 dengan laju pertumbuhan sebesar 10,78 persen per tahun. Jumlah asset terbesar berupa asset tetap yang pada tahun anggaran 2016 bernilai Rp. 1.833.188.206.583,00 dan laju pertumbuhan asset tetap ini adalah 10,65 persen per tahun. Dari struktur asset, nilai asset tetap ini mempunyai proporsi terbesar dari seluruh nilai asset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	417.411.215.736,00	506.599.316.941,15	582.425.048.945,95	696.956.523.923,00	856.951.614.721,00	19,74
1.3.5	Asset Tetap Lainnya	29.076.580.262,00	31.364.945.971,00	7.721.419.931,94	10.852.865.472,00	9.534.668.670,00	-9,78
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.717.327.698,00	15.140.744.129,00	8.571.423.396,35	21.320.246.449,00	4.909.572.401,00	21,05
1.3.7	Akumulasi Penyusutan		0	0,00	-653.281.050.336,29	-688.712.586.574,00	#DIV/0!
1.3.8	Asset Tetap Lainnya			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>Jumlah Asset Tetap</b>	<b>1.227.438.574.784,00</b>	<b>1.428.547.693.458,15</b>	<b>1.474.281.614.853,79</b>	<b>1.658.860.196.693,48</b>	<b>1.833.188.206.583,00</b>	<b>10,65</b>
1.4	<b>Dana Cadangan</b>						#DIV/0!
1.4.1	Dana Cadangan	0	0,00	20.000.000.000,00	0	0	#DIV/0!
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.5	<b>Asset Lainnya</b>						#DIV/0!
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.5.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.5.4	Asset Tak Berwujud	165.360.180,00	209.860.180,00	249.983.410,00	221.267.599,60	737.262.636,95	66,94
1.5.5	Asset Lain-lain	33.604.306.827,00	11.043.708.531,00	23.642.272.308,00	16.686.483.301,40	55.106.403.118,40	61,94
1.5.6	Kas yang Dibatas Penggunaannya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>Jumlah Asset Lainnya</b>	<b>35.169.667.007,00</b>	<b>12.553.568.711,00</b>	<b>25.292.255.718,00</b>	<b>16.907.750.901,00</b>	<b>55.843.665.755,35</b>	<b>58,25</b>
	<b>Jumlah Asset</b>	<b>1.340.614.235.215,92</b>	<b>1.555.534.675.648,06</b>	<b>1.674.948.012.765,63</b>	<b>1.753.874.835.887,71</b>	<b>2.011.429.165.963,04</b>	<b>10,78</b>
2.	<b>KEWAJIBAN</b>						#DIV/0!
2.1	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>						#DIV/0!

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami peningkatan yang berfluktuasi yaitu dari Rp. 3.986.668.168,00 pada Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp. 4.604.790.235,23 pada Tahun Anggaran 2016 dengan laju pertumbuhan sebesar 65,03 persen per tahun.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang.

Berdasarkan neraca keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui perhitungan yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Rumus yang digunakan adalah dengan membagi asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

### 3.1.3. Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 3.6**  
**Kinerja Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Opini BPK	WDP (Laporan Keuangan Tahun 2011)	WDP (Laporan Keuangan Tahun 2012)	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	28 Des 2011	26 Des 2012	31 Des 2013	31 Des 2014	31 Des 2015

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk mengelola pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja/ pengurangan pengangguran dan pemborosan sumber daya serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012-2013 telah memperoleh opini penilaian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun anggaran 2014-2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

### **3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2012 - 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Untuk menjamin ketersediaan dan peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2012 - 2016 melakukan langkah-langkah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan perencanaan target pendapatan daerah dari kelompok PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian obyek penerimaan. Optimalisasi pengelolaan PAD ini dilaksanakan melalui:
  - a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
  - c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
  - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
  - e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah

6. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012-2013.

#### **3.2.2.2. Belanja Langsung (BL)**

Belanja Langsung (BL) merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang diperuntukkan kepada barang habis pakai, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepus-takaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.

#### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Arah pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2009 - 2013, yang terdiri dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Tabel 3.7  
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Uraian	TAHUN (Rp)									
		2012			2013			2014			%
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
<b>2. BELANDA DAERAH</b>											
<b>2.1</b>	<b>BELANDA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>432.280.365.865,63</b>	<b>422.893.049.403,00</b>	<b>97,83</b>	<b>510.409.261.489,00</b>	<b>471.481.408.239,00</b>	<b>92,37</b>	<b>552.464.472.158,98</b>	<b>498.730.593.790,00</b>	<b>90,27</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	406.034.731.278,63	390.850.040.853,00	98,23	455.528.753.883,00	428.183.336.252,00	94,00	501.715.977.901,98	453.091.896.635,00	90,31	
2.1.2	Belanja Bunga	35.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1.3	Belanja Subsidi	1.238.425.000,00	1.067.444.000,00	86,19	-	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1.4	Belanja Hibah	9.408.990.000,00	8.552.199.000,00	90,89	34.426.648.750,00	24.572.248.119,00	71,38	19.973.450.000,00	15.992.591.949,00	80,07	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.903.011.897,00	788.158.000,00	41,42	3.435.000.000,00	3.147.781.000,00	91,64	3.470.000.000,00	2.728.366.000,00	78,63	
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	11.260.207.690,00	11.237.812.550,00	99,80	11.555.178.856,00	11.528.994.868,00	99,77	-	-	99,10	
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	2.397.395.000,00	99,89	5.452.680.000,00	4.049.048.000,00	74,12	5.000.000.000,00	4.813.222.500,00	96,26	
<b>2.2</b>	<b>BELANDA LANGSUNG</b>	<b>332.664.565.442,00</b>	<b>314.807.101.646,00</b>	<b>94,63</b>	<b>412.080.337.698,00</b>	<b>362.903.291.344,15</b>	<b>88,07</b>	<b>359.669.494.507,30</b>	<b>317.807.871.260,87</b>	<b>88,36</b>	
2.2.1	Belanja Pegawai	23.215.720.074,00	21.794.016.012,00	93,88	26.978.021.468,00	23.851.993.447,00	88,41	33.638.448.578,30	33.292.330.274,00	98,97	
2.2.2	Belanja barang Jasa	135.059.318.287,00	121.504.815.722,00	89,96	152.880.229.830,00	132.155.775.281,00	86,44	152.898.431.002,00	138.051.229.923,91	90,29	
2.2.3	Belanja Modal	174.389.527.081,00	171.508.170.212,00	98,35	232.222.086.400,00	206.895.522.616,15	89,09	173.132.614.927,00	146.464.311.062,96	84,60	
<b>TOTAL BELANDA DAERAH</b>		<b>764.944.931.307,63</b>	<b>737.700.051.049,00</b>	<b>96,44</b>	<b>922.489.599.187,00</b>	<b>834.384.699.583,15</b>	<b>90,45</b>	<b>912.133.966.666,28</b>	<b>816.538.465.050,87</b>	<b>89,52</b>	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

#### **3.2.4.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Secara umum belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 3.8. Dalam mendukung pemberian pelayanan yang optimal bagi publik di daerah, diperlukan proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja ditambah dengan pengeluaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012-2016, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8

**Tabel 3.9**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2012-2016**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)</b>	<b>Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)</b>
1	2012	508.573.247.923,00	737.700.051.049,00
2	2013	537.534.550.970,00	837.358.611.633,15
3	2014	453.091.896.635,00	838.538.465.050,87
4	2015	520.036.594.347,00	1.097.187.075.012,12
5	2016	559.982.502.286,00	1.261.526.835.417,24

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

### **3.2.5. Analisis Pembiayaan Daerah**

Analisis Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi tentang pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Periode Tahun 2014-2019 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, dapat dilihat dari surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu.

#### **3.2.5.1. Surplus/Defisit**

Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah periode lalu, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Kondisi anggaran defisit/surplus tidak selalu sama dengan realisasi anggaran. Pada periode pemerintahan sebelumnya realisasi APBD berada posisi defisit dan/atau surplus. Perkembangan surplus/defisit anggaran Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012-2016, ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Defisit anggaran ditutupi dengan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan surplus anggaran ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan rasio antara defisit dengan nilai PDRB berlaku transaksi keuangan Kabupaten Tapanuli Utara pada masa pemerintahan sebelumnya masih cukup baik.

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa perbandingan Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah menghasilkan data surplus/defisit. Data defisit atau surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil.

#### **3.2.5.2. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan data pada Tabel 3.11, tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2012-2016 berfluktuasi dimana penerimaan pembiayaan per tahun didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai penyumbang terbesar dari angka realisasi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran yang sama juga berfluktuasi.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan diiringi dengan efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, dimana komposisi realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2012 - 2016, diuraikan pada Tabel 3.13.

### **3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2019**

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dengan maksud untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun ke depan.

#### **3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran. Belanja tidak langsung secara mutlak meningkat setiap tahun dari Rp. 422.893.049.403,00 pada Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp. 758.696.846.118,00 pada Tahun Anggaran 2016.

2. Faktor yang melatarbelakangi besaran proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Belanja Tidak Langsung) antara lain adalah belanja gaji dan tunjangan, khususnya beban belanja untuk tambahan penghasilan guru PNS daerah (biaya sertifikasi) yang berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan sebagian besar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi Belanja Langsung menjadi sangat terbatas.

### **3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu**

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti perkiraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Asumsi yang digunakan didalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Pertumbuhan pendapatan diharapkan lebih baik dibandingkan periode lima tahun sebelumnya, dengan asumsi kegiatan ekonomi sektor riil semakin meningkat yang akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu PAD diharapkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 23,06 persen per tahun, Dana Perimbangan diharapkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9,44 persen per tahun dan Pendapatan lain-lain yang sah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 18,82 persen per tahun.

### **3.3.2.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai dengan akhir periode RPJMD ini, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah ditargetkan mencapai 3,7 persen. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal Daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Tapanuli Utara, penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah merupakan sumber pendapatan primadona dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,82 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 5,49 persen terhadap total pendapatan daerah. Karena dampaknya yang begitu besar, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus kepada ketiga jenis pajak tersebut, yang tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan pemantapan dan perbaikan sistem akuntansi pendapatan daerah, baik terhadap pendapatan asli daerah maupun terhadap penerimaan daerah lainnya;
2. Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penerimaan pendapatan asli daerah;
3. Menyediakan data potensi pendapatan asli daerah sehingga potensi pendapatan asli daerah tergali secara optimal oleh aparatur yang bertugas pada pengelolaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan data potensi pendapatan asli daerah yang akurat dan valid dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak dan para wajib retribusi, peningkatan efisiensi dan efektifitas penataan prosedur administrasi, intensifikasi dan ekstensifikasi serta peninjauan atas berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber PAD yang dinilai tidak relevan lagi untuk diterapkan pada saat ini;
5. Mengoptimalkan bantuan dana perimbangan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Beberapa kondisi yang mempengaruhi pendapatan daerah secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, regulasi, iklim usaha, keamanan dan stabilitas sosial politik, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan asumsi semua kondisi tersebut di atas berada pada tingkat yang optimum dan tidak ada perubahan regulasi atau regulasi baru yang bersifat kontraproduktif dengan kelancaran pengelolaan pendapatan daerah, maka dipredikasi pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan. Proyeksi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.16.

### **3.3.2.2. Kebutuhan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama**

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2012-2016 dengan asumsi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama Tahun 2015-2019 diproyeksikan cenderung meningkat. Adapun hasil proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat pada Tahun 2015 - 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.17.

### **3.3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA untuk periode Tahun 2015 - 2019 diasumsikan tumbuh sebesar 2,5 persen. Dasar pertimbangannya adalah bahwa proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga SiLPA akan berkurang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan digunakan untuk penyertaan modal. Proyeksi pembiayaan tahun 2015 - 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.18.

#### **3.3.2.4. Kebijakan Alokasi Anggaran**

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Ketentuan prioritas anggaran adalah sebagai berikut:

**Prioritas I :** dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama

**Prioritas II:** dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2014-2019, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajibsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segemen masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

**Prioritas III:** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dalam jangka waktu lima tahun mendatang pada Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 3.19.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada Tabel 3.20. Kemudian secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 - 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21**  
**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2019**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)				Realisasi	2017	2018	2019
		2015	2016	2017	2018				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
I.	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	271.932.362.067		321.024.952.675,80		522.136.970.000	558.384.067.000,00	569.237.223.000,00	
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I								
II.a	Belanja Langsung	374.960.584.024	473.470.646.041,12	411.736.019.330,00	492.497.337.645,24	497.397.000.000	588.257.700.000,00	603.502.700.000,00	
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Dikurangi :								
II.c	Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	171.609.893.500		187.353.941.000,00		263.420.030.000	343.073.633.000,00	362.465.477.000,00	
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	0	0	0	0	0	0	0	
II.	<b>Total Rencana Pengeluaran Prioritas (II.a+II.b-II.c-II.d)</b>	<b>203.350.690.524</b>	<b>473.470.646.041,12</b>	<b>224.382.078.330,00</b>	<b>492.497.337.645,24</b>	<b>233.976.970.000</b>	<b>245.184.067.000,00</b>	<b>241.037.223.000,00</b>	
	Sisa Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	68.581.671.543		611.773.818.686,00		719.496.222.399	834.191.125.389,00	971.699.592.999,00	
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II								
III.a	Belanja Tidak Langsung	678.303.929.192	623.716.428.971,00	823.505.148.491,69	758.696.846.118,00	801.160.000.000	876.200.000.000,00	941.200.000.000,00	
	Dikurangi :								
III.b	Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	584.539.679.917		640.095.331.216,69		500.000.000.000	550.000.000.000,00	600.000.000.000,00	
III.	<b>Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)</b>	<b>93.764.249.275</b>	<b>623.716.428.971,00</b>	<b>183.402.817.275,00</b>	<b>758.696.846.118,00</b>	<b>301.160.000.000</b>	<b>326.200.000.000,00</b>	<b>341.200.000.000,00</b>	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara berkelanjutan.

### **6.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Hal ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran.

Dalam kaitan ini, perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 6.1

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 5: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan untuk Memperluas Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Integrasi Wilayah dan Interkoneksi dengan Kawasan Pembangunan disekitarnya</b>			
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan wilayah kawasan pembangunan di sekitarnya	5.1. Meningkatnya infrastruktur transportasi yang handal yang terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	5.1.1. Penambahan jumlah jalan dan sarana pengangkutan lainnya 5.1.2. Peningkatan mutu jalan dan sarana pengangkutan lainnya
		5.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah	5.2.1. Pembangunan infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah 5.2.2. Peningkatan mutu infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
		5.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	5.3.1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dasar pemukiman 5.3.2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana dasar pemukiman
		5.4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk pelayanan publik dan aparatur	5.4.1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pelayanan publik dan aparatur 5.4.2. Peningkatan mutu infrastruktur untuk pelayanan publik dan aparatur
<b>Misi 6: Menjadikan Desa Sebagai Pusat Percepatan Pembangunan</b>			
6.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	6.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	6.1.1. Peningkatan mutu sumberdaya desa 6.1.2. Pemanfaatan sumber daya desa
		6.2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	6.2.1. Peningkatan pembangunan desa 6.2.2. Penggalan potensi sumber pendapatan masyarakat desa 6.2.3. Penciptaan sumber pendapatan masyarakat desa
<b>Misi 7: Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta Berorientasi Pada Pelayanan Public (<i>good and clean governance</i>) dengan Sistem <i>e-Government</i></b>			
7.	7.1. Mewujudkan peningkatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur	7.2.2.1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	7.1.1.1. Peningkatan produktivitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 7.1.1.2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kantor pemerintah kabupaten Tapanuli Utara

## **6.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan akan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, namun tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan, artinya program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2014 - 2019 digambarkan sebagai berikut :

### **6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2015)**

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung akses, kualitas dan kapasitas pelayanan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis, seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, pemetaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan sebagai acuan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, melaksanakan percepatan pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta penyediaan infrastruktur perdesaan yang memadai dan dapat menstimulasi penciptaan kegiatan ekonomi pedesaan, pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta pembinaan terhadap generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap seni budaya dan olah raga menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kelurahan/desa sampai tingkat kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya saing.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah pembangunan daerah (pemantapan peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi, pembangunan infrastruktur irigasi, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, meningkatkan pelaksanaan pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan infrastruktur perdesaan), penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya daerah, arah kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti daerah kawasan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi ditingkat global dan regional.

#### **6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2019)**

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya. Arah kebijakan berdasarkan tahapan tahun pelaksanaan RPJMD tersebut disajikan pada Tabel 6.2.

Arah Kebijakan				
Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<p>8. Peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari kelurahan/ desa sampai tingkat kabupaten</p> <p>9. Peningkatan terhadap generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap seni budaya dan olah raga pembangunan</p>	<p>9. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</p> <p>10. Peningkatan peran generasi muda dalam pengembangan kreativitas seni budaya dan olah raga.</p> <p>11. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.</p>		<p>perdesaan</p> <p>10. Penyediaan pelayanan publik,</p> <p>11. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya daerah</p> <p>12. Pengembangan kawasan strategis, seperti kawasan pariwisata.</p>	

**Tabel 6.3**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang Disertai Pagu Indikatif**

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal (2014)	Depatan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2018)	Peringkat Daerah Penanggung jawab
				2015			2016			2017		2018		2019			
				Target	Realisasi	TARGET	Realisasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I.	Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas																
	Tujuan Mewujudkan perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan																
	Sasaran terwujudnya perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan																
	Program																
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 3 tahun	Rata-rata lama sekolah	10,60	24.883.423,000	9,31	27.359.673,529	10,90	27.378.366,000	9,32	20.666.571,260	11,10	72.417.000,600	11,40	31.000.000,000	12	80.000.000,000	Dinas Pendidikan
II.	Meningkatkan akses & kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di Puskesmas																
	Tujuan Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat & keluarga berencana secara merata & berkualitas melalui pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat di																



No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab										
				2015						2016								2017		2018		2019					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K		Rp				K		Rp		K		Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Tujuan Meningkatkan produktivitas hasil pertanian & penerapan teknologi teujat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani																										
	Sasaran Meningkatnya produktivitas hasil pertanian & penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani																										
	Program 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas tanaman padi sawah (%)	62,5	7.926.412.000	62,5	22.461.230.000	62,5	8.719.054.000	68,75	7.600.000.000	81,25	9.500.000.000	81,25	10.450.000.000	81,25	44.155.470.000											Unas Pertanian
	Program 2. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Cakupan bina kelembagaan tani	50	77.500.000	50	73.541.900	50	85.250.000	50	90.000.000	55	99.000.000	55	0	55	351.750.000											Unas Pertanian
	Program 3. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Cakupan bina kelembagaan tani	50	1.652.680.000	50	1.439.158.000	60	1.267.948.000	65	3.000.000.000	70	3.500.000.000	75	3.500.000.000	75	12.420.628.000											Unas Pertanian
	Misi 5 Meningkatkan kuantitas & kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah & interkoneksi dengan kawasan pembangunan di sekitarnya																										

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2015				2016				2017		2018			2019		Kondisi Akhir (2019)
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
6.	Program Pembangunan Saluran/Dorong- gorong			10	10	5.835.345.000,00	1.050.000.000,00	1.670.976.000,00	1.155.000.000,00	3.861.757.000,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	1.776.000.000,00				Dinas Perkim		
	<b>Sasaran 5.2</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta permanfaatan air tanah																		
	Program																		
	Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	10	10	5.835.345.000,00	1.050.000.000,00	1.670.976.000,00	1.155.000.000,00	3.861.757.000,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	1.776.000.000,00					Dinas PUPR		
	<b>Sasaran 5.3</b> Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman																		
	Program																		
	1. Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Cakupan pengembangan sarana perumahan yang dibangun	87	87	3.436.400.000,00	3.472.064.830,00	3.472.064.830,00	3.780.040.000,00	3.780.040.000,00	525.893.600,00	1.700.000.000,00	1.800.000.000,00	12.183.500.000,00	100	12.183.500.000,00	27.679.940.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	2. Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Cakupan desa/kel berakses sanitasi	60	60,71	2.274.445.000,00	4.307.116.727,00	4.307.116.727,00	2.508.890.000,00	2.508.890.000,00	3.207.742.272,00	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	64,7	5.000.000.000,00	27.776.335.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	3. Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Persentase pembangunan sarana dan prasarana air bersih terhadap kebutuhan	79	79	3.465.634.000,00	3.324.887.550,00	3.324.887.550,00	3.812.168.000,00	3.812.168.000,00	7.037.224.430,00	4.500.000.000,00	0	0	0	0	11.771.832.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung jawab			
				2015				2016				2017		2018			2019		Kondisi Akhir (2019)
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan																		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang mampu menyusun PP,IMDes dan APDes tepat waktu	20	25	858.500.000	1.855.965.670	30	944.350.000	30	3.068.541.665	35	3.000.000.000	45	2.100.000.000	50	2.310.000.000	9.272.850.000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa	
	Sasaran 6.2 Meningkatnya pembudayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan																		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pembangunan	40	45	4.647.167.100	5.020.299.071	49	5.111.884.000	49	10.425.973.616	51	3.500.000.000	53	2.000.000.000	59	2.200.000.000		Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa	
VII	Mis 7 Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik ( <i>good and clean governance</i> ) dengan sistem e- government																		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab									
				2015						2016							2017		2018		2019		Kondisi Akhir (2019)		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K		Rp			K		Rp		K			Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan			271.957.500	302.500.000	384.507.250	175.000.000	250.000.000	275.000.000													1.277.500.000		Umas Penanaman Modal dan PISP	
7.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KOH			1.211.531.600	1.317.724.000	1.394.394.700	1.200.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000														7.915.654.000	Inspektorat	
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			845.481.513	965.470.000	897.276.450	1.700.000.000	1.700.000.000	1.870.000.000														7.113.170.000	Umas Kependudukan dan Catpil	
9.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			240.000.000	264.000.000	332.519.200	300.000.000	1.100.000.000	1.270.000.000														3.114.000.000	Umas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<b>Sasaran 7.2</b> terwujudnya peningkatan kapasitas dan perdayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan																								
	Program																								
	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.298.412.750	3.881.442.000	2.783.332.178	2.000.000.000	2.000.000.000	2.193.900.000															13.563.925.600	BKD
	2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			3.945.461.030	4.600.593.000	5.397.845.670	10.000.000.000	6.100.000.000	8.701.800.000															33.965.568.000	Sekretariat DPRD
	3. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar			1.658.068.191	1.897.000.000	1.470.509.000	1.000.000.000	900.000.000	1.037.000.000															6.549.000.000	Sekretariat Daerah

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab							
				2015				2016				2017		2018				2019						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
	Tujuan 7.2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																							
	Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance																							
	Program																							
	1. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat				37.500.000	21.425.000	41.250.000	23.250.000			15.070.000	15.000.000	16.500.000										125.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		75	75	475.000.000	490.684.701	522.500.000	482.564.888			500.000.000	350.000.000	385.000.000										2.232.500.000	Kesbangpol dan Linmas
	3. Program Pemeliharaan Kantantulus dan Pencegahan Tindak Kriminal		3	4	400.000.000	499.953.000	440.000.000	1.277.947.660			1.300.000.000	1.300.000.000	1.316.000.000										4.755.000.000	Satpol PP
	4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PeKart)		16	85	110.000.000	110.000.000	121.000.000	125.002.000			135.000.000	200.000.000	177.690.000										743.690.000	Satpol PP
	5. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				3.424.365.000	3.370.625.185	3.767.352.000	665.956.500			1.150.000.000	500.000.000	1.270.340.000										10.113.057.000	Satpol PP

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 dapat dirumuskan, yaitu:

#### **“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Wisata”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Tapanuli Utara** : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- Lumbung Pangan** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.
- Lumbung Sumberdaya Manusia** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).
- Berkualitas** : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.
- Daerah Wisata** : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan

- lokasi pengembangan industri hasil pertanian.
- Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen.** : Dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan peningkatan kesejahteraan petani, dijamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan disekitarnya.** : Untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat diperlukan infrastruktur jalan yang berkualitas, memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan serta mampu meningkatkan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan disekitarnya.
- Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan** : Perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari pembangunan desa sebagai konteks sosial dan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan, harus dilihat dari keterkaitan antar desa, desa dengan kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten yang merupakan perwujudan dari desa sebagai pusat percepatan pembangunan.
- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik (*good and clean governance*) dengan sistem *e-Government*.** : Mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
- Mengembangkan minat bakat generasi muda di bidang seni-budaya dan olahraga** : Mewujudkan generasi muda yang memiliki sumberdaya manusia yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas yang tinggi terhadap keragaman seni budaya dan olah raga di Kabupaten Tapanuli Utara.

Misi tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD.

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019**

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Misi 1 : Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas	Mewujudkan perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan	Terwujudnya perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan
2.	Misi 2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di puskesmas	Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana secara merata dan berkualitas melalui pelayanan kesehatan dasar yang gratis bagi masyarakat di puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana secara merata dan berkualitas melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar yang gratis bagi masyarakat di puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat
3.	Misi 3 Menjadikan Tapanuli Utara sebagai industri pertanian	Mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian	Berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian
4.	Misi 4 Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
5.	Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan di sekitarnya	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan wilayah kawasan pembangunan di sekitarnya	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang handal yang terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk pelayanan publik dan aparat			
6.	Misi 6 Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
7.	Misi 7 Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public ( <i>good and clean governance</i> ) dengan sistem <i>e-government</i>	Mewujudkan peningkatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparat pelayanan publik	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
			Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparat pemerintahan daerah yang berkelanjutan

**Tabel 5.3.**  
**Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2014)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2019)	
						2015		2016		2017	2018		2019
						Target	Realisasi	Target	Realisasi				
I.	Misi 1 : Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas	Mewujudkan perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan	Terwujudnya perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	11,8	12	11,87	12	11,96	12	12	12	
II.	Misi 2 Meningkatkan akses & kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di Puskesmas	Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat & keluarga berencana secara merata & berkualitas melalui pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat di Puskesmas & pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat & keluarga berencana secara merata & berkualitas melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat di Puskesmas & pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,57	70,57	67,55	70,98	67,85	71,15	71,76	72,26	
III.	Misi 3 Menjadikan Tapanuli Utara sebagai industri pertanian	Mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian	Berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian	Jumlah usaha industri pertanian	8	8	651	11	659	661	665	668	
IV.	Misi 4 Menjamin ketersediaan bibit unggul dari pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (Ton) (Kwintal/Ha):									
				a. Padi sawah	150.000 58,00	150.000 58,00	148,132 58,54	165.000 58,00	151.335 58,70	154.300 58,75	157.500 59,00	160.600 59,25	
				b. Padi ladang	8.600 25,75	8.600 25,75	12,446 34,62	8.800 25,85	19,577 45,21	20,752 4,55	21,997 4,70	23,317 4,80	
				c. Jagung	21.950 48,55	21.950 48,55	14,866 34,52	22,450 48,60	37,246 52,95	39,481 5,31	41,850 5,39	44,361 5,54	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2014)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2019)	
						2015		2016		2017	2018		2019
						Target	Realisasi	Target	Realisasi				
VI.	Misi 6 Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	<p>elayanan publik dan aparatur</p> <p>1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan</p>	<p>Persentase penduduk miskin</p> <p>Persentase desa berstatus swasembada</p>	11,50	11,50	11,41	11,12	11,25	10,64	9,99	9,31	9,31
					1,21	1,21	1,7	1,70	1,7	2,55	5,10	7,55	7,55
VII.	Misi 7 Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik ( <i>good and clean governance</i> ) dengan sistem <i>e-government</i>	<p>1. Mewujudkan peningkatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur pelayanan publik</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.</p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.</p>	<p>Persentase pekerjaan yang sudah memiliki standar</p> <p>Capaian skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>Opini penilai administrasi keuangan oleh BPK</p>	50	50	100	60	100	75	100	100	100
					65	65	65,13	63	69,41	100	100	100	100

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			4. Peningkatan pola pangan harapan melalui gerakan diversifikasi pangan yang berbasis pangan lokal
		4. Perdagangan	1. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki masih terbatas disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran 2. Informasi dan analisa pasar masih belum optimal
		5. Kehutanan	1. Penataan Kawasan Hutan dan penanganan lahan kritis 2. Perambahan, pencurian hasil hutan dan kebakaran hutan 3. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan
		6. Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan 2. Perlunya regulasi tentang pengelolaan tambang batuan dan non logam 3. Data dan informasi tentang potensi sumberdaya mineral dan kualitas cadangan belum rinci 4. Pemanfaatan potensi listrik tenaga mikro hidro
		7. Perindustrian	1. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki masih terbatas disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran 2. Belum berkembangnya industri pengolahan produk pertanian dan turunannya 3. Desain dan standarisasi mutu serta kualitas produk yang belum optimal
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Pemerintah Umum	1. Aktualisasi <i>Good Government and Clean Government</i> 2. Lemahnya penerapan dan aktualisasi prinsip-prinsip <i>Good Government and Clean Government</i> banyak dipengaruhi keadaan, yang mana pada dasarnya SDM birokrasi belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya <i>Good Government and Clean Government</i> 3. Penetapan batas wilayah 4. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan 5. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)
		2. Pengawasan	1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran 2. Masih belum konsistennya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			<p>keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sehubungan dengan itu isu strategis yang perlu menjadi perhatian ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan/pembangunan infrastruktur perhubungan darat</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian operasional angkutan barang dan orang di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>3. Peningkatan keselamatan jalan melalui pemenuhan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, marka jalan, delineator dan guardrail</li> </ol>
		10. Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi serta sumber daya manusia komunikasi dan informasi serta belum meratanya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi (TIK)
		11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM yang relatif rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal dan kebijakan serta peraturan yang kurang efektif yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi</li> <li>2. Sebagian besar UMKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar</li> <li>3. Kurang optimalnya peran sistem pendukung dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga litbang, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB dan lain-lain. Peran sistem pendukung UMKM juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif</li> </ol>
		12. Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah</li> <li>2. Peningkatan partisipasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>3. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN)</li> </ol>
		13. Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda melalui keterampilan, kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi iman dan takwa</li> </ol>

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Ketersediaan sistem informasi rawan bencana beserta mitigasi bencana</li> <li>5. Tingkat waktu tanggap (response time) penanganan bencana</li> <li>6. Prasarana sarana tanggap darurat</li> </ul>
		6. Sosial	Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
II	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar</b>	1. Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta ketidakberdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global</li> <li>2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka</li> </ul>
		2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum berperannya lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam mendukung pokja sebagaimana amanat strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender
		3. Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penyediaan pangan beragam berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi</li> <li>2. Pengembangan bibit dan pakan ternak</li> <li>3. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal</li> <li>5. Peningkatan pola pangan harapan melalui gerakan diversifikasi pangan yang berbasis pangan lokal</li> </ul>

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara 2014-2019, karena dari tahap ini akan diketahui apa tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama lima tahun ke depan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya. Isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas
2. Peningkatan Akses Pelayanan di Bidang Kesehatan
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
4. Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi
6. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik
7. Percepatan Pembangunan Perdesaan yang Berkualitas
8. Minat Generasi Muda Terhadap Seni Budaya dan Olah Raga

Secara rinci, isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendidikan vokasi</li> <li>2. Peningkatan kualitas guru</li> </ol>
		2. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular difokuskan pada berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dengan indikator antara lain; Angka Case Detection Rate penyakit TB. Angka keberhasilan pengobatan TB. Angka penemuan kasus baru kusta, Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks, leptospirosis) ditangani sesuai standard, CFR diare pada saat KLB, Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B, Jumlah penduduk kelompok usia &gt; 15 tahun yang mengikuti test HIV, Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk, dan Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API).</li> </ol>

pertanian. Beberapa permasalahan dalam pengembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa antara lain :

- a. Produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan belum optimal karena pengelolaannya belum profesional dan sebagian besar masih secara tradisional.
- b. Perekonomian daerah belum berkembang karena (a) terbatasnya akses informasi pasar; (b) masih rendahnya penerapan teknologi tepat guna; dan (c) belum berkembangnya informasi yang terkait dengan potensi unggulan daerah;
- c. Kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal belum optimal.
- d. Akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar) belum optimal.
- e. Produktivitas dan daya saing produk UMKMK masih terbatas.
- f. Penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala kecil, menengah dan besar belum optimal.

Di sisi lain permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang masih tergantung kepada alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kreatif dan terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan (PAD) pada masa yang akan datang.

#### **4.1.4.2. Ketersediaan Sarana/Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan**

Salah satu kendala utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur, baik ekonomi, sosial dan pemerintahan atau fasilitas publik lainnya. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan utama yang dihadapi adalah belum seluruhnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dijangkau oleh infrastruktur yang memadai sehingga akses masyarakat terhadap layanan transportasi yang dapat menjangkau lokasi permukiman, lokasi produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan lain-lain, serta lokasi obyek-obyek wisata masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan layanan transportasi darat.

Masalah lainnya adalah terbatasnya infrastruktur pengairan untuk mendukung ketahanan pangan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana/prasarana infrastruktur pengairan serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pengembangan sumberdaya air, khususnya dibidang air baku dan irigasi.

Dalam penyediaan air bersih, masalah yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih di pedesaan serta belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya air sebagai sumber air bersih bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Dalam mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing dituntut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang tercermin dalam setiap kegiatan pembangunan. Berbagai masalah yang muncul terkait dengan bidang lingkungan antara lain:

- a. Lemahnya hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar.
- c. Sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan.
- d. Rendahnya pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir).
- e. Belum optimalnya pengembangan industri yang berbasis pariwisata.
- f. Kurangnya stimulus (bantuan modal) dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen dalam pengembangan industri kecil dan menengah.

#### **4.1.3.3.7. Transmigrasi**

Permasalahan pada urusan Transmigrasi antara lain :

Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

#### **4.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **4.1.3.4.1. Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan pada urusan Administrasi Pemerintahan antara lain :

- a. Belum ditetapkan Indiktor Kinerja Utama masing-masing Perangkat Daerah sehingga ada kendala dalam menentukan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.
- b. Belum seluruhnya kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai SOP.

##### **4.1.3.4.2. Pengawasan**

Permasalahan pada urusan Pengawasan antara lain : belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.

##### **4.1.3.4.3. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan pada urusan Perencanaan Pembangunan antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) sehingga Bappeda selaku koordinator dalam menyusun dokumen perencanaan tingkat kabupaten (RPJPD, RPJMD, RKPD) mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen dimaksud.
- b. Belum semua Perangkat Daerah melakukan pelaporan/pengisian data pada website <http://sipd.bangda.kemendagri.go.id>. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 144 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD. Ketidaktersediaan data akan menyebabkan proses penyelesaian dokumen perencanaan menjadi terhambat.

#### **4.1.3.2.17. Perpustakaan**

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung budaya gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat.
- b. Masih kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan perpustakaan.

#### **4.1.3.2.18. Kearsipan**

Permasalahan pada urusan Kearsipan antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola kearsipan daerah dalam mendukung penataan kearsipan pemerintah daerah.
- b. Kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam mendukung pengembangan tata kelola kearsipan daerah.

#### **4.1.3.3. Urusan Pilihan**

##### **4.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan pada urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Masih rendahnya pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan dan kapasitas petani dalam memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat.
- b. Masih rendahnya produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar.

##### **4.1.3.3.2. Pariwisata**

Permasalahan pada urusan Pariwisata antara lain :

- a. Masih terbatasnya upaya pengembangan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kepariwisataan seperti fasilitas dan jasa transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan menuju ke obyek-obyek wisata dan sarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.
- b. Peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan masih minim, dimana seharusnya masyarakat lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjadi prioritas utama untuk berusaha dan terlibat langsung di dalamnya.
- c. Obyek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai serta terbatasnya akses menuju obyek wisata.
- d. Sumber Daya Manusia dalam bidang kepariwisataan belum dapat berperan secara maksimal baik dari segi jumlah maupun kualitas serta belum optimalnya pembangunan citra daerah wisata yang akan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- e. Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan secara arif dan berkelanjutan terutama memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah untuk mendukung wilayah *Geopark Caldera Toba*.

- b. Belum optimalnya penataan transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi dan mutu lingkungan hidup sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa dan perdagangan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terminal angkutan darat dan dermaga yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Masih kurangnya penataan dan ketersediaan prasarana, sarana pengaman dan rambu-rambu jalan.
- e. Lebar ruas jalan penghubung antar kabupaten-kota belum memenuhi standar untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
- f. Belum optimalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka menghapus keterisolasian wilayah.

#### **4.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar
- b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha
- c. Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi
- d. Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi
- e. Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap teknologi informasi
- f. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat

#### **4.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
- b. Masih kurangnya stimulus (bantuan modal) dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
- c. Masih minimnya penerapan pola kemitraan koperasi dan UKM dengan perusahaan lain
- d. Masih lemahnya promosi produk koperasi dan UKM serta upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas.
- e. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil pertanian.

#### **4.1.3.2.12. Penanaman Modal**

Permasalahan pada urusan Penanaman Modal antara lain :

- a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara

- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

#### **4.1.3.2.3. Pangan**

Permasalahan pada urusan Pangan antara lain :

- a. Produksi bahan pangan Kabupaten Tapanuli Utara masih jauh di bawah tingkat konsumsi masyarakat sehingga mendatangkan dari daerah lain. Hal ini sewaktu-waktu dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Ketersediaan pangan khususnya protein (daging, susu, telur) yang dihasilkan oleh petani di Tapanuli Utara masih rendah, sehingga sebagian besar kebutuhan protein dipasok dari luar daerah.
- c. Masih ditemukan beberapa daerah rawan pangan, hal ini dapat digambarkan dengan masih adanya desa-desa terpencil yang masih sulit untuk menjangkau/memperoleh kebutuhan pangan.
- d. Belum tercapainya distribusi dan akses pangan, dimana masih ada keterbatasan dalam ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
- e. Belum optimalnya kemampuan desa untuk dapat memenuhi dan mengelola kebutuhan pangannya dalam rangka mewujudkan lumbung pangan dan mandiri pangan.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Kabupaten Tapanuli Utara.
- g. Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau.

#### **4.1.3.2.4. Pertanahan**

Permasalahan pada urusan Pertanahan antara lain:

- a. Masih adanya kasus sengketa tanah negara dikarenakan masih kurangnya informasi status kepemilikan tanah negara.
- b. Kurang tersedianya data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bersertifikat.
- c. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat.
- e. Masih banyaknya status kepemilikan tanah ulayat yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat.

#### **4.1.3.2.5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar dan penebangan liar (*illegal logging*).
- b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan lintas wilayah dalam menangani masalah-masalah perusakan alam.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam masih mengabaikan kelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam.

- c. Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini terlihat dari rasio dokter per 1.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 0,32 dan tahun 2016 sebesar 0.30 sedangkan rasio tenaga medis per 1.000 penduduk pada tahun 2015 dan 2016 berada pada angka 2.79. Artinya penambahan tenaga medis relatif tidak ada sementara jumlah penduduk setiap tahun selalu bertambah.

#### **4.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain :

- a. Belum optimalnya mobilitas pada jalan kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dapat digambarkan dengan kondisi jalan baik di Kabupaten Tapanuli Utara masih mencapai 68% pada tahun 2016 sehingga masih membutuhkan penanganan sepanjang  $\pm$  400 km.
- b. Belum optimalnya 168 daerah irigasi untuk mengairi luas lahan budidaya sebesar 15.905 Ha dan fungsi kelembagaan pengelolaan irigasi.
- c. Belum terpenuhinya penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- d. Belum diimplementasikannya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Utara dan masih dibutuhkannya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk aktivitas pemerintah.
- e. Penataan Ruang belum menjadi perhatian bagi stakeholder di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dapat terlihat dari belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan Kawasan Strategis, tingkat ketaatan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037 masih rendah, aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang tata ruang belum tersedia, dan masih minimnya pemahaman masyarakat terkait penataan ruang.

#### **4.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

- a. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin.
- b. Belum terintegrasinya sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan.
- c. Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu penanganan lebih lanjut.
- d. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana umum di kawasan perumahan dan permukiman.
- e. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

#### **4.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan.

Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara belum digali dan dikembangkan sebagai potensi wisata. Peningkatan kinerja obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.

3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Tapanuli Utara belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian dan kebutuhan domestik. Selain itu kondisi jaringan irigasi juga belum memadai. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani, terutama di wilayah desa. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan jasa telepon salah satunya disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang berbukit.

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih

Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta belum optimalnya pelayanan publik.

#### **4.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan bagi masyarakat menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang bermutu tinggi adalah pelayanan publik yang lahir dari sistem dan mekanisme yang transparan, cepat, murah dan manusiawi. Kondisi seperti ini belum bisa dicapai dengan masih rendahnya komitmen bersama untuk segera mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mendukung pelayanan publik tersebut, pemerintah daerah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas

**Gambar 4.1**  
**Hubungan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**serta Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara**



#### **4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Permasalahan aspek geografi dan demografi menjadi isu utama perencanaan pembangunan yang menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi corak daerah. Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi berdasarkan aspek geografi dan demografi antara lain:

##### **4.1.1.1. Geografi**

Berdasarkan aspek geografis, permasalahan yang paling mencolok adalah kegagalan dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam secara optimal. Wilayah yang sebagian besar bergelombang dan berbukit menyebabkan beberapa kendala dalam pengembangan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Di beberapa wilayah bahkan masih terdapat beberapa daerah yang terisolir, sementara di wilayah perkotaan terjadi kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman (aglomerasi perkotaan). Untuk itu, optimalisasi potensi sumberdaya alam harus dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* sehingga dapat meningkatkan minat para investor termasuk putra-putri daerah di perantauan untuk berinvestasi di daerah ini dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

## **BAB VII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Program pembangunan merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Setelah program diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program pembangunan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya), sebagaimana diuraikan pada Gambar 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019**

No	Kapasitas Riil/Belanja	Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target	
		Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018
	Belanja	1.084.083.696.205,90	1.097.187.075.012,12	1.253.241.167.821,69	1.250.082.118.763,24	1.298.557.000.000	1.464.457.700.000	1.544.702.700.000			
1	Belanja Tidak Langsung	678.303.929.192,17	623.716.428.971	823.505.148.491,69	758.696.846.118	801.160.000.000	876.200.000.000	941.200.000.000			
1.1	Belanja Pegawai	584.539.679.917,17	520.036.594.347	640.095.331.216,69	559.982.502.286	500.000.000.000	550.000.000.000	600.000.000.000			
1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	1.112.065.000	-	-	-			
1.3	Belanja Hibah	-	8.405.448.609	-	12.024.468.800	25.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000			
1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	892.970.000	-	962.410.000	1.160.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000			
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	93.764.249.275	93.584.696.015	-	183.049.033.532	250.000.000.000	275.000.000.000	300.000.000.000			
1.6	Belanja Tidak Terduga	-	796.720.000	-	1.566.366.500	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000			
2	Belanja Langsung	374.960.584.024	473.470.646.041,12	411.736.019.330	492.497.337.645,24	497.397.000.000	588.257.700.000	603.502.700.000			
2.1	Belanja Pegawai		42.445.156.374		43.902.076.090	54.713.670.000	52.943.193.000	54.315.243.000			
2.2	Belanja Barang dan Jasa		190.475.583.285,71		209.586.855.467,21	268.594.380.000	282.363.696.000	289.681.296.000			
2.3	Belanja Modal		240.549.906.381,41		238.928.406.088,03	174.088.950.000	252.950.811.000	259.506.161.000			
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.084.083.696.205,90</b>	<b>1.097.187.075.012,12</b>	<b>1.253.241.167.821,69</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>1.298.557.000.000</b>	<b>1.464.457.700.000</b>	<b>1.544.702.700.000</b>			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017



NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	DPO PEMANGGONG JAWAB					
					2015			2016			2017			2018					2019				
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.2	RSU Daerah Tembung	Lakukan layanan administrasi yang tertangani	%	100	28.527.278.200	33.434.910.688,00	100	4.021.202.490,00	31.380.018.000	100	5.591.290.000	42.448.403.870	100	4.800.000.000	65.700.000.000	57.200.000.000	4.200.000.000	4.620.000.000	82.920.000.000	245.728.286.200	24.294.280.600	RSUD Landung	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lakukan kegiatan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	300.000.000,00	820.230.000,00	75	330.000.000	330.000.000	80	480.000.000	518.742.272	80	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000		
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepuasan pegawai	%	85	0	0	85	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	10.454.600.000	174.735.000,00	70	11.500.000.000	194.382.000	85	65.000.000	43.844.000	85	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	436.054.003	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu merealisasikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.499.000,00	70	14.850.000	14.850.000	80	14.850.000	13.500.000	80	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	22.314.660.000	
6	Program Duet dan Perbaikan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	90	6.073.270.600	10.430.765.530,00	93	6.680.540.000	6.680.540.000	94	8.006.000.000	13.405.498.979	94	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	42.350.000	
7	Program Ujaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah rujukan Jemasteste RSUD Tembung ke RSUD di Medan	Orang	50	440.000.000	618.324.000,00	45	484.000.000	484.000.000	44	44.000.000.000	43.267.000	44	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	52.800.000.000	145.724.000.000	145.724.000.000		
8	Program Pengabdian, Peningkatan & Pertukaran Sarana & Prasarana Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	%	75	3.071.777.997	3.234.070.347,00	78	3.488.405.000	3.488.405.000	80	4.700.000.000	6.735.123.011	80	4.700.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000	5.500.000.000	21.859.689.997	21.859.689.997	21.859.689.997	
9	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit secara rutin/berkala	%	50	655.000.000	1.455.259.380,00	60	698.500.000	698.500.000	70	700.000.000	1.015.388.580	70	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	2.033.500.000	
10	Program Kemiripan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan kerjasama kemitraan (jumlah kader PPKS yang bertugas di RSUD)	Orang	16	1.680.000.000	1.848.000.000	16	1.848.000.000	1.848.000.000	16	1.950.000.000	1.950.000.000	16	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	5.478.000.000	
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan tipe RS dalam pelayanan kesehatan	Skala	Type C	300.000.000	431.649.300,00	Type C	330.000.000	330.000.000	Type C	293.000.000	810.444.600	Type C	293.000.000	293.000.000	293.000.000	293.000.000	293.000.000	293.000.000	293.000.000	293.000.000	923.000.000	
12	Program Sistem Informasi Kesehatan				200.000.000	198.660.000,00		270.000.000	270.000.000		305.000.000	185.705.000		305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	775.000.000	
13	Program Promosi Kesehatan & pemberdayaan masyarakat				200.000.000	198.660.000,00		270.000.000	270.000.000		305.000.000	185.705.000		305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	34.000.000	
1.2.3	Akademi Keadilan Tembung				2.723.424.820	3.063.678.582,00		2.985.768.000	2.985.768.000		3.485.171.220	3.485.171.220		3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	3.485.171.220	11.386.592.820	
1	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	1.000.748.920	990.248.399,00	100	1.000.874.000	1.000.874.000	100	1.033.832.807	1.033.832.807	100	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	1.033.832.807	4.573.572.970
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kegiatan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	355.355.900	446.095.556,00	75	394.182.000	394.182.000	75	446.095.556,00	1.572.558.227	80	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	446.095.556,00	1.172.547.900
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepuasan pegawai	%	85	0	0	85	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	90.000.000	109.306.699,00	70	98.000.000	98.000.000	70	109.306.699,00	219.949.766	75	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	109.306.699,00	459.000.000
5	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merealisasikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.435.000,00	70	14.850.000	14.850.000	75	13.487.000	13.487.000	80	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	13.487.000	67.750.000
6	Program Pendidikan Tinggi	Persentase Program Pendidikan Tinggi	%	90	1.260.820.000	1.504.578.928,00	92	1.366.902.000	1.366.902.000	92	1.504.578.928,00	369.984.000	94	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	1.504.578.928,00	3.627.722.000
7	Program Indorama Perguruan Tinggi	Persentase Program Indorama Perguruan Tinggi	%	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000.000	



NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERENCANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		OPD PENANGGUNG JAWAB				
					2015				2016				2017				2018				2019		
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target			Realisasi		Target	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Malaria (Peklat)	Jumlah Operasi Pemak Mesyarakat (Peklat)	Kali	16	85	110.000.000,00	90	171.000.000,00	90	171.000.000,00	90	175.000.000,00	95	135.000.000,00	97	200.000.000,00	98	177.690.000,00	98	743.690.000,00			
9	Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Keamanan Masyarakat	Jumlah Operasi Kuch Sasang kepada Pelajar	Kali	40	24	75.000.000,00	24	87.500.000,00	24	87.500.000,00	24	265.409.000,00	24	360.000.000,00	24	200.000.000,00	24	191.000.000,00	120	908.500.000,00			
10	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	%	85	85	100.000.000,00	85	110.000.000,00	85	110.000.000,00	85	665.856.500,00	30	300.000.000,00	90	210.000.000,00	95	238.000.000,00	95	951.000.000,00			
11	DKM Sub Bidang Satpol PP	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan Peneguhan batteja kebidanan	%			2.743.000.000,00		2.467.300.000,00		2.467.300.000,00		3.370.625.865,00		3.167.352.000,00		1.150.000.000,00		1.770.840.000,00		4.710.300.000,00			
12	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan Peneguhan batteja kebidanan	Ketepatan waktu penanganan kejadian	%			3.474.885.000,00		3.167.352.000,00		3.167.352.000,00		665.856.500,00		1.150.000.000,00		500.000.000,00		1.770.840.000,00		10.183.057.000,00			
15.3	Bidang Penanggulangan Bencana Daerah																						
1	Pelebaran Administrasi Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	100	1.675.652.000,00	100	1.942.668.000,00	100	1.942.668.000,00	100	5.870.517.990,00	100	14.374.000.000,00	100	16.089.000.000,00	100	9.432.200.000,00	100	45.843.070.000,00	8960		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	33.750.000,00	75	17.849.600,00	75	37.175.000,00	75	49.720.710,00	80	120.000.000,00	82	300.000.000,00	84	2.263.875.000,00	85	2.753.875.000,00			
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	10.000.000,00	90	30.000.000,00	95	40.000.000,00	100	80.000.000,00			
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	15.000.000,00	70	7.055.000.000,00	70	16.500.000,00	75	17.849.600,00	75	14.850.000,00	80	25.000.000,00	80	27.500.000,00	80	14.000.000,00			
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merapikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	15.500.000,00	70	13.499.200,00	75	14.850.000,00	75	13.499.870,00	80	14.000.000,00	80	14.000.000,00	85	15.470.000,00	90	7.750.000,00			
6	Pengembangan Dan dan Penanggulangan Kurban Bencana Daerah	Persentase cakupan wilayah yang siap bencana	%	100	100	220.000.000,00	100	219.071.850,00	100	242.000.000,00	100	143.366.850,00	100	600.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	3.262.000.000,00			
7	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Daerah	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Bencana Daerah yang Ditandatangani	%	60	65	68.000.000,00	65	555.270.000,00	70	74.800.000,00	70	297.629.800,00	70	13.200.000.000,00	70	13.200.000.000,00	70	5.150.000.000,00	70	30.492.800.000,00			
8	Medanuratan dan Logistik Bencana Daerah	Cakupan ketersediaan logistik bencana	%	65	65	51.403.316,00	65	576.690.000,00	65	582.552.000,00	65	240.839.550,00	70	300.000.000,00	70	750.000.000,00	75	775.000.000,00	75	1.898.962.316,00			
9	Program Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat	Paket	4	4	8.833.523.400,00	4	8.833.523.400,00	4	2.600.000.000,00	4	4.842.803.972,00	4	1.500.000.000,00	4	2.600.000.000,00	4	4.000.000.000,00	4	4.000.000.000,00			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPO PENANGGUNG JAWAB			
					2015			2016			2017			2018					2019		
					Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi			Target		Realisasi
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
I	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																				
2.1	Urusan Tenaga Kerja				1.321.800.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.453.300.000	1.453.300.000	1.453.300.000	623.070.304	623.070.304	3.684.000.000	3.684.000.000	3.569.000.000	3.569.000.000	3.535.900.000	3.535.900.000	13.963.380.600	13.963.380.600	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi yang bertanggung	%	100									430.000.000	430.000.000	370.000.000	370.000.000	677.000.000	677.000.000	1.627.000.000	1.627.000.000	
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian locakulian sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75									240.000.000	240.000.000	500.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	1.790.000.000	1.790.000.000	
	3 Peningkatan Kualitas Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85									10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	41.500.000	41.500.000	
	4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70									60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	97.000.000	97.000.000	207.000.000	207.000.000	
	5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesepakatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	70									14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	15.400.000	15.400.000	43.400.000	43.400.000	
	6 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	86,8	1.155.000.400		1.288.732.200.000	1.270.500.000	500.000.000	444.925.004				500.000.000	550.000.000	605.000.000	605.000.000	605.000.000	4.080.500.400	4.080.500.400	
	7 Peningkatan Kesempatan Kerja	Capaian Pelayaran Penempatan Tenaga Kerja	%	97,95	661.800.200		201.074.600.000	182.795.000	200.000.000	178.145.200				200.000.000	270.000.000	270.000.000	200.000.000	200.000.000	968.975.200	968.975.200	
	8 Program Peningkatan Pelatihan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	%						2.000.000.000					1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	
	9 Program Hubungan Industrial dan Penguasaan Kerja												100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	165.000.000	165.000.000	415.000.000	415.000.000	
	10 Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja												180.000.000	180.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	340.000.000	340.000.000	

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Saluan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		OPP PENANGGUNG JAWAB			
					2015				2016				2017		2018		2019			Target	Rp	
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.3	Urusan Lingkungan Hidup					15.280.155.000	12.211.580.994,00	12.211.580.994,00	15.892.276.000	15.892.276.000	15.892.276.000	11.004.821.903	11.004.821.903	8.839.000.000	8.839.000.000	10.841.900.000	10.841.900.000	55.242.286.000	55.242.286.000			
	Dinas Lingkungan Hidup					4.802.343.000	4.802.343.000	4.802.343.000	5.094.880.000	5.094.880.000	5.094.880.000	1.936.394.972	1.936.394.972	850.000.000	850.000.000	935.000.000	935.000.000	11.977.233.000	11.977.233.000			Dinas Lingkungan Hidup
	Pelayanan Administrasi Perizinan		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	75	75	4.297.723.000	3.816.484.510,00	3.816.484.510,00	4.244.570.000	4.244.570.000	4.244.570.000	2.584.439.800	2.584.439.800	1.900.000.000	1.900.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	13.677.274.000	13.677.274.000			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	85	85	195.000.000	195.000.000	195.000.000	209.565.000	209.565.000	209.565.000	146.322.200	146.322.200	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.038.515.000	1.038.515.000			
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		%	70	70	215.000.000	210.495.441,00	210.495.441,00	181.580.000	181.580.000	181.580.000	139.985.000	139.985.000	125.000.000	125.000.000	127.500.000	127.500.000	1.039.060.000	1.039.060.000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		%	70	70	54.000.000	47.838.200,00	47.838.200,00	44.562.000	44.562.000	44.562.000	35.866.150	35.866.150	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.567.000	14.567.000			
6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		%	25	30	4.055.000.000			4.504.610.000	4.504.610.000	4.504.610.000			1.800.000.000	1.800.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	3.253.990.000	3.253.990.000			
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		%	25	30	50.900.000	583.493.800,00	583.493.800,00	552.090.000	552.090.000	552.090.000	270.813.000	270.813.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.253.990.000	3.253.990.000			
8	Pertindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		%			804.085.000	840.300.000,00	840.300.000,00	884.497.900	884.497.900	884.497.900	1.696.910.000	1.696.910.000					1.698.586.900	1.698.586.900			
	Pertindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		%			370.000.000	362.857.540,00	362.857.540,00	352.000.000	352.000.000	352.000.000	344.370.650	344.370.650	350.000.000	350.000.000	1.814.000.000	1.814.000.000	3.686.000.000	3.686.000.000			
	Pertindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Dok																			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/COME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		DPO PENANGGUNG JAWAB				
					2015				2016				2017		2018		2019			Target	Rp		
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2.5	Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pelayanan Administrasi) Perkantoran					6.426.886,00	7.069.500,00	7.763.226.286,00	7.069.500,00	7.069.500,00	7.069.500,00	6.856.398.368	6.856.398.368	6.079.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00	6.888.900,00	6.888.900,00	33.822.299,00	33.822.299,00			
		Capaian layanan administrasi yang tertanggung	%	100	100	368.795,000	405.657,000	475.264.865,00	405.657,000	405.657,000	405.657,000	642.193.252	642.193.252	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	33.822.299,00	33.822.299,00		Dinas Permas	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	66.940,000	73.634,000	102.572,000	75	73.634,000	75	766.766,051	766.766,051	85.000,000	85.000,000	85.000,000	84	270.000,000	270.000,000	645.574,000	645.574,000		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat ketepatan pegawai	%	85	85				85		85			10.000,000	10.000,000	10.000,000	95	16.500,000	16.500,000	41.500,000	41.500,000		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	62.000,000	68.200,000	61.942,450,00	75	68.200,000	75	67.592,400	67.592,400	80	50.000,000	50.000,000	85	55.000,000	55.000,000	285.700,000	285.700,000		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	13.500,000	13.500,000	13.500,000,00	75	14.850,000	75	12.734,150	12.734,150	80	15.000,000	15.000,000	85	15.400,000	15.400,000	72.750,000	72.750,000		
6	Peningkatan Keterbacaan Masyarakat/Pendataan	Jumlah kelompok Lembaga perkenyamanan masyarakat (LPM)	LPM	241	241	409.932,000	450.976,000	283.742,000,00	241	450.976,000	241	593.272,250	593.272,250	241	250.000,000	250.000,000	241	1.000.000,000	1.000.000,000	3.210.858,000	3.210.858,000		
7	Pembinaan dan Fasilitas Pengabdian Keuangan Desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMD/Desa dan AP/Desa tepat waktu	%	20	25	858.500,000	944.350,000	1.855.965.600,00	30	944.350,000	30	3.068.941,665	3.068.941,665	35	3.000,000,000	3.000,000,000	50	2.300,000,000	2.300,000,000	9.212.850,000	9.212.850,000		
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program Pembangunan	Desa	40	45	4.647,067,000	5.111.884,000	5.070.239,071,000	49	5.111.884,000	49	1.042.923,600	1.042.923,600	50	3.500,000,000	3.500,000,000	50	2.000,000,000	2.000,000,000	17.459,051,000	17.459,051,000		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYAJIAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPO PENANGGUNG JAWAB								
					2015				2016				2017						2018				2019			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
27	Usaha Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2.583.000.000	2.844.300.000	2.655.972.000.00	2.844.300.000	2.885.840.243	2.885.840.243	2.885.840.243	2.885.840.243	2.885.840.243	2.570.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	1.855.000.000	1.855.000.000	2.000.000.000	1.999.300.000	1.999.300.000				
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA					510.000.000	2.844.300.000	2.655.972.000.00	2.844.300.000	2.885.840.243	2.885.840.243	2.885.840.243	2.885.840.243	2.570.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	1.855.000.000	1.855.000.000	2.000.000.000	1.999.300.000	1.999.300.000					
1	Penguatan Kelenyangan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi masyarakat dan pemertintah dalam penguatan kelenyangan pengarusutamaan gender	%	50	50	510.000.000	564.300.000	550.539.650.00	564.300.000	573.435.347	573.435.347	573.435.347	573.435.347	60	400.000.000	400.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000				
2	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan sektor pemberdayaan perempuan	%	75	75	370.000.000	407.000.000	366.651.400.00	407.000.000	389.850.000	389.850.000	389.850.000	389.850.000	80	300.000.000	300.000.000	300.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000				
3	Peningkatan Peran Serta dan Kesepahaman Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	6,88	6,88	100.000.000	110.000.000	99.126.600.00	110.000.000	134.636.800	134.636.800	134.636.800	134.636.800	7,55	100.000.000	100.000.000	100.000.000	8	8	8	7,98	7,98				
4	Koordinasi Kerjasama dengan PKK, P3W	Jumlah Kelompok PKK Aktif	PKK	252	252	1.440.000.000	1.584.000.000	1.437.432.450.00	1.584.000.000	1.581.938.096	1.581.938.096	1.581.938.096	1.581.938.096	252	1.300.000.000	1.200.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000				
5	Mesrasen Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					160.000.000	160.000.000	159.960.000.00	160.000.000	155.979.900	155.979.900	155.979.900	155.979.900	2	150.000.000	150.000.000	150.000.000	2	2	2	636.000.000	636.000.000				

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	2015												2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		DPO PENANGGUNG JAWAB																							
					Target			Realisasi			Target			Realisasi			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target			Realisasi																						
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K		Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40											
2.9	Urusan Komunikasi dan Informatika	1) Pelayanan Administrasi Pemerintahan	%	100	330.000.000	330.000.000	516.333.200,00	516.333.200,00	363.000.000	363.000.000	283.586.050	283.586.050	3.617.000.000	3.617.000.000	8.239.000.000	8.239.000.000	9.062.900.000	9.062.900.000	21.604.900.000	21.604.900.000	21.604.900.000	21.604.900.000	10.160.000.000	10.160.000.000	2.080.000.000	2.080.000.000	172.500.000	172.500.000	145.000.000	145.000.000	39.400.000	39.400.000	5.553.000.000	5.553.000.000	2.530.000.000	2.530.000.000	465.000.000	465.000.000	2.480.000.000	2.480.000.000	22	22	Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Calapan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	80	80	990.000.000	990.000.000	2.080.000.000	2.080.000.000	2.080.000.000	2.080.000.000	85	85	2.080.000.000	2.080.000.000	172.500.000	172.500.000	145.000.000	145.000.000	39.400.000	39.400.000	5.553.000.000	5.553.000.000	2.530.000.000	2.530.000.000	465.000.000	465.000.000	2.480.000.000	2.480.000.000										
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	90	90	75.000.000	75.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	95	95	27.500.000	27.500.000	172.500.000	172.500.000	145.000.000	145.000.000	39.400.000	39.400.000	5.553.000.000	5.553.000.000	2.530.000.000	2.530.000.000	465.000.000	465.000.000	2.480.000.000	2.480.000.000										
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	75	40.000.000	40.000.000	55.000.000	55.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	80	80	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	39.400.000	39.400.000	5.553.000.000	5.553.000.000	2.530.000.000	2.530.000.000	465.000.000	465.000.000	2.480.000.000	2.480.000.000											
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merealisasikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	10.000.000	10.000.000	15.400.000	15.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	85	85	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000							
6	Pengembangan Komunitas, Informasi dan Media Massa	Jumlah Kelompok Media Tradisional	Kel	2	4	330.000.000	516.333.200,00	516.333.200,00	363.000.000	363.000.000	283.586.050	283.586.050	7	7	7	760.000.000	760.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	13	13	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000							
7	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	75	850.000.000	850.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	80	80	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000					
8	Program Penguatan Kelembagaan Komunitas dan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah usaha mikro kecil menengah/ KURB	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	75	75	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000				
9	Program e-government	Calapan pembangunan berbasis e-government	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	75	800.000.000	800.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	75	75	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGKUTAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2015				2016				2017		2018		2019				
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP									
1	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	2	3	%	30	340.000.000	340.000.000	387.780.065,00	340.000.000	271.500.000	271.500.000	313.182.200	313.182.200	290.000.000	365.000.000	365.000.000	346.500.000	1.563.000.000	1.563.000.000	1.563.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	3	%	85	215.000.000	267.740.000,00	267.740.000,00	35	236.500.000	236.500.000	313.182.200	313.182.200	250.000.000	275.000.000	302.500.000	50	50	50	1.793.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	3	%	85	125.000.000	114.640.050,00	114.640.050,00	90	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	44.000.000	65	65	65	284.000.000		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		JPD PENANGGUNG JAWAB			
					2015			2016			2017			2018			2019			Target	Rp	
					Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi	Tertarget					Realisasi
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.13	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	1.487.000.000	1.527.266.294,00	1.527.266.294,00	1.487.000.000	1.527.266.294,00	1.527.266.294,00	2.184.022.877	2.184.022.877	2.404.000.000	2.404.000.000	2.404.000.000	2.644.400.000	2.644.400.000	10.070.300.000	10.070.300.000	10.070.300.000	10.070.300.000
			%	100	100	345.600.000	405.746.634,00	405.746.634,00	345.600.000	405.746.634,00	405.746.634,00	575.214.527	575.214.527	800.000.000	800.000.000	800.000.000	880.000.000	880.000.000	2.905.760.000	2.905.760.000	2.905.760.000	2.905.760.000
			%	75	75	268.000.000	220.579.500,00	220.579.500,00	268.000.000	220.579.500,00	220.579.500,00	798.586.598	798.586.598	400.000.000	400.000.000	400.000.000	440.000.000	440.000.000	2.002.800.000	2.002.800.000	2.002.800.000	2.002.800.000
			%	85	85	-	-	-	85	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	27.000.000	27.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
			%	70	70	70.000.000	69.982.300,00	69.982.300,00	70	69.982.300,00	69.982.300,00	74.144.536	74.144.536	80.000.000	80.000.000	80.000.000	88.000.000	88.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
			%	70	70	31.000.000	30.989.400,00	30.989.400,00	31	30.989.400,00	30.989.400,00	75.728.300	75.728.300	14.000.000	14.000.000	14.000.000	15.400.000	15.400.000	108.500.000	108.500.000	108.500.000	108.500.000
			%	60	60	90.000.000	89.280.000,00	89.280.000,00	70	89.280.000,00	89.280.000,00	50.277.665	50.277.665	180.000.000	180.000.000	180.000.000	121.000.000	121.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
			%	75	75	275.000.000	271.957.500,00	271.957.500,00	80	271.957.500,00	271.957.500,00	384.502.250	384.502.250	250.000.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	1.777.500.000	1.777.500.000	1.777.500.000	1.777.500.000
			%	75	75	37.500.000	21.425.000,00	21.425.000,00	80	21.425.000,00	21.425.000,00	23.250.000	23.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	125.250.000	125.250.000	125.250.000	125.250.000
			Ada/Tidak	Ada	Ada	70.000.000	69.989.000,00	69.989.000,00	Ada	69.989.000,00	69.989.000,00	69.638.000	69.638.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	71.500.000	71.500.000	348.500.000	348.500.000	348.500.000	348.500.000
			Ada/Tidak	Ada	Ada	60.000.000	58.995.700,00	58.995.700,00	80	58.995.700,00	58.995.700,00	27.384.900	27.384.900	100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	356.000.000	356.000.000	356.000.000	356.000.000
			Buah	75	75	145.000.000	167.563.500,00	167.563.500,00		167.563.500,00	167.563.500,00	34.200.000	34.200.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	330.000.000	330.000.000	994.500.000	994.500.000	994.500.000	994.500.000
						95.000.000	89.807.700,00	89.807.700,00		89.807.700,00	89.807.700,00	120.559.720	120.559.720	250.000.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	884.500.000	884.500.000	884.500.000	884.500.000

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Situasi	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	OPD PENANGGUNG JAWAB								
					2015				2016				2017						2018				2019			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
2.15	Urusan Perpustakaan				848.600.000		906.419.370,00		933.460.000		1.544.950.907		1.004.000.000		1.479.000.000		1.626.900.000		5.691.860.000							
	Dinas Perpustakaan				848.600.000		906.419.370,00		933.460.000		1.544.950.907		1.004.000.000		1.479.000.000		1.626.900.000		5.691.860.000							
	Pelayanan Administrasi Perantaraan	Cakupan layanan administrasi yang terintegrasi	%	100	184.100.000	100	174.197.880,00	100	202.500.000	100	151.524.720	100	210.000.000	100	500.000.000	100	530.000.000	100	1.826.800.000							
	Pf. Angkutan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan leluasan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	87.000.000	75	116.963.400,00	75	95.700.000	75	521.639.700	80	70.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	462.700.000							
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat ketepatan pegawai	%	85		85		85		85		85	10.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	100	41.500.000							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	5.000.000	70		75	5.500.000	75	7.824.800	80	50.000.000	80	50.000.000	85	55.000.000	85	165.500.000							
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merevisi laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	70	13.500.000,00	75	14.850.000	75	12.321.400	80	14.000.000	80	14.000.000	85	13.410.000	90	69.750.000							
	Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan peduli pustaka	%	50	559.000.000	55	607.569.061,30	55	614.900.000	60	821.640.287	60	650.000.000	65	800.000.000	70	902.000.000	70	3.525.800.000							

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN PENDANAAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Setuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	2016												2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		DPO PEMANGGUNG JAWAB
					Tetapan			Realisasi			Tetapan			Realisasi			Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	Tetapan	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
2.17	Urusan Pemerintahan				240.000.000	27.553.900,00	27.553.900,00	264.000.000	397.519.200	397.519.200	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.430.000.000	1.430.000.000	3.114.000.000	3.534.000.000	3.114.000.000	3.534.000.000	Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		%	50	240.000.000	27.553.900,00	27.553.900,00	264.000.000	397.519.200	397.519.200	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	3.114.000.000	3.114.000.000	3.114.000.000	3.114.000.000	Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	270.000.000	270.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	Kawasan Permukiman			

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENUNJANG

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	2015												2016				2017				2018				2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	CPD PENANGSUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Targat			Realisasi			Targat			Realisasi			Targat			Realisasi			Targat			Realisasi			Targat			Realisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K			Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					5	7	4	8	9	4	10	11	4	12	13	4	14	15	4	16	17	4	18	19	4	20	21	4	22	23	4	24			25	4	26	27	4	28	29	4	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I	URUSAN PUJAH	3	4	5	7	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/OUTCOME)	Saluran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPR PENANGGUNG JAWAB				
					2015				2016				2017		2018				2019			
					Tetapan		Realisasi		Tetapan		Realisasi		Tetapan	Rp	Tetapan	Rp			Tetapan	Rp	Tetapan	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.3	Usaha Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	%	10	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000
	Pengembangan Budidaya Perikanan			10	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000	3.842.650.000

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPD PENANGGUNG JAWAB				
					2015			2016			2017			2018					2019			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.5	Urusan Perindustrian					205.000.000		195.754.070,00		225.500.000		184.430.475		480.000.000		1.644.000.000		1.805.000.000		4.336.600.000		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					205.000.000		195.754.070,00		225.500.000		184.430.475		480.000.000		1.644.000.000		1.805.000.000		4.336.600.000		
	Peningkatan Teknologi Industri		%	75	75	205.000.000		195.754.070,00	75	225.500.000		184.430.475	80	240.000.000	85	264.000.000	85	375.000.000	85	1.309.600.000		
	Peningkatan Kapasitas P1EX Sistem Industri		%	50	50				50			65.955.375	50	70.000.000	50	77.000.000	50		50	147.000.000		
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		%	20	20				20			116.475.000	20	150.000.000	40	1.300.000.000	50	1.430.000.000	50	2.880.000.000		

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	DPO PEMANGGUNG JAWAB				
					2015				2016				2017						2018			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.7	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				2.960.000.000	3.367.938.700.00	3.076.535.000	3.076.535.000	4.305.000.000	4.305.000.000	4.305.000.000	3.595.500.000	3.595.500.000	778.000.000	778.000.000	14.584.835.000	14.584.835.000	Dinas Lingkungan Hidup				
	Dinas Lingkungan Hidup				2.960.000.000	3.367.938.700.00	3.076.535.000	3.076.535.000	4.305.000.000	4.305.000.000	4.305.000.000	3.595.500.000	3.595.500.000	778.000.000	778.000.000	14.584.835.000	14.584.835.000					
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketangulahan	Calupan pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga	%	85	115.000.000	1.068.649.600.00	1.335.000	1.335.000	90	1.200.000.000	1.335.000	1.335.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	1.000.000.000					
	2	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan	Terbuka dan Terwaspada Kegiatan Pertambangan	%	60	135.000.000	70.573.800.00	125.000.000	63	125.000.000	125.000.000	125.000.000	68	143.000.000	75	143.000.000	533.000.000					
	3	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi	Terbuka dan Terwaspada Kegiatan Bidang Energi	%	100	50.000.000	49.549.200.00	120.000.000	100	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	775.000.000					
	4	Pengembangan Informasi/Updating Potensi Sumber Daya Mineral dan Energi	Calupan pemenuhan data potensi sumber daya mineral dan energi	%	85	200.000.000	199.775.000.00	535.000.000	85	535.000.000	535.000.000	535.000.000	85	605.000.000	100	605.000.000	1.890.000.000					
	5	Penggiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pemasaan dan Investasi di Bidang Pertambangan	%	100	60.000.000	59.070.000.00	145.000.000	100	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100	187.000.000	100	187.000.000	567.000.000					
	6	Pengerjaan dan Pemeliharaan Air Bersih Tanah	Calupan pemenuhan air bersih untuk masyarakat	%	65	1.400.000.000	1.964.870.000.00	2.000.000.000	70	2.000.000.000	1.475.000.000	1.475.000.000	80	2.205.000.000	90	2.475.500.000	668.000.000					

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENCIANAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	OPD PENANGGUNG JAWAB								
					2015				2016				2017						2018				2019			
					TARGET	K	Rp	Realisasi	TARGET	K	Rp	Kualifikasi	TARGET	K	Rp	TARGET			K	Rp	TARGET	K	Rp	TARGET	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4.1	Administrasi Pemerintahan																									
4.1.1	Sekretariat Daerah																									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Calakan layanan administrasi yang terintegrasi	%	100	100	5.770.600.000	5.745.955.554,00	34.668.550.032,00	35.554.882,00	32.292.628,00	32.292.628,00	31.827.245,285	31.827.245,285	28.065.000,00	27.905.500,00	30.857.200,00	27.905.500,00	30.857.200,00	27.905.500,00	30.857.200,00	27.905.500,00	30.857.200,00	27.905.500,00	Sekretariat Daerah		
2	Program Penggajian, Sarana dan Prasarana Aparatur	Calakan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	13.528.400,000	16.036.595.827,60			14.888.250,000	14.888.250,000	9.235.421.989	9.235.421.989	7.000.000,000	7.000.000,000	6.220.902.900	6.220.902.900	46.130.563.900	46.130.563.900	46.130.563.900	46.130.563.900	46.130.563.900	46.130.563.900			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	377.600,000	156.174.200,00			415.360,000	415.360,000	136.246,036	136.246,036	200.000,000	200.000,000	396.400,000	396.400,000	1.688.430,000	1.688.430,000	1.688.430,000	1.688.430,000	1.688.430,000	1.688.430,000			
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu merekapitulasi laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	682.500,000	589.481.400,00			750.750,000	750.750,000	779.748,076	779.748,076	100.000,000	100.000,000	470.000,000	470.000,000	230.716,400	230.716,400	230.716,400	230.716,400	230.716,400	230.716,400			
5	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	85	120.600,000	18.405.500,00			132.660,000	132.660,000	75.650,000	75.650,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000		
6	Program Penataan Kelembagaan	Persentase penataan kelembagaan	%	85	85	55.000,000	154.070.000,00			60.500,000	60.500,000	560.216.550	560.216.550	300.000,000	300.000,000	450.000,000	450.000,000	395.000,000	395.000,000	1.260.500,000	1.260.500,000	1.260.500,000	1.260.500,000	1.260.500,000		
7	Program peningkatan pelayanan teknis kepada daerah/wilayah kepala daerah	Persentase koordinasi yg dilakukan	%	100	100	3.700.695,000	3.376.970.689,00			4.071.836,000	4.071.836,000	4.824.583.959	4.824.583.959	5.500.000,000	5.500.000,000	5.777.250,000	5.777.250,000	24.550.755,000	24.550.755,000	24.550.755,000	24.550.755,000	24.550.755,000	24.550.755,000	24.550.755,000		
8	Program peningkatan dan pengembangan pengujian keagenan daerah	Calakan pelayanan keagenan daerah	%	100	100	108.750,000	92.704.000,00			119.825,000	119.825,000	99.407.950	99.407.950	150.000,000	150.000,000	124.640,000	124.640,000	868.016,000	868.016,000	868.016,000	868.016,000	868.016,000	868.016,000	868.016,000		
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan Perundang-Undangan daerah yang diterbitkan				315.000,000	315.733.900,00			335.500,000	335.500,000	595.536.770	595.536.770	500.000,000	500.000,000	600.000,000	600.000,000	2.350.500,000	2.350.500,000	2.350.500,000	2.350.500,000	2.350.500,000	2.350.500,000			
	a. Peraturan Daerah		Buah	4	6				4					5	7	8										
	b. Peraturan Bupati		Buah	14	35				37					38	40											
	c. Keputusan Bupati		Buah	28	600				550					600	650											
10	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%	85	85	200.000,000	230.000,000,00			220.000,000	220.000,000	349.922,000	349.922,000	300.000,000	300.000,000	250.000,000	250.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000		
11	Program Peningkatan Hukum dan Hak azas Manusia	Calakan bimbingan dan penyuluhan penerangan HAM	%	50	50	105.000,000	103.823.800,00			115.500,000	115.500,000	44.165,700	44.165,700	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000		
12	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Calakan penyelesaian kasus dan bantuan hukum	%	5	5	440.000,000	359.019.700,00			484.000,000	484.000,000	453.825,100	453.825,100	700.000,000	700.000,000	600.000,000	600.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000	2.594.000,000		
13	Program Sosial	Calakan pelayanan sosial	%	50	50	190.000,000	172.095.634,00			209.000,000	209.000,000	227.079.250	227.079.250	1.200.000,000	1.200.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000	1.279.000,000		
14	Program Peningkatan Sumber Daya Mineral dan Energi	Calakan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi	%	50	50	95.000,000	90.740.150,00			104.500,000	104.500,000	78.666,400	78.666,400	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000		
15	Program Peningkatan Kawasan Industri		%	1	1	45.000,000	87.880.350,00			49.500,000	49.500,000	53.875,600	53.875,600	50.000,000	50.000,000	100.000,000	100.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000		
16	Program Peningkatan Kelangkaan Pangan, Pertanian dan Perikanan		%	4	4	740.000,000	667.088.768,00			84.000,000	84.000,000	60.597.020	60.597.020	500.000,000	500.000,000	250.000,000	250.000,000	105.000,000	105.000,000	2.709.000,000	2.709.000,000	2.709.000,000	2.709.000,000	2.709.000,000		
17	Program Peningkatan Keselamatan Pangan	Nilai Index Pangan	%	85	85	60.000,000			85	66.000,000	66.000,000	34.279,300	34.279,300	35.000,000	35.000,000	36.500,000	36.500,000	189.500,000	189.500,000	189.500,000	189.500,000	189.500,000	189.500,000	189.500,000		
18	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama		%	10	10	995.000,000	81.338.720,00			1.094.500,000	1.094.500,000	1.035.004,100	1.035.004,100	1.200.000,000	1.200.000,000	1.320.000,000	1.320.000,000	4.609.500,000	4.609.500,000	4.609.500,000	4.609.500,000	4.609.500,000	4.609.500,000	4.609.500,000		
19	Program Peningkatan Keterampilan Komunitas dan Informasi dan Hubungan antar Lembaga	Meningkatnya pelayanan informasi	%	85	85	1.720.000,000	1.659.068.49,00			1.892.000,000	1.892.000,000	1.470.509,002	1.470.509,002	1.000.000,000	1.000.000,000	900.000,000	900.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000	1.037.000,000		
20	Program Peningkatan Daerah Berinovasi Baru		%	70	70	580.000,000	628.882.000,00			638.000,000	638.000,000	636.926.249	636.926.249	550.000,000	550.000,000	650.000,000	650.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000	1.325.000,000		
21	Program Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan	%	70	70	645.000,000	659.465.000,00			709.500,000	709.500,000	1.930.072.318	1.930.072.318	1.200.000,000	1.200.000,000	700.000,000	700.000,000	1.139.850,000	1.139.850,000	1.139.850,000	1.139.850,000	1.139.850,000	1.139.850,000	1.139.850,000		
23	Program Pengendalian Administrasi Proyek	Calakan pengendalian administrasi proyek	%	85	85	1.115.500,000	1.314.266.493,00			1.277.050,000	1.277.050,000	398.692.992	398.692.992	300.000,000	300.000,000	200.000,000	200.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN (CRANGKAI PENUNJANG)												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		OPD PEMANGKUNG JAWAB						
					2015			2016			2017			2018			2019								
					K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp		Target	K	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	122.750.000	121.779.799,07	134.475.000	131.376.050	140.000.000	140.000.000	140.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	566.725.000		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	5.000.000	4.998.000,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	60.150.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	3.300.000	3.300.000,00	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	37.930.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu meregistrasi laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.500.000,00	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	147.350.000	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%	70	199.273.000	182.280.000,00	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	219.200.000	1.448.474.000	
4.1.5	Kantor Kecamatan Adiantoling																								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	502.976.000	485.805.377,00	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	553.000.000	3.090.090.000	Kantor Kecamatan Adiantoling
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	102.880.000	102.789.000,00	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	113.700.000	576.050.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	3.630.000	3.593.000,00	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	49.650.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	3.630.000	3.630.000,00	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	38.673.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu meregistrasi laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.454.800,00	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	49.650.000	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%	70	216.549.000	214.434.550,00	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	237.040.000	775.000.000	
4.1.6	Kantor Kecamatan Spoholon																								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	464.346.000	456.251.759,00	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	500.782.000	2.891.178.000	Kantor Kecamatan Spoholon
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	134.893.000	134.857.500,00	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	148.383.000	589.276.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	3.300.000	2.955.000,00	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	49.650.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	3.300.000	3.300.000,00	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	37.930.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu meregistrasi laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.430.000,00	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	71.750.000	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%	70	185.651.000	181.585.400,00	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	204.437.000	1.252.288.200	
4.1.7	Kantor Kecamatan Pataas Julu																								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	483.812.000	439.470.069,00	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	539.426.000	2.584.586.000	Kantor Kecamatan Pataas Julu
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	120.500.000	115.594.500,00	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	132.553.000	603.054.900	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	3.630.000	3.630.000,00	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	49.650.000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYAJIAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	OFD PENANGGUNG JAWAB						
					2015			2016			2017			2018					2019					
					Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi			Target		Realisasi			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	Terjutt	Rp
1	6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	4	5	70	7	152.094.000	8	127.653.600.00	75	167.444.000	10	167.444.000	12	13	14	14	14	17	19	20	21	1.044.608.000	
		Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%																					
4.1.1	Kantor Kecamatan Spohutar																							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Cakupan layanan administrasi yang terbagi	%																					
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
		Cakupan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%																					
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
		Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%																					
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%																					
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																					
		Kemampuan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan	%																					
		6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan																					
		Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%																					
4.1.2	Kantor Kecamatan Pangrehuan																							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Cakupan layanan administrasi yang terbagi	%																					
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
		Cakupan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%																					
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
		Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%																					
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%																					
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																					
		Kemampuan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan	%																					
		6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan																					
		Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%																					
4.1.3	Kantor Kecamatan Garoga																							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Cakupan layanan administrasi yang terbagi	%																					
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
		Cakupan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%																					
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
		Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%																					
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%																					
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																					
		Kemampuan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan	%																					
		6	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan																					
		Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pelaku pembangunan	%																					

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN**

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		DPD PEMANGSUNG JAWAB						
					2015				2016				2017				2018				2019				
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target			Realisasi		Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	14.354.000	8	11.592.930,00	10	175.834.000	12	13	80	15.000.000	80	100.000.000	80	10.000.000	85	585.228.000					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	85				85																
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	3.630.000		3.410.000,00	75	3.997.000		4.930.000	75	15.000.000	90	16.500.000	85	18.650.000	100	49.650.000					
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kemampuan waktu merekrut aparat kinerja dan keuangan	%	70	70	17.500.000		12.336.400,00	75	13.750.000		10.089.700	80	14.000.000	80	10.000.000	85	11.000.000	90	61.750.000					
6	Program Kondisasi dan Pemeliharaan Palku Pembangunan	Persentase peningkatan kondisi dan pemeliharaan palku pembangunan	%	70	70	214.522.000		197.113.700,00	75	235.975.000		323.572.900	75	400.000.000	80	250.000.000	85	275.000.000	85	1.375.497.000					





NO	URISAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	UPU PENANGANAN JAWAB						
					2015				2016				2017						2018					
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	4.5 Fungsi Urusan Kepegawain Daerah Badan Kepegawain Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	%	100	4.220.277.400	8	3.965.225.730,00	10	4.642.306.000	12	3.469.033.625	14	2.794.000.000	16	2.894.000.000	18	3.180.400.000	20	17.730.883.400	21	17.730.883.400	22	17.730.883.400	Badan Kepegawain Daerah
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	75	403.433.000	100	367.305.581,00	100	451.644.000	100	403.767.247	100	400.000.000	100	600.000.000	100	632.000.000	100	2.494.037.800					
3	Peningkatan Disiplin Aparatur		%	85	187.700.000	75	175.655.700,00	75	206.470.000	75	270.086.000	80	250.000.000	82	100.000.000	84	100.000.000	85	854.170.000					
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	70	80.000.000	70	64.399.000,00	75	88.030.000	75	48.845.400	80	30.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	100	80.000.000					
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	70	13.500.000	70	13.442.200,00	75	14.850.000	75	13.497.800	80	100.000.000	85	150.000.000	85	153.000.000	90	61.000.000					
6	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		%	75	3.518.583.600	75	3.298.472.750,00	77	3.881.442.000	75	2.783.332.768	80	2.000.000.000	82	2.000.000.000	85	2.183.900.000	85	13.633.375.600					
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>								<b>374.960.584.024</b>		<b>447.985.086.330</b>		<b>487.497.327.845</b>		<b>588.257.700.000</b>		<b>603.502.700.000</b>		<b>#VALUE!</b>						

## **BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan mendasarkan pada capaian masing-masing indikator kinerja selama kurun waktu tahun 2012-2016. Indikator kinerja ini menjadi target bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator kinerja kunci (IKK) bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja daerah dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, terdiri dari indikator agregat dan indikator makro pembangunan daerah serta indikator urusan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

No.	Indikator	Target Tahun ke									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
20	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB		2,54		2,57	3,00		3,05		3,10	
21	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB		0,43		0,43	0,44		0,45		0,45	
22	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB		13,10		12,81	12,85		12,90		12,90	
23	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB		1,95		2,01	2,05		2,10		2,15	
<b>II Aspek Daya Saing</b>											
1	Pengeluaran per kapita penduduk per bulan (makanan dan bukan makanan)		653.708		715.016	750.000		800.000		850.000	
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan		41,22		36,41	40		42		45	
3	Rasio ketergantungan		0,72		0,71	0,70		0,69		0,68	

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	b. APM SMP/MTs	71,63	97,50	72,35	72,35	98,95	73,80	73,80			
<b>1.3</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>										
1.3.1	Angk. Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	72,31	82,55	73,75	82,62	85	85	85			
1.3.2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	23,40	28,00	23,17	29,00	22,94	22,71	22,49			
1.3.3	Rasio Guru Terhadap Murid SMA	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15			
1.3.4	Rasio Guru Terhadap Murid SMK	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11			
1.3.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,65	86,31	99,75	93,22	99,85	99,95	100			
1.3.6	APK SMA/SMK/MA	88,18	91,41	89,06	91,46	89,98	90,86	90,86			
1.3.7	APM SMA/SMK/MA	70,99	75,45	71,70	71,70	75,73	73,14	73,14			
<b>1.4</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>										
1.4.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,20	0,02	0,18	0,02	0,01	0,01			
1.4.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,12	0,32	0,10	0,23	0,08	0,06	0,05			
1.4.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,56	0,32	0,44	0,26	0,20	0,16			
<b>1.5</b>	<b>Angka Kelulusan</b>										
1.5.1	Angka Kelulusan SD/MI	100	95,56	100	96,80	100	100	100			
1.5.2	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	95,56	100	97,30	100	100	100			
1.5.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	93,56	100	96,44	100	100	100			
<b>1.6</b>	<b>Angka Melanjutkan</b>										
1.6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	99,94	100	99,96	100	100	100			

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.14	Cakupan Pembantu Puskesmas	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	24,21	24,60		
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>										
3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	44	80.07	46	61.15	62	62.8	65			
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	9.12	10.27	10.92	72.30	72.3	72.4	72.5			
3.3	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,010	27.39	0,010	27.01	27.81	27.42	27.02			
3.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,65		0,75		0,84	0,94	1,03			
<b>4.</b>	<b>Perumahan</b>										
4.1	Rumah Layak Huni (%)	43	88.10	45	88.75	90	90.50	91.00			
4.2	Rumah Tidak Layak Huni (%)	3	11.90	2,5	11.25	10	9	9			
4.3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	68.00	78.41	75.00	81.00	90	95	100			
4.4	Jumlah Data Bidang tanah										
4.5	Jumlah Sengketa/Konflik Tanah yang dimediasi							13.522	20.000		
								24	48		
<b>5</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>										
5.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2	2	2	2		
5.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	1	2	1	2	2	2	2		
5.3	Jumlah Limas per Jumlah 10.000 Penduduk	3,08	0,04	3,39	0,04	4,37	5,66	6,59			
5.4	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	90	61	100	66	130	170	200			
<b>6</b>	<b>Sosial</b>										
6.1	Jumlah Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	1	1	1	1	1	1	1	1		

No.	Indikator	Target Tahun																		
		2015		2016		2017		2018		2019										
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi									
3.5	Ketersediaan Energi dan Protein																			
	a. Energi	4.475	4.837	4.500	5.607	4.900		5000		5500										
	b. Pangan	200	161,98	200	170,96	220		220		250										
3.6	Konsumsi Beras	78	80,20	79,5	81	80,50		83,50		85										
3.7	Pemberdayaan desa rawan pangan	15	15	15	15	15		15		15										
3.8	Kelompok Lumbung Pangan	5	5	6	5	5		5		5										
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>																			
4.1	Persentase penanganan sampah	25,45	25,45	25,45	28,42	30		33		37										
4.2	Luas Ruang Terbuka Hijau	621,32	610,70	632,45	625,70	610,42		610,42		610,42										
4.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	0,65	1,17	0,75	1,39	0,84		0,94		1,03										
<b>5</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																			
5.1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk	45,5	50,90	50,5	55,59	65,3		80,5		100										
5.2	Rasio Pasangan Berakate Nikah	6,03	6,38	6,84	6,92	7,75		8,78		9,97										
5.3	Persentase Kepemilikan KTP	82,84	74,36	87,16	81,48	91,47		95,75		100,00										
5.4	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada										
5.5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah										
5.6	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	57,22	80,43	60,21	76,54	75,33		85,11		100										
5.7	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran/satuan Penduduk	25,52	28,27	44,12	34,73	45,32		50,26		55,65										
5.8	Persentase kepemilikan Akte Kematian berdasarkan keluarga cerai mati	5,1	7,20	7,2	19,31	13,33		16,66		20,20										
5.9	Persentase kepemilikan Akte Perceraian berdasarkan keluarga cerai hidup	1,3	13,86	3,6	19,12	19,42		19,52		20,04										

No.	Indikator	Target Tahun											
		2015		2016		2017		2018		2019			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8.7.1	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.7.2	Jumlah Pelabuhan Danau	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	
8.8	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
8.9	Jumlah Angkutan Darat	1.434	1.415	1.459	1.437	1.524	1.559	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
8.10	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
<b>9</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>												
9.1	Persentase Koperasi Aktif	43,06	22,22	45,50	21,26	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	
9.2	Jumlah Koperasi aktif		102	98		188	195	205	195	205	205	205	
9.3	Pertumbuhan volume usaha koperasi		29,76		7,06	3,12	3,45	4,02	3,45	4,02	4,02	4,02	
9.4	Pertumbuhan aset koperasi		5,00		0,98	2,42	2,50	2,54	2,50	2,54	2,54	2,54	
9.5	Persentase Koperasi Wanita Aktif	2,48	2,18	2,50	2,17	2,51	2,54	2,55	2,54	2,55	2,55	2,55	
9.6	Pertumbuhan jumlah UMKM	20,04	21,03	16,70	16,24	11,79	15,02	27,25	15,02	27,25	27,25	27,25	
9.7	Jumlah Produk Unggulan UMKM	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	
<b>10</b>	<b>Perizinan dan Penanaman Modal</b>												
10.1	Perizinan												
	Jumlah Izin Yang diterbitkan :												
	- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	180	237	185	327	191	198	207	198	207	207	207	
	- Izin usaha industri (IUI)	2	0	5	0	7	10	15	10	15	15	15	
	- Tanda daftar industri (TDI)	2	3	6	52	7	9	13	9	13	13	13	
	- Izin mendirikan bangunan (IMB)	73	76	104	77	112	134	169	134	169	169	169	
	- Izin gangguan (HO)	997	1.135	1.099	1.204	1.117	1.208	1.422	1.208	1.422	1.422	1.422	
	- Waktu pengurusan surat izin:												
	- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	5	4	4	4	3	3	2	3	2	2	2	

No.	Indikator	Target Tahun													
		2015		2016		2017		2018		2019					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
<b>12</b>	<b>Kearsipan</b>														
12.1	Pengelolaan Arsip secara Baku	100	0	100	0	0	20	40							
12.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	0	0	1	1							
12.3	Jumlah perpustakaan	56	56	61	61	66	71	76							
12.4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	26.464	26.464	27.464	27.464	28.275	28.775	29.275							
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>															
<b>3.1</b>	<b>Pertanian</b>														
3.1.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar														
3.1.1.1	Padi Sawah	150.000	148.132	165.000	151.335	154.300	157.500	160.600							
		58,00	58,54	58,00	58,70	58,75	59,00	59,25							
	Padi Ladang	8.600	12.446	8.800	19.577	9.100	9.500	10.000							
		25,75	34,62	25,85	45,21	25,95	26,10	26,50							
	Jagung	21.950	14.866	22.450	37.246	23.150	24.150	25.150							
		48,55	34,52	48,60	52,95	48,75	49,00	49,50							
	Kacang tanah	3.750	2.600,99	4.150	2.654,82	2.700	2.750	2.800							
		17,9	18,35	18,00	19,75	19,90	20,00	20,10							
	Ubi Kayu	41.000	32.123,11	41.800	23.659,38	24.000	24.500	25.000							
		177,25	179,61	177,35	186,44	188,50	191,00	19,50							
	Ubi Jalar	11.480	11.829,56	11.750	14.198,29	12.050	12.400	12.900							
		105,96	105,94	106,10	161,34	106,32	106,61	107,00							
3.1.2	Produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura														
	Cabai Merah	6.120	6.241,71	6.650	6.684,29	6.690	6.720	6.750							
		54,51	54,51	55,60	55,57	55,65	55,65	55,70							
	Bawang Merah	490	500,74	530	541,55	545	555	565							
		71,53	71,53	74,18	74,18	74,50	74,60	74,70							
	Jeruk	3.120	3.129,07	3.130	3.132,19	3.200	3.350	3.600							
		144,86	144,86	145,01	145,01	145,10	145,15	145,20							

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.1.6	Jumlah gabungan kelompok tani (gapoktan)	80	181	82	203	85	87	90			
3.1.7	Jumlah WKPP	184	132	185	127	168	168	200			
3.1.8	<b>Populasi Ternak</b>										
	Kerbau	9.342	9.339	9.346	9.527	9.550	9.575	9.600			
	Sapi	440	438	445	444	450	460	470			
	Kambing	1.880	1.877	1.915	1.919	1.925	1.930	1.975			
	Babi	60.200	60.311	61.650	61.679	61.879	62.050	62.350			
	Ayam	425.300	425.305	427.600	427.822	428.850	430.000	432.000			
	Itik	32.100	32.114	32.600	32.700	33.200	33.500	34.000			
3.1.9	<b>Kebutuhan Pupuk Bersubsidi</b>										
	Urea	4.340	4.340	4.290	4.290	4.160	4.380	4.680			
	Sp-36	2.110	2.110	1.907	1.907	1.730	1.892	1.964			
	ZA	1.427	1.427	1.239	1.239	1.223	1.236	1.240			
	NPK	4.504	4.504	5.416	5.416	4.890	4.984	5.130			
	Organic	792		1.605		1.130	1.120	1.128			
3.1.10	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>										
	Traktor Besar (Roda 4)	4	4	6		9	10	14			
	Traktor Mini	2	2	7	7	10	12	15			
	Combine Harvester	5	5	13	13	15	17	19			
	Hand Traktor	65	65	125	125	257	280	310			
	Hand Traktor	45	45	85	85	122	135	150			
	Mesin Pemipil Jagung (corn sheller)	20	20	28	28	36	50	75			

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.4.8	Konsumsi Susu perkapita	8,30	0,81	9,11	0,82	9,99	10,96	12,02			
3.4.9	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	2,10	2,98	2,00	3,01	1,89	1,78	1,67			
3.4.10	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,71	0,43	0,71	0,43	0,71	0,71	0,71			
<b>3.5</b>	<b>Pariwisata</b>										
3.5.1	Jumlah Wisatawan	108.000	108.117	118.000	115.110	128.000	138.000	148.000			
<b>3.6</b>	<b>Perdagangan</b>										
3.6.1	<b>Perdagangan</b>										
3.6.1.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,98	13,10	16,15	12,81	16,33	16,50	16,68			
3.6.1.2	Jumlah Lokasi Pasar Lelang	-	-	-	2	3	3	3			
3.6.1.3	Jenis Komoditi Pasar Lelang	-	-	-	1	2	2	3			
3.6.2	<b>Perindustrian</b>										
3.6.2.1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	1,68	1,95	1,85	2,01	1,85	1,93	1,98			
3.6.2.2	Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,43	1,95	1,40	2,01	1,37	1,34	1,32			
3.6.2.3	Pertumbuhan Industri	0,14		0,14		0,15	0,16	0,17			
	a. Industri pangan										
	1) Jumlah perusahaan	652	651	656	659	666	675	683			
	2) Jumlah tenaga kerja	1.835	1.834	1.839	1.843	1.849	1.858	1.866			
	b. Industri sandang & kulit										
	1) Jumlah perusahaan	2.248	2.246	2.251	2.256	2.255	2.264	2.270			
	2) Jumlah tenaga kerja	4.231	4.232	4.233	4.236	4.238	4.247	4.253			
	c. Industri kimia & bahan bangunan										

## **BAB IX PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan tercapai sesuai visi, misi dan program kepala daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ini disusun dengan latar belakang antara lain :

1. Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 lebih dulu dari RPJMN Tahun 2015 - 2019;
2. Penyesuaian terhadap urusan pemerintahan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perubahan SOTK dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
5. Tindaklanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/Sj dan No. 0430/M.PPN/12/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ini disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta hasil Evaluasi Mid Term Review RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode satu tahun.

Tarutung, 05 Juni 2018  
**Pt. BUPATI TAPANULI UTARA,**

  
**MAULIATE SIMORANGKIR**



No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017	2018	2019			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	1) Jumlah perusahaan	168	169	170	186	173	178	187			
	2) Jumlah tenaga kerja	575	571	586	588	704	733	785			
	d. Industri kerajinan										
	1) Jumlah perusahaan	312	246	315	246	320	328	341			
	2) Jumlah tenagakerja	662	406	677	405	701	746	827			
	e. Industri logam										
	1) Jumlah perusahaan	246	311	246	347	250	254	411			
	2) Jumlah tenaga kerja	403	659	403	700	407	259	416			
3.6.3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1,68	1,95	1,85	2,01	1,85	1,93	1,98			
	<b>Urusan Penunjang</b>										
<b>4.1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>										
4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
4.1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100			

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Mesin Kompos	8	8	16	16	27	16	40	40	55	55
	Power Thresher	15	15	30	30	30	30	40	40	50	50
	Mesin pengupas Kulit Kopi	-	-	-	-	41	-	50	50	60	60
	Alat Panen Padi Sederhana	-	-	-	-	100	-	200	200	300	300
	Cultivator	-	-	-	-	28	-	35	35	45	45
	Alat Tanam Jagung	-	-	-	-	50	-	100	100	150	150
	Power Sprayer	-	-	-	-	-	-	30	30	60	60
<b>3.2</b>	<b>Kehutanan</b>										
3.2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,17		0,26		0,35		0,44		0,53	
3.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	7,11		7,08		7,05		7,02		6,55	
3.2.3	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,45		0,41		0,37		0,34		0,30	
<b>3.3</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>										
3.3.1	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan terhadap PDRB	0,19		0,20		0,20		0,21		0,21	
<b>3.4</b>	<b>Perikanan dan Peternakan</b>										
3.4.1	Produksi Perikanan Budidaya	1.979,60	1.399,10	2.078,50	1.402,40	2.182,50	1.402,40	2.291,60	2.291,60	2.406,20	2.406,20
3.4.2	Konsumsi Ikan perkapita	20,50	20,50	20,70	20,90	20,90	20,90	21,10	21,10	21,30	21,30
3.4.3	Produksi Daging	1.104,06	1.343,46	1.146,11	1.396,44	1.190,09	1.396,44	1.235,87	1.235,87	1.283,65	1.283,65
3.4.4	Konsumsi Daging perkapita	6,28	4,62	6,67	6,80	7,09	6,80	7,54	7,54	8,03	8,03
3.4.5	Produksi Telur	96.608,39	122.960,47	96.833,05	1.542.576,00	97.559,30	1.542.576,00	98.290,09	98.290,09	99.028,17	99.028,17
3.4.6	Konsumsi Telur perkapita	8,30	5,24	9,11	6,98	9,99	6,98	10,96	10,96	12,02	12,02
3.4.7	Produksi Susu	235.917,93	236.007,00	238.277,11	238.367,23	240.659,88	238.367,23	243.066,48	243.066,48	245.497,14	245.497,14

No.	Indikator	Target Tahun											
		2015		2016		2017		2018		2019			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Alpukat	812 74,08	814,93 74,08	816 72,87	816,15 72,87	817 74,00	819 74,20	821 74,50					
	Nenas	34.400 178,84	34.477,57 178,84	34.800 179,02	34.857,16 179,02	34.860 179,05	34.862 179,08	34.865 179,10					
	Durian	5.815 96,46	5.819,42 96,46	5.818 96,46	5.819,42 96,46	5.820 96,50	5.821 96,55	5.823 96,60					
	Mangga	1.190 76,47	1.192,92 76,47	1.193 76,54	1.194 76,54	1.195 76,55	1.197 76,56	1.199 76,57					
3.1.3	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar												
	Karet	5.000 597,45	5.437,10 668,40	5.100 597,55	5.437,65 667,13	5.300 597,67	5.600 597,85	6.050 598,25					
	Kemenyan	3.975 250,65	3.660,75 262,47	4.060 250,70	3.661,10 262,50	3.661,50 262,55	3.661,85 262,58	3.662,15 262,80					
	Kopi Arabika	21.950 1.072	10.891,13 1078,65	22.450 1.119	10.932,06 1079,02	23.150 1.131	11.000 1.079,05	11.500 1.081,10					
	Kopi Robusta	3.83 625,99	546,90 517,66	3.83 626,10	546,93 517,69	3.83 626,28	150,11 626,36	155,5 627,50					
	Kelapa	277 1.128	253,15 1120,88	280 1.132	253,17 1.120,97	253,20 1.121,00	253,24 1.121,12	253,29 1.121,15					
	Kakao	1.100 576,06	1.404,05 718,18	1.160 576,17	1.404,20 718,26	1.240 576,43	1.250 576,59	1.350 577,00					
	Kulit Manis	1.365 5.832,16	1.126,05 5.710,19	1.390 5.847,43	1.126,15 5.710,70	1.126,27 5.710,95	1.126,39 5.711,38	1.126,54 5.712,00					
	Kemiri	225,23 783,21	216,55 782,48	232,91 786,11	216,55 782,48	216,65 783,12	217,00 783,32	217,25 787,65					
	Aren	175,15 640,55	174,20 643,40	181,20 643,14	174,28 643,69	174,35 643,91	144,75 644,20	145,50 644,50					
	Tembakau	160,15 1.136,21	428,87 1.170,00	165,32 1.200,08	433,13 1.125,00	176,67 1.253,42	195,44 1.345,32	215,65 1.555,21					
3.1.4	Jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL)	155	132	160	127	168	168	200					
3.1.5	Jumlah kelompok tani (poktan)	1.880	2.092	1.885	2.126	1.885	1.900	2.000					

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Izin usaha industri (IUI)	7	5	6	5	5	4	5	5	4	4
	- Tanda daftar industri (TDI)	5	5	4	4	3	3	4	3	3	3
	- Izin mendirikan bangunan (IMB)	7	5	6	5	5	4	5	4	4	4
	- Izin gangguan (HO)	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3
10.2	Penanaman Modal										
10.2.1	Jumlah Investasi (PMDN/PMDA)	3	8	3	15	26	30	26	30	40	40
10.2.2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMDA)	5,00	5,00	5,00	6,00	9,00	9,50	9,00	9,50	10,00	10,00
10.2.3	Pertumbuhan Industri	3.624	3.624	3.629	3.634	3.634	3.639	3.634	3.639	3.644	3.644
10.2.4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	37	15	41	24	49	56	49	56	60	60
<b>11</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>										
11.1	Jumlah Organisasi Pemuda	14	22	16	22	18	20	18	20	22	22
11.2	Jumlah Kegiatan Pemuda	5	4	6	6	7	8	7	8	9	9
11.3	Jumlah Organisasi Olah Raga	17	20	19	24	21	23	21	23	25	25
11.4	Rasio Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) terhadap Jumlah Penduduk	0,01	0,06	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
11.5	Rasio Lapangan Olah Raga	0,04	0,16	0,04	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
11.6	Jumlah Kegiatan Olah Raga	6	7	8	7	10	12	10	12	14	14
11.7	Jumlah Grup Kesenian	1,03		1,02		1,24	1,33	1,24	1,33	1,48	1,48
11.8	Jumlah Gedung Kesenian	0,14		0,24		0,34	0,43	0,34	0,43	0,53	0,53
11.9	Jumlah Klub Olahraga	0,58	0,67	0,64	0,74	0,78	0,80	0,78	0,80	0,85	0,85
11.10	Jumlah Gedung Olahraga	0,14	0	0,24	0	0	0,03	0	0,03	0,03	0,03

No.	Indikator	Target Tahun																		
		2015		2016		2017		2018		2019										
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi									
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																			
6.1	Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
6.2	Kelompok Binaan PKK	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6.3	PKK Aktif	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
6.4	Posyandu aktif	370	373	375	377	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
<b>7</b>	<b>Pengendalian Penduduk &amp; Keluarga Berencana</b>																			
7.1	Jumlah Anak per Keluarga	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.2	Rasio Akseptor KB	74,96	66,94	76,88	72,55	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
7.3	Jumlah Peserta KB Aktif																			
7.4	Cakupan peserta KB aktif	74,96	66,12	76,88	69,29	70,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
7.5	Jumlah Peserta KB Baru																			
7.6	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,08	10,98	4,10	10,8	4,13	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
7.7	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	171	145	173	147	150	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
7.8	Cakupan Peserta PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	451	150	456	125	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
<b>8</b>	<b>Perhubungan</b>																			
8.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum																			
8.2	Jumlah penumpang bus dan minibus	2.675.000	2.691.750	2.750.000	2.721.000	2.775.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
8.3	Jumlah Penumpang Kapal Danau	22.400	9.750	22.430	9.850	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520	22.520
8.4	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	17.900	17.685	18.000	153.135	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8.5	Rasio Ijin Trayek terhadap Jumlah Penduduk	0,00101	0,00098	0,00104	0,00098	0,00106	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110	0,00110
8.6	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.255	1.205	1.274	1.076	1.295	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
8.7	Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis																			

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.2	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	78,02	0,68	81,02	12,8	88,02		89,75		90,25	
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>											
<b>1 Ketenagakerjaan</b>											
1.1	Angka Partisipasi Angkatan kerja	86,20		87,25	88,33	88,33	89,56	89,56	89,89	89,89	
1.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	86,20		87,25	88,33	88,33	89,56	89,56	89,89	89,89	
1.3	Rasio Penduduk Bekerja	86,20		87,25	88,33	88,33	89,56	89,56	89,89	89,89	
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	7,09	6,66	7,32	4,95	7,55	7,77	7,77	7,98	7,98	
2.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	10,91	93,74	11,80	95,05	95	95	95	95	95	
2.3	Rasio KDRT	0,03	0,019	0,03	0,006	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
2.4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	17,67	74,51	17,68	97,54	85	87	87	90	90	
2.6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	2,51	38	2,51	35	3,00	3,41	3,41	4,00	4,00	
<b>3 Pangan</b>											
3.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.2	Ketersediaan Cadangan Pangan	10	58.618,33	20	63.325,71	64.000	64.500	64.500	64.800	64.800	
3.3	Konsumsi pangan	1859	1.718,10	1887	1.801,30	1916	1.944	1.944	1.972	1.972	
3.4	Konsumsi Ketersediaan Energi dan Protein										
a. Energi		1.859	1.718,10	1.887	1.801,30	1.916	1.944	1.944	1.972	1.972	
b. Pangan		55	52,20	55	52,70	56	56	56	57	57	

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,60	98,95	100,09	99,70	100,59	101,10	101,00			
<b>1.7</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>										
1.7.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SD/MI (%)	62,33	42,37	71,52	46,71	75	78	80			
1.7.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D Tingkat SMP/MTs (%)	83,90	86,62	87,97	90,22	92	95	98			
1.7.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D Tingkat SMA/SMK/MA (%)	93,07	93,49	93,35	95,40	93	94	95			
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>										
2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	1,18	11,94	1,07	12,53	13,43	13,83	14,03			
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,29	0,27	0,29	0,27	0,28	0,28	0,28			
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003			
2.4	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0,45	0,32	0,48	0,30	0,48	0,35	0,38			
2.5	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	7,54	2,79	49,05	2,79	2,88	3,00	3,08			
2.6	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	91	82	92	83	84	85	86			
2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	76,2	100	88,9	92,4	93,2	95,8			
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100			
2.9	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 KH)	977	903	977	977	934	977	977			
2.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100	47,08	100	46,72	30	30	30			
2.11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100			
2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	92	92	94	94	96	98	100			
2.13	Cakupan Puskesmas	126,67	126,67	126,67	133,33	133,33	133,33	133,33			

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019**

No.	Indikator	Target Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>											
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>										
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										
1.1.1	Jumlah Sekolah PAUD	30	120	30	194	30	30	30	30	30	30
1.1.2	Jumlah Siswa PAUD	3.825	3.950	4.425	3.265	5.025	5.625	5.625	6.225	6.225	6.225
1.1.3	Jumlah Guru PAUD	30	500	30	520	520	530	530	540	540	540
1.1.4	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1.1.5	Jumlah Siswa Taman Kanak-kanak	1.326	2.872	1.392	2.872	1.462	1.535	1.535	1.612	1.612	1.612
1.1.6	Jumlah Guru Taman Kanak-kanak	135	140	142	128	149	156	156	164	164	164
<b>1.2</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>										
1.2.1a	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	97,32	99,05	98,29	99,13	99,27	100,27	100,27	101,27	101,27	101,27
1.2.1b	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	95,37	97,07	96,33	97,15	97,29	98,26	98,26	98,26	98,26	98,26
1.2.2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	74,40	118	73,67	118	72,94	72,22	72,22	71,50	71,50	71,50
1.2.3	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	1:13	1:13	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
1.2.4	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	1:13	1:13	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)										
a.	APK SD/MI	104,33	105,38	105,38	105,38	105,38	106,43	106,43	107,49	107,49	107,49
b.	APK SMP/MTs	98,78	97,50	99,77	98,95	100,76	101,76	101,76	101,77	101,77	101,77
1.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM)										
a.	APM SD/MI	89,28	98,51	90,18	90,18	97,89	91,99	91,99	92,91	92,91	92,91

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Menurut Tingkat Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019**

No.	Indikator	Target Tahun ke												
		2015		2016		2017		2018		2019				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>													
1	Pertumbuhan PDRB	6,25	4,81	6,60	4,12	4,5 - 4,7	4,7 - 5,0							5,00
2	Laju Inflasi		1,66		4,28	4,00	4,00							4,00
3	PDRB per kapita	21.154.017,77	19.957.843,95	23.429.944,11	21.312.628,59	22.271.696,88	23.318.466,63							24.484.389,96
4	Indeks Gini		0,3558		0,3087	0,3085	0,3080							0,3080
5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	11,50	11,41	11,30	11,25	11,00	10,50							10,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	71	71,32	71,50	71,50	71,80	72,00							72,30
7	Angka melek huruf	99,65	98,23	99,66	99,22	99,67	99,68							99,69
8	Angka rata-rata lama sekolah	10,60	9,31	10,80	9,32	11,10	11,40							12,00
9	Angka usia harapan hidup	70,57	67,50	70,98	70,98	69	69,5							70
10	Persentase balita gizi buruk	1,00	0,09	0,80	0,80	0,70	0,60							0,50
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	86,20	83,57	87,25	-	88,33	89,56							89,89
12	Tingkat pengangguran terbuka	3,15	3,10	3,10	3,14	3,10	3,00							2,95
13	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,50	7,41	7,80	7,91	9,00	12,00							15,00
14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							WTP
15	Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB		41,76		41,23	41,20	41,16							41,10
16	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB		11,76		11,63	11,70	11,75							11,80
17	Kontribusi sub sektor perkebunan tahunan terhadap PDRB		15,67		15,32	15,50	15,50							15,50
18	Kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB		5,18		4,95	4,50	4,50							4,00
19	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB		0,07		0,07	0,08	0,10							0,10

ID	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGKUTAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	JUMLAH						
					2015			2016			2017			2018					2019					
					Target		Realisasi	Target		K	Rp	K	Rp	Realisasi	TARGET	Kp			TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.4	Fungsi Urusan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah					5.358.430.000	5.358.430.000	5.894.793.430.000	5.894.793.430.000	5.894.793.430.000	5.894.793.430.000	8.086.722.085	8.086.722.085	8.340.000.000	8.340.000.000	8.725.000.000	8.725.000.000	9.597.500.000	9.597.500.000	37.915.207.000	37.915.207.000			
	Pelayanan Administrasi Pertantaran	Caluan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	945.955.800	945.955.800	977.93.953.000	977.93.953.000	100	100	1.125.089.206	1.125.089.206	1.700.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	6.548.630.800	6.548.630.800			
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Caluan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	402.750.000	402.750.000	1.01.885.802.000	1.01.885.802.000	75	80	844.865.751	844.865.751	700.000.000	700.000.000	350.000.000	350.000.000	385.000.000	385.000.000	2.719.725.000	2.719.725.000		
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85	85	35.000.000	35.000.000	84.720.000.000	84.720.000.000	85	85	-	-	40.000.000	40.000.000	25.000.000	25.000.000	27.500.000	27.500.000	165.000.000	165.000.000		
	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	75	75	150.000.000	150.000.000	70.824.700.000	70.824.700.000	80	80	141.630.900	141.630.900	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	675.000.000	675.000.000		
	5	Pengelolaan Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	75	75	245.500.000	245.500.000	236.383.400.000	236.383.400.000	75	75	29.175.600	29.175.600	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	1.035.550.000	1.035.550.000		
	6	Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Pengelolaan keuangan daerah	Nilai Audit	WDP	3.578.74.200	3.578.74.200	4.214.268.825.000	4.214.268.825.000	WDP	WDP	3.936.586.000	3.936.586.000	5.589.692.988	5.589.692.988	6.000.000.000	6.000.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	26.745.300.700	26.745.300.700	
	7	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Caluan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kab/kota	%	85	85	-	-	99.78.800.000	99.78.800.000	85	85	94.008.050	94.008.050	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	165.000.000	165.000.000	415.000.000	415.000.000		

ID	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGKUTAN	INDIKATOR MINERJIA PROGRAM (OUTPUT)	Satuan	Fondasi Kinerja P-ds Awal RPJMD	CAPAIAN MINERJIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	UPTD PEMANGKUTAN JAWAB			
					2015			2016			2017			2018					2019		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	TARGET
1	1.2 Fungsi Urusan Pengawasan Inspektorat	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					2.093.592.200	2.302.954.000	2.202.207.307.00	2.302.954.000	2.302.954.000	2.469.233.991	2.469.233.991	2.469.233.991	2.469.233.991	2.125.000.000	2.125.000.000	3.061.000.000	3.061.000.000	3.367.000.000	3.367.000.000	12.949.647.200	12.949.647.200
				100	570.285.200	572.315.000	552.720.607.00	572.315.000	572.315.000	507.457.291	507.457.291	507.457.291	507.457.291	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.957.601.200	2.957.601.200
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	75	58.976.900	64.875.000	63.793.500.00	64.875.000	64.875.000	129.453.700	129.453.700	129.453.700	15.000.000	15.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	243.853.900	243.853.900	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		%	85	19.400.000	21.340.000	18.030.000.00	21.340.000	21.340.000				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	24.277.700	24.277.700	86.007.700	86.007.700	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	70	215.000.000	236.500.000	209.374.800.00	236.500.000	236.500.000	235.465.000	235.465.000	235.465.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	330.000.000	330.000.000	1.281.500.000	1.281.500.000	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	70	87.000.000	90.200.000	80.800.800.00	90.200.000	90.200.000	202.423.300	202.423.300	202.423.300	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	97.822.300	97.822.300	470.022.300	470.022.300	
6	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penguatan Pelaksanaan Kebijakan MDH		Kategori	CC	1.197.930.000	1.301.774.000	1.216.531.600.00	1.301.774.000	1.301.774.000	1.394.394.700	1.394.394.700	1.394.394.700	1.200.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	7.915.554.000	7.915.554.000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PENGUNJUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	DPO PENGUNJUAN JAWAB												
					2015				2016				2017						2018				2019							
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	4.1.14	Mentor Kecamatan Sumbang 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	627.400.000	608.978.385.000	189.270.070.000	270.572.000	100	189.270.070.000	170.275.050	100	210.000.000	250.000.000	100	275.000.000	733.500.000	3.886.292.000	1.155.995.000	733.500.000	100	733.500.000	3.886.292.000	1.155.995.000	733.500.000	100	733.500.000	Kantor Kecamatan Sumbang Kantor Kecamatan Sumbang		
2		Program Pelatihan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	177.147.000	168.917.345.000	168.917.345.000	168.917.345.000	75	168.917.345.000	168.917.345.000	80	170.000.000	170.000.000	80	170.000.000	170.000.000	702.019.000	702.019.000	170.000.000	85	170.000.000	702.019.000	702.019.000	170.000.000	85	170.000.000			
3		Program Pelatihan Disiplin Aparatur	%	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-			
4		Program Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	3.630.000	3.020.000.000	3.020.000.000	3.020.000.000	75	3.020.000.000	3.020.000.000	75	3.020.000.000	3.020.000.000	75	3.020.000.000	3.020.000.000	11.070.000	11.070.000	3.020.000.000	75	3.020.000.000	11.070.000	11.070.000	75	3.020.000.000				
5		Program Pelatihan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	70	13.500.000	13.749.200.000	13.749.200.000	13.749.200.000	75	13.749.200.000	13.749.200.000	80	14.000.000	14.000.000	80	14.000.000	14.000.000	44.000.000	44.000.000	13.749.200.000	85	44.000.000	44.000.000	44.000.000	85	44.000.000				
6		Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	%	70	232.859.000	227.565.800.000	227.565.800.000	227.565.800.000	75	227.565.800.000	227.565.800.000	75	235.975.000	235.975.000	80	250.000.000	250.000.000	1.803.594.000	1.803.594.000	227.565.800.000	85	250.000.000	1.803.594.000	1.803.594.000	85	250.000.000				
4.1.15		Kantor Kecamatan Paganan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	470.877.000	357.833.853.000	357.833.853.000	357.833.853.000	100	357.833.853.000	357.833.853.000	100	357.833.853.000	357.833.853.000	100	357.833.853.000	357.833.853.000	2.976.645.000	2.976.645.000	357.833.853.000	100	357.833.853.000	2.976.645.000	2.976.645.000	100	357.833.853.000	Kantor Kecamatan Paganan			
2		Program Pelatihan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	130.307.000	124.919.150.000	124.919.150.000	124.919.150.000	75	124.919.150.000	124.919.150.000	80	130.000.000	130.000.000	80	130.000.000	130.000.000	18.150.000	18.150.000	124.919.150.000	95	130.000.000	18.150.000	18.150.000	95	130.000.000				
3		Program Pelatihan Disiplin Aparatur	%	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-			
4		Program Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	3.630.000	2.850.000.000	2.850.000.000	2.850.000.000	75	2.850.000.000	2.850.000.000	75	3.000.000	3.000.000	75	3.000.000	3.000.000	11.000.000	11.000.000	2.850.000.000	75	3.000.000	11.000.000	11.000.000	75	3.000.000				
5		Program Pelatihan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	70	13.500.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	75	13.500.000.000	13.500.000.000	80	14.000.000	14.000.000	80	14.000.000	14.000.000	15.400.000	15.400.000	13.500.000.000	85	14.000.000	15.400.000	15.400.000	85	14.000.000				
6		Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	%	70	184.957.000	172.604.430.000	172.604.430.000	172.604.430.000	75	172.604.430.000	172.604.430.000	75	209.433.000	209.433.000	80	250.000.000	250.000.000	1.303.400.000	1.303.400.000	172.604.430.000	85	250.000.000	1.303.400.000	1.303.400.000	85	250.000.000				
4.1.16		Kantor Kecamatan Pannanangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	569.893.000	425.639.552.000	425.639.552.000	425.639.552.000	100	425.639.552.000	425.639.552.000	100	425.639.552.000	425.639.552.000	100	425.639.552.000	425.639.552.000	3.286.949.000	3.286.949.000	425.639.552.000	100	425.639.552.000	3.286.949.000	3.286.949.000	100	425.639.552.000	Kantor Kecamatan Pannanangan			
2		Program Pelatihan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	173.077.400	167.394.400.000	167.394.400.000	167.394.400.000	75	167.394.400.000	167.394.400.000	80	170.000.000	170.000.000	80	170.000.000	170.000.000	16.000.000	16.000.000	167.394.400.000	85	170.000.000	16.000.000	16.000.000	85	170.000.000				
3		Program Pelatihan Disiplin Aparatur	%	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-			
4		Program Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	3.300.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	75	3.200.000.000	3.200.000.000	75	3.630.000	3.630.000	75	3.630.000	3.630.000	11.000.000	11.000.000	3.200.000.000	75	3.630.000	11.000.000	11.000.000	75	3.630.000				
5		Program Pelatihan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	70	13.500.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	75	13.500.000.000	13.500.000.000	80	14.000.000	14.000.000	80	14.000.000	14.000.000	16.500.000	16.500.000	13.500.000.000	85	14.000.000	16.500.000	16.500.000	85	14.000.000				
6		Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	%	70	226.870.000	226.855.800.000	226.855.800.000	226.855.800.000	75	226.855.800.000	226.855.800.000	75	249.907.000	249.907.000	80	250.000.000	250.000.000	1.403.377.000	1.403.377.000	226.855.800.000	85	250.000.000	1.403.377.000	1.403.377.000	85	250.000.000				
4.1.17		Kantor Kecamatan Muara 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	449.332.004	453.595.306.000	453.595.306.000	453.595.306.000	100	453.595.306.000	453.595.306.000	100	449.332.004	449.332.004	100	449.332.004	449.332.004	3.038.449.004	3.038.449.004	453.595.306.000	100	449.332.004	3.038.449.004	3.038.449.004	100	449.332.004	Kantor Kecamatan Muara			

No	URISAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEARIFAN PENDAMUAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	SPD PEMBANGUNAN JAWAB									
					2015				2016				2017						2018				2019				
					K	TARGET	REALISASI	Rp	K	TARGET	REALISASI	Rp	K	TARGET	REALISASI	Rp			K	TARGET	REALISASI	Rp	K	TARGET	REALISASI	Rp	
1	4	3	%	70	7	3.300.000	75	10	3.630.000	12	1.230.000	14	75	15	10.000.000	16	75	17	10.000.000	18	75	19	11.070.000	20	80	37.930.000	22
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	7	13.500.000	75	10	14.650.000	12	13.077.700	14	80	15	14.000.000	16	85	17	14.000.000	18	85	19	15.400.000	20	90	71.750.000	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Publik Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan publik pembangunan	%	70	70	249.066.000	75	75	240.968.000	12	192.018.300	14	75	15	300.000.000	16	80	17	250.000.000	18	85	19	275.000.000	20	85	1.295.079.000	
4.1.8	Kantor Kecamatan Pahae Jibe																										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	100	453.372.000	100	100	499.044.000	12	427.698.774	14	100	15	589.000.000	16	100	17	640.500.000	18	100	19	704.550.000	20	100	2.886.763.000	Kantor Kecamatan Pahae Jibe
2	Program Pengiklatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecolupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	156.678.900.00	75	75	172.652.000	12	94.998.800	14	80	80	10.000.000	16	80	80	10.000.000	18	80	19	10.000.000	20	85	638.607.950	
3	Program Pengiklatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat ketepatan pegawai	%	85	85	3.300.000	85	85	3.630.000	12	475.000.00	14	75	75	10.000.000	16	80	80	10.000.000	18	85	19	11.000.000	20	90	37.930.000	
4	Program Pengiklatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	13.500.000	75	75	14.650.000	12	10.000.000	14	80	80	14.000.000	16	80	80	14.000.000	18	85	19	15.400.000	20	90	71.750.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merapikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	151.419.200	75	75	166.567.000	12	207.662.600	14	75	75	250.000.000	16	80	80	300.000.000	18	85	19	330.000.000	20	85	1.897.981.200	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Publik Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan publik pembangunan	%	70	70	425.146.000	100	100	467.662.000	12	331.563.323	14	100	15	639.000.000	16	100	17	695.500.000	18	100	19	765.550.000	20	100	2.887.856.000	Kantor Kecamatan Purabaya
4.1.9	Kantor Kecamatan Purabaya																										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	100	122.090.000	100	100	134.299.000	12	103.784.273	14	100	15	200.000.000	16	100	17	230.000.000	18	100	19	230.000.000	20	100	897.989.000	
2	Program Pengiklatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecolupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	183.344.000	75	75	191.276.000	12	73.343.500	14	80	80	100.000.000	16	80	80	100.000.000	18	80	19	100.000.000	20	85	560.677.000	
3	Program Pengiklatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat ketepatan pegawai	%	85	85	3.630.000	85	85	3.993.000	12	1.145.000	14	75	75	10.000.000	16	90	90	16.500.000	18	95	19	18.150.000	20	100	49.650.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	13.500.000	75	75	14.650.000	12	10.395.700	14	80	80	14.000.000	16	80	80	14.000.000	18	85	19	15.400.000	20	90	71.750.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merapikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	166.565.000	75	75	183.244.000	12	136.994.900	14	75	75	300.000.000	16	80	80	200.000.000	18	85	19	220.000.000	20	85	1.069.829.000	
6	Program Koordinasi dan Pembinaan Publik Pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan publik pembangunan	%	70	70	416.631.000	100	100	460.485.000	12	440.069.970	14	100	15	559.000.000	16	100	17	600.500.000	18	100	19	660.550.000	20	100	2.879.176.000	Kantor Kecamatan Sringgaman
4.1.10	Kantor Kecamatan Sringgaman																										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	100	145.690.000	100	100	160.759.000	12	105.595.170	14	100	15	200.000.000	16	100	17	230.000.000	18	100	19	230.000.000	20	100	946.949.000	
2	Program Pengiklatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecolupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	103.817.000	75	75	113.979.000	12	70.824.800	14	80	80	100.000.000	16	80	80	100.000.000	18	80	19	100.000.000	20	85	527.596.000	
3	Program Pengiklatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat ketepatan pegawai	%	85	85	3.630.000	85	85	3.993.000	12	4.320.000	14	75	75	10.000.000	16	90	90	16.500.000	18	95	19	18.150.000	20	100	49.650.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	13.500.000	75	75	14.650.000	12	10.000.000	14	80	80	14.000.000	16	80	80	14.000.000	18	85	19	15.400.000	20	90	38.623.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu merapikan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	13.500.000	75	75	14.650.000	12	12.807.700	14	80	80	14.000.000	16	80	80	14.000.000	18	85	19	15.400.000	20	90	71.750.000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	OPD PENANGGUNG JAWAB								
					2015				2016				2017						2018				2019			
					Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi			Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi		
1	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			%	70	70	240.000.000	230.724.800.000	239.257.650	264.000.000	75	80	299.257.650	300.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.544.000.000	1.544.000.000					
			%	75	75	200.000.000	198.326.300.000	198.326.300.000	270.000.000	75	80	220.000.000	253.000.000	253.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000					
			%	75	75	200.000.000	343.181.800.000	343.181.800.000	270.000.000	75	80	97.844.240	300.000.000	300.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000					
			%	50	50	75.000.000	74.390.000.000	84.979.500	82.500.000	55	55	84.979.500	150.000.000	150.000.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000					
			%	75	75	140.000.000	139.621.200.000	207.245.960	154.000.000	85	85	207.245.960	150.000.000	150.000.000	281.300.000	281.300.000	281.300.000	281.300.000	281.300.000	281.300.000	281.300.000					
			%	75	75	135.000.000	133.475.000.000	371.653.852	148.500.000	75	80	371.653.852	300.000.000	300.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000					
			Ya/Tidak	Ya	Ya				Ya	Ya		1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000					
4.1.2	1		%	100	100	11.555.293.000	11.322.563.695.000	14.120.776.505	12.490.823.000	100	100	14.120.776.505	20.314.000.000	20.314.000.000	22.346.500.000	22.346.500.000	22.346.500.000	22.346.500.000	22.346.500.000	22.346.500.000	22.346.500.000					
			%	75	75	1.202.000.000	1.204.914.384.000	1.867.452.422	1.322.200.000	75	80	1.867.452.422	800.000.000	800.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000				
			%	85	85	396.700.000	390.600.000.000	253.150.000	436.300.000	85	85	253.150.000	400.000.000	400.000.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000	566.200.000				
			%	70	70	1.659.800.000	2.072.793.073.000	1.957.490.850	1.869.780.000	75	80	1.957.490.850	2.000.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000				
			%	70	70	13.500.000	12.707.700.000	17.707.900	14.850.000	75	80	17.707.900	14.000.000	14.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000				
			%	95	95	4.364.175.000	3.945.461.030.000	5.397.845.670	4.800.593.000	95	95	5.397.845.670	10.000.000.000	10.000.000.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000	8.700.800.000				
4.1.3	1		%	100	100	706.696.000	633.276.336.000	720.789.469	776.865.000	100	100	720.789.469	1.034.000.000	1.034.000.000	897.600.000	897.600.000	897.600.000	897.600.000	897.600.000	897.600.000	897.600.000					
			%	75	75	156.569.500	144.293.300.000	108.743.500	172.277.000	75	80	108.743.500	250.000.000	250.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000				
			%	85	85	3.400.000			3.740.000	85	85		10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000				
			%	70	70	13.500.000	13.500.000.000	8.642.000	14.850.000	75	80	8.642.000	14.000.000	14.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000				
			%	70	70	277.047.000	275.129.460.000	373.659.700	304.752.000	75	80	373.659.700	400.000.000	400.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000				
4.1.4	1		%	100	100	466.407.000	447.266.652.000	575.171.200	515.249.000	100	100	575.171.200	736.000.000	736.000.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000	777.500.000				
			%	100	100	175.084.000	121.904.854.000	175.569.150	137.593.000	100	100	175.569.150	200.000.000	200.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000				

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/ONE)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERENCANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPPD PENGANGSUNG JAWAB				
					2015			2016			2017			2018					2019			
					Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi			Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	3.8	Urusan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Pembangunan Wilayah Transmigrasi Lokal dan Transmigrasi Regional)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					65	90.000.000	90.000.000	139.413.900.00	90.000.000	99.000.000	99.000.000	132.890.300	132.890.300	132.890.300	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	489.000.000	489.000.000
			%	65	65	90.000.000	90.000.000	139.413.900.00	90.000.000	99.000.000	99.000.000	132.890.300	132.890.300	132.890.300	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	489.000.000	489.000.000
									70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENCAHAIAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	TUPU PERANGGANG JAWAB						
					2015			2016			2017			2018					2019					
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	3.6	Urusan Kebudayaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dinas Lingkungan Hidup	%	50	2.015.000.000	2.015.000.000	2.015.000.000	2.342.271.000.00	2.425.500.000	2.425.500.000	2.425.500.000	3.003.872.512	3.003.872.512	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	860.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000	7.120.500.000	7.120.500.000	7.120.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan dan Konektivitas Sumber Daya Hutan	%	50	185.000.000	185.000.000	185.000.000	1.074.649.000.00	24.500.000	60	60	100.000.000	2.022.158.900	2.022.158.900	100.000.000	100.000.000	150.000.000	776.000.000	776.000.000	776.000.000	1.385.500.000	1.385.500.000	1.385.500.000	
		Pemerataan Potensi Sumber Daya Hutan	%	90	95.000.000	95.000.000	95.000.000	94.968.850.00	104.500.000	90	90	100.000.000	109.899.500	109.899.500	100.000.000	100.000.000	121.000.000	430.500.000	430.500.000	430.500.000	430.500.000	430.500.000	430.500.000	
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	170	1.645.000.000	1.645.000.000	1.645.000.000	1.649.528.880.00	1.809.500.000	210	210	1.809.500.000	2.095.085.200	2.095.085.200	500.000.000	500.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	4.374.500.000	4.374.500.000	4.374.500.000	
		Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Dok	4	390.000.000	390.000.000	390.000.000	523.727.12.00	429.000.000	5	5	429.000.000	578.088.400	578.088.400	450.000.000	450.000.000	495.000.000	1.764.000.000	1.764.000.000	1.764.000.000	1.764.000.000	1.764.000.000	1.764.000.000	
		Pembinaan dan Perentihan Industri Hasil Hutan	%	85	40.000.000	40.000.000	40.000.000	34.751.500.00	38.500.000	30	30	38.500.000	31.658.412	31.658.412	40.000.000	40.000.000	44.000.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
		Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.295.000.00	44.000.000			44.000.000	89.339.000	89.339.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	394.000.000	394.000.000	394.000.000	394.000.000	394.000.000	394.000.000	

URUSAN DAN PROGRAM PEH: NGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2015)		DPO PEMANGGUNG JAWAB			
				2015			2016			2017			2018			2019			Target	Rp	
				Target		Realisasi	Target		K	Rp	Realisasi		Target	Rp	Target		Rp				Target
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	Unsur Perdagangan	%	100	0	3.247.778.000	0	3.030.567.800,00	0	3.672.896.000	0	5.393.956.670	0	3.034.000.000	0	3.794.000.000	0	4.773.400.000	0	#VALUE!		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	0	3.247.778.000	0	3.030.567.800,00	0	3.672.896.000	0	5.393.956.670	0	3.034.000.000	0	3.794.000.000	0	4.773.400.000	0	#VALUE!		
	1) Pelayanan Administrasi & Perawatan	%	100	0	0	0	0	0	0	0	360.611.200	100	400.000.000	100	750.000.000	100	875.000.000	100	1.975.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	0	0	0	0	0	0	75	112.453.800	75	130.500.000	90	1.000.000.000	80	1.100.000.000	85	2.200.000.000		
	3) Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	10.000.000	90	30.000.000	95	33.000.000	100	#VALUE!		
	4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	0	0	0	0	0	0	70	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	80	55.000.000	80	155.000.000		
	5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	70	0	0	0	0	0	0	75	13.500.000	80	14.000.070	80	14.000.000	85	15.430.000	90	43.400.000		
	6) Perluangan Konsumen dan Penguasaan Heng apangan	%	10	10	170.000.000	165.033.050,00	187.000.000	10	187.000.000	10	183.303.300	10	600.000.000	10	650.000.000	10	665.000.000	10	772.000.000		
	7) Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	%	30	30	200.000.000	246.265.200,00	220.000.000	40	220.000.000	40	512.407.360	40	200.000.000	45	600.000.000	45	660.000.000	45	1.880.000.000		
	8) Pengembangan Perdagangan Pasar	%	30	30	2.877.778.000	2.719.269.550,00	2.877.778.000	45	3.164.896.000	45	4.182.433.560	50	2.000.000.000	50	800.000.000	55	880.000.000	55	9.772.074.000		
	9) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	%	12,50	12,5	0	0	50.000.000	13	50.000.000	13	49.481.400	13,10	130.000.000	13,20	400.000.000	13,50	440.000.000	13,50	1.020.000.000		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PELOMBAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPO PENANGGUNG JAWAB						
					2015			2016			2017			2018					2019					
					Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi			Tertarget		Realisasi	Tertarget		Realisasi
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
3.2	Urusan Perumahan Dinas Perumahan	Calakan layanan administrasi yang terintegrasi	%	100	1.688.111.200	26.878.251.200	39.284.889.701,71	29.443.974.000	100	1.724.424.000	29.443.974.000	30.285.857.237	29.443.974.000	100	1.400.000.000	33.993.000.000	36.842.300.000	36.842.300.000	1.540.000.000	1.540.000.000	7.767.535.200	1.540.000.000		
		Calakan layanan administrasi yang terintegrasi	%	75	5.897.000.000	5.897.000.000	5.553.297.450,00	6.178.700.000	75	6.178.700.000	6.178.700.000	4.928.620.889	6.178.700.000	80	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	17.505.700.000	2.100.000.000		
		Persentase tingkat kepuasan pegawai	%	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	33.000.000	12.000.000		
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	770.000.000	770.000.000	776.585.993	797.000.000	75	797.000.000	797.000.000	384.650.765	797.000.000	80	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	87.000.000	100.000.000		
		Kepuasan waktu menyelesaikan layanan energi dan keuangan	%	70	40.500.000	40.500.000	40.489.500	44.550.000	75	44.550.000	44.550.000	40.489.800	44.550.000	80	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	128.450.000	14.000.000		
		Ketersediaan cadangan pangan	Ton	58.000	3.849.709.000	3.849.709.000	2.021.067.200	4.234.679.000	63.325	4.234.679.000	4.234.679.000	3.583.344.650	4.234.679.000	64.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	14.704.387.000	2.000.000.000		
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/Perkebunan			150.000.000	150.000.000	76.756.000	165.000.000		165.000.000	165.000.000	204.730.300	165.000.000		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.265.000.000	300.000.000			
		Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan	%	62,5	7.926.417.000	7.926.417.000	22.461.228.851,71	8.718.054.000	62,5	8.718.054.000	8.718.054.000	8.874.148.075	8.718.054.000	75	9.500.000.000	9.500.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000	44.955.466.000	10.450.000.000		
		Pengembangan Agribisnis	%	50	2.230.000.000	2.230.000.000	1.580.138.100	2.453.000.000	55	2.453.000.000	2.453.000.000	2.771.471.739	2.453.000.000	70	3.200.000.000	3.200.000.000	3.380.000.000	3.380.000.000	3.380.000.000	3.380.000.000	15.263.000.000	3.380.000.000		
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	%	80	960.000.000	960.000.000	997.413.300	1.056.000.000		1.056.000.000	1.056.000.000	529.104.550	1.056.000.000		600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	3.966.000.000	600.000.000			
		Calakan penerapan teknologi pertanian oleh kelompok tani	%	30	995.000.000	995.000.000	917.347.600	1.094.500.000	40	1.094.500.000	1.094.500.000	979.462.500	1.094.500.000	60	6.000.000.000	6.000.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	24.889.500.000	6.800.000.000		
		Calakan bina kelompok petani	%	50	1.152.860.000	1.152.860.000	1.439.158.100	1.267.948.000	60	1.267.948.000	1.267.948.000	2.586.662.200	1.267.948.000	65	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	12.428.828.000	3.500.000.000		
		Calakan bina kelembagaan tani	%	50	71.500.000	71.500.000	73.541.900	85.250.000	50	85.250.000	85.250.000	147.987.400	85.250.000	55	90.000.000	90.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	351.750.000	99.000.000		
		Persentase ternak yang diaksan dan dibati	%	> 70	350.000.000	350.000.000	348.890.200	385.000.000	> 30	385.000.000	385.000.000	436.772.500	385.000.000	> 30	400.000.000	400.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.835.000.000	350.000.000		
		Produksi Unggul, Susu dan Telur			1.574.340.000	1.574.340.000	1.968.138.600	1.778.474.000		1.778.474.000	1.778.474.000	1.794.586.165	1.778.474.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	8.089.840.000	2.200.000.000		
		Peningkatan Produksi Hasil Pertanian																						
		Peningkatan Penyebaran Teknologi Pertanian																						
		Peningkatan Kualitas Bahan Baku																						



ID	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2015			2016			2017		2018		2019		Rp					
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	URUSAN : Kesehatan Dinas Perhubungan	3	%	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Dinas Perhubungan	
	Program Pemeliharaan dan Pelaksanaan Dukumen/Aspi Daerah	Persentase jumlah dokumen aspi yang mempunyai nilai guna yang signifikan.	%	10		10	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	330.000.000	330.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	

ID	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	RPJMD PEMANGKONG JAWAB							
					2015				2016				2017		2018				2019						
					K	Rp	Target	Realisasi	K	Rp	Target	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp			
1	1.4	1.4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			%	100	2.530.500.000	2.530.500.000	2.632.558.050.00	2.632.558.050.00	2.783.550.000	2.783.550.000	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	2.834.981.756	
			%	75	354.000.000	354.000.000	370.930.300.00	370.930.300.00	389.400.000	389.400.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
			%	75	263.000.000	263.000.000	368.035.650.00	368.035.650.00	289.300.000	289.300.000	75	214.804.500	214.804.500	80	25.000.000	80	100.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000
			%	85							85			85	10.000.000	30.000.000	95	33.000.000	100	72.000.000					
			%	70	30.000.000	30.000.000	47.950.000.00	47.950.000.00	33.000.000	33.000.000	75	71.035.000	71.035.000	80	20.000.000	80	30.000.000	85	30.000.000	85	30.000.000				
			%	70	13.500.000	13.500.000			14.850.000	14.850.000	75	12.419.400	12.419.400	80	14.000.000	80	14.000.000	85	15.400.000	90	15.400.000				
			%	45	150.000.000	150.000.000	148.772.700.00	148.772.700.00	165.000.000	165.000.000	50	189.346.400	189.346.400	55	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000				
			%	45	875.000.000	875.000.000	863.024.500.00	863.024.500.00	982.500.000	982.500.000	50	570.672.434	570.672.434	55	420.000.000	60	700.000.000	65	700.000.000	65	700.000.000				
			%	30	350.000.000	350.000.000	343.535.600.00	343.535.600.00	385.000.000	385.000.000	35	573.523.000	573.523.000	40	200.000.000	45	350.000.000	50	385.000.000	50	385.000.000				
			%	45	485.000.000	485.000.000	490.770.800.00	490.770.800.00	544.500.000	544.500.000	50	704.678.500	704.678.500	50	550.000.000	60	700.000.000	65	770.000.000	65	770.000.000				

ID	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal (PJMD)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	OPD PEMANGGUNG JAWAB							
					2015			2016			2017			2018					2019						
					K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI			K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
JZ	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																								
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Caluan layanan administrasi yang terintegrasi	%	100	1.059.257.000	1.059.257.000	1.295.097.424,00	1.295.097.424,00	1.059.257.000	1.059.257.000	1.059.257.000	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	1.420.946.293	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Caluan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	193.500.000	193.500.000	148.705.740,00	148.705.740,00	193.500.000	193.500.000	193.500.000	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	233.705.531	
	Pengelolaan Fasilitas Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	%	85																					
	Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	15.000.000	15.000.000	2.640.000,00	2.640.000,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	38.145.800	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	70	13.500.000	13.500.000	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	13.497.700	
	Pengembangan Sistem Pendukung dan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	%	43,20	200.000.000	200.000.000	147.098.000,00	147.098.000,00	200.000.000	200.000.000	200.000.000	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	206.550.600	
		Caluan pengembangan UMKM	%	70	250.000.000	250.000.000	573.383.400,00	573.383.400,00	250.000.000	250.000.000	250.000.000	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500	47.157.500



Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (tahun 2019)	OPD PENANGGUNG JAWAB					
				2015			2016			2017			2018									
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	Urusan Perhubungan		5	7.360.595.000	7.360.595.000	7.360.595.000	8.096.655.000	8.096.655.000	8.096.655.000	5.640.370.516	5.640.370.516	2.335.000.000	2.335.000.000	2.335.000.000	2.335.000.000	2.564.000.000	2.564.000.000	2.820.400.000	2.820.400.000	23.176.650.000	23.176.650.000	
	Dinas Perhubungan (Pelayanan Administrasi Perakotoran)	%	100	7.360.595.000	7.360.595.000	7.360.595.000	8.096.655.000	8.096.655.000	8.096.655.000	5.640.370.516	5.640.370.516	2.335.000.000	2.335.000.000	2.335.000.000	2.335.000.000	2.564.000.000	2.564.000.000	2.820.400.000	2.820.400.000	23.176.650.000	23.176.650.000	Dinas Perhubungan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	2.807.000.000	2.64.654.500.000	75	3.187.700.000	3.187.700.000	75	1.102.351.600	1.102.351.600	80	200.000.000	200.000.000	80	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	85	6.654.700.000	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85			85			85			85								100		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	55.000.000	10.523.000.000	70	60.500.000	60.500.000	75	3.742.500	3.742.500	80	35.000.000	35.000.000	80	50.000.000	50.000.000	45.000.000	45.000.000	85	245.600.000	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	70	13.500.000	13.500.000.000	70	14.850.000	14.850.000	75	13.493.500	13.493.500	80	20.000.000	20.000.000	80	14.000.000	14.000.000	15.400.000	15.400.000	90	77.750.000	
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	85	1.427.600.000	10.405.300.000	85	1.553.860.000	1.553.860.000	85	685.874.000	685.874.000	85	500.000.000	500.000.000	87	300.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	90	3.956.460.000	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas UAJ	%	75	1.825.870.000	1.416.716.700.000	75	2.008.457.000	2.008.457.000	75	2.436.590.600	2.436.590.600	78	440.000.000	440.000.000	80	300.000.000	300.000.000	840.000.000	840.000.000	85	5.444.327.000	
8	Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	85	126.000.000	126.000.000	85	138.600.000	138.600.000	85	271.589.600	271.589.600	87	200.000.000	200.000.000	87	250.000.000	250.000.000	126.000.000	126.000.000	90	834.600.000	
9	Pengembangan dan Pengamanan Lalu Lintas	%	75	590.000.000	338.330.650.000	75	648.000.000	648.000.000	75	449.349.800	449.349.800	80	400.000.000	400.000.000	80	700.000.000	700.000.000	555.000.000	555.000.000	85	2.894.000.000	



ID	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKAH PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPO PENANGGUNG JAWAB				
					2015			2016			2017		2018		2019							
					K	TARGET	Rp	K	TARGET	Rp	K	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.4	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	%	100	1578.447.700	1.578.447.700	1.736.293.000	1.862.743.972.00	1.862.743.972.00	1.736.293.000	1.736.293.000	3.121.652.781	3.121.652.781	3.137.000.000	3.100.000.000	3.137.000.000	3.137.000.000	3.450.700.000	3.450.700.000	13.012.440.700	13.012.440.700	22
		Calupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	557.297.700	557.297.700	393.078.000	397.460.099.00	397.460.099.00	393.078.000	1.736.293.000	1.736.293.000	505.605.700	505.605.700	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.450.700.000	3.450.700.000	Dinas Dukacapi
		Calupan kebijakan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	264.950.000	264.950.000	291.445.000	237.036.650.00	237.036.650.00	291.445.000	1.736.293.000	1.736.293.000	1.507.013.470	1.507.013.470	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	330.000.000	330.000.000	1.386.395.000	1.386.395.000
		Persentase tingkat kepuasan pegawai	%	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	33.000.000	33.000.000
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	35.000.000	35.000.000	38.500.000	34.957.000	34.957.000	38.500.000	1.736.293.000	1.736.293.000	34.957.000	34.957.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	66.000.000	66.000.000	239.500.000	239.500.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	70	43.500.000	43.500.000	47.850.000	41.690.000	41.690.000	47.850.000	1.736.293.000	1.736.293.000	77.015.660	77.015.660	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	72.600.000	72.600.000	289.550.000	289.550.000
		Penataan Administrasi Kependudukan	%	78,49	87,84	87,84	87,16	845.481.500,00	845.481.500,00	87,16	1.736.293.000	1.736.293.000	897.276.450	897.276.450	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.870.000.000	1.870.000.000	7.013.000.000	7.013.000.000	
			%	5,32	6,03	6,03	6,84	-	6,84	6,84	-	-	-	7,75	7,75	8,78	8,78	-	-	9,97	9,97	
			Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	
			Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	-	Sudah	Sudah	-	-	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	-	-	Sudah	Sudah	

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PELOMBAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	RPJ PERANGKANG JAWAB					
				2015				2016				2017		2018				2019				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Urusan Pangan					1.522.424.000	1.479.663.735.00	1.479.663.735.00	1.522.424.000	1.504.804.000	1.494.000.000	1.494.000.000	390.339.002	390.339.002	1.494.000.000	1.649.000.000	1.641.000.000	1.699.900.000	1.699.900.000	8.771.928.000	8.771.928.000	72
1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana /sarur	%	75	75	75	75	145.944.600.00	145.944.600.00	145.944.600.00	52.000	52.000	75	104.638.850	104.638.850	220.000.000	220.000.000	220.000.000	198.000.000	198.000.000	784.152.000	784.152.000	85
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	%																				
4	Peningkatan Kapasitas, Sumber Daya Aparatur	%	70	70	70	70	39.280.000.00	39.280.000.00	39.280.000.00	35.000	35.000	75	39.880.000	39.880.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	185.035.000	185.035.000	85
5	Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	70	70	70	70	13.500.000	13.500.000	13.500.000	17.000	17.000	75	13.392.800	13.392.800	14.000.000	14.000.000	14.000.000	22.500.000	22.500.000	64.070.000	64.070.000	90
6	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Pertekanan)	%					1.604.400.000	1.604.400.000	1.604.400.000						800.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.500.000	1.000.500.000	5.550.900.000	5.550.900.000	

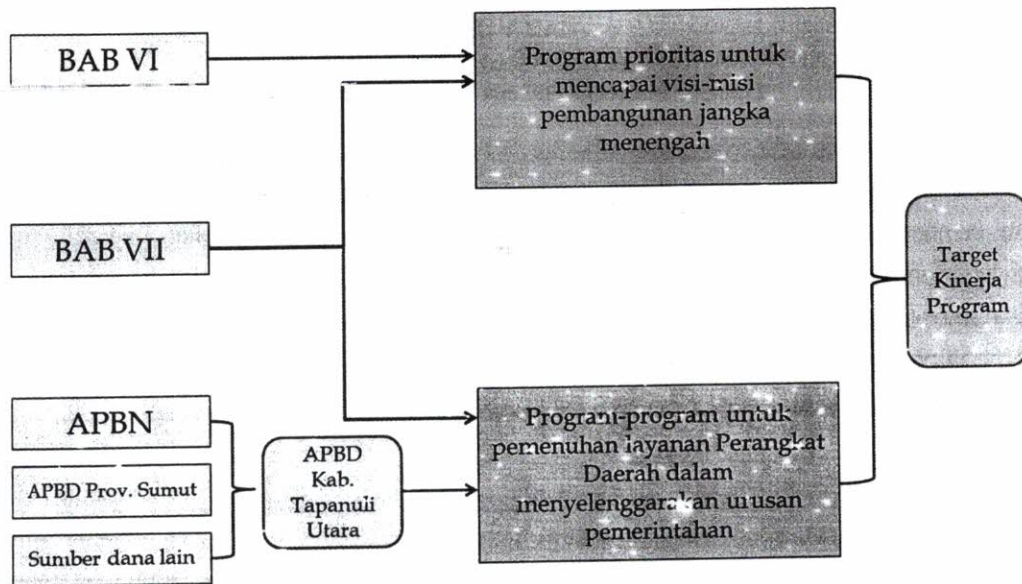
ID	URUSAN DAN PROGRAM PENGANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/ OUCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	Jumlah OPD PENANGGUNG JAWAB					
					2015			2016			2017			2018					2019				
					TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	K	TARGET	REALISASI	K			TARGET	REALISASI	K		
					Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp				Rp	Rp			
1	Urusan Sosial	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.6	Dinas Sosial					1.500.795.400	1.500.795.400	1.570.845.794,00	1.500.795.400	1.668.794.000	1.668.794.000	2.572.983.335	604,71	1.357.000.000	2.185.500.000	2.185.500.000	2.327.050.000	2.327.050.000	8.972.065.400	8.972.065.400			
	1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang bertanggung	%	100	100	47.135.000	100	442.372.938,00	100	453.350.000	100	611.487.215	100	425.000.000	565.000.000	565.000.000	565.000.000	2.370.986.000	2.370.986.000	100		Dinas Sosial	
	2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	176.434.000	75	215.270.000,00	75	194.078.000	75	561.792.370	80	172.000.000	200.000.000	200.000.000	224.000.000	224.000.000	976.517.000	976.517.000	85		
	3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	60.000.000	70	33.337.000,00	75	66.000.000	75		80	30.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	33.000.000	279.000.000	279.000.000	85		
	4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Cakupan PMS yang dibina	%	70	70	13.500.000	70	13.463.800,00	75	14.850.000	75	13.500.000	80	15.000.000	14.000.000	14.000.000	15.400.000	15.400.000	72.750.000	72.750.000	90		
	5) Pembudayaan Masyarakat Sehat (MKS) dan Penyelenggaraan Masalah Kesehatan Masyarakat (PMKS) Lainnya	Cakupan PMS yang dibina	%	25	25	104.537.500	25	139.857.300,00	25	114.592.000	25	113.198.300	27	100.000.000	700.000.000	700.000.000	296.000.000	296.000.000	1.935.579.500	1.935.579.500	35		
	6) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMS yang dibangun	%	25	25	481.000.000	25	483.080.640,00	25	579.000.000	25	667.943.500	27	500.000.000	600.000.000	600.000.000	758.950.000	758.950.000	2.878.050.000	2.878.050.000	35		
	7) Pemberdayaan Ketersediaan Kesejahteraan Sosial	Persentase ketersediaan kesejahteraan sosial yang dibina	%	50	50	130.000.000	55	110.440.000,00	60	143.000.000	65	7.560.000	70,71	15.000.000	16.500.000	16.500.000	379.200.000	379.200.000	663.700.000	663.700.000	80,81		
	8) Peningkatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	%	40	40	33.111.500		32.816.900,00	45	36.424.000		34.827.800	50	40.000.000	40.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000	193.535.900	193.535.900	60		
	9) Pelestarian Lahan dan Nilai Kesejahteraan	Persentase aparatur dan masyarakat yang aktif dalam pelestarian taman dan nilai	%	80	85	100.000.000	85	99.678.206,00	85	110.000.000		37.634.200	90	100.000.000	100.000.000	100.000.000			310.000.000	310.000.000	95		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)	DPO PEMANGGUNG JAWAB												
					2015				2016				2017						2018				2019							
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1.5	Urusan Keterbacaan Umum dan Perindungan Masyarakat					11.674.973.000		21.772.772.580.00		12.843.573.000		14.815.748.384		24.434.000.000		28.567.200.000		21.079.800.000		89.545.546.000										
1.5.1	Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat					2.231.544.000		2.531.506.374.00		2.454.639.000		3.297.630.276		2.440.000.000		3.179.200.000		3.442.200.000		13.897.643.000										
1	Pelayanan Administrasi Perantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	422.044.000	100	428.997.599.00	100	464.249.000	100	614.735.876	100	330.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.266.693.000					Kantor Kesbangpol Umam					
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	71.000.000	75	67.663.200.00	75	78.000.000	75	107.210.750	80	80.000.000	80	121.000.000	85	460.000.000												
3	Peningkatan Desain Aparatur	Persentase tingkat kepuasan pegawai	%	85	85	-	85	-	85	-	85	57.200.000	85	32.000.000	90	38.800.000	100	106.000.000												
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	30.000.000	70	29.920.000.00	70	33.000.000	75	29.679.000	75	30.000.000	80	55.000.000	80	198.000.000												
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	13.500.000	70	13.499.600.00	70	14.850.000	70	13.499.300	80	13.000.000	80	15.400.000	90	70.750.000												
6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat	%	75	75	475.000.000	75	490.684.700.00	75	572.500.000	75	482.564.888	80	500.000.000	80	305.000.000	80	2.222.500.000												
7	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Keterbacaan dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	75	75	523.000.000	75	558.465.423.00	75	576.300.000	80	755.659.960	80	450.000.000	85	577.000.000	90	2.540.300.000												
8	Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat menjadi anggota aktif Organisasi Masyarakat atau Partai Politik	%	35	35	147.000.000	35	163.676.500.00	40	161.700.000	40	311.809.500	40	160.000.000	45	485.000.000	50	1.443.700.000												
9	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan latihan dan nilai kepahlawanan	%	80	80	165.000.000	80	337.994.000.00	90	214.500.000	90	246.804.400	95	230.000.000	98	270.000.000	98	1.059.500.000												
10	Pelestarian Iatanan dan Nilai Kepahlawanan	Persentase aparatur dan masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan latihan dan nilai kepahlawanan	%	80	85	365.000.000	85	351.655.600.00	85	390.500.000	85	386.605.800	90	350.000.000	90	485.000.000	95	2.040.500.000												
	Program Penyuluhan Percepatan dan Pemberantasan Penyelenggaraan Peredaran Gelap Narkoba	Persentase penguna, penyuluhan dan pendirian narkoba	%					58.355.700.00				104.675.600		65.000.000		100.000.000		165.000.000												
	Program Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	Partisipasi aktif masyarakat dalam mengikut pemeren pembangunan																												
1.5.2	Satuan Polisi Pemung Pajaj					7.769.277.000		8.329.744.983.00		8.546.206.000		4.397.300.008		7.020.000.000		7.444.000.000		8.655.400.000		38.904.883.000						Satpol PP				
1	Pelayanan Administrasi Perantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	979.442.000	100	976.712.900.00	100	1.070.540.000	100	1.655.909.070	100	3.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.141.000.000	100	13.685.656.000										
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75	75	111.500.000	75	107.357.098.00	75	127.650.000	75	86.239.487	80	200.000.000	82	400.000.000	84	403.070.000	85	1.237.220.000										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70	70	158.000.000	70	131.063.200.00	70	173.800.000	70	194.72.400	80	300.000.000	80	110.000.000	85	862.800.000												
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	70	70	13.500.000	70	13.499.400.00	70	14.850.000	75	17.999.800	80	15.000.000	80	15.400.000	90	77.750.000												
5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah anggota Satpol PP	Orgng	82	85	120.000.000	92	119.969.000.00	100	132.000.000	102	157.096.300	170	200.000.000	175	250.000.000	130	245.400.000	130	947.400.000										
6	Hambatan Karir dan Pembinaan dan Pengembangan Tingkat Kritis	Jumlah penyuluhan terhadap pengalihan pendahul/penerusan	Kah	3	4	400.000.000	4	499.953.000.00	4	440.000.000	4	1.277.947.660	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	20	4.756.000.000										
7	Mutuhan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	%	80	85	40.000.000	85	39.466.500.00	90	44.000.000	90	46.027.900	95	50.000.000	97	130.000.000	98	143.000.000	98	47.000.000										

INDO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBERHASILAN PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)		DPO PANGANGBIANG JAWAR			
					2015				2016				2017		2018		2019					
					Tertarget		Realisasi		Tertarget		Realisasi		Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi	Tertarget	Realisasi		Tertarget	Realisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3	Usasan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					76.615.550.000	174.239.499.292.41	84.274.909.000	84.274.909.000	84.274.909.000	84.274.909.000	154.353.729.046	154.353.729.046	10.194.000.000	10.194.000.000	10.194.000.000	10.194.000.000	10.194.000.000	10.194.000.000	10.194.000.000	445.667.955.000	445.667.955.000
1.3.1	Unas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		%	100	100	1.094.234.000	1.070.657.720.000	1.203.658.000	1.203.658.000	1.203.658.000	1.237.052.561	1.237.052.561	100	100	100	100	100	100	100	100	445.667.955.000	445.667.955.000
	Pelayanan Administrasi Perumahan		%	75	75	229.400.000	10.688.701.037.000	251.240.000	251.240.000	251.240.000	1.437.667.525	1.437.667.525	80	80	80	80	80	80	80	80	29.877.897.000	29.877.897.000
	Peningkatan Sistem dan Prasarana Aparatur		%	85	85																4.444.640.000	4.444.640.000
	Program peningkatan disiplin aparatur		%	70	70	75.000.000	98.072.200.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	45.789.159	45.789.159	70	70	70	70	70	70	70	70	143.000.000	143.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	70	70	43.500.000	13.500.000.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	13.500.000	13.500.000	75	75	75	75	75	75	75	75	10.000.000	10.000.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	40	40	45.255.015.000	51.078.665.204,43	43.780.507.000	43.780.507.000	43.780.507.000	38.726.766.070	38.726.766.070	55	55	55	55	55	55	55	55	37.000.700.000	37.000.700.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan		%	29	29	1.306.500.000	1.098.745.000.000	1.440.450.000	1.440.450.000	1.440.450.000	21.575.200	21.575.200	30	30	30	30	30	30	30	30	3.630.000.000	3.630.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan		%	10	10	5.863.345.000	27.956.065.780.000	6.994.680.000	6.994.680.000	6.994.680.000	11.650.953.650	11.650.953.650	15	15	15	15	15	15	15	15	10.120.000.000	10.120.000.000
	Pengembangan & Pengalihan Jaringan Higasi, Rawe & Jaringan Pengaliran Lainnya		%	40	40	17.665.157.000	33.482.220.958.000	19.433.673.000	19.433.673.000	19.433.673.000	71.665.599.787	71.665.599.787	45	45	45	45	45	45	45	45	40.000.000.000	40.000.000.000
	Peningkatan Jalan dan Jembatan		%	13	13	899.400.000	950.450.580.000	989.340.000	989.340.000	989.340.000	1.794.885.866	1.794.885.866	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2.530.000.000	2.530.000.000
	Pertanian/Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Lampu Jalan		Ha	13,45	13,45	1.300.000.000	1.479.875.800.000	1.441.000.000	1.441.000.000	1.441.000.000	1.752.696.000	1.752.696.000	30	30	30	30	30	30	30	30	430.000.000	430.000.000
	Pengalihan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		%	30	30	2.950.000.000	3.248.622.000.000	3.245.000.000	3.245.000.000	3.245.000.000	789.741.000	789.741.000	50	50	50	50	50	50	50	50	1.550.000.000	1.550.000.000
	Pencantrakan Teta Ruang		%	65	65																7.000.000.000	7.000.000.000
	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman		%	60	60																2.200.000.000	2.200.000.000
	Pembangunan Infrastruktur Air Minum		%																		6.500.000.000	6.500.000.000

NO	URAIAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2019)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYAJIAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (Tahun 2019)																																																																																		
					2015						2016						2017						2018						2019																																																																						
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi																																																																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																			
1	1.2	1.2.1	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1.2	1.2.1	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak dapat didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Akan tetapi pencantuman pendanaan di dalam tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda pembangunan yang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada tabel 7.2.



**Gambar 7.1**  
**Indikasi Program Pembangunan RPJMD**

Perumusan indikasi rencana program pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan dan disesuaikan dengan kapasitas riil daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 7.1.

## **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Permasalahan pembangunan pada umumnya terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena kegagalan menggunakan sumberdaya pembangunan yang tersedia secara optimal dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor eksternal pada umumnya terjadi karena adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis yang secara geografis terletak di Bagian Tengah Sumatera Utara serta memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran masyarakat. Namun disamping peluang yang tersedia terdapat juga berbagai ancaman yang harus dihadapi. Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapanuli Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019 ini menguraikan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara yang dirumuskan dari kelemahan dan ancaman yang dihadapi selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Hubungan antara permasalahan pembangunan, isu strategis dan langkah-langkah konkrit pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun dalam rangkaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pembangunan kabupaten tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II dan Bab III, identifikasi permasalahan strategis pembangunan yang dihadapi dilakukan berdasarkan pendekatan empat aspek yaitu (a) aspek geografis dan demografi; (b) aspek kesejahteraan rakyat; (c) aspek pelayanan dan (d) aspek daya saing. Aspek identifikasi permasalahan strategis pembangunan didasarkan kepada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **4.1.1.2. Demografi**

Berdasarkan aspek demografi, permasalahan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan angka ketergantungan. Jumlah penduduk tengah tahun Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 diproyeksikan berada pada angka 295.613 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadi permasalahan dalam upaya pemenuhan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara hingga pertengahan tahun 2016 adalah 295.613 jiwa dimana tingkat penyebarannya tidak merata pada setiap kecamatan. Kecamatan Siborongborong mempunyai jumlah penduduk tertinggi, yaitu 46.751 jiwa atau sebesar 15,81 persen dan Kecamatan Purbatua mempunyai jumlah penduduk terendah yaitu 7.583 jiwa atau sebesar 2,57 persen. Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata ini berdampak kepada ketersediaan tenaga kerja pada beberapa kecamatan.

#### **4.1.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat**

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia. Sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, kualitas sumberdaya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan sering menghadapi hambatan dan permasalahan. Berdasarkan hasil identifikasi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara masih dihadapkan pada beberapa permasalahan berikut :

##### **1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia**

Hal ini ditandai dengan indikator usia harapan hidup yang masih rendah, tingginya angka kemiskinan, cakupan penanganan PMKS yang masih rendah.

##### **2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat**

Rendahannya ekonomi masyarakat terlihat dari rendahnya pendapatan per kapita. Permasalahannya meliputi rendahnya investasi, kurang maksimalnya pengelolaan sektor pertanian, terbatasnya ketersediaan input produksi pertanian dan belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan, belum berdayanya industri kecil menengah (IKM), belum berkembangnya pariwisata, belum optimalnya peranan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Masih rendahnya infrastruktur pendukung merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Berkembangnya sektor industri belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.

Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum meratanya penerapan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian serta belum memadainya dukungan sarana dan prasarana. Wilayah budidaya pertanian relatif masih terbatas dan belum mengoptimalkan lahan yang ada. Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan tidak optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah belum berdayanya industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Peranan

dan demokrasi. Sementara itu beban kerja yang semakin meningkat menuntut perlunya peningkatan profesionalisme dan komitmen yang kuat dari aparatur pemerintah. Komitmen dan visi aparatur mengenai hakekat pembangunan serta pola pikir yang *project oriented* perlu direformasi guna mewujudkan *good governance and clean government* serta berusaha mentransformasikan semangat *entrepreneurship* (wirausaha) ke dalam sektor publik dan birokrasi pemerintahan.

#### **4.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **4.1.3.1.1. Pendidikan**

Peningkatan pelayanan (akses, kualitas dan kuantitas) pendidikan telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan, akan tetapi masih banyak permasalahan, tantangan dan kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2015 capaian angka rata-rata lama sekolah adalah 9,31 tahun dan pada tahun 2016 berada pada angka 9,32 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara belum menyelesaikan pendidikan menengah.
- b. Tingkat pendidikan guru di Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jumlahnya masih kurang memadai. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD sederajat dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 46,71 %, pada jenjang pendidikan SMP sederajat sebanyak 90,22 %. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas belajar mengajar di kelas.
- c. Masih belum optimalnya sistem dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para pendidik sehingga kualitas dari peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan distribusi guru yang belum merata pada setiap jenjang pendidikan dan ketidaksesuaian penempatan guru dengan kebutuhan sekolah. Terjadinya perpindahan tenaga pengajar ke jenjang jabatan struktural akan mempengaruhi ketersediaan tenaga pengajar pada setiap jenjang pendidikan.

##### **4.1.3.1.2. Kesehatan**

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain tingkat pendidikan dan pendapatan, kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus mencakup peningkatan kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia dan tata kelola. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan, antara lain:

- a. Angka harapan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 berada pada angka 67,85 tahun dari target 68 tahun. Salah satu penyebab capaian lebih rendah dari target adalah pola hidup masyarakat yang masih kurang memenuhi syarat kesehatan termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Angka Kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 0.314 dan tahun 2016 berada pada angka 0.289. Sedangkan untuk angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 0.055 dan tahun 2016 yang berada pada angka 0,011.

lingkungan masing-masing sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

- b. Belum tersedianya sistem informasi rawan bencana serta mitigasinya.
- c. Belum optimalnya tingkat waktu tanggap (*respon time*) dalam penanganan bencana.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menghindari bencana.
- e. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana tanggap darurat bencana.

#### **4.1.3.1.6. Sosial**

Permasalahan pada urusan Sosial antara lain :

- a. Masih belum optimalnya pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini terlihat dari data persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya hanya 34 % pada tahun 2015 dan tahun 2016 berada pada angka 35 % terhadap target SPM Kemensos sebesar 80% pada tahun 2015.
- b. Masih belum optimalnya PMKS menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan data tahun 2015 sebesar 34% dan data tahun 2016 sebesar 36% terhadap target SPM sebesar 80% tahun 2015.
- c. Masih tingginya persentase penduduk miskin, dimana tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara tercatat sebesar 11.25 dari target RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 11,15. Namun capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2015 sebesar 11.47 dari target RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 11.50.

#### **4.1.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **4.1.3.2.1. Tenaga Kerja**

Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja antara lain :

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini terlihat dari angka TPT tahun 2016 sebesar 7,08. Bila dibandingkan dengan capaian TPT pada tahun 2015 sebesar 7.70 maka capaian tahun 2016 lebih baik dari capaian tahun 2015. Masih tingginya angka TPT ini dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor industri dan sektor pertanian dimana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
- b. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

##### **4.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
- b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan.

- d. Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak para pelaku perusak lingkungan yang mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup.
- e. Belum optimalnya penanganan sampah seperti masih kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, kurangnya pemahaman hampir seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.
- f. Belum tersedianya informasi/data Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) dan potensi Sumber Daya Alam.

#### **4.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan antara lain KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran. Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan KTP untuk tahun 2016 sebesar 81,48%, Akta Perkawinan sebesar 47,25% dan Akta Kelahiran sebesar 34,73%.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) karena ketersediaan sarana dan prasarana pendukung belum memadai.

#### **4.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- a. Masih adanya desa terpencil dan sangat terpencil yang perlu lebih diperhatikan peningkatan kesejahteraannya. Hal ini terlihat dari data tahun 2016 jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal masih ada 20 desa dari total 241 desa.
- b. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparaturnya desa di dalam menjalankan pembangunan desa.
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing.
- d. Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

#### **4.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu dilakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- b. Masih rendahnya cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana persentase data tahun 2015 sebesar 66,12% dan tahun 2016 sebesar 69,29%.

#### **4.1.3.2.9. Perhubungan**

Permasalahan pada urusan Perhubungan antara lain :

- a. Belum optimalnya pengembangan transportasi darat dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

- b. Belum optimalnya penciptaan iklim investasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Masih rendahnya pelaksanaan kerjasama antara pengusaha lokal dengan investor dalam pengelolaan sumber daya.

#### **4.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

- a. Kurangnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
- b. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah.
- c. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **4.1.3.2.14. Statistik**

Permasalahan pada urusan Statistik antara lain :

- a. Belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses perencanaan maupun untuk melihat hasil pembangunan daerah.
- b. Masih lemahnya kesadaran masing-masing Perangkat Daerah dalam menyiapkan data sesuai dengan urusannya.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan pemberian reward atau punishment didalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan Daerah

#### **4.1.3.2.15. Persandian**

Permasalahan pada urusan Persandian antara lain :

- a. Belum optimalnya tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
- b. Belum optimalnya koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah

#### **4.1.3.2.16. Kebudayaan**

Permasalahan pada urusan Kebudayaan antara lain :

- a. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul serta masih lemahnya pemahaman nilai luhur budaya yang berkembang di masyarakat.
- b. Kurangnya penerapan tata nilai budaya dan adat istiadat leluhur dalam pembangunan jatidiri.
- c. Masih lemahnya pengembangan budaya inovasi yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur.
- d. Belum optimalnya bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas seni dan budaya.

- f. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata yang difokuskan pada pengembangan wisata sejarah dan wisata budaya.

#### **4.1.3.3.3. Pertanian**

Permasalahan pada urusan Pertanian antara lain :

- a. Produksi sektor pertanian belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
- b. Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kecamatan yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersial masih belum memadai. Sebagian besar masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur, saprodi bidang pertanian dan pemasaran hasil pertanian yang diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor pertanian dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
- d. Rendahnya produktivitas usaha pertanian, serta penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.
- e. Rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian.
- f. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM penyuluh pertanian.
- g. Lemahnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

#### **4.1.3.3.4. Energi dan Sumber daya Mineral**

Permasalahan pada urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain : Masih adanya daerah pemukiman masyarakat yang belum mendapat aliran jaringan listrik khususnya pada daerah terpencil.

#### **4.1.3.3.5. Perdagangan**

Permasalahan pada urusan Perdagangan antara lain :

- a. Rendahnya kualitas produk daerah yang akan dipasarkan keluar daerah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal di luar.
- b. Belum optimalnya promosi yang dilakukan dalam mendukung pemasaran produk-produk lokal keluar daerah maupun keluar negeri.
- c. Lemahnya sistem tata kelola perdagangan dan pengawasan terhadap pemasaran produk-produk di dalam daerah.
- d. Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan mau pun komoditas non pangan.
- e. Kurangnya jiwa enterpreneur pelaku usaha maupun pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

#### **4.1.3.3.6. Perindustrian**

Permasalahan pada urusan Perindustrian antara lain :

- c. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan yang berubah-ubah dan terlambat penetapannya.

#### **4.1.3.4.4. Keuangan Daerah**

Permasalahan pada urusan Keuangan Daerah antara lain :

- a. Perlunya peningkatan manajemen aset daerah dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian.
- b. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual.

#### **4.1.3.4.5. Kepegawaian Daerah**

Permasalahan pada urusan Kepegawaian Daerah antara lain :

- a. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja bagi aparatur

#### **4.1.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan pada urusan Penelitian dan Pengembangan antara lain :

- a. Minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Minimnya produk penelitian yang mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- c. Minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara
- d. Belum tersusunnya dokumen Rencana Induk Kelitbangan dan Sistem Inovasi Daerah.

### **4.1.4 Aspek Daya Saing**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### **4.1.4.1. Ekonomi dan Keuangan**

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara di bidang ekonomi, keuangan dan sumberdaya dihadapkan pada masalah masih rendahnya daya saing produk unggulan daerah, tingginya tingkat ketergantungan daerah dan degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam yang dapat mempengaruhi daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke Tapanuli Utara untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah ini.

Kondisi alam dan potensi sumber daya yang cukup besar yang dimiliki daerah ini memungkinkan untuk mengembangkan berbagai komoditi dalam mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat, khususnya pengembangan komoditi unggulan pertanian daerah. Pengembangan komoditi unggulan pertanian di daerah ini diharapkan dapat memberikan kesinambungan ketersediaan bahan baku yang diprioritaskan berasal dari produksi lokal yang sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan industri berbasis

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang masih sering terjadi karena kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah masih rendah.
- b. Upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal.
- c. Pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup belum efektif.
- d. Pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan masih kurang.
- e. Tempat sampah di lokasi-lokasi padat aktivitas masih terbatas dan armada pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) masih kurang serta TPA belum memadai.
- f. Terjadinya perubahan lingkungan karena aktifitas manusia antara lain penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan pencemaran.
- g. Tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih rendah akibat kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan.

#### **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis daerah berkaitan dengan masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019, karena dari tahap ini akan diketahui apa tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2) Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.
  - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kondisinya di masa datang.
  - Sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

- 1) Kriteria-1 : Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- 2) Kriteria-2 : Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- 3) Kriteria-3 : Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat.
- 4) Kriteria-4 : Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
- 5) Kriteria-5 : Mungkin dan mudah dikelola.
- 6) Kriteria-6 : Merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			<p>2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang didukung berbagai kegiatan dengan indikator antara lain persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani, persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana, persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT, persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi, persentase ibu hamil mendapatkan Fe</p> <p>3. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan melalui Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari berbagai kegiatan dengan indikator antara lain persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, persentase SD yang mempromosikan kesehatan.</p>
		3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air untuk peningkatan produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian</p> <p>3. Peningkatan ruang terbuka hijau</p> <p>4. Penanganan jalan dan jembatan dititik beratkan pada skala prioritas yang berkelanjutan</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan mutu pekerjaan penanganan jalan dengan spesifikasi teknis</p>
		4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>1. Peningkatan jumlah pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta peningkatan kualitas hunian masyarakat</p> <p>2. Peningkatan layanan air limbah terpusat</p> <p>3. Peningkatan layanan air minum perpipaan dan sanitasi</p>
		5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>1. Kehidupan masyarakat modern membawa perubahan-perubahan sosial di masyarakat sehingga ketertiban harus diperhatikan, terlebih mewaspadaai peredaran minuman keras dan narkoba</p> <p>2. Menjunjung tinggi nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang artinya bersatu mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia</p> <p>3. Linmas sigap dalam menghadapi segala tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat</p>

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
		4. Lingkungan Hidup	<p>Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan 3 prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Isu pokok lingkungan hidup antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penanganan konservasi dan pelestarian sumber daya air</li> <li>2. Reboisasi hutan dalam rangka peningkatan kawasan lindung</li> <li>3. Perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba</li> <li>4. Mengoptimalkan penanganan konservasi dan pelestarian sumber daya hutan</li> <li>5. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</li> <li>6. Ketersediaan dokumen RPPLHD</li> <li>7. Penanganan dan pengelolaan sampah</li> </ol>
		5. Pertanahan	Ketimpangan penguasaan tanah (tanah ulayat), tanah terlantar dan dualisme administrasi pertanahan
		6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya update data kependudukan kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk</li> <li>2. Peningkatan cakupan kepemilikan Akte Kependudukan di kecamatan</li> </ol>
		7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>2. Perlunya peningkatan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa serta pengelolaan aset dan keuangan desa</li> <li>3. Penguatan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa</li> <li>4. Peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam</li> </ol>
		8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlunya dukungan dari semua lapisan masyarakat atas pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam mengurangi dampak tekanan demografi
		9. Perhubungan	Pengembangan sejumlah wilayah dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi, sosial dan budaya, khususnya pada wilayah-wilayah strategis yang belum berkembang menuntut adanya prasarana transportasi yang cukup dan handal serta

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			<p>2. Peningkatan budaya olahraga melalui pengembangan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga secara merata dan meluas, meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga</p> <p>3. Pembangunan kepramukaan adalah peningkatan pengembangan potensi diri agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan memiliki kecakapan hidup</p>
		14. Statistik	<p>1. Penyediaan data statistik yang terintegrasi (Satu Data)</p> <p>2. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk pengelola data statistik</p>
		15. Persandian	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk pengelola persandian
		16. Kebudayaan	<p>1. Mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai tuntunan dalam peningkatan kualitas SDM</p> <p>2. Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan kebudayaan belum seluruhnya terlaksana</p>
		17. Perpustakaan	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, khususnya di kecamatan</p> <p>2. Peningkatan minat baca melalui lomba-lomba minat baca, bimbingan teknis pengelola perpustakaan dan sosialisasi untuk meningkatkan minat baca</p>
		18. Kearsipan	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan</p> <p>2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan</p>
<b>III</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>	1. Kelautan dan Perikanan	<p>1. Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan budidaya</p> <p>2. Belum optimalnya peran UPT dalam menghasilkan bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan bibit</p> <p>3. Masih rendahnya kualitas SDM peternak ikan dan pembudidaya</p> <p>4. Keterbatasan akses terhadap permodalan</p>
		2. Pariwisata	<p>1. Peningkatan "Sadar Wisata" masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata terutama dalam menciptakan <i>brand local</i> yang menjadi ciri khas daerah wisata</p> <p>2. Akses informasi dan pemasaran produk wisata (advertising dan selling) masih belum optimal</p>
		3. Pertanian	<p>1. Mitigasi dampak perubahan iklim global</p> <p>2. Peningkatan penyediaan pangan beragam berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi</p> <p>3. Memperlancar distribusi pangan keseluruh wilayah (kecamatan/desa)</p>

No	Urusan	Bidang Urusan	Isu Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan</li> <li>4. Perubahan regulasi bidang pengawasan</li> <li>5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</li> </ul>
		3. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan</li> <li>2. Produk-produk perencanaan yang mengarah kepada pembangunan kewilayahan (core bisnis), terukur dan berdaya guna</li> <li>3. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran</li> <li>4. Penyusunan perencanaan pembangunan berbasis hasil kajian/penelitian</li> </ul>
		4. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sumber-sumber PAD</li> <li>2. Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan asset daerah</li> </ul>
		5. Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Tunjangan penambahan penghasilan ASN berbasis kinerja</li> <li>3. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan aparatur yang berdaya saing</li> </ul>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2014)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2019)	
						2015		2016		2017	2018		2019
						Target	Realisasi	Target	Realisasi				
VIII.	Mengembangkan minat bakat generasi muda di bidang seni budaya dan olahraga	<p>1. Mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas terhadap keragaman seni budaya dan olah raga</p>	4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif dan memperhatikan kearifan lokal	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			<p>1. Terwujudnya pembinaan generasi muda terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya local</p>	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	20	18	25	18	32	41	55	55	
		<p>2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Capaian skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	69,13	68	69,41	100	100	100	100	
			<p>2. Mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas terhadap keragaman seni budaya dan olah raga</p>	Jumlah wisatawan									
			<p>3. Terwujudnya peningkatan peran generasi muda dan prestasi olah raga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan local</p>	1. Mancanegara	1.025	1.665	1.115	1.705	1.350	1.510	2.000	2.000	
				1. Nusantara	98.050	108.117	99.100	128.110	100.100	115.500	150.000	150.000	
				Jumlah organisasi pemuda tingkat Kabupaten	14	22	16	22	18	20	22	22	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2014)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2019)	
						2015		2016		2017	2018		2019
						Target	Realisasi	Target	Realisasi				
V.	Meningkatkan kuantitas & kualitas jalan untuk pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah & interkoneksi cengan kawasan pembangunan di sekitarnya	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan wilayah kawasan pembangunan di sekitarnya	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	d. Kacang tanah	3.750 17,9	2.600 18,35	4.150 18.00	2.654 19,75	2.700 19,90	2.750 20,00	2.800 20,10	2.800 20,10	
				e. Ubi kayu	41.000 177,25	32.123 179,61	41.800 177,35	23.659 186,44	24.000 188,50	24.500 191,00	25.000 191,50		
				f. Ubi jalar	11.480 105,96	11.829 105,94	11.750 106,10	14.198 161,34	12.050 106,32	12.400 106,61	12.900 107,00		
				a. Cabai merah	6.120 54,51	6.241,71 54,51	6.650 55,53	6.684,87 55,57	6.690 55,60	6.720 55,65	6.750 55,70		
				b. Bawang Merah	490 71,53	500,74 71,53	530 74,18	541,55 74,18	545 74,50	555 74,60	565 74,70		
				Persentase jalan dalam kondisi baik	44	80,07	46	61,15	62	62,8	65		
			<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah</p> <p>2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk</p>	Persentase luas lahan yang terlayani irigasi	9,23	9,23		10,27	10,92	11,35	12,72	12,72	
				Persentase permukiman layak huni	43	88,91	45	87,57	87,61	87,65	87,69		
				Persentase layanan angkutan darat	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02		

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib
			Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif dan memperhatikan kearifan lokal
		Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
8.	Misi 8 Mengembangkan minat bakat generasi muda dibidang seni budaya dan olahraga	Mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas terhadap keragaman seni budaya dan olah raga	Terwujudnya pembinaan generasi muda terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal Terwujudnya pengembangan objek wisata daerah yang berbasis budaya dan sumberdaya daerah Terwujudnya peningkatan peran generasi muda dan prestasi olah raga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja misi dengan target-target terukur. Kinerja misi disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun yaitu dari Tahun 2014-2019. Target-target misi tersebut ditunjukkan pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.1**  
**Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019**  
**dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025**

No.	Misi RPJMD Tahun 2014-2019	Misi RPJPD Tahun 2014-2019
1.	Misi 1: Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas	Misi 2: Meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas
2.	Misi 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di puskesmas	
3.	Misi 3 : Menjadikan Tapanuli Utara sebagai industri pertanian	Misi 1 : Menempatkan sektor pertanian dan agroindustri yang maju sebagai andalan perekonomian rakyat didukung sektor pariwisata, pertambangan dan energi  Misi 5: Memperkuat perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak.
4.	Misi 4: Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen	Misi 1 : Menempatkan sektor pertanian dan agroindustri yang maju sebagai andalan perekonomian rakyat didukung sektor pariwisata, pertambangan dan energi  Misi 5: Memperkuat perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak.
5.	Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan di sekitarnya	Misi 7: Membangun infrastruktur yang maju untuk semua wilayah Kabupaten Tapanuli Utara  Misi 8: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman melalui pemanfaatan ruang yang serasi antar penggunaan pertanian, permukiman, kegiatan sosial ekonomi, konservasi dan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam lingkungan yang berkesinambungan.
6.	Misi 6: Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan	Misi 3: Menciptakan kondisi dinamis, bagi terjaminnya kesatuan dan persatuan yang harmonis.  Misi 6: Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) sesuai kebutuhan masyarakat.
7.	Misi 7 : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public ( <i>good and clean governance</i> ) dengan sistem e-Government	Misi 4 : Terciptanya pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), bagi terjaminnya pelayanan masyarakat yang optimal
8.	Misi 8 : Mengembangkan minat dan bakat generasi muda di bidang seni-budaya dan olahraga	Misi 3 : Menciptakan kondisi dinamis, bagi terjaminnya kesatuan dan persatuan yang harmonis.  Misi 6: Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sesuai kebutuhan masyarakat.

sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

## 5.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di Puskesmas;
3. Menjadikan Tapanuli Utara sebagai Industri Pertanian;
4. Menjamin ketersediaan Bibit Unggul dan Pupuk Bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, Penguatan Integrasi Wilayah dan Interkoneksi dengan Kawasan Pembangunan di sekitarnya;
6. Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan;
7. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public (*good and clean governance*) dengan sistem *e-government*;
8. Mengembangkan minat bakat generasi muda di bidang seni-budaya dan olahraga.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas.** : Mewujudkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada semua jenjang pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan relevan guna meningkatkan pengetahuan, kemandirian, keluruhan budi pekerti dan kesejahteraan hidup masyarakat.

**Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gratis, Khususnya di Puskesmas.** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana secara gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit.

**Menjadikan Tapanuli Utara sebagai Industri Pertanian** : Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dalam arti luas guna menghasilkan berbagai jenis barang hasil pertanian, sehingga memiliki peluang untuk menjadi

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				2015				2016				2017		2018				2019			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
	6. Program Pengakuan Hukum dan HAM			100	105.000.000	103.823.800	103.823.800	100	105.000.000	44.165.700	44.165.700	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Sekretariat Daerah			
	7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		100	220.000.000	209.071.850	209.071.850	100	242.000.000	149.356.850	149.356.850	100	600.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.262.000.000	3.262.000.000	Badan Perangulungan Bencana Daerah			
	8. Program PMKS Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		25	104.537.500	139.852.300	139.852.300	25	114.997.000	103.198.300	103.198.300	27	100.000.000	700.000.000	296.000.000	296.000.000	1.315.529.500	1.315.529.500	Dinas Sosial			
	9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesjahteraan Sosial		25	481.000.000	483.080.640	483.080.640	25	529.000.000	867.943.500	867.943.500	27	510.000.000	600.000.000	758.950.000	758.950.000	2.879.050.000	2.879.050.000	Dinas Sosial			
	10. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		40	333.111.900	32.806.900	32.806.900	45	36.424.000	34.837.800	34.837.800	50	40.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000	193.535.900	193.535.900	Dinas Sosial			
VIII.	<b>Misi 8</b> Membangun minat bakat generasi muda di bidang seni budaya dan olahraga																				
	<b>Tujuan</b> Mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas terhadap keagaman seni budaya dan olah raga																				
	<b>Sasaran 8.1</b> Terwujudnya pembinaan generasi muda terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal																				

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2015			2016			2017		2018		2019			Kondisi Akhir (2019)		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Lembaga																		
	<b>Sasaran 7.3</b> terwujudnya pengelolaan keuangan (pembayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib																		
	Program																		
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	BRKPAD	
	2. Program Pengendalian Administrasi Proyek																	Sekretariat Daerah	
	<b>Sasaran 7.4</b> terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif dan memperhatikan kearifan lokal																		
	Program																		
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100																Beppda
	2. Program Pengembangan Data/Informasi		Ada																Beppda

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2015			2016			2017			2018					2019		
				Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi			Target		Realisasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
	Tujuan 7.1 Mewujudkan peningkatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur pelayanan publik																			
	Sasaran 7.1 terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi																			
	Program																			
	1. Program Penataan Kelembagaan		75	133.475.000	148.500.000	371.653.852	80	300.000.000	400.000.000	85	380.600.000	1.364.100.000	Sekretariat Daerah							
	2. Program Penataan Tata laksanaan		85	154.170.000	60.500.000	560.218.550	85	300.000.000	450.000.000	95	395.000.000	1.260.500.000	Sekretariat Daerah							
	3. Program Penataan Wilayah/Ditomi Baru			628.882.000	638.000.000	636.926.249		550.000.000	650.000.000		1.325.000.000	3.743.000.000	Sekretariat Daerah							
	4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			315.733.900	335.500.000	565.596.770		500.000.000	600.000.000		610.000.000	2.350.500.000	Sekretariat Daerah							
	5. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Perijinan			58.995.700	66.000.000	27.384.900		20.000.000	100.000.000		110.000.000	356.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PISP							

a.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2015			2016			2017		2018		2019					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	4. Program Perataan/ Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman	Cakupan jalan umum dengan LPJU	13	13,55	899.400.000	13	960.450.580	13,75	989.340.000	13	1.794.885.865	14	3.500.000.000	14	2.300.000.000	14,15	2.530.000.000	10.218.740.000	Dinas PUPR
	<b>Sasaran 5.4</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk pelayanan publik dan aparatur																		
	<b>Program</b>																		
	1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	85	85	126.000.000		125.907.525	85	138.600.000		277.589.600	85	200.000.000	87	250.000.000	87	120.000.000	834.600.000	Dinas Perhubungan
	2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan perengkapan keamanan lalu lintas	75	75	590.000.000		338.331.650	75	649.000.000		449.349.800	80	400.000.000	20	700.000.000	80	555.000.000	2.894.000.000	Dinas Perhubungan
VI.	<b>Misi 6</b> Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan																		
	<b>Tujuan</b> Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan																		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				2015				2016				2017		2018				2019			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
	Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan wilayah kawasan pembangunan di sekitarnya																				
	Sasaran 5.1 Meningkatnya infrastruktur transportasi yang handal yang terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.																				
	Program																				
	1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Lakupan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	40	17.665.157.000	44	33.482.270.620	45	19.431.673.000	61	71.595.600.000	50	30.000.000.000	65	6.000.000.000	70	40.000.000.000		113.096.830.000	Dinas PU/PR		
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Proporsi sarana prasarana kebudayaan dalam kondisi baik	29	1.309.500.000	29	1.098.746.000	30	23.500.000	30	21.525.200	35	3.000.000.000	65	3.300.000.000	85	3.630.000.000		12.679.950.000	Dinas PU/PR		
	3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Lakupan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	40	45.255.015.000	50	51.078.185.720	55	49.780.517.000	55	38.726.787.000	60	9.000.000.000	50	70.000.000.000	65	37.000.000.000		211.035.532.000	Dinas PU/PR		
	4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	Persentase pemanfaatan dalam kondisi baik	75	1.825.870.000		1.461.176.700	75	2.008.457.000		2.436.590.600	78	440.000.000	80	300.000.000	82	840.000.000		5.414.327.000	Dinas Perhubungan		
	5. Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang terhadap kebutuhan	30	2.550.000.000	30	3.248.152.000	50	3.245.000.000	30	789.741.000	60	400.000.000	65	500.000.000	70	1.550.000.000		8.645.000.000	Dinas PU/PR		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2015			2016			2017		2018		2019					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		K	Rp	K	Rp			K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian																		
	<b>Sasaran</b> Berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian																		
	Program																		
	1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan penerapan teknologi pertanian oleh kelompok tani	30	995.000.000	30	902.347.600	40	1.094.500.000	50	929.462.500	50	6.000.000.000	30	8.000.000.000	70	8.800.000.000	24.889.500.000	Dinas Pertanian	
	2. Program Pengembangan Agribisnis	Peningkatan pengolahan lahan pertanian	50	2.230.000.000	50	1.580.136.000	55	2.453.000.000	60	2.771.472.000	60	4.000.000.000	70	3.200.000.000	75	3.383.000.000	15.263.000.000	Dinas Pertanian	
	3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pengembangan UMKM	20	250.000.000	20	573.383.400	25	275.000.000	30	472.522.500	30	150.000.000	35	450.000.000	40	495.000.000	1.620.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan daerah pemasaran produksi hasil pertanian/ perkebunan		150.000.000		76.756.000		165.000.000		204.732.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	1.215.000.000	Dinas Pertanian	
	5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi		1.571.340.000		1.988.838.600		1.728.474.000		1.794.586.000		1.600.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000	9.098.814.000	Dinas Pertanian	
IV.	Misi 4 Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen																		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan 7 Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2019)	Peringkat Daerah Penanggung jawab										
				2015				2016				2017						2018				2019					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi		Target		Realisasi			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	puskesmas & pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat																										
	<b>Sasaran</b> terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat & keluarga berencana secara merata & berkualitas melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat di puskesmas & pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat																										
	<b>Program</b>																										
	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	44,33	40	215.000.000	40	214.101.400	35	236.500.000	35	4.635.836.645	30	3.584.000.000	75	20.500.000.000	75	20.000.000.000	15	20.000.000.000	44.535.500.000							
	2. Jumlah Rujukan Jamkesda RSUD Terhitung ke RSUD di Medan	2. Jumlah Rujukan Jamkesda RSUD Terhitung ke RSUD di Medan	50 orang	50	440.000.000	45	619.324.000	45	484.000.000	44	493.267.000	44	44.000.000.000	35	48.000.000.000	30	52.800.000.000	30	52.800.000.000	55.000.000.000							
	2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat (%)	60,26	61	1.027.000.000	61	996.625.000	63	1.122.000.000	63	1.125.217.300	65	848.000.000	70	300.000.000	70	360.000.000	75	360.000.000	3.650.000.000							
	3. Program Pertaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	85	87	443.000.000	87	390.462.820	92	487.300.000	92	175.795.900	93	536.030.000	94	589.633.000	94	648.597.000	95	648.597.000	1.545.300.000							
	4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Cakupan penderita penyakit menular	20	25	1.170.000.000	25	1.101.433.510.000	30	1.287.000.000	26,7	892.781.150	30	550.000.000	40	400.000.000	40	520.000.000	50	520.000.000	3.927.000.000							

### **6.3. Program Pembangunan Daerah**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui : (1) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (2) pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara**

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung akses, kualitas dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis, seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan</p> <p>4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian</p> <p>5. Pemetaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan sebagai acuan dalam pengembangan industri berbasis pertanian,</p> <p>6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi</p> <p>7. Melaksanakan percepatan pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta infrastruktur pertanian yang memadai dan dapat menstimulasi penciptaan kegiatan ekonomi pedesaan</p>	<p>1. Peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan.</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi terus</p> <p>3. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif</p> <p>4. Pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan untuk mendukung pengembangan industri berbasis pertanian,</p> <p>5. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan infrastruktur perdesaan</p> <p>7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel</p> <p>8. Penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.</p>	<p>1. Perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>2. Peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan dan pendidikan yang sudah menjadi sistem pelayanan dan melembaga pada dinas/ instansi didukung oleh unit-unit kerja terkait.</p> <p>3. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.</p> <p>4. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.</p> <p>5. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.</p>	<p>1. Memantapkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya</p> <p>2. Mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/ sektor agar terwujud pembangunan Tapanuli Utara yang berdaya berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya saing.</p> <p>3. Pemantapan peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke wilayah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur irigasi</p> <p>6. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, Meningkatkan pelaksanaan pengembangan industri berbasis pertanian</p> <p>8. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi</p> <p>9. Pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan infrastruktur</p>	<p>1. Difokuskan pada bidang/ sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir.</p> <p>2. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (<i>baseline</i>) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/ sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya</p>

### **6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2016)**

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak, seperti peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian juga halnya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi terus dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan untuk mendukung pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan infrastruktur perdesaan, terus dilaksanakan untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender dan peningkatan peran generasi muda dalam pengembangan kreativitas seni budaya dan olah raga. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

### **6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2017)**

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan dan pendidikan yang sudah menjadi sistem pelayanan dan melembaga pada dinas/instansi didukung oleh unit-unit kerja terkait. Peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

### **6.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2018)**

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkelanjutan secara fisik,

	pelayanan publik	7.2.2.2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Menghilangkan praktek-praktek KKN dan transparansi audit keuangan pemerintah
		7.1.3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib	7.1.3.1. Peningkatan sumber pendapatan pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya 7.1.3.2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warganegara
		7.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif dan memperhatikan kearifan lokal	Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan
	7.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	7.2.1.1. Peningkatan citra kemampuan pemerintah daerah 7.2.1.2. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
<b>Misi 8: Mengembangkan Minat Bakat Generasi Muda Di Bidang Seni-Budaya dan Olahraga</b>			
8.	Mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing serta memiliki apresiasi dan kreativitas terhadap keragaman seni budaya dan olah raga	8.1. Terwujudnya pembinaan generasi muda terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal	8.1.1. Memperkokoh: Kehidupan Keagamaan (Keimanan) 8.1.2. Memperkokoh Kondisi Psikis dan Fisik 8.1.3. Memperkokoh Peran di Masyarakat 8.1.4. Peningkatan minat dan kemampuan generasi muda dalam olahraga dan seni budaya
		8.2. Terwujudnya pengembangan objek wisata daerah yang berbasis budaya dan sumberdaya daerah	Peningkatan jumlah dan daya tarik obyek wisata
		8.3. Terwujudnya peningkatan peran generasi muda dan prestasi olah raga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	8.3.1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan.

**Tabel 6.1**  
**Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019**

<b>Visi :</b> <b>Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Wisata</b>			
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan Akses Pendidikan dan Menyiapkan Pendidikan yang Berkualitas</b>			
<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1.	Mewujudkan perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan	Terwujudnya perluasan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan relevan untuk semua tingkat pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses dan kapasitas layanan pendidikan</li> <li>2. Peningkatan mutu pendidikan</li> <li>3. Peningkatan daya tarik pendidikan (ekstrakurikuler seperti: Seni, Budaya dan Olahraga)</li> </ol>
<b>Misi 2:</b> <b>Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gratis Khususnya di Puskesmas</b>			
2.	Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana secara merata dan berkualitas melalui pelayanan kesehatan dasar yang gratis bagi masyarakat di puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana secara merata dan berkualitas melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar yang gratis bagi masyarakat di puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit yang terjangkau masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan</li> <li>2. Peningkatan akses kepada layanan kesehatan</li> <li>3. Peningkatan mutu layanan kesehatan</li> </ol>
<b>Misi 3:</b> <b>Mengembangkan Tapanuli Utara Sebagai Industri Pertanian</b>			
3.	Mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian	Berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas dan usaha industri pengolahan berbasis pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian</li> <li>3.2. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian</li> <li>3.3. Peningkatan luas lahan pertanian</li> <li>3.4. Diversifikasi produksi</li> <li>3.5. Diversifikasi konsumsi</li> <li>3.6. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan</li> <li>3.7. Peningkatan pendapatan petani</li> </ol>
<b>Misi 4:</b> <b>Menjamin Ketersediaan Bibit Unggul dan Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Bayar Pasca Panen</b>			
4.	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian bagi petani, khususnya bibit unggul dan pupuk dalam mendukung penciptaan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat

**Tabel 3.20**  
**Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2019**

No	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)											
		2015		2016		2017		2018		2019			
		%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)		
I.	Prioritas I	71,79	756.149.573.417	66,99	827.449.272.217	58,79	763.420.030.000	60,98	893.073.633.000	62,31	962.465.477.000,00		
1.	Belanja Tidak Langsung	55,50	584.539.679.917,17	51,82	640.095.331.216,69	38,50	500.000.000.000	37,56	550.000.000.000	38,84	600.000.000.000,00		
2.	Belanja Langsung	16,29	171.609.893.500	15,17	187.353.941.000	20,29	263.420.030.000	23,43	343.073.633.000	23,47	362.465.477.000,00		
II.	Prioritas II	19,31	203.350.690.524	18,17	224.382.078.330	18,02	233.976.970.000	16,74	245.184.067.000	15,60	241.037.223.000,00		
II.	Prioritas III	8,90	93.764.249.275	14,85	183.409.817.275	23,19	301.160.000.000	22,27	326.200.000.000	22,09	341.200.000.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>1.053.264.513.216</b>	<b>100</b>	<b>1.235.241.167.822</b>	<b>100</b>	<b>1.298.557.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.464.457.700.000</b>	<b>100</b>	<b>1.544.702.700.000</b>		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.19**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019**

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendapatan Daerah	1.006.083.814,294,59	82.753.547,210,86	1.120.462.658.431,80	94.783.154.638,45	1.255.000.000.000,00	1.323.900.000.000,00	1.323.900.000.000,00	1.323.900.000.000,00	1.367.790.000.000,00	
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	21.998.121.189,00	119.289.789.356,01	28.011.566.461,00	108.957.137.702,01	30.557.000.000,00	127.557.700.000,00	127.557.700.000,00	127.557.700.000,00	163.912.700.000,00	
	Total Penerimaan	1.028.081.935,483,59	202.043.336,566,87	1.148.474,224,892,80	203.740.292,340,46	1.285.557.000.000,00	1.451.457.700.000,00	1.451.457.700.000,00	1.451.457.700.000,00	1.531.702.700.000,00	
	Dikurangi :										
4.	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	756.149.573,417,00		827.449.272,217,00		763.420.030.000,00		893.073.633.000,00		962.465.477.000,00	
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	271.932.362,066,59	202.043.336,566,87	321.024,952,675,80	203.740.292,340,46	522.136.970.000,00	558.384.067.000,00	558.384.067.000,00	558.384.067.000,00	569.237.223.000,00	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019**

No	Uraian	Target						
		2015		2016		2017	2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
A	Penerimaan Pembiayaan	21.998.121.189	119.289.789.356,01	28.011.566.461	108.957.137.702,01	30.557.000.000	127.557.700.000	163.912.700.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	13.000.000.000	-	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2019**

No	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)									
		2015		2016		2017	2018	2019			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	678.303.929,192,17	623.716.428,971	823.505.148.491,69	758.696.846,118	801.160.000.000	876.200.000.000	941.200.000.000			
1	Belanja Pegawai	584.539.679,917,17	520.036.594,347	640.095.331,216,69	559.982.502,286	500.000.000.000	550.000.000.000	600.000.000.000			
2	Belanja Hibah	-	-	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000			
3	Belanja Bantuan Sosial	-	892.970.000	-	962.410.000	1.160.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000			
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	93.764.249,275	93.584.696,015	183.409.817,275	183.049.033,532	250.000.000.000	275.000.000.000	300.000.000.000			
5	Belanja Tidak Terduga	-	796.720.000	-	1.566.366.500	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000			
B	<b>Belanja Langsung</b>	374.960.584,024	473.470.646,041,12	411.736.019,330	492.497.337,645,24	497.397.000.000	588.257.700.000	603.502.700.000			
1	Administrasi Perkantoran	56.783.173.729,51	50.922.353,203	56.783.173.729,51	50.992.353,203	52.000.000.000	53.000.000.000	55.000.000.000			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.076.071.393,12	45.171.981.693,64	50.996.071.393,12	45.171.981.693,64	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000			
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	958.150.000	721.903,780	958.150.000	721.903,780	500.000.000	500.000.000	500.000.000			
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.925.067,863	19.037.732,241	19.925.067,863	19.037.732,241	8.000.000.000	12.500.000.000	10.500.000.000			
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.282.494,309	2.168.980,436	2.097.994,500	1.995.276,560	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000			
6	Belanja Pembangunan	243.935.626.738,37	355.447.694.687,48	281.075.561.844,37	374.578.090.167,60	409.897.000.000	495.257.700.000	510.592.700.000			
	<b>Prioritas (A+B)</b>	<b>1.053.264.513.216,17</b>	<b>1.097.187.075.012,12</b>	<b>1.235.241.167.821,69</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>1.298.557.000.000</b>	<b>1.464.457.700.000</b>	<b>1.544.702.700.000</b>			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Pro. eksi Tahun (Rp)				2017	2018	2019
		2015	2016	2017	2018			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>62.550.253.830,89</b>	<b>82.753.547.210,86</b>	<b>75.481.381.279,72</b>	<b>94.786.548.456,45</b>	<b>164.000.000.000,00</b>	<b>180.400.000.000,00</b>	<b>198.440.000.000,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.153.357.500,00	9.599.737.353,20	11.930.195.062,50	12.862.246.704,44	16.000.000.000,00	17.600.000.000,00	19.360.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.638.478.032,30	38.136.335.569,00	44.548.097.540,38	45.108.112.180,50	9.000.000.000,00	9.900.000.000,00	10.890.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.517.713.978,59	7.442.520.126,00	12.358.313.924,84	9.499.944.717,00	9.000.000.000,00	9.900.000.000,00	10.890.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.040.704.320,00	27.574.954.162,66	6.644.774.752,00	27.316.244.854,51	130.000.000.000,00	143.000.000.000,00	157.300.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>803.582.173.215,43</b>	<b>762.000.850.373,00</b>	<b>870.986.415.123,89</b>	<b>894.622.014.108,00</b>	<b>856.000.000.000,00</b>	<b>885.000.000.000,00</b>	<b>885.000.000.000,00</b>
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	25.056.791.615,43	22.435.676.373,00	25.808.495.363,89	26.641.817.772,00	31.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	656.525.381.600,00	616.216.474.000,00	722.177.919.760,00	650.827.006.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	122.000.000.000,00	123.348.680.000,00	123.000.000.000,00	217.153.190.336,00	175.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>211.418.684.248,27</b>	<b>272.435.805.618,00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>208.469.806.203,00</b>	<b>235.000.000.000,00</b>	<b>258.500.000.000,00</b>	<b>284.350.000.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.654.804.607,75	0,00	0,00	13.184.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Pajak Dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	21.748.928.294,52	51.735.763.073,00	0,00	43.617.810.228,00	45.000.000.000,00	49.500.000.000,00	54.450.000.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.392.783.196,00	203.268.615.000,00	200.000.000.000,00	147.031.302.000,00	190.000.000.000,00	209.000.000.000,00	229.900.000.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44.622.088.150,00	17.431.427.545,00	0,00	4.636.693.975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya			0,00	0	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.077.351.115.294,59</b>	<b>1.117.190.183.201,86</b>	<b>1.146.467.796.403,61</b>	<b>1.197.878.368.767,45</b>	<b>1.255.000.000.000,00</b>	<b>1.323.900.000.000,00</b>	<b>1.367.790.000.000,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.15**  
**Asumsi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Target							
		2015		2016		2017	2018	2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
A	Ekonomi Makro Daerah								
	PDRB ADHB (Rp. Juta)	6.169.157,86	5.855.611,46	6.894.033,91	6.300.290,07	6.583.803,12	6.893.241,87	7.237.803,96	
	Pertumbuhan Ekonomi	6,4	4,89	6,6	4,12	4,5 - 4,7	4,7 - 5,0	5,00	
	Angka Melek Huruf	99,65	98,78	99	99,12	99,67	99,68	99,69	
	Pendapatan per Kapita (Rp)	21.154.017,77	15.957.843,95	23.429.944,11	21.312.628,59	22.271.696,88	23.318.466,63	24.484.389,96	
B	Pokok-pokok Kebijakan Fiskal								
	PAD (Rp. Juta)	62.350.253.831	82.753.547.210,86	75.481.381.280	94.783.154.638,45	164.000.000.000	180.400.000.000	198.440.000.000	
	Dana Perimbangan (Rp. Juta)	732.314.876.215	762.000.830.373	801.255.753.274	894.622.014.138	856.000.000.000	885.000.000.000	885.000.000.000	
	Pendapatan Lain-lain yang Sah (Rp. juta)	256.040.772.398	141.189.989.433	243.725.523.878	272.435.805.618	235.000.000.000	258.500.000.000	284.350.000.000	

Sumber : Bappeda Kab. Tapanuli Utara & Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017 (data diolah)

**Tabel 3.14**  
**Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>410.087.853.403,00</b>	<b>456.866.328.921,00</b>	<b>475.196.413.341,00</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	313.716.215.328,00	323.338.912.407,00	339.047.081.357,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	83.913.113.402,00	102.561.875.368,00	111.463.072.492,00
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	868.455.000,00	1.764.000.000,00	1.797.600.000,00
4.	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	169.689.603,00	387.835.288,00	550.621.117,00
5.	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	182.567.520,00	130.713.189,00	233.521.669,00
6.	Uang Makan (Lauk Pauk)	0,00	0	0,00
7.	Belanja Bunga	0,00	0	0,00
8.	Belanja Hibah Dalam Rangka Pilkada	0	17.445.180.119,00	0,00
9.	Belanja Bantuan Keuangan	11.237.812.550,00	11.528.994.868,00	22.104.516.706,00
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>26.355.237.658,00</b>	<b>26.796.525.578,00</b>	<b>27.510.669.726,00</b>
1.	Belanja Jasa Kantor	12.439.314.131,00	12.661.487.792,00	13.644.252.592,00
2.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.804.698.053,00	6.488.682.256,00	7.241.583.850,00
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.240.625.000,00	1.056.750.000,00	0
4.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	357.815.000,00	349.480.250,00	166.882.000,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.166.940.216,00	4.638.660.353,00	5.206.173.646,00
6.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	805.933.594,00	1.191.117.827,00	969.058.258,00
7.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	539.911.664,00	410.347.100,00	282.719.380,00
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>38.463.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	38.463.000,00	20.000.000.000,00
<b>Total (A+B+C)</b>		<b>436.443.091.061,00</b>	<b>483.701.317.499,00</b>	<b>522.707.083.067,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Berdasarkan uraian dan penyajian pada Tabel 3.14, secara umum dapat disimpulkan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain :

1. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung) dalam AP3D setiap tahunnya rata-rata 58,32 persen dari total belanja daerah yang berarti sudah melebihi batas toleransi yaitu sebesar 50 persen dari total belanja daerah. Tingginya beban biaya untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di daerah ini sangat besar dampaknya terhadap berkurangnya anggaran biaya untuk kepentingan anggaran pelayanan publik. Terbukti secara rata-rata selama lima tahun total pengeluaran adalah 41,68 persen per tahun dari total belanja daerah.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rili Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun (Rp)											
		2012		2013		2014		2015		2016		%	
		Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%		
1	Jumlah SiLPA	36,831,305,879.63	100	24,687,881,729.48	100	39,532,475,153.28	99.92	90,786,681,166.27	100	119,289,789,356.01	100		
2	Pelampauan Penerimaan PAD	1,128,496,684.85	38.36	391,966,997.95	1.59	1,506,415,419.86	130.98	11,311,515,611.86	115.83	1,785,206,928.45	101.92		
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	4,474,844,823.00	12.15	2,495,161,120.00	10.11	-1,060,517,809.00	99.84	-11,315,350,210.00	98.54	-68,380,515,838.00	92.8		
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Daerah yang Syah	-16,726,884,550.00	-45.41	-31,385,877,026.00	-127.13	-22,412,729,419.00	86.3	24,111,825,471.00	109.71	-11,352,764,492.44	91.84		
5	Lainnya (Pencairan Dana Cadangan)	0	0	0	0	0.00		0.00		0.00			
6	Sisa Pengeluaran Pembiayaan	720,000,000.00	1.95	0	0	34,132,000,696.26	111.79	99,286,681,166.27	75.78	108,957,137,702.01	100.08		
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	24,801,653,007.48	67.34	39,562,981,288.28	160.25	90,706,681,160.27		119,289,789,358.01		55,637,928,918.22			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.12**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi Pendapatan Daerah	725.670.398.176,85	852.233.711.191,95	873.193.145.520,86	1.117.190.183.201,86	1.197.874.974.979,45
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	737.700.051.049,00	834.384.699.583,15	816.538.465.050,87	1.097.187.095.012,12	1.251.194.183.763,24
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.973.912.050,00	22.000.000.000,00	11500000000	10.332.651.654,00
<b>A</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>-12.029.652.872,15</b>	<b>14.875.099.558,80</b>	<b>34.654.680.469,99</b>	<b>8.503.088.189,74</b>	<b>-63.651.860.437,79</b>
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	36.831.305.879,63	24.687.881.729,48	39.532.475.153,28	90.786.681.166,27	119.289.789.356,01
5	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	20.000.000.000,00	0
6	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
9	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	16.599.525.543,00	0	0
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>36.831.305.879,63</b>	<b>24.687.881.729,48</b>	<b>56.132.000.696,28</b>	<b>110.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>24.801.653.007,48</b>	<b>39.562.981.288,28</b>	<b>90.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	<b>55.637.928.918,22</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>725,670,398,176.85</b>	<b>852,233,711,191.95</b>	<b>873,193,145,520.86</b>	<b>1,117,190,183,201.86</b>	<b>1,184,690,974,919.45</b>	<b>0.00</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,023,120,252.85	37,952,077,661.95	63,696,097,398.86	82,753,547,210.86	94,783,154,638.45	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	643,767,726,254.00	761,663,073,336.00	780,637,089,042.00	1,017,005,208,446.00	1,085,271,126,366.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	47,879,551,670.00	52,618,560,194.00	28,859,959,080.00	17,431,427,545.00	4,636,693,975.00	0.00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>737,700,051,049.00</b>	<b>834,384,699,583.15</b>	<b>816,538,465,050.87</b>	<b>1,097,187,075,012.12</b>	<b>1,251,194,183,763.24</b>	<b>0</b>
2.1	BELANJA LANGSUNG	422,893,049,403.00	471,481,408,239.00	317,807,871,260.87	473,470,646,041.12	492,497,337,645.24	0
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	314,807,001,646.00	362,903,291,344.15	498,730,593,790.00	623,716,428,971.00	758,696,846,118.09	0
	<b>Surplus/defisit</b>	<b>-12,029,652,872.15</b>	<b>17,849,011,608.80</b>	<b>56,654,680,469.99</b>	<b>20,003,108,189.74</b>	<b>-66,503,208,783.79</b>	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2012-2016**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36,831,305,879.63	24,687,881,729.48	56,132,000,696.28	110,786,681,166.27	119,289,789,356.01	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	2,973,912,050.00	22,000,000,000.00	11,500,000,000.00	10,332,651,654.00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	36,831,305,879.63	21,713,969,679.48	34,132,000,696.28	99,286,681,166.27	108,957,167,702.01	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	24,801,653,007.48	39,562,981,288.28	50,786,681,166.27	119,289,789,356.01	55,637,928,918.22	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 3.8  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>398.850.040.853,00</b>	<b>428.183.336.252,00</b>	<b>452.307.753.849,00</b>	<b>506.528.587.682,00</b>	<b>543.317.233.341,00</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	313.716.215.328,00	323.338.912.407,00	339.047.081.357,00	365.884.589.499,00	388.773.104.506,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	83.913.113.402,00	102.561.875.368,00	111.463.072.492,00	138.754.679.183,00	152.530.132.835,00
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	868.455.000,00	1.764.000.000,00	1.797.600.000,00	1.889.319.000,00	2.013.996.000,00
4.	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	169.689.603,00	387.835.288,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	182.567.520,00	130.713.189,00	0,00	0,00	0,00
6.	Uang Makan (Lauk Pauk)	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>58.979.734.908,00</b>	<b>74.276.709.984,00</b>	<b>69.858.723.094,00</b>	<b>104.694.014.025,00</b>	<b>119.896.587.463,00</b>
1.	Belanja Honorarium PNS	13.506.626.112,00	14.129.519.186,00	20.003.232.928,00	33.030.477.559,00	30.010.650.490,00
2.	Belanja Honorarium Non PNS	7.658.387.400,00	8.936.908.661,00	0,00	0,00	-
3.	Belanja Uang Lembur	586.002.500,00	486.924.000,00	598.714.000,00	1.876.461.500,00	1.256.734.000,00
4.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	-	112.000.000,00	390.000.000,00	200.000.000,00
5.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.746.152.800,00	3.824.747.747,00	3.246.482.807,00	5.241.416.372,00	4.920.780.485,00
6.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	515.302.971,00	383.422.572,00	122.129.291,00	8.191.596.125,00	11.519.771.020,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	10.288.222.700,00	10.985.382.280,00	10.613.679.505,00	13.621.774.900,00	18.780.533.482,00
8.	Belanja Pakaiannya dan Atributnya	423.912.813,00	292.875.000,00	727.008.500,00	565.150.000,00	344.250.000,00
9.	Belanja Pakaiannya Khusus dan Hari-Hari Tertentu	844.322.421,00	889.253.950,00	792.069.100,00	998.759.700,00	1.306.192.680,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas	31.410.305.191,00	34.347.676.588,00	33.643.406.963,00	40.778.377.869,00	51.557.675.306,00
11.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0	0	0,00	0
12.	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
13.	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>467.829.275.761,00</b>	<b>502.460.046.236,00</b>	<b>522.166.476.943,00</b>	<b>611.222.601.707,00</b>	<b>663.213.820.804,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.7**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012-2016 (Sambungan)**

No.	Uraian	TAHUN (%)					
		2015			2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	692.985.929.192,17	623.716.428.970,00	90,00	842.054.422.491,63	758.696.646.118,00	90,10
2.1.1	Belanja Pegawai	584.539.679.917,17	520.036.594.347,00	88,97	640.095.331.216,69	559.982.502.286,00	87,48
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi				1.182.985.000,00	1.112.065.000,00	94,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.877.000.000,00	8.405.448.609,00	77,28	13.995.800.000,00	12.024.468.800,00	85,91
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.915.000.000,00	892.970.000,00	30,63	1.800.000.000,00	962.410.000,00	53,47
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	93.764.249.275,00	93.584.696.014,00	99,81	183.409.817.275,00	183.849.033.532,00	99,80
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	890.000.000,00	796.720.000,00	89,52	1.570.500.000,00	1.566.366.500,00	99,75
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>531.110.579.604,00</b>	<b>473.470.646.041,12</b>	<b>89,15</b>	<b>542.641.051.089,63</b>	<b>492.497.337.645,24</b>	<b>90,76</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	45.317.314.678,00	42.445.156.374,00	93,66	46.905.157.571,00	43.982.076.090,00	93,77
2.2.2	Belanja barang Jasa	212.988.845.198,00	190.475.583.285,71	89,43	247.541.757.271,63	209.586.855.467,21	84,67
2.2.3	Belanja Modal	272.804.419.728,00	240.549.906.381,41	88,18	248.194.136.247,00	238.928.406.088,03	96,27
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1.224.096.508.796,17</b>	<b>1.097.187.075.011,12</b>	<b>89,63</b>	<b>1.384.695.484.581,32</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>90,36</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

4. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
5. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

#### **3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Realisasi kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016 yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

##### **3.2.4.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa realisasi belanja terhadap anggaran belanja (total belanja, belanja tidak langsung dan belanja langsung) berfluktuasi, dimana rata-rata realisasi total belanja terhadap anggaran total belanja adalah 92,32 persen per tahun, rata-rata realisasi belanja tidak langsung terhadap anggaran total belanja tidak langsung adalah 93,64 persen per tahun dan rata-rata realisasi belanja langsung terhadap anggaran total belanja langsung adalah 90,80 persen per tahun.

- f. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pemerintah Atasan, dimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempuh berbagai upaya koordinasi baik sisi perencanaan, penggunaan, mekanisme dari penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
5. Meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2012 - 2016 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dialokasikan untuk memenuhi urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan perencanaan belanja daerah disusun atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil program dan kegiatan yang disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, dalam mendukung dan meningkatkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah, maka kebijakan belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Jenis belanja daerah dimaksud dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

#### **3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2009 - 2013 memprogramkan BTL untuk membiayai belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, dialokasikan untuk pembayaran Gaji PNS/CPNS, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS, Access Gaji PNS/CPNS, gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Belanja Hibah, dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
3. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Kabupaten Tapanuli Utara serta Bantuan kepada Partai Politik.

<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>								
3.2.1	Dalam Investasi Jangka Panjang	23.038.156.669,50	26.016.995.027,50	31.954.871.159,50	0,00	0,00	0,00	13,01	
3.2.2	Dalam Asset Tetap	1.227.435.574.784,00	1.429.547.663.458,15	1.474.281.614.854,00	0,00	0,00	0,00	15,84	
3.2.3	Dalam Asset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	35.169.667.007,00	12.653.568.711,00	25.292.255.718,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-3.986.668.168,00	-3.986.668.168,80	-3.986.668.168,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>1.281.660.730.292,50</b>	<b>1.464.231.559.027,85</b>	<b>1.527.542.073.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,09</b>	
<b>3.3</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>							<b>0</b>	
3.3.1	Dalam Dana Cadangan	0	0,00	20.000.000.000,00	0	0	0	0	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH DANA EKUITAS</b>	<b>1.336.628.567.047,92</b>	<b>1.544.628.477.826,49</b>	<b>1.690.991.931.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.340.615.235.215,92</b>	<b>1.558.420.565.479,29</b>	<b>1.694.983.303.997,64</b>	<b>5.361.654.111,13</b>	<b>4.604.790.235,23</b>	<b>15,61</b>		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

<b>2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>									
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0	0,00	0,00	684.471.364,00	7.960.000,00		
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0	0				
2.1.3	Utang Pajak	0	0	0	0				
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0	0				
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	167.305.952,00	0		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	9.805.419.484,00	4.704.545,00	4.704.545,00	523.208.627,13	610.162.067,23		
2,17	Utang Beban	0	-	-	-	2.088.788.079,50	879.988.100,00		
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805.419.484,00</b>	<b>4.704.545,00</b>	<b>4.704.545,00</b>	<b>1.374.985.943,13</b>	<b>618.122.067,23</b>		
<b>2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>									
2.2.1	Utang Dalam Negeri	3.986.668.168,00	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,00	3.986.668.168,00		-0,05
2.2.2	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	0	0		
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>3.986.668.168,00</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,80</b>	<b>3.986.668.168,00</b>	<b>3.986.668.168,00</b>		-0,05
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.986.668.168,00</b>	<b>13.792.087.652,80</b>	<b>3.991.372.713,80</b>	<b>3.991.372.713,80</b>	<b>5.361.654.111,13</b>	<b>4.604.790.235,23</b>	<b>65,03</b>	
<b>3. EKUITAS DANA</b>									
<b>3.1 EKUITAS DANA LANCAR</b>									
3.1.1	Sisa Lebih/ Pembayaan Anggaran (SILPA)	24.801.653.007,48	39.679.094.566,28	90.788.860.603,27	90.788.860.603,27	0,00	0,00		-3,26
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	18.493.910.659,94	38.249.057.249,73	45.545.653.473,19	45.545.653.473,19	0,00	0,00		249,75
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	7.707.923.656,00	10.885.387.476,46	6.392.193.146,97	6.392.193.146,97	0,00	0,00		53,51
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	-9.805.419.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	140.857.150,00	221.776.199,00	225.150.496,91	225.150.496,91	0,00	0,00		365,04
3.1.6	Dicadangkan Dalam Belanja Dibayar Dimuka	3.823.492.302,00	1.167.022.791,17	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	0,00		

**Tabel 3.5**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>ASSET</b>						
<b>1.1</b>	<b>Asset Lancar</b>						
1.1.1	Kas	24,687,881,729.48	39,484,329,890.28	90,720,044,144.27	119,326,403,606.01	55,667,576,987.05	41.97
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	140,857,150.00	1,647,242.00	225,150,496.91	67,571,219.00	28,107,805.00	3335.28
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	113,771,278.00	414,893,633.00	73,521,004.00	700,600.00	14,900,000.00	527.52
1.1.4	Kas di Bendahara di Pengeluaran Lainnya	0.00	56,501,094.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.5	Investasi Jangka Pendek	0	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.6	Piutang	599,889,792.00	38,030,092,252.73	45,358,839,863.19	27,389,171,517.38	5,237,410,811.74	1534.57
1.1.7	Piutang Lain-lain	17,894,020,867.94	218,964,997.00	186,813,610.00	186,813,610.00	165,990,775.00	-31.15
1.1.8	Persediaan	7,707,923,636.00	10,885,387,476.46	6,392,193,146.97	6,771,574,296.34	8,725,830,316.00	8.69
1.1.9	Belanja Dibayar Dimuka	3,823,492,302.00	-	498,000,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	<b>Jumlah Asset Lancar</b>	<b>54,967,836,755.42</b>	<b>89,091,816,585.47</b>	<b>143,454,562,265.34</b>	<b>153,742,234,848.73</b>	<b>69,839,816,694.79</b>	<b>18.92</b>
<b>1.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>						
1.2.1	Investasi Non Permanen	3,522,788,739.00	3,522,788,739.00	3,522,788,739.00	3,522,788,739.00	3,522,788,739.00	0.00
1.2.2	Investasi Permanen	19,515,367,930.50	20,994,206,288.50	28,396,791,189.50	40,048,076,101.50	46,083,532,484.50	24.73
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>23,038,156,669.50</b>	<b>24,516,995,027.50</b>	<b>31,919,579,928.50</b>	<b>43,570,864,840.50</b>	<b>49,606,321,223.50</b>	<b>21.74</b>
<b>1.3</b>	<b>Asset Tetap</b>						
1.3.1	Tanah	197,812,878,408.00	197,831,628,408.00	199,119,908,408.00	836,500,874,041.00	845,849,170,307.00	80.47
1.3.2	Peralatan dan Mesin	182,006,899,922.00	214,693,683,180.00	186,904,418,848.04	225,711,032,948.00	239,879,201,531.00	8.01
1.3.3	Gedung dan Bangunan	391,413,672,758.00	463,883,174,829.00	489,539,395,323.51	520,799,704,196.77	564,776,565,527.00	9.72

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>36.831.305.879,63</b>	<b>24.687.881.729,48</b>	<b>39.532.475.153,28</b>	<b>110.786.681.166,27</b>	<b>119.289.789.356,01</b>	53,77
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	36.831.305.879,63	24.687.881.729,48	39.532.475.153,28	90.786.681.166,27	119.289.789.356,01	47,05
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	20.000.000.000,00	0	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>2.973.912.050,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>11.500.000.000,00</b>	<b>10.332.651.654,00</b>	#DIV/0!
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	2.935.449.050,00	20.000.000.000,00	0	0	#DIV/0!
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0,00	2.000.000.000,00	11.500.000.000,00	9.170.615.538,00	#DIV/0!
2.3	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Pokok Utang)	0	38.463.000,00	0,00	0	1.162.036.116,00	#DIV/0!
2.4	Koreksi Silpa Tahun Lalu	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!
2.5	Lainnya (Pembayaran hutang atas barang dan jasa)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>36.831.305.879,63</b>	<b>21.713.969.679,48</b>	<b>17.532.475.153,28</b>	<b>99.286.681.166,27</b>	<b>108.957.137.702,01</b>	103,93

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

Tabel 3.3  
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>422.893.049.403,00</b>	<b>471.481.408.239,00</b>	<b>498.730.593.790,00</b>	<b>623.716.428.971,00</b>	<b>758.696.846.118,00</b>	15,99
Belanja Pegawai	398.850.040.853,00	428.183.336.252,00	453.091.896.635,00	520.036.594.347,00	559.982.502.286,00	8,91
Belanja Bunga	0	0	0,00	0	0	
Belanja Subsidi	1.067.444.000,00	0	0,00	0,00	1.112.065.000,00	#DIV/0!
Belanja Hibah	9.552.199.000,00	24.572.248.119,00	15.992.591.949,00	8.405.448.609,00	12.024.468.800,00	37,00
Belanja Bantuan Sosial	788.158.000,00	3.147.781.000,00	2.728.366.000,00	892.970.000,00	962.410.000,00	56,64
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	11.207.817.550,00	11.528.994.868,00	22.104.516.706,00	93.584.696.015,00	183.049.033.532,00	128,32
Belanja Tidak Terduga	2.397.395.000,00	4.049.048.000,00	4.813.222.500,00	796.720.000,00	1.566.366.500,00	25,23
<b>Belanja Langsung</b>	<b>314.807.001.646,00</b>	<b>362.903.291.344,15</b>	<b>317.807.871.260,87</b>	<b>473.470.646.041,12</b>	<b>492.497.337.645,24</b>	<b>13,96</b>
Belanja Pegawai	21.794.016.012,00	23.851.993.447,00	33.292.330.274,00	42.445.156.374,00	43.982.076.090,00	20,03
Belanja barang Jasa	121.504.815.422,00	132.155.775.281,00	138.051.229.923,91	190.475.583.285,71	209.586.855.467,21	15,31
Belanja Modal	171.508.170.212,00	206.895.522.616,15	146.464.311.062,96	240.549.906.381,41	238.928.406.088,03	13,75
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>737.700.051.049,00</b>	<b>834.384.699.583,15</b>	<b>816.538.465.050,87</b>	<b>1.097.187.075.012,12</b>	<b>1.251.194.183.763,24</b>	<b>14,84</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012-2016**

No.	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>34.023.120.252,85</b>	<b>37.952.077.661,95</b>	<b>63.696.097.398,86</b>	<b>82.753.547.210,86</b>	<b>94.786.548.457,45</b>	<b>30,96</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.097.600.087,50	6.022.333.998,00	11.286.218.960,23	9.599.737.353,20	12.862.246.705,44	31,15
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.448.581.542,00	17.636.231.882,00	36.162.112.657,00	38.136.335.569,00	45.108.112.180,50	34,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.566.169.608,00	7.195.245.251,00	4.481.772.418,00	7.442.520.126,00	9.499.944.717,00	16,39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.910.769.015,35	7.098.266.530,95	11.765.993.363,63	27.574.954.162,66	27.316.244.854,51	54,82
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>643.767.726.254,00</b>	<b>761.663.070.336,00</b>	<b>780.637.089.042,00</b>	<b>1.017.005.208.446,00</b>	<b>1.085.271.126.366,00</b>	<b>14,45</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer	567.953.425.913,00	637.547.707.918,00	668.307.058.689,00	762.000.830.373,00	894.622.014.138,00	12,13
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.387.273.913,00	29.306.486.918,00	23.148.942.689,00	22.435.676.373,00	26.641.817.772,00	-2,23
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	487.345.532.070,00	552.463.211.000,00	596.841.256.000,00	616.216.474.000,00	650.827.006.000,00	7,56
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	50.220.620.000,00	55.778.010.000,00	48.316.860.000,00	123.348.680.000,00	217.153.190.366,00	57,26
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	65.514.039.000,00	116.344.568.000,00	106.872.852.000,00	203.268.615.000,00	147.031.302.000,00	32,99
1.2.2.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.514.039.000,00	116.344.568.000,00	106.872.852.000,00	203.268.615.000,00	147.031.302.000,00	32,99
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	10.300.261.341,00	7.770.794.418,00	5.457.178.353,00	51.735.763.073,00	43.617.810.228,00	194,50
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.300.261.341,00	7.770.794.418,00	5.457.178.353,00	51.735.763.073,00	43.617.810.228,00	194,50
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>2.688.113.670,00</b>	<b>52.618.560.194,00</b>	<b>28.859.959.080,00</b>	<b>17.431.427.545,00</b>	<b>17.820.693.975,00</b>	<b>443,73</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.628.113.670,00	5.564.966.194,00	3.175.162.650,00	0,00	13.184.000.000,00	#DIV/0!
1.3.2	Pendapatan Lainnya	60.000.000,00	47.053.594.000,00	25.684.796.430,00	17.431.427.545,00	4.636.693.975,00	19542,93
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>680.478.960.176,85</b>	<b>852.233.708.191,95</b>	<b>873.193.145.520,86</b>	<b>1.117.190.183.201,86</b>	<b>1.197.878.368.767,45</b>	<b>15,72</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2017